



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia



SERI-A FoLU Net Sink 2030
Nomor: A-13/Renja-Sumbar/09/2022

RENCANA KERJA

PROVINSI SUMATRA BARAT

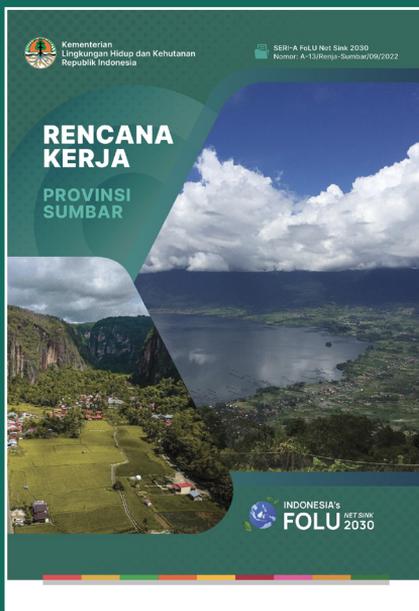


INDONESIA's
FOLU NET SINK
2030



RENCANA KERJA

PROVINSI SUMATRA BARAT



Keterangan Gambar Sampul:

1. Lawang Adventure Park
2. Lembah Harau

Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat

ISBN:

XXX - XXXX - XXX - XX

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar, Mahyeldi.

ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisol Nurofiq, Emma Rachmawaty, Omo Rusdiana,
Gusmardi Indra, Eko Subrata.

REVIEWERS:

Laksmi Dewanthi, Hansastri, Bambang Hendroyono,
Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto, Hansastri.

CONTRIBUTORS:

Istanto, Helmi Basalamah, Wiratno, M.R Karliansyah,
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion
Sumatera, Kepala Balai Taman Nasional Siberut, Kepala
Balai KSDAE Sumbar, Fernando L. Tobing Kepala BPKH
Wilayah I Medan, Kepala Balai PHP Wilayah III Pekanbaru,
Kepala Balai PDASHL Agam Kuantan Padang, Kepala Balai
PDASHL Batanghari, Kepala PDASHL Indragiri Rokan,
Kepala Balai PPI dan Karhutla Wilayah Sumatera, Kepala
Balai Gakkum Wilayah Sumatera, Kepala Balai PSKL
Wilayah Sumatera, Kepala Seksi Wilayah II Balai Gakkum
Wilayah Sumatera.

CONTRIBUTORS OF PROVINCE SUMATERA BARAT:

Medi Iswandi, Siti Aisyah, Erinaldi, Safrizal, Erasukma
Munaf, Agus Wijayanto, Nelsi Simanjuntak, Firman Hidayat,
Yandesman, Cucu Sukarna, Boy Martin, Syamsul Bahri,
Tera Darma, Hasan, Refriasel, Hendra Bakti Putra, Hendrio
Fadly, Afrial Muhammad, Sayogo Hutomo, Jusmalinda,
Riyos Zanea Putra, Kasnan.

FACILITATORS:

Romilla Sari, Azis Syaifulloh, Sona Pahlawan, Nurlela
Komalasari, Hasnawati Hamzah, Agung Bayu Nalendro,
Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Danny Armando Wikongko,
Claudia Meitrivane Silalahi, Rio Sembiring, Indah Suryani
Ginting, Riopranata, Randy Butar-Butar.

Kata Pengantar



Indonesia sebagai pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia, mempunyai arti sangat penting dalam upaya pengendalian iklim global. Hutan merupakan kunci untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mendinginkan udara dan melindungi kita dari kekeringan, panas ekstrem, dan banjir yang disebabkan oleh kerusakan iklim. Untuk itu, perlindungan yang lebih baik, dan peningkatan pengelolaan hutan di dunia merupakan salah satu solusi berbasis alam yang paling efektif.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia dalam penurunan gas rumah kaca dengan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 dan menegaskan menegaskan komitmennya kepada dunia melalui penyampaian Enhanced NDC kepada Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022 dengan target penurunan emisi dari 29% di first NDC dan updated NDC meningkat menjadi 31,89% tanpa syarat dan dari 41% meningkat menjadi 43,20% dengan dukungan internasional. Enhanced NDC ini adalah transisi menuju Second NDC yang akan diselaraskan dengan *Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050* dengan visi untuk mencapai *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat, untuk membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 2°C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga di bawah 1,5°C.

Skenario LCCP ingin dicapai melalui implementasi Rencana Operasi Lapangan FOLU Indonesia 2030 adalah tingkat pencapaian emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 dan seterusnya meningkat menjadi -304 juta ton CO₂e pada tahun 2050 sehingga emisi bersih di tingkat nasional (semua sektor) menjadi 540 juta ton CO₂e atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita.



Guna mendukung target tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Kebijakan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/ 2022 tentang Indonesia's *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Di dalam Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 telah diatur secara detail program dan kegiatan mitigasi, lokus spasial rencana operasional, penanggung jawab kegiatan dan program, kebutuhan SDM, Sarana dan Prasarana, penganggaran dan tata waktu pelaksanaannya secara nasional tahun 2022-2030.

Dalam menjalankan komitmen pengendalian perubahan iklim serta untuk pencapaian target NDC serta mendukung *Net Zero Emission*, Pemerintah RI telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya dalam mengurangi emisi GRK termasuk mengeluarkan pengaturan terkait *carbon pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melalui Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Guna menjabarkan target-target Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 agar dapat diimplementasikan pada tingkat tapak telah disusun Rencana Kerja Sub Nasional yang mendetailkan target-target aksi mitigasi Rencana Kerja bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang Konservasi; Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang Instrumen dan Informasi di tingkat Provinsi dengan memperhatikan landscape dan karakteristik wilayah.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Gubernur Provinsi Aceh beserta Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net Sink 2030 atas ditetapkannya Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Aceh.

Akhir kata, semoga upaya dan kerja nyata semua pihak bermanfaat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2023
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami ucapkan karena dengan rahmat dan karunia Allah 'Azza wa Jalla pula, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Dokurnen Rencana Kerja Sub Nasional Sumatera Barat Indonesia's FOLU Net Sink 2030 :rahan 2022 - 2030. Dokurnen ini disusun sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya rnenurunkan emisi di sektor kehutanan melalui Rencana Operasional Indonesia's Forestry- and Other Land Use Net Sink 2030 (FOLU Net Sink 2030), yang mana telah menargetkan tercapainya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO:ie pada tahun 2030.

Dokumen ini merupakan panduan kerja agenda perubahan iklim dan *climate actions* sektor kehutanan dan lahan di Provinsi Sumatera Barat untuk. dapat mengakselerasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang sedang diselenggarakan saat ini pada tingkat nasional. Namun demikian, kami sangat bergembira, karena di dalam dokumen ini upaya-upaya yang dilakukan dalam penurunan emisi gas rumah kaca juga tidak mengesarnpingkan keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan melalui program-program Perhutanan Sosial.

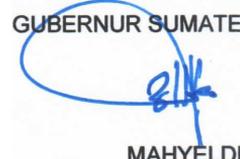
Dengan tersusunnya dokurnen ini diharapkan kepada Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama bersinergi mengimplementasikan rencana ini di tapak sehingga sumbangsih Sumatera Barat dalam rangka penurunan tingkat emisi gas rumah kaca dapat terukur.

Rencana Kerja Sub-Nasional Sumatera Barat Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Tahun 2022 - 2030 ini merupakan dokumen yang dinamis, sehingga diperlukan upaya untuk rnenghimpun dan menatanya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai dokumen yang dinamis, berbagai masukan untuk penyesuaian akan sangat dihargai dan dapat dipertimbangkan guna penyempumaan perencanaan dalam dokumen ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kami sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sangat memberi perhatian kepada Sumatera Barat untuk turut serta dalam pengurangan emisi gas rumah kaca ini. Tak lupa kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Sub-Nasional Sumatera Barat Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Tahun 2022 - 2030 ini diucapkan terima kasih. Semoga segala upaya yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah 'Azza wa Jalla.

Padang, Desember 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Daftar Singkatan

ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APL	: Area Penggunaan Lain
BAU	: <i>Business As Usual</i>
BPDASHL	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
CA	: Cagar Alam
CM 1	: <i>Counter Measures 1</i> (skenario <i>unconditional</i> NDC)
CM 2	: <i>Counter Measures 2</i> (skenario <i>conditional</i> NDC)
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DD	: Deforestasi Degradasi
DPSIR	: <i>Drivers–Pressures–States–Impacts–Responses</i>
EEA	: <i>European Environment Agency</i>
ENR	: <i>Enhanced Natural Regeneration</i>
FOLU	: <i>Forestry and Other Land Use</i>
FREL	: <i>Forest Reference Emission Level</i>
GCF	: <i>Green Climate Fund</i>
GIZ	: <i>Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca
HD	: Hutan Desa
HGU	: Hak Guna Usaha
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HL	: Hutan Lindung
HP	: Hutan Produksi
HPK	: Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
HPT	: Hutan Produksi Terbatas
HN	: Hutan Nagari
HTI	: Hutan Tanaman Industri
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
HR	: Hutan Rakyat
IFNet	: Indonesia's FOLU NetSink 2030
IPL	: Indek Prioritas Lokasi
JCM	: <i>Joint Crediting Mechanism</i>
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KBR	: Kebun Bibit Rakyat
KEE	: Kawasan Ekosistem Esensial
KK	: Kemitraan Kehutanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPA	: Kawasan Pelestarian Alam
KPH	: Kesatuan Pengelolaan Hutan
KPHL	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

KPHP	: Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
KSA	: Kawasan Suaka Alam
KTH	: Kelompok Tani Hutan
KUPS	: Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
LCCP	: <i>Low Carbon Compatible with Paris Agreement</i>
LPHD	: Lembaga Pengelola Hutan Desa
LTS-LCCR	: <i>Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience</i>
MPTS	: <i>Multi-Purpose Tree Species</i>
N/A	: Not Applicable
NDC	: <i>Nationally Determined Contribution</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PBPH	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
PBPH-HA	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Alam / Kayu Tumbuh Alami
PBPH-HT	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Hutan Tanaman / Pemanfaatan Kayu Budidaya
PBPH-RE	: Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan-Restorasi Ekosistem / Jasa Lingkungan untuk Pemulihan Lingkungan
PCK	: Peningkatan Cadangan Karbon
PDASRH	: Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PHBM	: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
PHL	: Pengelolaan Hutan Lestari
PIAPS	: Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial
PIPPIB	: Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
PKTL	: Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPP	: <i>Public Private Partnership</i>
PS	: Perhutanan Sosial
PSKL	: Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
PT	: Perseroan Terbatas
RAD	: Rencana Aksi Daerah
REDD	: <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i>
RIL	: <i>Reduce Impact Logging</i>
RIL-C	: <i>Reduce Impact Logging-Carbon</i>
RKPS	: Rencana Kerja Perhutanan Sosial
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
RKUPH	: Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
RO	: Rencana Operasional
RPHJP	: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SILIN	: Silvikultur Intensif
SM	: Suaka Margasatwa
TN	: Taman Nasional
TWA	: Taman Wisata Alam
UNFCCC	: <i>United Nation Framework Convention on Climate Change</i>
UU	: Undang-Undang

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Kata Pengantar	5
Daftar Singkatan	6
Daftar Isi	8
Daftar Tabel	12
Daftar Gambar	24
Daftar Lampiran	26
BABI PENDAHULUAN	30
A. Latar Belakang	30
B. Tujuan dan Sasaran	31
A.1. Tujuan	31
A.2. Sasaran	31
C. Dasar Hukum	31
D. Definisi	34
BABII DINAMIKA PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	38
A. Pendekatan DPSIR	38
B. Faktor Penggerak (<i>Driver Factor</i>)	39
C. Spek Tekanan (<i>Pressures</i>)	41
C.1. Pembukaan Lahan untuk Perkebunan	41
C.2. Pembukaan Lahan dalam Kawasan untuk Permukiman	44
D. Kondisi Lingkungan (<i>State</i>)	46
D.1. Luas Kawasan Hutan	46
D.2. Kondisi Tutupan Lahan	47
E. Dampak (<i>Impact</i>)	50
E.1. Deforestasi	50
E.2. Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	52
E.3. Perubahan Iklim Mikro	53
E.4. Konflik Lahan	53
F. Respons	53
F.1. Program Pemantapan Kawasan Hutan	53
F.2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	54
F.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	54
F.4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	54
F.5. Program Perhutanan Sosial	55

F.6. Program Rehabilitasi Lahan	56
---	----

BAB III | RENCANA KERJA AKSI MITIGASI 2022–2030 58

A. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral	62
A.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	62
A.2. Intervensi BPSK	65
B. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut	68
C. Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi	69
C.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	69
C.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	71
C.3. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	72
D. Pembangunan Hutan Tanaman	73
E. Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)	74
E.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	75
E.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	79
E.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	80
E.4. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	82
E.5. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	83
F. Penerapan RIL-C	85
F.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	86
F.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	91
F.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	92
F.4. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	94
F.5. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	95
G. Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi	97
G.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	97
G.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	107
G.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VIII)	109
G.5. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	112
G.6. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	113
H. Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi	116
H.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	116
H.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	125
H.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	126
H.4. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	128
H.5. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	130
H.6. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	131
I. Pengelolaan Tata Air Gambut	132
J. Pelaksanaan Restorasi Gambut	132
K. Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	132

K.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	132
K.2. Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)	151
K.3. Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	161
K.4. Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)	168
K.5. Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	177
K.6. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	188
K.7. Wilayah KPHL Solok (Unit VI)	198
K.8. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	205
K.9. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	215
K.10. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	216
K.11. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	222
K.12. Wilayah BKSDA Sumatera Barat	225
K.12. Intervensi BPSKL Sumatera	226
L. Pengelolaan Mangrove	240

BAB IV | PENDANAAN KEGIATAN270

A. Kebutuhan Anggaran	270
A.1. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1]	272
A.2. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [RO2]	273
A.3. Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3]	273
A.4. Pembangunan Hutan Tanaman[RO4]	273
A.5. Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [RO5]	274
A.6. Penerapan RIL-C [RO6]	275
A.7. Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [RO7]	276
A.8. Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [RO8]	278
A.9. Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]	280
A.10. Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]	280
A.11. Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO11]	280
A.12. Pengelolaan Mangrove [RO12]	284
B. Mekanisme Pendanaan	284
C. Sumber Pendanaan	286

BAB V | MONITORING DAN EVALUASI290

A. Monitoring	290
A.1. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1]	290
A.2. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [RO2]	294
A.3. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3]	294

A.4. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]	298
A.5. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [RO5].	298
A.6. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [RO6].	304
A.7. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [RO7]	316
A.8. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [RO8].	348
A.9. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]	368
A.10. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]	368
A.11. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO11].	368
A.12. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO12]	392
B. Evaluasi	394
B.1. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1].	396
B.2. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [RO2]	400
B.3. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3].	401
B.4. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]	404
B.5. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [RO5]	404
B.6. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [RO6].	408
B.7. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [RO7].	416
B.8. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [RO8].	450
B.9. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]	470
B.10. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]	470
B.11. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO11].	470
B.12. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO12]	494

BAB VI PENUTUP	500
DAFTAR PUSTAKA	501
LAMPIRAN	502

Daftar Tabel

Tabel 1 Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi pada Tahun 2030.....	30
Tabel 2 Luas Areal Non-Hutan di Dalam Kawasan Konservasi Tahun 2020.....	43
Tabel 3 Luas Areal Non-Hutan di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2020.....	43
Tabel 4 Kondisi Tutupan Lahan di Areal PBPH-HT PT. Sukses Jaya Wood Tahun 2020.....	44
Tabel 5 Luas Tutupan Lahan Permukiman Dalam Kawasan Konservasi dan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.....	45
Tabel 6 Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat menurut Fungsinya.....	46
Tabel 7 Penutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat.....	47
Tabel 8 Penutupan Lahan Tahun 2020 pada Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Barat.....	49
Tabel 9 Penutupan Lahan Tahun 2020 pada Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat.....	49
Tabel 10 Sebaran Deforestasi di Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2020.....	52
Tabel 11 Perbandingan Luas Area Sasaran FOLU Net Sink 2030 Menurut Aksi Mitigasi Berdasarkan Arahan Nasional dan Arahan Sub-Nasional di Provinsi Sumatera Barat.....	59
Tabel 12 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin.....	63
Tabel 13 Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2022-2024.....	63
Tabel 14 Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2025-2030.....	63
Tabel 15 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin.....	64
Tabel 16 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Arahan PIAPS.....	65
Tabel 17 Target Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral pada Areal Definitif PS pada Tahun 2022-2024.....	66
Tabel 18 Target Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral Pada Areal Indikatif PS pada Tahun 2022-2024.....	66
Tabel 19 Target Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral pada Areal Definitif PS pada Tahun 2025-2030.....	67

Tabel 20	Target Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral pada Areal Indikatif PS pada Tahun 2025-2030	68
Tabel 21	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin	70
Tabel 22	Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima.	70
Tabel 23	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2022-2024	70
Tabel 24	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2025-2030	71
Tabel 25	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin	71
Tabel 26	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	72
Tabel 27	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024	72
Tabel 28	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Mentawai (Unit X dan Unit XI)	73
Tabel 29	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024	73
Tabel 30	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin	75
Tabel 31	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber	76
Tabel 32	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024	77
Tabel 33	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030	77
Tabel 34	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin	78
Tabel 35	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	79
Tabel 36	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024	80

Tabel 37	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	81
Tabel 38	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024	82
Tabel 39	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	83
Tabel 40	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024	83
Tabel 41	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	84
Tabel 42	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024	85
Tabel 43	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin	86
Tabel 44	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber	87
Tabel 45	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024	88
Tabel 46	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030	88
Tabel 47	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2022-2024	89
Tabel 48	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2025-2030	89
Tabel 49	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera pada Tahun 2022-2024	89
Tabel 50	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera pada Tahun 2025-2030	90
Tabel 51	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin	90
Tabel 52	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	91
Tabel 53	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024	92
Tabel 54	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	93

Tabel 55	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024	94
Tabel 56	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	94
Tabel 57	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024	95
Tabel 58	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI).	95
Tabel 59	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024	97
Tabel 60	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin.	98
Tabel 61	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber	99
Tabel 62	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024	99
Tabel 63	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030	100
Tabel 64	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin	100
Tabel 65	Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Intensif.	102
Tabel 66	Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Semi-Intensif atau Pengkayaan	102
Tabel 67	Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Agroforestry	103
Tabel 68	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022-2024	104
Tabel 69	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025-2030	106
Tabel 70	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	107
Tabel 71	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024	107

Tabel 72	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2025-2030	108
Tabel 73	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII).	109
Tabel 74	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024	111
Tabel 75	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2025-2030	111
Tabel 76	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	112
Tabel 77	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) pada tahun 2022-2024	112
Tabel 78	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	113
Tabel 79	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024.	113
Tabel 80	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	113
Tabel 81	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI) pada tahun 2022-2024	115
Tabel 82	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI) pada tahun 2025-2030	116
Tabel 83	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin	117
Tabel 84	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber	118
Tabel 85	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030	118
Tabel 86	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin	118
Tabel 87	Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangku Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Intensif	120
Tabel 88	Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangku Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Semi-Intensif atau Pengkayaan	121

Tabel 89	Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Agroforestry . . .	122
Tabel 90	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022-2024	123
Tabel 91	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025-2030	124
Tabel 92	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V).	125
Tabel 93	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024.	126
Tabel 94	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII).	126
Tabel 95	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024.	128
Tabel 96	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	129
Tabel 97	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) pada tahun 2022-2024	129
Tabel 98	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	130
Tabel 99	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024	130
Tabel 100	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	131
Tabel 101	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024	131
Tabel 102	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin.	133
Tabel 103	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber	134
Tabel 104	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024	134

Tabel 105 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Berizin	134
Tabel 107 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Dharmasraya	136
Tabel 108 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Kepulauan Mentawai	137
Tabel 109 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Padang	138
Tabel 110 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Padang Panjang	139
Tabel 111 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Sawahlunto	139
Tabel 112 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Solok	140
Tabel 113 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Lima Puluh Kota	140
Tabel 114 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Padang Pariaman	141
Tabel 115 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Pasaman	142
Tabel 116 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Pasaman Barat	143
Tabel 117 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Pesisir Selatan	144
Tabel 118 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Sijunjung	146
Tabel 119 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Solok	148
Tabel 120 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Solok Selatan	149
Tabel 121 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Tanah Datar	150
Tabel 122 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)	151

Tabel 123	Perbandingan Luas Areal Arahkan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I).	157
Tabel 124	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I).	157
Tabel 125	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) pada Tahun 2022-2024	160
Tabel 126	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II).	161
Tabel 127	Perbandingan Luas Areal Arahkan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	163
Tabel 128	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II).	164
Tabel 129	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) pada Tahun 2022-2024	166
Tabel 130	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III).	168
Tabel 131	Perbandingan Luas Areal Arahkan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III).	171
Tabel 132	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III).	172
Tabel 133	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) pada Tahun 2022-2024	174
Tabel 134	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) pada Tahun 2025-2030	175
Tabel 135	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV).	178
Tabel 136	Perbandingan Luas Areal Arahkan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	184
Tabel 137	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	184
Tabel 138	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) pada Tahun 2022-2024	186
Tabel 139	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V).	188

Tabel 140	Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	194
Tabel 141	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V).	194
Tabel 142	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada Tahun 2022-2024	197
Tabel 143	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI).	198
Tabel 144	Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)	202
Tabel 145	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)	203
Tabel 146	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI) pada Tahun 2022-2024	204
Tabel 147	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII).	205
Tabel 148	Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	210
Tabel 149	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII).	211
Tabel 150	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada Tahun 2022-2024	213
Tabel 151	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII).	215
Tabel 152	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) pada Tahun 2022-2024	215
Tabel 153	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	216
Tabel 154	Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX).	218
Tabel 155	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	218
Tabel 156	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada Tahun 2022-2024	218

Tabel 157	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada Tahun 2025-2030	220
Tabel 158	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	222
Tabel 159	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada Tahun 2022-2024	224
Tabel 160	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat	225
Tabel 161	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat pada Tahun 2022-2024	226
Tabel 162	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam Arahan PIAPS dengan Skema Hutan Nagari	226
Tabel 163	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam Arahan PIAPS dengan Skema Hutan Masyarakat (HKm)	234
Tabel 164	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif PS Tahun 2022-2024	237
Tabel 166	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif PS Tahun 2025-2030	239
Tabel 167	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Indikatif PS Tahun 2025-2030	240
Tabel 168	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)	241
Tabel 169	Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)	241
Tabel 170	Rencana Aksi Mitigasi Sub Nasional Tahun 2022 s/d 2030	242
Tabel 171	Sebaran Lokasi Sasaran FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat Menurut Luas Area dan Aksi Mitigasinya	270
Tabel 172	Kebutuhan Anggaran per Tahun untuk Rencana Aksi Implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat Tahun 2022 - 2030	271
Tabel 173	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01] pada Sub Nasional Sumatera Barat	272
Tabel 174	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [R03] pada Sub Nasional Sumatera Barat	273
Tabel 175	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [R05] pada Sub Nasional Sumatera Barat	274

Tabel 176	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [R06] pada Sub Nasional Sumatera Barat	275
Tabel 177	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [R07] pada Sub Nasional Sumatera Barat	276
Tabel 178	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [R08] pada Sub Nasional Sumatera Barat.	279
Tabel 179	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [R011] pada Sub Nasional Sumatera Barat	281
Tabel 180	Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R012] pada Sub Nasional Sumatera Barat	284
Tabel 181	Alternatif Sumber Pendanaan untuk Implementasi FOLU Net Sink 2030	286
Tabel 182	Rencana Sumber Pendanaan Implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat.	286
Tabel 183	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01].	292
Tabel 184	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [R02].	294
Tabel 185	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [R03].	297
Tabel 186	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [R04].	298
Tabel 187	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)[R05]	300
Tabel 188	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [R06].	306
Tabel 189	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [R07].	318
Tabel 190	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [R08].	350
Tabel 191	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [R09]	368
Tabel 192	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [R010].	368
Tabel 193	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [R011].	372

Tabel 194	Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R012]	394
Tabel 195	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01]	398
Tabel 196	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [R02]	400
Tabel 197	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [R03]	402
Tabel 198	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [R04]	404
Tabel 199	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [R05]	406
Tabel 200	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [R06]	411
Tabel 202	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [R08]	452
Tabel 203	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [R09]	470
Tabel 204	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [R010]	470
Tabel 205	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [R011]	474
Tabel 206	Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R012]	497

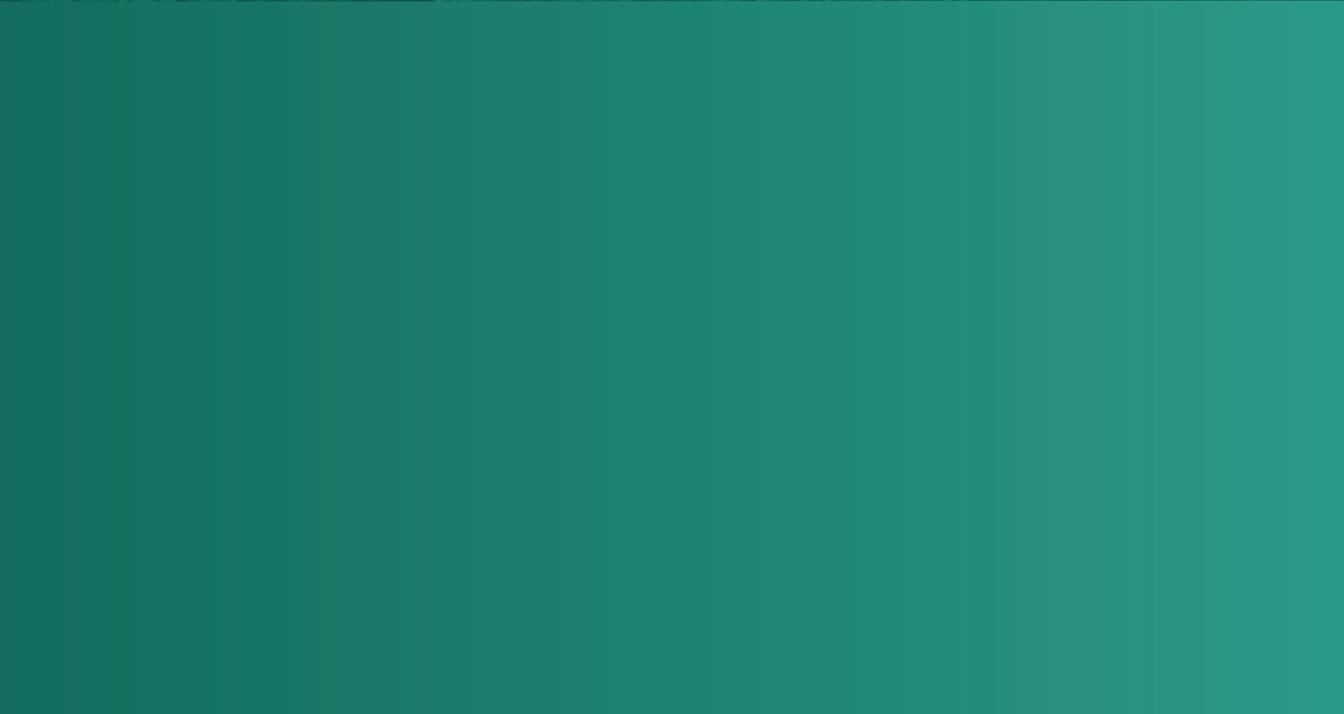
Daftar Gambar

Gambar 1 Konsep DPSIR (Drivers–Pressures–States–Impacts–Responses)	39
Gambar 2 Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2000 sampai 2020	40
Gambar 3 Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat Tahun 2000 s/d Tahun 2020	40
Gambar 4 Luas Perkebunan Sumatera Barat Tahun 2011 sampai 2021	42
Gambar 6 Peta Sebaran Permukiman dalam Kawasan Hutan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat ..	46
Gambar 7 Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	48
Gambar 8 Dinamika Luas Hutan di Sumatera Barat	51
Gambar 9 Laju Kerusakan Hutan Sumatera Barat Tahun 2012-2010	52
Gambar 10 Laju Penurunan Lahan Kritis di Sumatera Barat	55
Gambar 11 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Provinsi Sumatera Barat	65
Gambar 12 Peta Sebaran Lokasi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral pada Lokasi Indikatif Area Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat	69
Gambar 13 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Provinsi Sumatera Barat	74
Gambar 14 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Provinsi Sumatera Barat	79
Gambar 15 Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Provinsi Sumatera Barat	91
Gambar 16 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Provinsi Sumatera Barat	106
Gambar 17 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Provinsi Sumatera Barat	120
Gambar 18 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)	160
Gambar 19 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) pada Areal Perhutanan Sosial	161
Gambar 20 Persentase Luas Areal Perhutanan Sosial yang Menjadi Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPH Lima Puluh Kota (Unit II)	166
Gambar 21 Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)	167

Gambar 22	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) pada Areal Perhutanan Sosial	167
Gambar 23	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)	176
Gambar 24	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) pada Areal Perhutanan Sosial	177
Gambar 25	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	187
Gambar 26	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) pada Areal Perhutanan Sosial	187
Gambar 27	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	197
Gambar 28	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada Areal Perhutanan Sosial	198
Gambar 29	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)	204
Gambar 30	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI) pada Areal Perhutanan Sosial	205
Gambar 31	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	214
Gambar 32	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada Areal Perhutanan Sosial	214
Gambar 33	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Dharmasraya (Unit VIII)	216
Gambar 34	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	221
Gambar 35	Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada Areal Perhutanan Sosial	222
Gambar 36	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)	224
Gambar 37	Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit XI)	225
Gambar 38	Mekanisme Penyaluran Hibah ke Daerah (GIZ, 2018)	285
Gambar 39	Proyeksi emisi sektor FOLU pada skenario NDC (CM1) dan LTS (LCCP)	285

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Peta Gap R01 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	502
Lampiran 2 Peta Gap R03 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	503
Lampiran 3 Peta Gap R05 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	503
Lampiran 4 Peta Gap R06 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	504
Lampiran 5 Peta Gap R07 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	504
Lampiran 6 Peta Gap R08 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	505
Lampiran 7 Peta Gap R011 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	505
Lampiran 8 Peta Gap R012 Arahan Peta Mangrove Nasional dengan Arahan Sub-Nasional	511



BAB 01



PENDAHULUAN

BABI | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengembangkan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang merupakan inisiatif pembangunan yang berupaya untuk mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan serta penurunan emisi. PRK dikembangkan dari serangkaian program, kebijakan dan komitmen pemerintah terkait penanganan perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional. Inisiatif PRK tercantum dalam prioritas pembangunan nasional pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dan inisiatif ini juga akan dikembangkan ke dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Hasil Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) upaya pengurangan emisi GRK Provinsi Sumatera Barat telah dilakukan melalui sistem AKSARA dan menunjukkan pencapaian potensi penurunan emisi GRK mencapai 16,46 juta ton CO₂eq sampai dengan tahun 2020. Potensi capaian tersebut berdasarkan aksi mitigasi yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Sumatera Barat pada 5 (lima) sektor prioritas dalam rencana penurunan emisi GRK, yaitu sektor kehutanan dan lahan gambut, sektor pertanian (berbasis lahan dengan pengurangan emisi sampai 2020 sekitar 16,37 juta ton CO₂eq) energi, industri transportasi (berbasis energi dengan pengurangan emisi sampai 2020 sekitar 0,04 juta ton CO₂eq) dan pengolahan limbah (berbasis pengelolaan limbah dengan pengurangan emisi masih kecil sekali.

Hasil perhitungan nilai baseline dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2030 menunjukkan bahwa dari berbagai kegiatan mitigasi yang diusulkan diproyeksikan dapat menurunkan emisi hingga 9,72% dari BAU baseline pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Sumatera Barat dalam menangani perubahan iklim di daerah. Adapun hasil rekapitulasi nilai baseline dan estimasi penurunan emisi GRK tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 | Nilai Baseline dan Perkiraan Penurunan Emisi pada Tahun 2030

Bidang Mitigasi	BAU Baseline 2030 (tonCO ₂ eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK pada Tahun 2030	
		tonCO ₂ eq	%
Pertanian	1.533.653	369.772	24,11
Kehutanan	132.184.477	11.117.529	8,41
Energi & Transportasi	10.960.000	2.625.018	23,95
Limbah	1.175.300	62.500	5,32
Total	145.178.490	14.112.319	9,72

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

B. Tujuan dan Sasaran

A.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sub-Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Tahun 2022 – 2030 Provinsi Sumatera Barat meliputi :

1. Menindaklanjuti kebijakan dan implementasi kerja untuk mencapai Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dengan langkah-langkah yang sistematis dan terukur di Sub Nasional Sumatera Barat;
2. Menetapkan rencana operasional kerja aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat;
3. Mendetailkan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan dengan pendekatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat;
4. Menegaskan kegiatan penopang utama pelaksanaan program dan kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan lahan menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030 serta tahapan kerja dan operasionalisasi serta evaluasinya di Sub Nasional Sumatera Barat;
5. Menyusun *Manual of Operation* dari setiap kebijakan dan langkah penopang utama Program Nasional "Indonesia's FOLU Net Sink 2030" di Sub Nasional Sumatera Barat.

A.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Kerja Implementasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat adalah kontribusi dalam capaian pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030 secara nasional dan mendukung net zero emission sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia di Sub Nasional Sumatera Barat sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sub-Nasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Tahun 2022 – 2030 Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419];
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888] dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432] sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725];
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573];
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798];
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518];
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634];
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635];
 9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 mengenai Moratorium Perizinan Baru Dan Perbaikan Tata Kelola, yang selanjutnya menjadi Instruksi Presiden No 5/2019 tentang penghentian pemberian perizinan baru dan perbaikan tata kelola. Pada operasionalnya Instruksi Presiden ini, setiap 6 bulan sekali selalu disertai dengan SK MenLHK yang mengatur tentang Peta Indikatif (PIPIB). SK terupdate adalah SK MenLHK No.5446/2021 tentang penetapan peta PIPPIB periode II tahun 2021
 10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 mengenai Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87];
 12. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.48/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987];
 13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.49/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 988];
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/

- MENLHK-SETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 164];
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368];
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest And Enhancement* [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161];
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor NOMOR P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344];
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318];
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319];
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320];
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314];
 22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/PLA.0/8/2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat;
 23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi VII);
 24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
 25. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: INS.1/MENLHK/ SETJEN/ Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan;

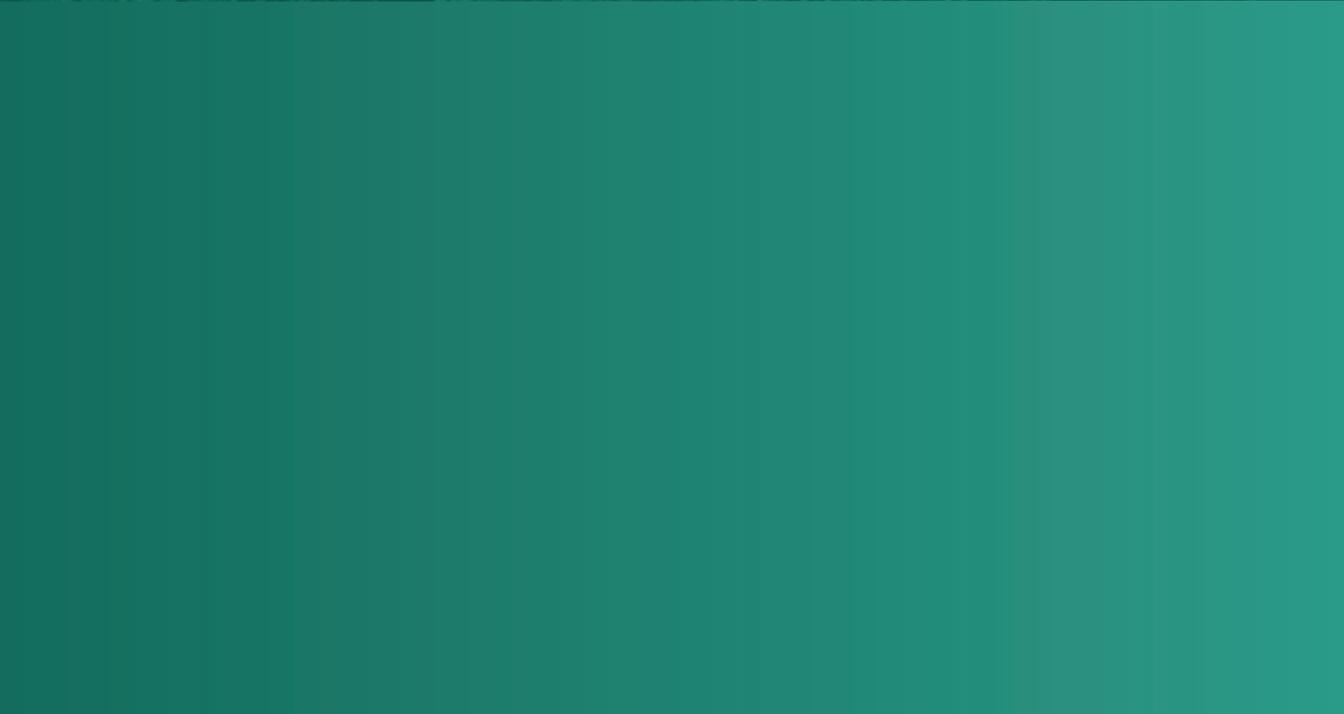
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128)
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 [Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195];
28. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman hayati Tinggi di Luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru;
29. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
30. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Efektivitas Pengelolaan Ekosistem Esensial
31. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Teknik *Reduce Impact Logging* (RIL)

D. Definisi

1. Rencana Kerja Sub Nasional adalah sebuah dokumen perencanaan yang bersifat spesifik dan memberikan informasi bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan secara rinci dengan memperhatikan ketersediaan dan potensi sumber daya pada tingkat sub nasional.
2. *Nationally Determined Contribution* (NDC) adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*). NDC tersebut menggambarkan peningkatan aksi dan kondisi yang mendukung selama periode 2015-2019 yang akan menjadi landasan untuk menentukan tujuan lebih ambisius setelah tahun 2020, yang akan berkontribusi dalam upaya untuk mencegah kenaikan temperatur global sebesar 2°C dan mengejar upaya membatasi kenaikan temperatur global sebesar 1.5°C dibandingkan masa praindustri. Kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC.
3. LTS-LCCR adalah dokumen yang menyampaikan visi Indonesia dalam skenario yang lebih ambisius (*Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement target; LCCP*) bahwa Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK dengan puncak emisi bersih GRK nasional (seluruh sektor) tercapai pada tahun 2030 sebesar 1.244 juta ton CO₂e atau setara 4,23 ton CO₂e per kapita. Setelah itu, nilai emisi bersih akan terus

mengalami penurunan dan mencapai tingkat emisi bersih sebesar 540 juta ton CO₂e pada tahun 2050 atau setara dengan 1,6 ton CO₂e per kapita, dan terus mengeksplorasi peluang untuk mencapai kemajuan lebih cepat menuju *net zero emission (NZE)* pada tahun 2060 atau lebih cepat.

4. FOLU atau *Forestry and Other Land Use* adalah kategori sektor yang merupakan salah satu sumber emisi dan rosot GRK yang berasal dari dinamika perubahan tutupan dan penggunaan lahan yang diharapkan memberikan kontribusi terbesar atas pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen NDC.
5. *Net zero emission* adalah sebuah kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga *net* emisi bernilai nol.
6. *Net Sink* adalah sebuah kondisi yang menggambarkan serapan GRK dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan, dimana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpan karbon memegang peranan yang penting dalam menyerap GRK.
7. FOLU *Net Sink* 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka *net sink* 140 juta ton CO₂e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e tersebut



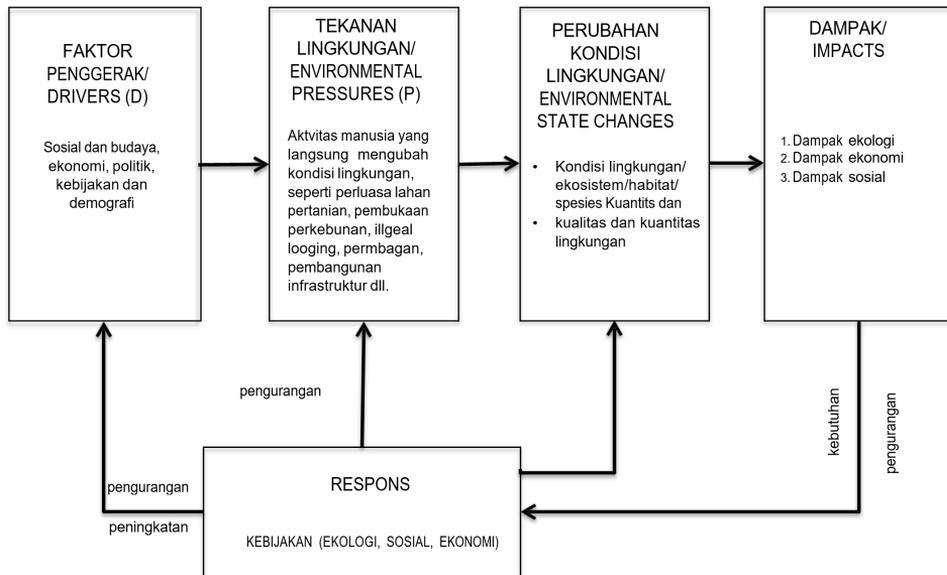
BAB 02

**DINAMIKA PENGELOLAAN HUTAN DAN
LINGKUNGAN DI PROVINSI SUMATRA BARAT**

BAB II | DINAMIKA PENGELOLAAN HUTAN DAN LINGKUNGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Pendekatan DPSIR

DPSIR merupakan salah satu *tools* untuk menilai tingkat tekanan terhadap ekosistem yang diakibatkan oleh aktivitas manusia pada lingkungan (Martinez *et al.*, 2008). Pendekatan DPSIR (*Drivers–Pressures–States–Impacts–Responses*) digunakan untuk melihat dinamika pengelolaan hutan dan lingkungan saat ini. Konsep DPSIR ini pada awalnya diperkenalkan oleh Organisasi untuk Kerja OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) pada tahun 1994. Konsep DPSIR ini digunakan sebagai pendekatan dalam mengkonstruksikan data indikator lingkungan. Pada tahun 2005 EEA (*European Environment Agency*) mengembangkan konsep pendekatan ini, yaitu dengan memasukkan unsur *Drivers* (P) dan *Impact* (I). Konsep DPSIR ini digunakan dengan pola pikir bahwa kondisi lingkungan (*environmental state*) akan berubah karena pengaruh faktor langsung (*pressure*) dan tidak langsung (*driver/driving force*) dari aktivitas ekonomi dan tekanan penduduk (demografi). Perubahan lingkungan tersebut akan menimbulkan dampak negatif (*impact*), diantaranya menurunnya jasa ekosistem/lingkungan, kerusakan ekosistem, dan terancamnya keberadaan makhluk hidup di dalamnya. Dalam rangka untuk mengelola dampak negatif tersebut, manusia melakukan berbagai upaya (*response*) berupa intervensi kebijakan baik dalam bentuk perundangan/regulasi, program maupun project. Kebijakan atau Respon tersebut dapat langsung ditujukan untuk mengelola *driver, state* ataupun *impact*. Kebijakan yang dikeluarkan sebagai respon akan mengembalikan keseimbangan kembali, kebijakan-kebijakan respon tersebut menentukan kualitas membaiknya jasa lingkungan dan keberlanjutan ekosistem serta makhluk hidup di dalamnya. Secara konseptual Kerangka Pendekatan DPSIR untuk pengelolaan dan pemanfaatan hutan pada skala spasial tertentu (sub-nasional/region) disajikan pada Gambar 1.



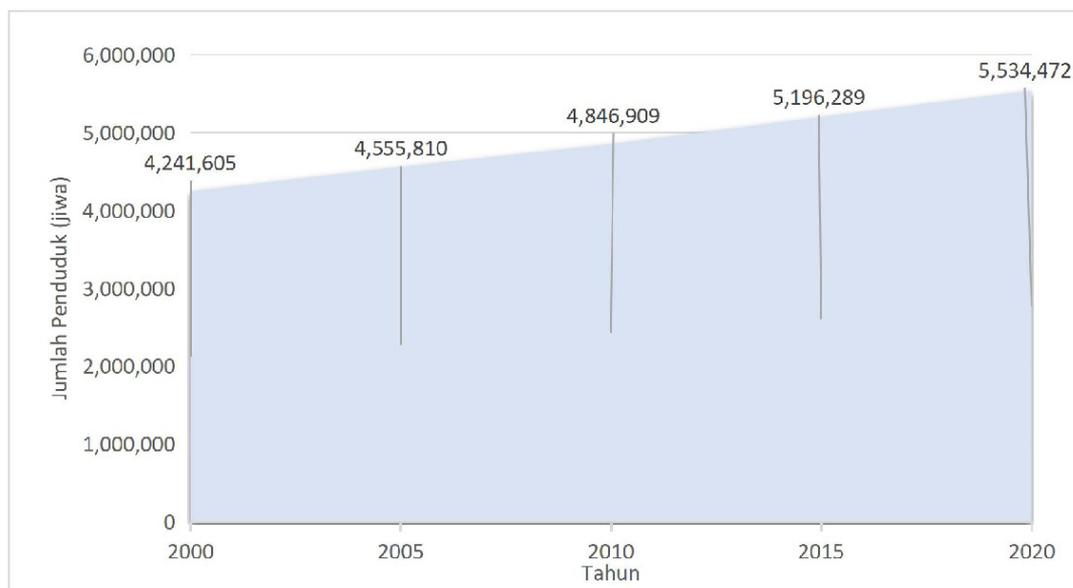
Gambar 1 | Konsep DPSIR (Drivers–Pressures–States–Impacts–Responses)

Penggunaan pendekatan DPSIR ini harus sangat hati-hati dalam memetakan hubungan sebab-akibatnya, konsisten kepada definisi DPSIR dan skala spasialnya. Dalam konteks monitoring keanekaragaman hayati, monitoring tidak hanya ditujukan pada status keanekaragaman hayati dan habitatnya (*state*), namun termasuk juga *monitoring driver, pressure, impact* dan respon dari pengelola (Boyle et al., 1997) sehingga indikator dan parameter yang dibangun harus mencakup indikator dan parameter untuk D, P, S, I dan R.

Pendekatan DPSIR untuk mengetahui keterkaitan faktor-faktor penyebab terjadinya tekanan terhadap ekosistem hutan sehingga dapat digunakan untuk menilai intensitas penggunaan sumberdaya oleh manusia dan aktivitas sektoral di kawasan hutan. Penilaian tekanan terhadap ekosistem dianalisis berdasarkan pendekatan keseluruhan sistem dan integrasi ekosistem yang berkaitan dengan struktur, komposisi dan fungsinya berdasarkan indikator ruang meliputi bentang alam, pemanfaatan ruang, dan biodiversity (Turner et al. 2000).

B. Faktor Penggerak (*Driver Factor*)

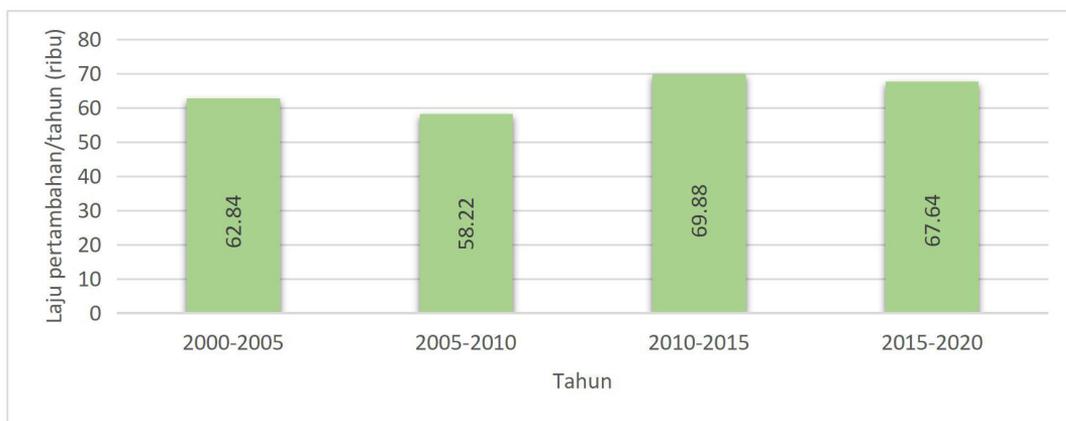
Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor penggerak (*driver*) dalam dinamika pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Pertambahan penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, baik untuk permukiman beserta sarana dan prasarannya, maupun untuk lahan produksi pangan dan lainnya. Sementara itu luas lahan sendiri bukannya bertambah namun cenderung berkurang. Hasil sensus penduduk di Sumatera Barat memperlihatkan peningkatan jumlah dari tahun ketahun, seperti yang terlihat pada Gambar 2.



Sumber : Sensus Penduduk Tahun Data 2000, 2005, 2010, 2015 dan 2020

Gambar 2 | Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2000 sampai 2020

Dari data yang didapatkan, selama 20 tahun terakhir penduduk di Sumatera Barat bertambah sebanyak 1.292.867 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata sebanyak 64.643,35 jiwa pertahun. Jadi setiap tahun terjadi peningkatan jumlah penduduk, dengan laju pertumbuhan tertinggi terjadi selama periode waktu 2010-2015.



Gambar 3 | Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat Tahun 2000 s/d Tahun 2020

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta pertumbuhan ekonomi yang sangat baik memberikan dampak pada pola permukiman masyarakat Sumatera Barat. Kebutuhan akan pemukiman terus meningkat. Pemerintah Sumatera Barat telah merencanakan untuk pengembangan pemukiman seluas 496.915,49 ha.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi salah satu faktor penggerak (*driver*) dalam dinamika pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan meningkatkan jumlah penduduk, yang akibatnya terjadi peningkatan kebutuhan baik fisik seperti terhadap pangan, papan dan sandang maupun non fisik seperti rekreasi dan kehidupan yang nyaman. Peningkatan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan mendorong manusia untuk mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Hutan, menjadi salah satu aspek yang menjadi sasaran manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut.

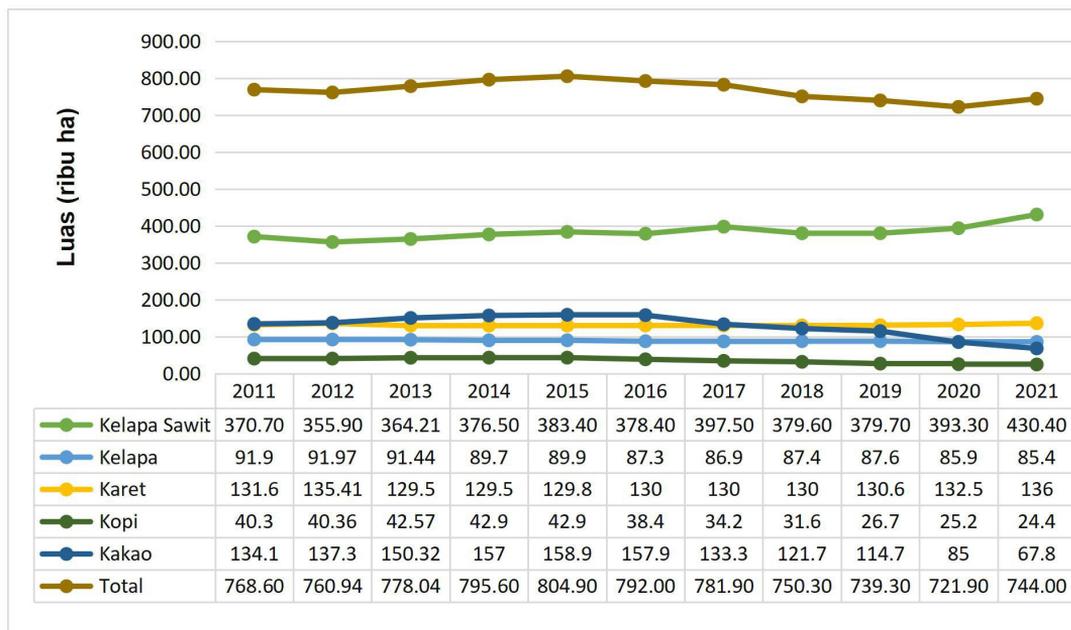
Sejalan dengan bertumbuhnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia membutuhkan bahan baku untuk proses produksinya. Semakin lama kebutuhan bahan tersebut akan semakin bertambah sejalanannya dengan permintaan konsumen terhadap barang yang dihasilkan. Bertambahnya permintaan konsumen terhadap barang disebabkan karena peningkatan jumlah penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun berikutnya.

Kebutuhan bahan baku untuk mencukupi kegiatan ekonomi salah satunya berasal dari hutan. Hutan dengan potensi kenakeragaman hayati yang ada didalamnya serta potensi kayu menjadi salah satu sumber buat bahan baku untuk kegiatan ekonomi masyarakat saat ini. Sehingga Peningkatan ekonomi di suatu wilayah akan menjadi faktor penggerak (*driver*) bagi dinamika pengelolaan hutan.

C. Spek Tekanan (*Pressures*)

C.1. Pembukaan Lahan untuk Perkebunan

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kegiatan ekonomi, untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut dibutuhkan ruang sebagai tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu sektor yang membutuhkan ruang yang luas adalah perkebunan. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi di Sumatera Barat, luas lahan perkebunan juga meningkat. Pengembangan lahan perkebunan, terutama sawit cukup pesat di Sumatera Barat. Gambar 4 memperlihatkan dinamika penambahan luas kebun di Sumatera Barat, utamanya sawit, kelapa, karet, kopi dan kakao. Beberapa komoditi memperlihatkan luasan lahan yang konstan, dan bahkan ada penurunan, namun luasan kebun sawit terus mengalami peningkatan.



Sumber: Pusat Statistik Nasional

Gambar 4 | Luas Perkebunan Sumatera Barat Tahun 2011 sampai 2021

Hutan mempunyai fungsi ekologi yang sangat penting, antara lain, hidro-orologi, penyimpan sumberdaya genetik, pengatur kesuburan tanah hutan dan iklim serta rosot (penyimpan, sink) karbon, Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan keanekaragaman hayati. Pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat memicu kebutuhan ruang-ruang untuk beraktifitas dan pemenuhan kebutuhan sehingga terjadi pembukaan lahan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan untuk perkebunan. Hal tersebut secara langsung telah memberikan tekanan terhadap kondisi ekosistem hutan.

Berdasarkan hasil analisis spasial, sampai dengan tahun 2020, terdapat areal non-hutan di kawasan konservasi seluas 70.644 ha yang terdiri dari pertanian lahan kering seluas 14.326 ha (20,28%), pertanian lahan kering campur seluas 54.717 ha (77,45%), sawah seluas 826 ha (1,17%) dan perkebunan seluas 775 ha (1,10%). Areal perkebunan yang telah teridentifikasi terdiri dari seluas 11 ha di kawasan Suaka Margasatwa, seluas 304 ha di kawasan Cagar Alam, seluas 450 ha di kawasan Taman Nasional dan seluas 9 ha di kawasan Taman Wisata Alam. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 | Luas Areal Non-Hutan di Dalam Kawasan Konservasi Tahun 2020

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kawasan Konservasi					Luas Total	
			SM	CA	KSA	TN	TWA	ha	%
1	Pertanian Lahan Kering	20091	1.904	1.094	1	11.015	312	14.326	20,28
2	Pertanian Lahan Kering Campur	20092	6.024	5.097	61	40.858	2.676	54.717	77,45
3	Sawah	20093	179	431	55	111	50	826	1,17
4	Perkebunan	2010	11	304	-	450	9	775	1,10
Grand Total			8.118	6.926	117	52.434	3.047	70.644	100,00

Sumber: Analisis Spasial, 2022

Sedangkan pada kawasan hutan, areal non-hutan terhitung lebih luas lagi yaitu seluas 338.305 ha yang terdiri dari pertanian lahan kering seluas 80.389 ha (23,76%), pertanian lahan kering campur seluas 189.267 ha (55,95%), sawah seluas 5.611 ha (1,66%) dan perkebunan seluas 63.039 ha (18,63%). Areal perkebunan yang telah teridentifikasi terdiri dari seluas 9.690 ha di kawasan Hutan Lindung, seluas 18.537 ha di kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas 12.170 ha di kawasan Hutan Produksi Terbatas dan seluas 22.642 ha di kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 | Luas Areal Non-Hutan di Dalam Kawasan Hutan Tahun 2020

No	Tutupan Lahan Non-Hutan	Kode	Kawasan Hutan				Luas Total	
			HL	HP	HPT	HPK	ha	%
1	Pertanian Lahan Kering	20091	35.108	13.222	18.088	13.970	80.389	23,76%
2	Pertanian Lahan Kering Campur	20092	83.025	42.302	27.650	36.290	189.267	55,95%
3	Sawah	20093	3.471	650	496	994	5.611	1,66%
4	Perkebunan	2010	9.690	18.537	12.170	22.642	63.039	18,63%
Grand Total			131.294	74.711	58.405	73.895	338.305	100,00%

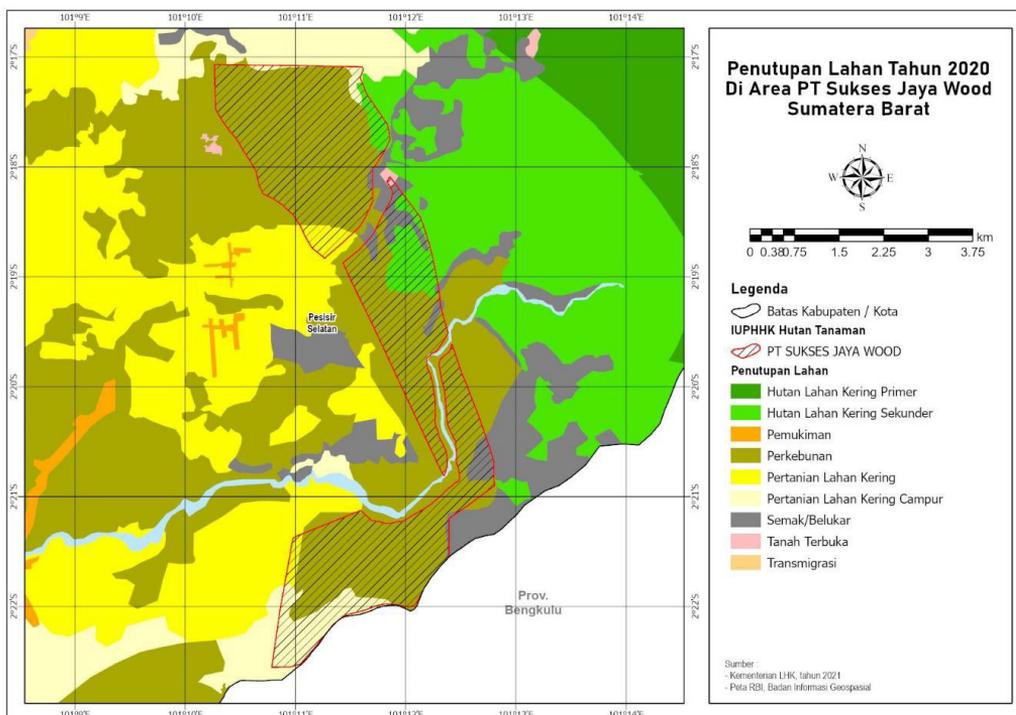
Sumber: Analisis Spasial, 2022

Hasil analisis spasial juga menunjukkan bahwa perkebunan sudah merambah di dalam kawasan PBPH-HT, sebagaimana yang disajikan sebagai contoh merupakan tutupan lahan di areal PBPH-HT PT. Sukses Jaya Wood berikut.

Tabel 4 | Kondisi Tutupan Lahan di Areal PBPH-HT PT. Sukses Jaya Wood Tahun 2020

Areal PBPH-HT	Kondisi Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)	Persentase
PT SUKSES JAYA WOOD	Hutan Lahan Kering Sekunder	107,96	5,33%
	Perkebunan	1.237,00	61,05%
	Pertanian Lahan Kering	41,32	2,04%
	Pertanian Lahan Kering Campur	563,95	27,83%
	Semak/Belukar	74,41	3,67%
	Tanah Terbuka	1,07	0,05%
	(blank)	0,46	0,02%
Grand Total		2.026,17	100,00%

Sumber: Analisis Spasial, 2022



Gambar 5 | Peta Penutupan Lahan Tahun 2020 di Areal PBPH PT Sukses Jaya Wood yang Didominasi Perkebunan

C.2. Pembukaan Lahan dalam Kawasan untuk Permukiman

Berdasarkan hasil analisis spasial, terdapat lahan permukiman di kawasan konservasi seluas 612,53 ha yang terdiri dari seluas 225,05 ha di kawasan suaka margasatwa, seluas 77,72 ha di kawasan cagar alam, seluas 269,89 ha di kawasan taman nasional dan seluas 39,86 ha di kawasan taman wisata alam. Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi wilayah

dengan persentase tertinggi yang pada kawasan hutannya memiliki tutupan lahan berupa areal permukiman dengan luas 1.157,09 ha atau sebesar 39.41% dari luas total areal permukiman dalam kawasan. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5 | Luas Tutupan Lahan Permukiman Dalam Kawasan Konservasi dan Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

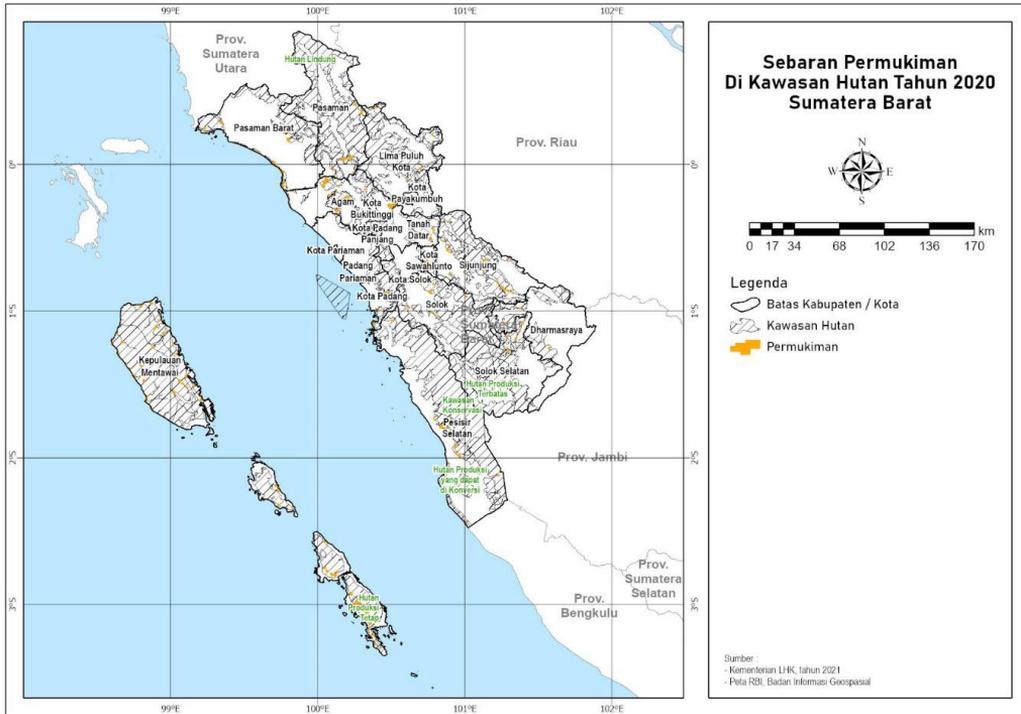
No	Kabupaten/Kota	Kawasan Konservasi				Kawasan Hutan				Luas	
		SM	CA	TN	TWA	HL	HP	HPT	HPK	ha	%
1	Agam	-	23,94	-	-	119,75	150,60	-	82,87	377,16	12,85
2	Dharmasraya	-	-	-	-	-	16,04	-	6,81	22,86	0,78
3	Kepulauan Mentawai	-	-	267,22	31,25	12,61	646,54	-	199,48	1.157,09	39,41
4	Kota Padang	-	-	-	-	62,24	-	-	-	62,24	2,12
5	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	101,88	101,88	3,47
6	Lima Puluh Kota	-	-	-	-	21,06	-	-	6,09	27,15	0,92
7	Pasaman	214,57	-	-	8,62	82,93	-	49,72	-	355,84	12,12
8	Pasaman Barat	-	-	-	-	194,56	94,33	-	70,87	359,76	12,25
9	Pesisir Selatan	-	-	2,68	-	37,37	-	3,66	109,68	153,38	5,22
10	Sijunjung	-	53,78	-	-	10,49	38,87	10,98	-	114,12	3,89
11	Solok	10,48	-	-	-	7,46	-	0,87	107,99	126,79	4,32
12	Solok Selatan	-	-	-	-	-	12,74	12,55	23,34	48,64	1,66
13	Tanah Datar	-	-	-	-	28,82	-	-	-	28,82	0,98
Grand Total		225,05	77,72	269,89	39,86	577,28	959,12	77,78	709,00	2.935,72	100,00

Keterangan: SM (Suaka Margasatwa); CA (Cagar Alam); TN (Taman Nasional); TWA (Taman Wisata Alam); HL (Hutan Lindung); HPT (Hutan Produksi Terbatas); HPT (Hutan Produksi Tetap); HPK (Hutan Produksi yang dapat Dikonversi)

Sumber: Analisis Spasial, 2022

Permukiman yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Malampah Alahan Panjang Kabupaten Pasaman terhitung seluas 214,57 ha yang berlokasi di dua desa yaitu di Nagari Simpang Kecamatan Simpang Alahan Mati seluas 81,19 ha dan di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol seluas 133,38 ha. Sementara permukiman yang terdapat dalam kawasan Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Solok terhitung seluas 10,48 ha yang berlokasi di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang.

Permukiman yang terdapat di kawasan Taman Nasional Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai terhitung seluas 267,22 ha yang berlokasi di 4 nagari yaitu di Nagari Simalegi seluas 100,62 ha dan Nagari Simatalu seluas 107,37 ha (Kecamatan Siberut Barat), Nagari Sagulu seluas 81,19 ha dan di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol seluas 133,38 ha. Sementara permukiman yang terdapat dalam kawasan Suaka Margasatwa Barisan di Kabupaten Solok terhitung seluas 10,48 ha yang berlokasi di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang.



Gambar 6 |Peta Sebaran Permukiman dalam Kawasan Hutan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat

D. Kondisi Lingkungan (State)

D.1. Luas Kawasan Hutan

Sumatera Barat terletak di pesisir Barat pada bagian Tengah Pulau Sumatera dan mempunyai luas wilayah sekitar 42,2 ribu km² yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Memiliki jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Sekitar 56,27% dari luas wilayah administrasi tersebut merupakan kawasan hutan negara sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020. Kawasan hutan Sumatera Barat tersebut terdiri atas kawasan hutan untuk fungsi konservasi, lindung, dan produksi sebagaimana diuraikan pada Tabel 6.

Tabel 6 | Luas Kawasan Hutan Sumatera Barat menurut Fungsinya

No	Fungsi Kawasan Hutan	Luas (ha)	Persentase %
1	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	766.249,29	33,52
2	Kawasan Hutan Lindung (HL)	773.561,51	33,84
3	Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)	229.018,23	10,02

4	Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)	356.819,16	15,61
5	Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)	160.580,38	7,02
Total		2.286.228,57	100,00

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat Sampai Dengan Tahun 2020

Sebagian besar hutan Sumatera Barat berada pada wilayah perbukitan dengan kelerengan yang agak curam sampai dengan sangat curam karena ketinggian Sumatera Barat juga umumnya sangat bervariasi. Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 mdpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 mdpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 mdpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 mdpl tercatat 113.116,6 ha (2,67%), dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 mdpl.

Dengan kondisi topografi tersebut di atas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat memiliki berbagai variasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan lahan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaannya akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.

D.2. Kondisi Tutupan Lahan

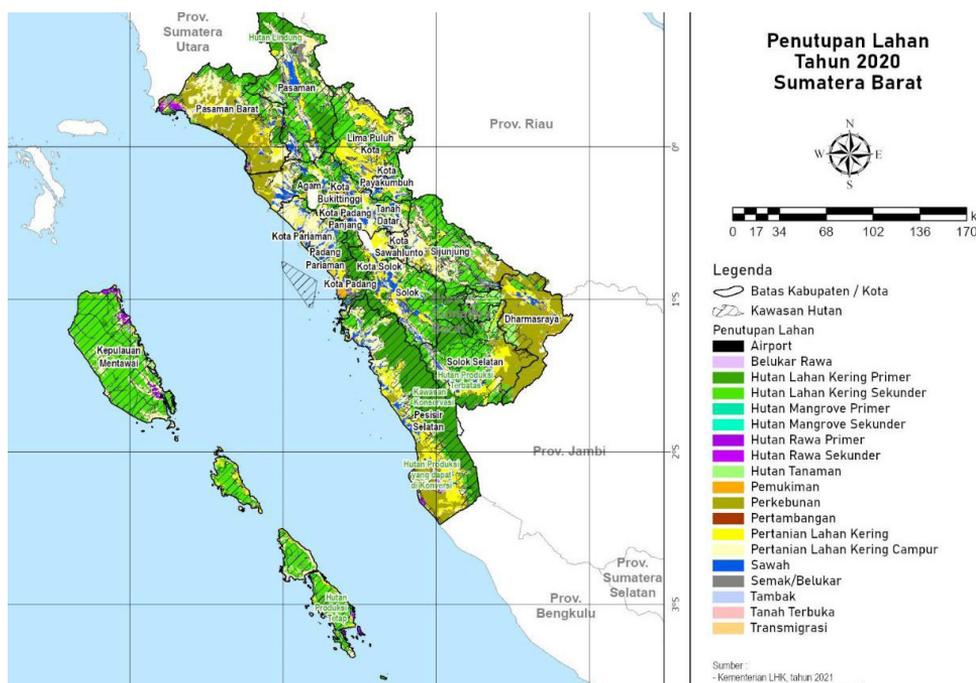
Berdasarkan hasil analisis spasial, kondisi penutupan lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 teridentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) kelas penutupan lahan. Hutan lahan kering sekunder masih mendominasi penutupan lahan seluas 1.202.785 ha atau sebesar 28,30% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari seluas 292.523 ha di kawasan konservasi, seluas 909.539 ha pada kawasan hutan dan seluas 723 ha berupa badan air.

Tabel 7 | Penutupan Lahan Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kawasan Konservasi	Kawasan Hutan	Badan Air	Luas Total	
						ha	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	2001	377.346	214.948	331	592.625	13,94
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	2002	292.523	909.539	723	1.202.785	28,30
3	Hutan Mangrove Primer	2004	602	12.012	25	12.640	0,30
4	Hutan Mangrove Sekunder	20041	-	3.281	67	3.348	0,08
5	Hutan Rawa Primer	2005	-	1.097	-	1.097	0,03
6	Hutan Rawa Sekunder	20051	-	26.313	17	26.331	0,62
7	Hutan Tanaman	2006	-	44.835	121	44.956	1,06
8	Semak/Belukar	2007	23.201	200.332	478	224.012	5,27
9	Belukar Rawa	20071	198	17.881	144	18.224	0,43

10	Pertanian Lahan Kering	20091	14.326	467.255	1.683	483.263	11,37
11	Pertanian Lahan Kering Campur	20092	54.717	665.982	1.397	722.096	16,99
12	Sawah	20093	826	241.126	1.355	243.307	5,72
13	Tambak	20094	-	25	-	25	0,00
14	Perkebunan	2010	775	520.004	1.075	521.854	12,28
15	Pemukiman	2012	613	59.535	220	60.368	1,42
16	Airport	20121	-	434	-	434	0,01
17	Transmigrasi	20122	-	1.564	4	1.567	0,04
18	Tanah Terbuka	2014	1.445	10.316	11	11.772	0,28
19	Pertambangan	20141	-	2.634	5	2.638	0,06
20	Tidak Teridentifikasi	0	37.416	9.492	30.418	77.326	1,82
Grand Total			803.989	3.408.605	38.075	4.250.670	100,00

Sumber: Analisis Spasial, 2022



Gambar 7 |Peta Penutupan Lahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Pada kawasan konservasinya, kondisi penutupan lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 teridentifikasi sebanyak 11 (sebelas) kelas penutupan lahan. Hutan lahan kering primer mendominasi penutupan lahan di kawasan konservasi dengan luas 377.346 ha atau sebesar 46,93% dari luas kawasan konservasi di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari seluas 85.186 ha pada kawasan Suaka Margasatwa, seluas 13.163 ha pada kawasan Cagar

Alam, seluas 1.299 ha pada Kawasan Suaka Alam, seluas 271.646 ha pada kawasan Taman Nasional dan seluas 6.051 ha pada kawasan Taman Wisata Alam.

Tabel 8 | Penutupan Lahan Tahun 2020 pada Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Barat

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kawasan Konservasi					Luas Total	
			SM	CA	KSA	TN	TWA	ha	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	2001	85.186	13.163	1.299	271.646	6.051	377.346	46,93
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	2002	42.415	45.822	2.450	180.609	21.226	292.523	36,38
3	Hutan Mangrove Primer	2004	46	-	-	-	556	602	0,07
4	Semak/Belukar	2007	4.650	7.071	374	10.501	606	23.201	2,89
5	Belukar Rawa	20071	-	-	-	139	59	198	0,02
6	Pertanian Lahan Kering	20091	1.904	1.094	1	11.015	312	14.326	1,78
7	Pertanian Lahan Kering Campur	20092	6.024	5.097	61	40.858	2.676	54.717	6,81
8	Sawah	20093	179	431	55	111	50	826	0,10
9	Perkebunan	2010	11	304	-	450	9	775	0,10
10	Pemukiman	2012	225	78	-	270	40	613	0,08
11	Tanah Terbuka	2014	137	343	21	571	372	1.445	0,18
12	Tidak Teridentifikasi	-	37.170	2	-	244	0	37.416	4,65
Grand Total			177.948	73.405	4.261	516.416	31.959	803.989	100,00

Sumber: Analisis Spasial, 2022

Pada kawasan hutannya, kondisi penutupan lahan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 teridentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) kelas penutupan lahan. Hutan lahan kering sekunder mendominasi penutupan lahan di kawasan hutan dengan luas 909.539 ha atau sebesar 26,68% dari luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari seluas 370.615 ha pada kawasan Hutan Lindung, seluas 136.966 ha pada kawasan Hutan Produksi Terbatas, seluas 218.006 ha pada kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas 49.425 ha pada kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan seluas 134.527 ha pada kawasan Areal Penggunaan Lain.

Tabel 9 | Penutupan Lahan Tahun 2020 pada Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kawasan Hutan					Luas Total	
			HL	HPT	HP	HPK	APL	ha	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	2001	196.182	5.660	2.612	2.226	8.268	214.948	6,31
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	2002	370.615	136.966	218.006	49.425	134.527	909.539	26,68
3	Hutan Mangrove Primer	2004	2.408	-	2.649	1.266	5.689	12.012	0,35

No	Kelas Penutupan Lahan	Kode	Kawasan Hutan					Luas Total	
			HL	HPT	HP	HPK	APL	ha	%
4	Hutan Mangrove Sekunder	20041	741	-	845	337	1.358	3.281	0,10
5	Hutan Rawa Primer	2005	257	-	840	-	1	1.097	0,03
6	Hutan Rawa Sekunder	20051	1.337	-	8.058	12.246	4.673	26.313	0,77
7	Hutan Tanaman	2006	598	6.894	22.449	3.103	11.791	44.835	1,32
8	Semak/Belukar	2007	63.803	19.587	19.578	11.038	86.325	200.332	5,88
9	Belukar Rawa	20071	2.473		2.971	5.722	6.716	17.881	0,52
10	Pertanian Lahan Kering	20091	35.108	18.088	13.222	13.970	386.867	467.255	13,71
11	Pertanian Lahan Kering Campur	20092	83.025	27.650	42.302	36.290	476.715	665.982	19,54
12	Sawah	20093	3.471	496	650	994	235.515	241.126	7,07
13	Tambak	20094	-	-	-	-	25	25	0,00
14	Perkebunan	2010	9.690	12.170	18.537	22.642	456.966	520.004	15,26
15	Pemukiman	2012	580	78	959	709	57.209	59.535	1,75
16	Airport	20121	1	-	-	-	433	434	0,01
17	Transmigrasi	20122	-	-	-	-	1.564	1.564	0,05
18	Tanah Terbuka	2014	2.457	942	1.762	300	4.854	10.316	0,30
19	Pertambangan	20141	4	123	576	84	1.846	2.634	0,08
20	Tidak Teridentifikasi	0	752	178	946	344	7.272	9.492	0,28
Grand Total			773.502	228.832	356.962	160.696	1.888.613	3.408.605	100,00

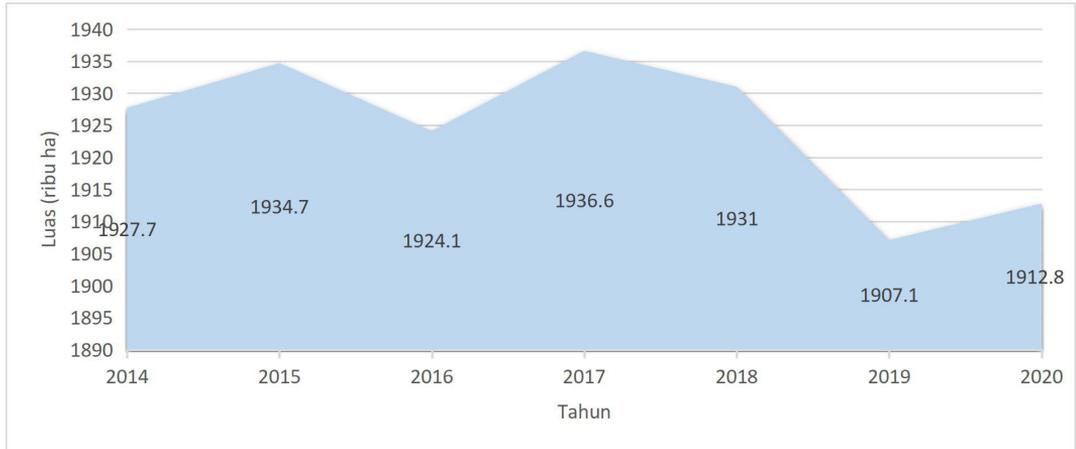
Sumber: Analisis Spasial, 2022

E. Dampak (Impact)

E.1. Deforestasi

Permasalahan utama yang terjadi dalam pengelolaan hutan di Sumatera Barat adalah terjadi deforestasi, sebagai akibat perambahan hutan dan konversi ke lahan perkebunan, pertanian dan penggunaan lain. Intensitas terjadinya perubahan lahan dari hutan ke perkebunan dan pertambangan serta pertanian sampai saat ini masih tinggi.

Berdasarkan data statistik Nasional, luas hutan di Sumatera Barat selama tahun 2014 sampai 2020 terus mengalami penurunan, walaupun secara dinamis terjadi penambahan dan pengurangan. Penurunan luas hutan yang paling tinggi terjadi dari tahun 2018 ke 2019.

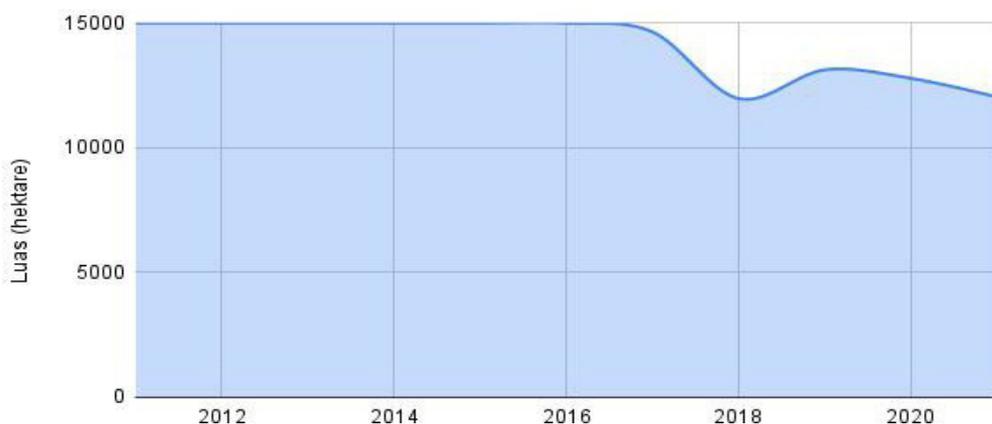


Sumber : Pusat Statistik Nasional

Gambar 8 | Dinamika Luas Hutan di Sumatera Barat

Berdasarkan kondisi tutupan lahannya menurut data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017), Sumatera Barat masih memiliki tutupan lahan berhutan sebesar 46%, yang terdiri atas 14% hutan primer, 31,6% hutan sekunder, dan 0,4% hutan tanaman. Meskipun demikian, sekitar 648.090 ha lahan di dalam dan luar kawasan hutan dilaporkan berada pada tingkat kritis dan sangat kritis.

Luas Hutan di Sumatera Barat terus menurun. Pada periode 2011-2021, provinsi Sumatera Barat kehilangan 139.590 hektar. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Sumatera Barat pada tahun 2017, laju kerusakan rata-rata sekitar 14.652 hektar. Pada 2018, turun jadi 11.979 hektar. Kemudian, 2019 naik lagi jadi 13.132 hektar. Tahun berikutnya, ada 12.790 hektar hutan hilang dan 2021 sebesar 12.037 ha.



Sumber: Dinas Kehutanan Tahun 2017

Gambar 9 | Laju Kerusakan Hutan Sumatera Barat Tahun 2012-2010

Berdasarkan data sebaran deforestasi di dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat selama periode tahun 2019-2020, tercatat seluas 705,78 ha yang sebagian besar terjadi pada fungsi Kawasan Konservasi sebesar 39,37% atau seluas 277,87 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10 | Sebaran Deforestasi di Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2020

No	Fungsi Kawasan	Luas Deforestasi (ha)	Persentase
1	Hutan Lindung	126,27	17,89%
2	Hutan Produksi Terbatas	101,85	14,43%
3	Hutan Produksi Tetap	66,18	9,38%
4	Hutan Produksi yang dapat di Konversi	133,60	18,93%
5	Kawasan Konservasi	277,87	39,37%
Total		705,78	100,00%

Sumber: Analisis Spasial, 2022

E.2. Penurunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Praktek konversi hutan alam untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seringkali menjadi penyebab utama bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu juga mengakibatkan hilangnya sejumlah sumber air, sehingga memicu kekeringan, peningkatan suhu, dan gas rumah kaca yang mendorong terjadinya bencana alam.

Dampak negatif bertambah serius karena dalam praktek pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi pada kawasan hutan konversi, melainkan juga dibangun pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, dan bahkan di kawasan konservasi yang memiliki ekosistem yang unik dan mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi.

Permasalahan tersebut akan berdampak pula pada penurunan kualitas jasa ekosistem yang terdapat di Hutan, seperti tata air, sumber air bersih, pangan, sumberdaya genetik dan lain sebagainya. Hilangnya tutupan hutan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti berkurangnya keanekaragaman hayati di luar dan dalam kawasan konservasi, meningkatnya emisi gas rumah kaca serta dapat meningkatkan suhu bumi secara global.

E.3. Perubahan Iklim Mikro

Aktivitas perkebunan yang membuka kawasan hutan akan berdampak pada kerusakan dan degradasi hutan dan menyebabkan perubahan iklim dengan dua cara. Pertama, menggunduli dan membakar hutan melepaskan karbondioksida ke atmosfer dan Kedua, wilayah hutan yang berfungsi sebagai penyerap karbon berkurang. Peran hutan dalam mengatur iklim sangat penting.

Dampak lainnya adalah pencemaran udara pada saat pembukaan lahan. Pencemaran yang diakibatkan oleh asap hasil dari pembukaan lahan dengan cara pembakaran dan pembuangan limbah, merupakan cara-cara perkebunan yang meracuni makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama.

E.4. Konflik Lahan

Secara sosial yang sering muncul adalah terjadinya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar baik yang disebabkan oleh konflik kepemilikan lahan atau karena limbah yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit. Dampak negatif tersebut akan terus berlangsung jika pemerintah dan pemerhati lingkungan tidak segera mengambil tindakan dan memberikan solusi yang tepat.

F. Respons

Menyikapi berbagai dampak yang telah terjadi, pemerintah Sumatera Barat, dalam hal ini Dinas Kehutanan Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya-upaya dalam bentuk program-program kegiatan terstruktur dan terencana. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 Dinas Kehutanan telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi laju kerusakan hutan dengan sasaran sosial ekonomi masyarakat serta kestabilan hutan secara ekologi.

F.1. Program Pemantapan Kawasan Hutan

Program pemantapan kawasan hutan ditujukan untuk penyelesaian konflik penggunaan kawasan hutan oleh masyarakat. Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan lainnya seperti pemukiman dan perkebunan. Beberapa bentuk kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

1. Pemeliharaan batas kawasan hutan.
2. Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada beberapa KPH di Sumbar
3. Sosialisasi, identifikasi hutan adat dan penanganan konflik.

4. Supervisi dan koordinasi pelaksanaan pengendalian penggunaan lahan dan pemanfaatan kawasan hutan.

F.2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program ini dilaksanakan dalam upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi dan pendapatan daerah. Pemanfaatan sumber daya hutan yang terencana dan berkesinambungan yang didasarkan oleh daya dukung hutan akan memberikan hasil secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat tanpa mengurangi fungsi hutan secara ekologis. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya :

1. Pembinaan dan pengembangan hasil hutan bukan kayu dan industri kehutanan pada beberapa wilayah kelola KPH di Sumatera Barat.
2. Pengelolaan potensi hutan pada beberapa wilayah kelola KPH di Sumatera Barat.
3. Membangun kemitraan dengan berbagai mitra usaha hasil hutan di Sumatera Barat.

F.3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Merupakan program yang ditujukan untuk melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap upaya-upaya pengrusakan hutan dan pencurian hasil hutan yang dapat menimbulkan degradasi lahan hutan dan deforestasi. Diantara kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan hutan dengan membentuk pokja di berbagai wilayah kelola KPH di Sumatera Barat.
2. Melaksanakan patroli dan operasi fungsional polisi pada beberapa wilayah kelola KPH di Sumatera Barat.
3. Fasilitasi pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) pada beberapa daerah potensial di Sumatera Barat.

Selama program ini berjalan, dinas kehutanan sudah banyak menggagalkan upaya ilegal logging dan upaya hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. Disamping itu Dinas Kehutanan Sumatera Barat sudah menginisiasi terbentuknya enam Kawasan Ekosistem Esensial di Sumatera Barat, yaitu Kinali Pasaman Barat, Danau Belibis Kota Solok, Sirukam Solok, Padang Panjang, Sambungo Pesisir Selatan dan Koridor Satwa Solok Selatan.

F.4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Merupakan program yang melaksanakan kegiatan pemulihan lahan-lahan hutan yang terdegradasi dengan berbagai upaya, diantara yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pembuatan bibit tanaman hutan
2. Penanaman bibit tanaman hutan dan HHBK pada beberapa wilayah kelola KPH dalam berbagai bentuk event
3. Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan

Jika dilihat dari tingkat ketercapaian selama lima tahun Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan rehabilitasi hutan dan lahan seluas ± 79.821 Ha atau 21,4% dari luas lahan kritis Sumatera Barat. Pencapaian ini telah melebihi target capaian kinerja Provinsi Sumatera Barat dari sektor kehutanan yang tertuang dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2010-2015 yaitu luas penurunan lahan kritis sebesar 15,9% dari luas lahan kritis Sumatera Barat dengan persentase capaian kinerja 135%.



Sumber : Sumbarprov.go.id

Gambar 10 | Laju Penurunan Lahan Kritis di Sumatera Barat

F.5. Program Perhutanan Sosial

Merupakan program unggulan dan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Kondisi sosial masyarakat Sumatera Barat yang unik, berbeda dengan daerah lain dalam pandangan kepemilikan lahan dapat memicu konflik dengan pemerintah dan menyulitkan dalam pengamanan kawasan hutan. Dinas kehutanan memberikan peluang kepada kelompok masyarakat setempat untuk mengelola hutan di wilayah mereka melalui skema HTR, HN dan HKm. Diantara kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan pengelolaan hutan mangrove pada beberapa wilayah KPH Sumatera Barat.
2. Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat.
3. Pembinaan dan pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada beberapa KPH di Sumatera Barat.
4. Pembangunan usaha produksi ternak lebah madu, gula aren, minuman herbal, pasak bumi, rotan dan ekowisata pada beberapa Hutan Nagari di Sumatera Barat.

Program perhutanan sosial di Sumatera Barat telah memberikan hak pengelolaan hutan kepada 169 kelompok masyarakat/lembaga dengan luas mencapai 236.900 ha.

F.6. Program Rehabilitasi Lahan

Disamping Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan juga telah melaksanakan berbagai program di Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan tutupan hutan di hutan lindung dan lahan das prioritas, meningkatkan kesehatan DAS prioritas serta meningkatkan sumbangan hutan lindung dan hutan rakyat pada devisa dan penerimaan negara, meminimalkan dampak dari deforestasi dan degradasi lahan hutan. Berbagai program yang telah dilaksanakan BPDASHL Agam Kuantan diantaranya adalah:

1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Selama tahun 2020, BPDASHL Agam Kuantan telah melaksanakan RHL seluas 1.015 ha pada beberapa hutan lindung dan hutan produksi di Sumatera Barat.
2. Penyediaan bibit berkualitas dan bibit produktif melalui pembangunan persemaian permanen. Persemaian permanen dibangun pada dua lokasi yaitu Bukittinggi dan Solok. Dalam tahun 2020 saja telah dihasilkan dan dibagikan bibit berkualitas sebanyak 1.500.000 batang.
3. Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) pada berbagai lokasi dan kelompok masyarakat di Sumatera Barat. Tahun 2020 telah dibangun 14 unit KBR/KBD dan telah dihasilkan bibit produktif sebanyak 20.000 batang.

BAB 03



RENJA AKSI MITIGASI 2022 - 2030

BAB III | RENCANA KERJA AKSI MITIGASI 2022 – 2030

Arahan dalam data spasial untuk Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 terhitung seluas 1.044.126,60 ha yang tersebar ke dalam sembilan aksi mitigasi yang terdiri dari Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral pada areal seluas 6.737,18 ha; Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi pada areal seluas 4.794,04 ha; Pembangunan Hutan Tanaman pada areal seluas 4.658,28 ha; Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) pada areal seluas 135.251,09 ha; Penerapan RIL-C pada areal seluas 2.170,55 ha; Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi pada areal seluas 45.834,41 ha; Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi pada areal seluas 22.042,80 ha; Pengelolaan Tata Air Gambut pada areal seluas 13.017,92 ha; dan Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada areal seluas 809.620,32 ha.

Data analisis perbandingan ini dapat memberikan informasi dan justifikasi pelaksanaan agenda FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari pelaporan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa, terdapat beberapa lokasi arahan nasional yang tidak digunakan oleh sub-nasional dengan beberapa justifikasi, seperti adanya perbedaan batas wilayah provinsi, perpindahan lokasi sasaran untuk beberapa aksi mitigasi, perbedaan batas kawasan hutan dengan areal penggunaan lain, dan justifikasi lainnya yang berbeda antara arahan dari nasional dengan arahan dari sub-nasional. Hasil analisis dari data perbandingan arahan luas area sasaran FOLU Net Sink 2030 menurut aksi mitigasinya selengkapnya disajikan pada Tabel 11. Sementara peta- peta hasil analisis perbandingan data nasional dengan sub-nasional selengkapnya disajikan pada bagian lampiran.

Tabel 11 | Perbandingan Luas Area Sasaran FOLU Net Sink 2030 Menurut Aksi Mitigasi Berdasarkan Arahan Nasional dan Arahan Sub-Nasional di Provinsi Sumatera Barat

No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahan Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
1	2	3	4	5	6
R01	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral	6.737,18	3.390,07	3.347,11	Arahan R01 dari nasional lebih luas 3.347,11 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan R01 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 3.116,61 ha. Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 3.620,39 ha, dan seluas 3.505,83 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 275,71 ha. Peta Gap R01 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 1.
R02	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut	-	-	-	Tidak terdapat arahan R02 baik dari nasional maupun dari sub nasional untuk Sumatera Barat.
R03	Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi	4.794,04	2.175,74	2.618,30	Arahan R03 dari nasional lebih luas 2.618,30 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan R03 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 2.167,96 ha. Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 2.624,52 ha, dan seluas 20,10 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 7,65 ha. Peta Gap R03 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 2.
R04	Pembangunan Hutan Tanaman	4.658,28	-	4.658,28	Terdapat arahan R04 dari nasional untuk Sumatera Barat seluas 4.658,28 ha. Namun tidak terdapat arahan untuk sub nasional.

No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahkan Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
R05	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)	135.251,09	131.294,59	3.956,50	Arahan R05 dari nasional lebih luas 3.956,50 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan R05 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 16.404,12 ha. Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 5.014,39 ha, dan seluas 19,34 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 114.752,42 ha. Peta Gap R05 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 3.
R06	Penerapan RIL-C	2.170,55	130.923,68	(128.753,13)	Arahan sub nasional untuk R06 masih bertampalan dengan R05. Sehingga luasan antara R05 dan R06 pada arahan sub nasional tidak jauh berbeda dan gap pada R06 lebih luas dari arahan nasional. Areal arahan R06 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 2.167,96 ha. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 128.613,32 ha. Peta Gap R06 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 4.
R07	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi	45.834,41	34.072,07	11.762,34	Arahan R07 dari nasional lebih luas 11.762,34 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan R07 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 35.123,75 ha. Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 10.696,26 ha, dan seluas 13,67 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 8.178,05 ha. Peta Gap R07 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 5.

No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahan Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
R08	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi	22.042,80	7.751,22	14.291,58	Arahan R08 dari nasional lebih luas 14.291,58 ha dari arahan sub nasional. Tidak ada areal arahan R08 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional. Artinya, untuk aksi mitigasi R08, lokasi yang dipilih tidak berdasarkan arahan nasional. Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 22.051,69 ha, dan seluas 686,07 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 7.766,18 ha. Peta Gap R08 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 6.
R09	Pengelolaan Tata Air Gambut	13.017,92	-	13.017,92	Terdapat arahan R09 dari nasional untuk Sumatera Barat seluas 13.017,92 ha. Namun tidak terdapat arahan untuk sub nasional.
R010	Pelaksanaan Restorasi Gambut	-	-	-	Tidak terdapat arahan R010 baik dari nasional maupun sub nasional untuk Sumatera Barat.
R011	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	809.620,32	805.609,83	4.010,49	Arahan R011 dari nasional lebih luas 4.010,49 ha dari arahan sub nasional. Areal arahan R011 yang bersesuaian antara arahan nasional dengan arahan sub-nasional terhitung seluas 783.215,51 ha. Areal yang terdapat pada arahan nasional namun tidak ada pada arahan sub-nasional terhitung seluas 26.271,59 ha, dan seluas 9.039,79 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Areal yang terdapat pada arahan sub-nasional namun tidak ada pada arahan nasional terhitung seluas 23.937,69 ha, dan seluas 2.415,07 ha-nya berada di wilayah administrasi Provinsi Riau. Peta Gap R011 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 7.

No	Aksi Mitigasi	Luas Menurut Arahan Spasial (ha)			Keterangan Hasil Analisis Perbandingan
		Nasional	Sub Nasional	Gap	
R012	Pengelolaan Mangrove	-	1,61	(1,61)	Tidak ada arahan R012 dari nasional. Namun terdapat arahan sub nasional seluas 2,29 ha untuk R012 di Sumatera Barat. Arahan untuk R012 disesuaikan dengan Peta Mangrove Nasional dan terdapat areal seluas 0,56 ha pada arahan R012 dari sub nasional yang bersesuaian dengan Peta Mangrove Nasional. Peta Gap R012 Arahan Peta Mangrove Nasional dengan Arahan Sub-Nasional disajikan pada Lampiran 8.
Total		1.044.126,60	1.115.218,81	(71.092,22)	Arahan sub nasional lebih luas 71.092,22 ha dari arahan nasional. Salah satu penyebabnya adalah karena arahan sub nasional untuk aksi ENR dengan RIL-C masih berada pada lokasi yang bertampalan.

Sumber: Rencana Operasional FOLU Net Sink 2030, 2022;
Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; Analisis Data, 2022

A. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral

Di wilayah APL, perlindungan hutan alam dari deforestasi memiliki peranan penting karena statusnya yang dapat dikonversi sesuai dengan kewenangan daerah. Konversi hutan alam, terutama di wilayah APL dan HPK, dapat terjadi untuk kegiatan non-kehutanan.

Pengendalian deforestasi melalui upaya pemberdayaan ekonomi dan pembinaan masyarakat dengan melibatkan semua pihak terkait terutama pada area dengan tingkat risiko emisi tinggi (IPL tinggi) harus ditingkatkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian deforestasi membutuhkan kontribusi dari seluruh pemangku kawasan. Kontribusi dari masing-masing pemangku kawasan berupa kegiatan pemberdayaan ekonomi dan pembinaan masyarakat dilakukan pada wilayah sasaran yang ditetapkan secara koordinatif, terutama pada wilayah dengan risiko deforestasi tinggi. Keberadaan kelembagaan di tingkat tapak yang kuat diperlukan dalam memfasilitasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan secara bersinergi dan koordinatif.

A.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk pengurangan laju deforestasi lahan mineral seluas 3.392,21 ha pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 4,84 ha pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 12 dan seluas 3.387,37 ha pada areal yang belum memiliki izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 15.

A.1.1. Areal Berizin

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, PT. Multikarya Lisun Prima menjadi satu-satunya pemegang izin pada areal seluas 4,84 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung yang memiliki arahan untuk aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral.

Tabel 12 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

Pemegang Izin	Kab.	Kec.	Nagari	Tuplah 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					APL	HPK	
PT Multikarya Lisun Prima	Sijunjung	Kamang Baru	Padang Tarok	Hutan Lahan Kering Primer	-	1,95	1,95
				Hutan Lahan Kering Sekunder	-	1,95	1,95
		Sumpur Kudus	Unggan	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,94	-	0,94
Total					0,94	3,90	4,84

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 13 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan												
Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Laju deforestasi berkurang, masyarakat semakin sadar dan pertanian menetap	ha	1,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Sumber: PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

Tabel 14 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan									

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Laju deforestasi berkurang, masyarakat semakin sadar dan pertanian menetap	ha	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Sumber: PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

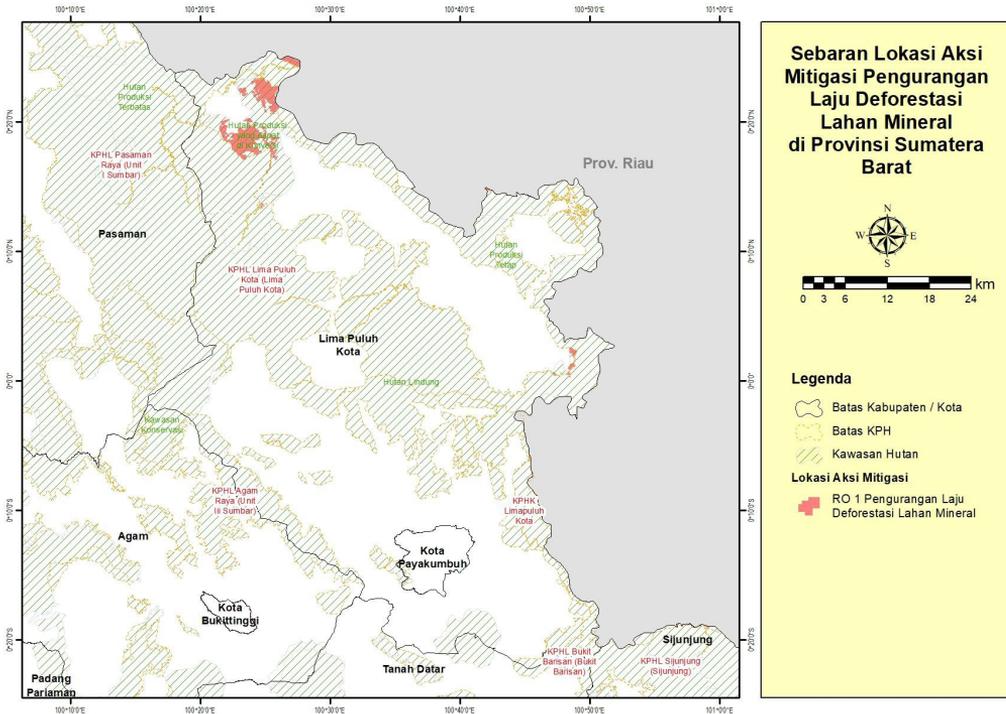
A.1.2. Areal Tidak Berizin

Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral yang paling luas terletak pada tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder di Nagari Galugur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 2.172,43 ha dan yang paling sempit terletak di Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman yang luasnya hanya 0,93 ha.

Tabel 15 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HL	HPK	HPT	
1	Dharmasraya	Timpeh	Panyubarangan	HLK Sekunder	-	-	2,32	-	2,32
2	Lima Puluh Kota	Harau	Sarilamak	HLK Sekunder	-	-	-	6,08	6,08
				Kapur IX	Galugur	HLK Primer	-	-	285,49
		HLK Sekunder	-			-	2.172,43	-	2.172,43
		Sialang	HLK Sekunder		-	-	719,24	-	719,24
		Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	HLK Sekunder	16,75	-	-	-	16,75
Manggilang	HLK Sekunder		-	-	167,65	-	167,65		
3	Pasaman	Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	HLK Sekunder	0,93	-	-	-	0,93
			Silayang	HLK Sekunder	1,24	-	-	-	1,24
4	Sijunjung	Sumpur Kudus	Unggan	HLK Sekunder	15,24	-	-	-	15,24
Total					36,16	-	3.347,13	6,08	3.387,37

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022



Gambar 11 |Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Provinsi Sumatera Barat

A.2. Intervensi BPSK

Berdasarkan arahan dari BPSKL Wilayah Sumatera, terdapat arahan pada hutan lahan kering sekunder yang merupakan lokasi definitif perhutanan sosial untuk Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Provinsi Sumatera Barat seluas 0,19 ha atas nama LPHD Sialang di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 16 |Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Arahan PIAPS

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
						APL	HL	HPK	HPT	
1	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Sialang	PPHD	HLK Sekunder	-	-	0,19	-	0,19
Total						-	-	0,19	-	0,19

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Hektar	134	134	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat												
Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	RKPS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	KUPS	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Program Kemitraan Lingkungan												
Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	Tenaga Pendamping	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PKS	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

Table 19 | Target Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral pada Areal

Definitif PS pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Kemitraan Lingkungan									

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	orang	2	2	2	2	2	2	2
Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PKS	2	1	1	1	1	1	1

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

Tabel 20 | Target Program dan Kegiatan Aksi Mitigasi Pencegahan Deforestasi di Tanah Mineral pada Areal

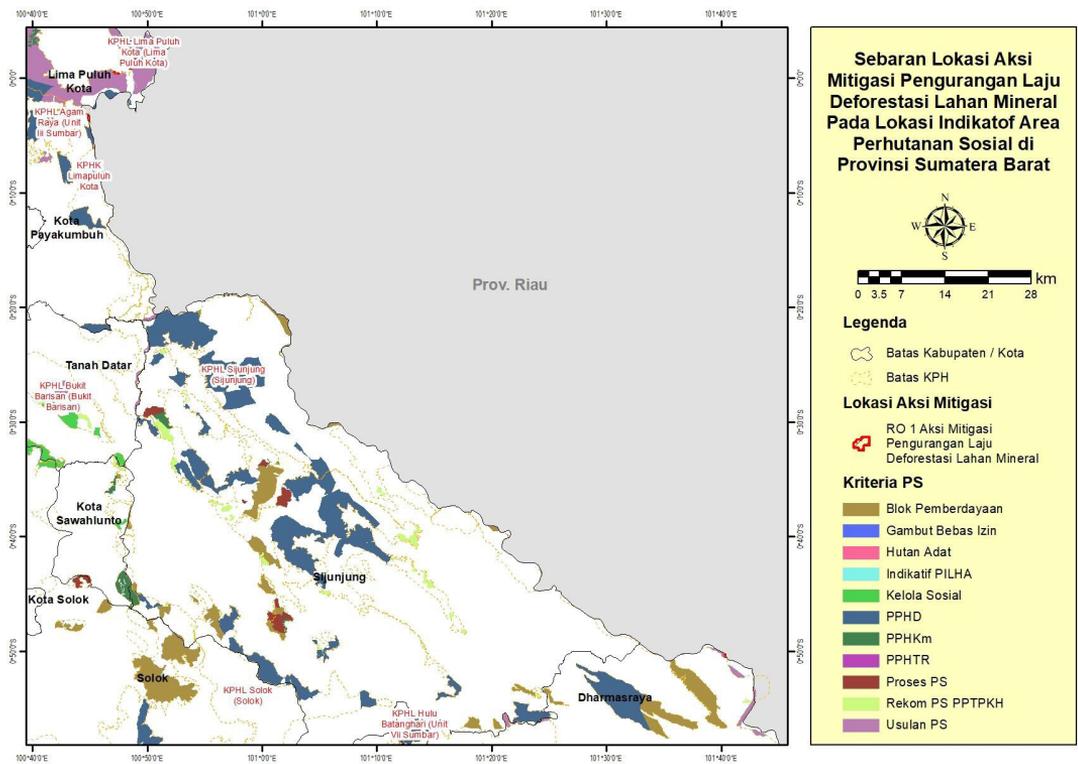
Indikatif PS pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Kemitraan Lingkungan									
Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	orang	1	1	1	1	1	1	1
Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PKS	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

B. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, tidak terdapat arahan spasial yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk pengurangan laju deforestasi lahan gambut pada Sub Nasional Sumatera Barat.



Gambar 12 |Peta Sebaran Lokasi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral pada Lokasi Indikatif Area Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

C. Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi

Penyelamatan hutan primer dari degradasi akibat kegiatan penebangan atau pemanenan kayu di area konsesi merupakan salah satu kegiatan penurunan emisi GRK. Di dalam Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk menuju net sink (LTS-LCCP), pencegahan degradasi hutan primer menjadi hutan sekunder di area konsesi merupakan salah satu kontribusi penting pihak swasta di area perizinan PBPH untuk pencapaian target *net sink*.

C.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi seluas 286,98 ha pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 283,39 ha pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 21 dan seluas 3,58 ha pada areal yang belum memiliki izin yang seluruhnya terletak di Kabupaten Dharmasraya.

C.1.1. Areal Berizin

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 2 (dua) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 282,16 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan PT. Multikarya Lisun Prima seluas 1,95 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 21 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

No	Pemegang Izin	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HP	HPK	
1	PT Multikarya Lisun Prima	Sijunjung	Kamang Baru	Padang Tarok	Hutan Lahan Kering Primer	-	1,00	1,00
2	PT Salaki Summa Sejahtera	Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Bojakan	Hutan Lahan Kering Primer	31,27	-	31,27
				Malancan	Hutan Lahan Kering Primer	251,12	-	251,12
Total						282,39	1,00	283,39

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Sebagai aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi, PBPH atas nama PT. Multikarya Lisun Prima di Kabupaten Sijunjung, juga melakukan strategi berupa pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan akan pentingnya menjaga hutan mengingat masih terdapat tutupan hutan lahan kering primer seluas 1,00 ha di Nagari Padang Tarok Kecamatan Kamang Baru yang harus dipertahankan keberadaannya. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Multikarya Lisun Prima dalam mendukung aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi di areal izinnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 22 | Lokasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima

No	Kecamatan	Nagari	Tuplah 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	Tahun RKT
				APL	HPK		
1	Kamang Baru	Padang Tarok	Hutan Lahan Kering Primer	-	1,00	1,00	2022 - 2030
Total				-	1,00	1,00	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 23 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan												
Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Laju deforestasi berkurang, masyarakat semakin sadar dan pertanian menetap	ha	0,8	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Sumber: PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

Tabel 24 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan									
Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Laju deforestasi berkurang, masyarakat semakin sadar dan pertanian menetap	ha	0,2	0,2	-	-	-	-	-

Sumber: PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

C.1.2. Areal Tidak Berizin

Sementara pada areal yang belum memiliki izin, arahan lokasi aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi terletak di Kabupaten Dharmasraya Kecamatan Asam Jujuhan Nagari Lubuk Besar dengan tutupan lahan tahun 2020 berupa hutan lahan kering primer seluas 3,58 ha. Namun sebagian besarnya terletak pada fungsi APL, sehingga kewenangannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 25 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					APL	HP	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Hutan Lahan Kering Primer	3,29	0,30	3,58
Total					3,29	0,30	3,58

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

C.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Arahan spasial aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi yang terdapat di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) terdapat pada Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK yang luasannya hanya 2,00 ha dan merupakan area konsesi BBPH-HA atas nama PT. Multikarya Lisun Prima sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 26 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
							HPT	
1	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK	PT Multikarya Lisun Prima	Sijunjung	Kamang Baru	Padang Tarok	Hutan Lahan Kering Primer	2,00	2,00
Total							2,00	2,00

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 27 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi												
Sosialisasi target lokasi RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

C.3. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

Arahan spasial aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi yang terdapat di wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) terdapat pada fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 1.886,77 ha di Unit X sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 28 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

No	Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
							HP	
1	Unit X	PT Salaki Summa Sejahtera	Kepulauan Mentawai	Siberut Utara	Bojakan	Hutan Lahan Kering Primer	522,96	522,96
					Malancan	Hutan Lahan Kering Primer	1.158,13	1.158,13
					Sotboyak	Hutan Lahan Kering Primer	204,06	204,06
2	N/A	N/A		Siberut Tengah	Saibi Samukop	Hutan Mangrove Primer	1,61	1,61
Total							1.886,77	1.886,77

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 29 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024

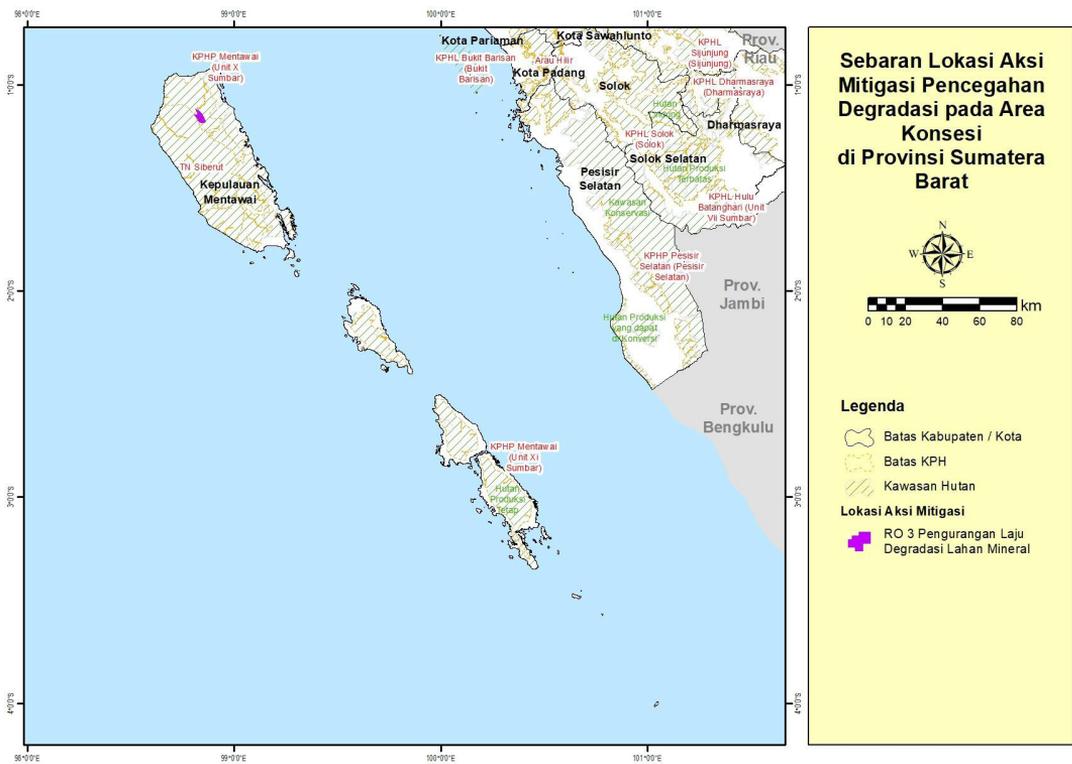
Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi												
Sosialisasi target lokasi RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari	kegiatan	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

D. Pembangunan Hutan Tanaman

Kegiatan perluasan hutan tanaman merupakan aksi penting yang ditujukan untuk memenuhi permintaan kayu industri (domestik dan internasional) dan menurunkan dependensi produksi kayu dari hutan alam.

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, tidak ditemukan adanya arahan spasial yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk pembangunan hutan tanaman pada Sub Nasional Sumatera Barat.



Gambar 13 | **Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Provinsi Sumatera Barat**

E. Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)

Target penurunan emisi GRK pada NDC melalui kegiatan pengelolaan hutan lestari sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dimana penurunan emisi dapat terjadi melalui penerapan teknologi penebangan dengan tingkat kerusakan tegakan dan keterbukaan wilayah minimal.

Hal ini sejalan dengan indikator 2.4 PHL (Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu). Karena itu, indikator 2.4 harus menjadi indikator penting yang diperhatikan dalam proses pemberian sertifikasi. Merujuk pada peraturan tersebut, penurunan emisi melalui PHL dapat terjadi melalui upaya pengayaan (*Enhanced Natural Regeneration*, ENR) apabila kondisi tegakan hutan setelah tebangan mengalami degradasi berat atau berada pada tingkat yang tidak memungkinkan regenerasi alami dapat menjamin keberlanjutan produksi.

E.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) seluas 3.897,95 ha pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 1.965,66 ha pada areal yang telah berizin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 30 dan seluas 1.932,29 ha pada areal yang belum berizin sebagaimana disajikan pada Tabel 34.

E.1.1. Areal Berizin

Arahan ENR pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 817,32 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 1.076,53 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; serta PT. Multikarya Lisun Prima seluas 71,81 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 30 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

No	Pemegang Izin [Kabupaten]	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)	
					APL	HP	HPK		
1	PT Minas Pagai Lumber [Kepulauan Mentawai]	Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	4,89	-	-	4,89	
			Makalo	HLK Sekunder	0,17	-	-	0,17	
			Malakopa	HLK Sekunder	36,82	-	-	36,82	
			Sinaka	HLK Sekunder	5,05	47,68	-	52,74	
		Pagai Utara	Betumonga	HLK Sekunder	-	251,09	-	251,09	
			Saumanganya	HLK Sekunder	19,65	-	-	19,65	
			Silabu	HLK Sekunder	6,11	104,83	-	110,94	
		Sikakap	Matobe	HLK Sekunder	3,49	-	-	3,49	
			Sikakap	HLK Sekunder	4,75	106,64	-	111,39	
			Taikako	HLK Sekunder	9,94	216,20	-	226,14	
Sub Total PT Minas Pagai Lumber					90,88	726,44	-	817,32	
2	PT Multikarya Lisun Prima	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	2,05	-	-	2,05	
			Padang Tarok	HLK Sekunder	-	-	66,02	66,02	
	[Sijunjung]		Tanjung Kaling	HLK Sekunder	3,74	-	-	3,74	
	Sub Total PT Multikarya Lisun Prima					5,79	-	66,02	71,81
	[Sijunjung]		Tanjung Kaling	HLK Sekunder	3,74	-	-	3,74	
	Sub Total PT Multikarya Lisun Prima					5,79	-	66,02	71,81

No	Pemegang Izin [Kabupaten]	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)		
					APL	HP	HPK			
3	PT Salaki Summa Sejahtera [Kepulauan Mentawai]	Siberut Barat	Sigapokna	HLK Sekunder	1,42	0,68	-	2,10		
			Simalégi	HLK Sekunder	-	125,67	-	125,67		
		Siberut Utara	Bojakan	HLK Primer	-	31,27	-	31,27		
				HLK Sekunder	-	210,84	-	210,84		
			Malancan	HLK Primer	-	251,12	-	251,12		
				HLK Sekunder	-	382,09	5,65	387,74		
				Hutan Rawa Sekunder	-	7,28	-	7,28		
			Sotboyak	HLK Sekunder	-	59,10	1,41	60,51		
		Sub Total PT Salaki Summa Sejahtera					1,42	1.068,06	7,06	1.076,53
		Total					98,09	1.794,49	73,08	1.965,66

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Sebagai aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR), PBPH atas nama PT. Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga melakukan strategi berupa pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) di wilayah APL dan pengayaan tanaman di wilayah Hutan Produksi Tetap (HP). Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Minas Pagai Lumber dalam mendukung aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) di areal izinnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 31 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	Tahun RKT
				APL	HP		
1	Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	4,89	-	4,89	2022
		Makalo	HLK Sekunder	0,17	-	0,17	2022
		Malakopa	HLK Sekunder	36,82	-	36,82	2026
		Sinaka	HLK Sekunder	5,05	47,68	52,73	2026
	Pagai Utara	Betumonga	HLK Sekunder	-	251,09	251,09	2023
		Saumanganya	HLK Sekunder	19,65	-	19,65	2023
		Silabu	HLK Sekunder	6,11	104,83	110,94	2024
	Sikakap	Matobe	HLK Sekunder	3,49	-	3,49	2024
		Sikakap	HLK Sekunder	4,75	106,64	111,39	2025
		Taikako	HLK Sekunder	9,94	216,20	226,14	2025
Sub Total PT Minas Pagai Lumber				90,88	726,44	817,32	

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 32 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Sosialisasi PHBM												
Penyuluhan dan Penanaman [batang]	Prosen tumbuh	batang	11.700	-	7.860	-	-	-	-	-	2.444	1.396
					7.860				3.840			
Program Pengayaan Tanaman												
Penanaman Permudaan Alam [batang]	Prosen tumbuh	batang	142.368	-	-	-	100.436	-	-	-	41.932	-
					100.436				41.932			

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Tabel 33 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Sosialisasi PHBM									
Penyuluhan dan Penanaman [batang]	Prosen tumbuh	batang	22.624	5.876	16.748	-	-	-	-
Program Pengayaan Tanaman									
Penanaman Permudaan Alam [batang]	Prosen tumbuh	batang	148.208	129.136	19.072	-	-	-	-

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022

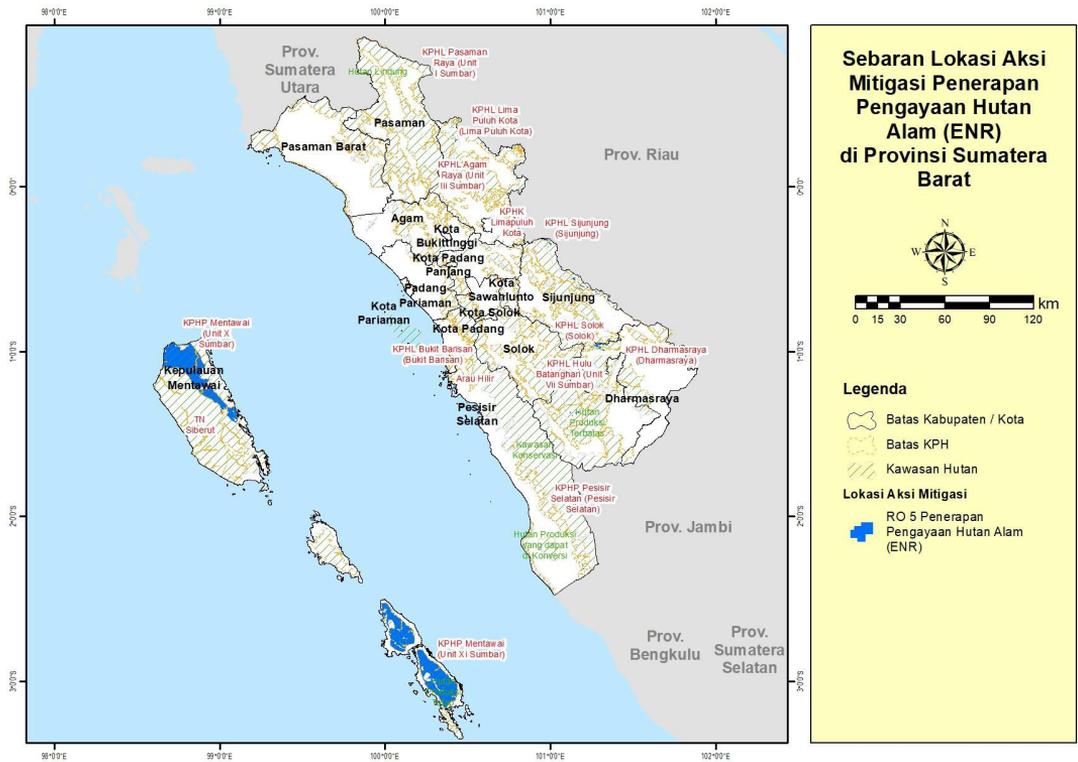
E.1.2. Areal Tidak Berizin

Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) yang paling luas terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 1.853,34 ha dan yang paling sempit terletak di Kabupaten Solok Selatan seluas 1,55 ha.

Tabel 34 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
					APL	HP	HPK	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	HLK Primer	3,29	0,30	-	3,58
		Sembilan Koto	Banai	HLK Sekunder	-	-	5,63	5,63
			Koto Nan Empat Dibawah	HLK Sekunder	45,89	-	-	45,89
	Sub Total Dharmasraya					49,18	0,30	5,63
2	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Sigapokna	Hutan Rawa Sekunder	-	0,71	-	0,71
			Simalegi	HLK Sekunder	-	2,68	-	2,68
		Siberut Tengah	Cimpungan	HLK Sekunder	-	739,31	-	739,31
			Saibi Samukop	HLK Sekunder	-	46,31	-	46,31
		Siberut Utara	Bojakan	HLK Sekunder	-	589,78	-	589,78
			Sotboyak	HLK Sekunder	-	474,55	-	474,55
Sub Total Kepulauan Mentawai					-	1.853,34	-	1.853,34
3	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Galugur	HLK Sekunder	-	-	1,71	1,71
			Sialang	HLK Sekunder	-	-	20,38	20,38
		Pangkalan Koto Baru	Manggilang	HLK Sekunder	-	-	0,20	0,20
Sub Total Lima Puluh Kota					-	-	22,29	22,29
4	Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling	HLK Sekunder	-	-	1,55	1,55
	Sub Total Solok Selatan					-	-	1,55
Total					49,18	1.853,64	29,47	1.932,29

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022



Gambar 14 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Provinsi Sumatera Barat

E.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) yang terdapat di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) terdapat pada 3 blok berbeda dengan total seluas 464,32 ha dan salah satunya merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Multikarya Lisun Prima seluas 364,64 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 35 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HP	HPT	
1	HP Pemanfaatan HHK-HT	N/A	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	94,55	-	94,55
				Muaro Takuang	HLK Sekunder	0,12	-	0,12
2	HP Pemberdayaan Masyarakat	N/A	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	5,01	-	5,01

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HP	HPT	
3	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK	PT Multikarya Lisun Prima	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder		23,07	23,07
				Padang Tarok	HLK Primer		2,00	2,00
					HLK Sekunder		136,15	136,15
			Tanjung Kaliang	HLK Sekunder		24,93	24,93	
			Sijunjung	Durian Gadang	HLK Sekunder		32,06	32,06
Sumpur Kudus	Unggan	HLK Sekunder		146,44	146,44			
Total						99,68	364,64	464,32

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 36 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam												
Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari	kegiatan	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

E.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) yang terdapat di wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) terdapat pada 3 blok berbeda dengan total seluas 509,68 ha dan pada Blok HP Pemanfaatan HHK-HA dan HP Pemberdayaan Masyarakat merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Andalas Merapi Timber sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					HP	HPT	
HP Pemanfaatan HHK-HA	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan					
		Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Sekunder	-	1,07	1,07
		Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	12,37	12,37
		Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	4,64	4,64
		Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	HLK Sekunder	-	2,22	2,22
			Padang Gantiang	HLK Sekunder	-	6,65	6,65
			Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	-	4,28	4,28
		Sungai Pagu	Koto Baru	HLK Sekunder	-	2,96	2,96
			Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	11,74	11,74
		HP Pemanfaatan HHK-HT	N/A	Kabupaten Dharmasraya			
Sembilan Koto	Banai			HLK Sekunder	4,45	-	4,45
	Koto Nan Empat Dibawah			HLK Sekunder	20,83	-	20,83
	Lubuak Karak			HLK Sekunder	43,36	-	43,36
	Silago			HLK Sekunder	338,54	-	338,54
Kabupaten Sijunjung							
Kamang Baru	Lubuk Tarantang			HLK Sekunder	31,16	-	31,16
	Muaro Takuang			HLK Sekunder	0,55	-	0,55
Kabupaten Solok Selatan							
Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling			HLK Sekunder	2,04	-	2,04
	Lubuk Ulang Aling Selatan			HLK Sekunder	1,07	-	1,07
	Lubuk Ulang Aling Tengah			HLK Sekunder	9,02	-	9,02

Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	
					HP	HPT		
HP Pembedayaan Masyarakat	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan						
		Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	1,17	1,17	
	N/A	Kabupaten Dharmasraya						
		Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	HLK Sekunder	-	3,85	3,85	
			Silago	HLK Sekunder	-	7,71	7,71	
Total					451,02	58,65	509,68	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam												
Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari	kegiatan	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

E.4. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) yang terdapat di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) terdapat pada fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 25,99 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 39 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

No	Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
							HP	
1	N/A	N/A	Pesisir Selatan	Lunang	Sindang Lunang	HLK Sekunder	24,28	24,28
				Silaut	Silaut	HLK Sekunder	1,72	1,72
Total							25,99	25,99

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyardartahuan IFNet 2030 R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam												
Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

E.5. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) yang terdapat di wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada areal seluas 126.396,65 ha dan pada Unit

X terdapat area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 43.818,29 ha dan pada Unit XI merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Minas Pagai Lumber seluas 68.184,08 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

No	Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)				
							HP					
1	Unit X	PT Salaki Summa Sejahtera	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Sigapokna	HLK Sekunder	9.495,06	9.495,06				
						Hutan Rawa Sekunder	302,70	302,70				
					Simalegi	HLK Sekunder	12.845,33	12.845,33				
				Siberut Utara	Bojakan	HLK Primer	522,96	522,96				
						HLK Sekunder	1.512,53	1.512,53				
					Malancan	HLK Primer	1.158,13	1.158,13				
						HLK Sekunder	16.496,19	16.496,19				
					Sotboyak	HLK Primer	204,06	204,06				
						HLK Sekunder	1.281,33	1.281,33				
				Sub Total							43.818,29	43.818,29
				Unit XI	N/A	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Sigapokna	HLK Sekunder	1,43	1,43	
									Siberut Tengah	Cimpungan	HLK Sekunder	3.111,76
							Saibi Samukop	HLK Sekunder			4.820,76	4.820,76
	Hutan Mangrove Primer	1,61	1,61									
	Saliguma	HLK Sekunder	416,49				416,49					
		Hutan Rawa Sekunder	30,06				30,06					
	Siberut Utara	Bojakan	HLK Sekunder				2.315,38	2.315,38				
			Sotboyak				HLK Sekunder	3.696,78	3.696,78			
	Sub Total							14.394,28	14.394,28			
2	Unit XI	PT Minas Pagai Lumber	Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	5.223,77	5.223,77				
						Makalo	HLK Sekunder	13.152,98	13.152,98			
					Sinaka	HLK Sekunder	6.231,48	6.231,48				
						Hutan Rawa Sekunder	13.355,20	13.355,20				
				Pagai Utara	Betumonga	HLK Sekunder	20,41	20,41				
						Saumanganya	HLK Sekunder	1.648,20	1.648,20			
					Silabu	HLK Sekunder	9.000,56	9.000,56				
				Sub Total							7.438,15	7.438,15

No	Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
							HP	
				Sikakap	Matobe	HLK Sekunder	1.425,83	1.425,83
					Sikakap	HLK Sekunder	1.690,25	1.690,25
					Taikako	HLK Sekunder	8.997,24	8.997,24
				Sub Total			68.184,08	68.184,08
Total							126.396,65	126.396,65

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam												
Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari	kegiatan	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

F. Penerapan RIL-C

Target penurunan emisi GRK pada NDC melalui kegiatan pengelolaan hutan lestari sejalan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dimana penurunan emisi dapat terjadi melalui penerapan teknologi penebangan dengan tingkat kerusakan tegakan dan keterbukaan wilayah minimal.

Hal ini sejalan dengan indikator 2.4 PHL (Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu). Karena itu, indikator 2.4 harus menjadi indikator penting yang diperhatikan dalam proses pemberian sertifikasi. Merujuk pada peraturan tersebut, penurunan emisi melalui PHL dapat terjadi melalui upaya pengurangan dampak kerusakan tegakan akibat penebangan baik dengan penerapan teknologi RIL (*Reduce Impact Logging*).

F.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi penerapan RIL-C seluas **3.856,20 ha** pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 1.947,89 ha pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 43 dan seluas 1.908,30 ha pada areal yang belum memiliki izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 51.

F.1.1. Areal Berizin

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 817,32 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 1.059,64 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; serta PT. Multikarya Lisun Prima seluas 70,94 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 43 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

No	Pemegang Izin [Kabupaten]	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
					APL	HP	HPK	
1	PT Minas Pagai Lumber [Kepulauan Mentawai]	Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	4,89	-	-	4,89
			Makalo	HLK Sekunder	0,17	-	-	0,17
			Malakopa	HLK Sekunder	36,82	-	-	36,82
			Sinaka	HLK Sekunder	5,05	47,68	-	52,74
		Pagai Utara	Betumonga	HLK Sekunder	-	251,09	-	251,09
			Saumanganya	HLK Sekunder	19,65	-	-	19,65
			Silabu	HLK Sekunder	6,11	104,83	-	110,94
		Sikakap	Matobe	HLK Sekunder	3,49	-	-	3,49
			Sikakap	HLK Sekunder	4,75	106,64	-	111,39
			Taikako	HLK Sekunder	9,94	216,20	-	226,14
Sub Total PT Minas Pagai Lumber					90,88	726,44	-	817,32
2	PT Multikarya Lisun Prima [Sijunjung]	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	1,32	-	-	1,32
			Padang Tarok	HLK Sekunder	-	-	66,02	66,02
			Tanjung Kalliang	HLK Sekunder	3,60	-	-	3,60
		Sub Total PT Multikarya Lisun Prima					4,92	-

No	Pemegang Izin [Kabupaten]	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)		
					APL	HP	HPK			
3	PT Salaki Summa Sejahtera [Kepulauan Mentawai]	Siberut Barat	Sigapokna	HLK Sekunder	1,42	-	-	1,42		
			Simalégi	HLK Sekunder	-	123,22	-	123,22		
		Siberut Utara	Bojakan	HLK Primer	-	31,27	-	31,27		
				HLK Sekunder	-	210,84	-	210,84		
			Malancan	HLK Primer	-	251,12	-	251,12		
				HLK Sekunder	-	368,33	5,65	373,99		
				Hutan Rawa Sekunder	-	7,28	-	7,28		
			Sotboyak	HLK Sekunder	-	59,10	1,41	60,51		
		Sub Total PT Salaki Summa Sejahtera					1,42	1.051,16	7,06	1.059,64
		Total					97,21	1.777,60	73,08	1.947,89

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Sebagai aksi mitigasi penerapan RIL-C, PBPH atas nama PT. Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga melakukan strategi berupa penanaman, konservasi tanah dan air, dan pembuatan bangunan sipil teknis untuk mengurangi tingkat erosi di areal izinnnya. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Minas Pagai Lumber dalam mendukung aksi mitigasi penerapan RIL-C di areal izinnnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 44 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	Tahun RKT
			APL	HP		
Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	4,89	-	4,89	2022
	Makalo	HLK Sekunder	0,17	-	0,17	2022
	Malakopa	HLK Sekunder	36,82	-	36,82	2026
	Sinaka	HLK Sekunder	5,05	47,68	52,74	2026
Pagai Utara	Betumonga	HLK Sekunder	-	251,09	251,09	2023
	Saumanganya	HLK Sekunder	19,65	-	19,65	2023
	Silabu	HLK Sekunder	6,11	104,83	110,94	2024
Sikakap	Matobe	HLK Sekunder	3,49	-	3,49	2024
	Sikakap	HLK Sekunder	4,75	106,64	111,39	2025
	Taikako	HLK Sekunder	9,94	216,20	226,14	2025
Sub Total PT Minas Pagai Lumber			90,88	726,44	817,32	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 45 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penanaman Tanaman Konservasi												
Penanaman dan Pembuatan Guludan [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	batang	156.092	2.024	-	-	100.436	7.860	44.376	1.396	-	-
					108.296				45.772			
Program Penerapan RIL-C												
Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	ha	390,23	5,06	108,30	81,22	54,15	27,07	45,77	34,33	22,89	11,44
					270,74				114,43			

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022; Program dan Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 46 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penanaman Tanaman Konservasi									
Penanaman dan Pembuatan Guludan [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	batang	170.836	135.012	35.824	-	-	-	-
Program Penerapan RIL-C									
Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	ha	427,09	337,53	89,56	-	-	-	-

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022; Program dan Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 47 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penerapan RIL-C												
Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	ha	26,57	8,87	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
					8,85				8,85			

Sumber: PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

Tabel 48 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penerapan RIL-C									
Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	ha	53,19	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87

Sumber: PT. Multikarya Lisun Prima, 2022

Tabel 49 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penerapan RIL-C												
Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	ha	366,74	1,42	61,80	46,35	30,90	15,45	84,34	63,25	42,17	21,08
					154,49				210,84			

Sumber: Program dan Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 50 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penerapan RIL-C									
Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	ha	692,89	251,12	373,99	67,79	-	-	-

Sumber: Program dan Kegiatan Alternatif, 2022

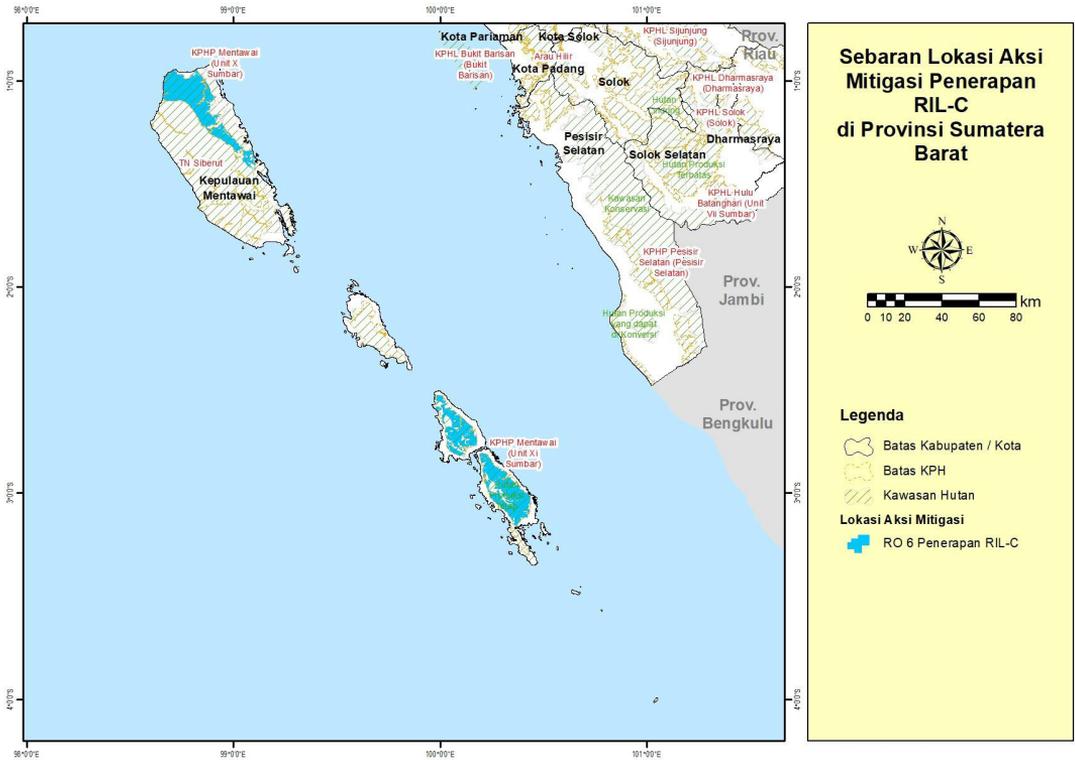
F.1.2. Areal Tidak Berizin

Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi penerapan RIL-C yang paling luas terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 1.851,65 ha dan yang paling sempit terletak di Kabupaten Solok Selatan yang luasnya 1,55 ha. Adapun pada wilayah ini, tidak dilakukan penerapan RIL-C mengingat pemanenan kayu hanya dilakukan pada areal berizin dan dilakukan oleh pemegang izin konsesi. Oleh karena itu, penerapan RIL-C pada area berikut hanya dilakukan jika sudah terdapat pemegang izin yang legal.

Tabel 51 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
					APL	HP	HPK	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Hlk Primer	3,29	0,30	-	3,58
		Sembilan Koto	Banai	Hlk Sekunder	-	-	5,63	5,63
			Koto Nan Empat Dibawah	Hlk Sekunder	45,89	-	-	45,89
	Sub Total Dharmasraya					49,18	0,30	5,63
2	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simalegi	Hlk Sekunder	-	1,70	-	1,70
		Siberut Tengah	Cimpungan	Hlk Sekunder	-	739,31	-	739,31
			Saibi Samukop	Hlk Sekunder	-	46,31	-	46,31
		Siberut Utara	Bojakan	Hlk Sekunder	-	589,78	-	589,78
			Sotboyak	Hlk Sekunder	-	474,55	-	474,55
Sub Total Kepulauan Mentawai					-	1.851,65	-	1.851,65
3	Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling	Hlk Sekunder	-	-	1,55	1,55
	Sub Total Solok Selatan					-	-	1,55
Total					49,18	1.851,94	7,18	1.908,30

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022



Gambar 15 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Provinsi Sumatera Barat

F.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan RIL-C yang terdapat di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) terdapat pada 3 blok berbeda dengan total seluas 419,69 ha dan salah satunya merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Multikarya Lisun Prima sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 52 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HP	HPT	
1	HP Pemanfaatan HHK-HT	N/A	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	94,55	-	94,55
2	HP Pemberdayaan Masyarakat	N/A	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	5,01	-	5,01

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	
						HP	HPT		
3	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK	PT Multikarya Lisun Prima RKT Tahun...	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	-	11,64	11,64	
				Padang Tarok	HLK Primer	-	2,00	2,00	
					HLK Sekunder	-	135,18	135,18	
				Tanjung Kaliang	HLK Sekunder	-	22,96	22,96	
				Sijunjung	Durian Gadang	HLK Sekunder	-	9,16	9,16
				Sumpur Kudus	Unggan	HLK Sekunder	-	139,19	139,19
Total						99,56	320,13	419,69	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 53 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C												
Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Area lokasi target lokasi R06 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

F.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan RIL-C yang terdapat di wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) terdapat pada 3 blok berbeda dengan total seluas 509,28 ha dan pada Blok HP Pemanfaatan HHK-HA dan HP Pemberdayaan Masyarakat merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Andalas Merapi Timber sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 54 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)		
						HP	HPT			
1	HP Pemanfaatan HHK-HA	PT Andalus Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan							
			Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Sekunder	-	1,07	1,07		
			Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	12,37	12,37		
			Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	4,55	4,55		
			Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	HLK Sekunder	-	2,22	2,22		
				Padang Gantiang	HLK Sekunder	-	6,65	6,65		
				Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	-	4,28	4,28		
			Sungai Pagu	Koto Baru	HLK Sekunder	-	2,96	2,96		
				Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	11,74	11,74		
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HA							45,84	45,84		
2	HP Pemanfaatan HHK-HT	N/A	Kabupaten Dharmasraya							
			Sembilan Koto	Banai	HLK Sekunder	4,45	-	4,45		
				Koto Nan Empat Dibawah	HLK Sekunder	20,83	-	20,83		
				Lubuak Karak	HLK Sekunder	43,15	-	43,15		
				Silago	HLK Sekunder	338,44	-	338,44		
			Kabupaten Sijunjung							
			Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	31,16	-	31,16		
				Muaro Takuang	HLK Sekunder	0,55	-	0,55		
			Kabupaten Solok Selatan							
			Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling	HLK Sekunder	2,04	-	2,04		
				Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Sekunder	1,07	-	1,07		
				Lubuk Ulang Aling Tengah	HLK Sekunder	9,02	-	9,02		
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HT						450,72	-	450,72		
3	HP Pemberdayaan Masyarakat	PT Andalus Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan							
			Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	1,17	1,17		
		N/A	Kabupaten Dharmasraya							
			Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	HLK Sekunder	-	3,85	3,85		
Silago	HLK Sekunder			7,71	7,71					
Total						450,72	58,56	509,28		

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 55 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyardartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C												
Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari	kegiatan	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

F.4. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan RIL-C yang terdapat di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) terdapat pada fungsi Hutan Produksi Tetap seluas 24,70 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 56 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
						HP	
N/A	N/A	Pesisir Selatan	Lunang	Sindang Lunang	HLK Sekunder	23,10	23,10
			Silaut	Silaut	HLK Sekunder	1,62	1,62
Total						24,72	24,72

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 57 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C												
Sosialisasi target RO 6 Penerapan RIL- C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

F.5. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

Arahan spasial aksi mitigasi penerapan RIL-C yang terdapat di wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada areal seluas 126.113,80 ha dan pada Unit X terdapat area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 43.796,39 ha dan pada Unit XI terdapat area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Minas Pagai Lumber seluas 67.947,31 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 58 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
						HP	
1	Unit X	PT Salaki Summa Sejahtera	Siberut Barat	Sigapokna	HLK Sekunder	9.495,06	9.495,06
					Hutan Rawa Sekunder	302,70	302,70
				Simalegi	HLK Sekunder	12.845,33	12.845,33
			Siberut Utara	Bojakan	Hutan Lahan Kering Primer	522,96	522,96
					HLK Sekunder	1.512,53	1.512,53
				Malancan	Hutan Lahan Kering Primer	1.158,13	1.158,13
					HLK Sekunder	16.474,29	16.474,29
			Sotboyak	Hutan Lahan Kering Primer	204,06	204,06	
				HLK Sekunder	1.281,33	1.281,33	
			Sub Total				

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
						HP	
2	Unit X	N/A	Siberut Barat	Sigapokna	HLK Sekunder	1,43	1,43
			Siberut Tengah	Cimpungan	HLK Sekunder	3.111,76	3.111,76
				Saibi Samukop	HLK Sekunder	4.796,58	4.796,58
					Hutan Mangrove Primer	1,61	1,61
				Saliguma	HLK Sekunder	416,49	416,49
					Hutan Rawa Sekunder	30,06	30,06
			Siberut Utara	Bojakan	HLK Sekunder	2.315,38	2.315,38
				Sotboyak	HLK Sekunder	3.696,78	3.696,78
Sub Total						14.370,10	14.370,10
3	Unit XI	PT Minas Pagai Lumber	Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	5.223,77	5.223,77
				Makalo	HLK Sekunder	13.152,98	13.152,98
				Malakopa	HLK Sekunder	6.231,48	6.231,48
				Sinaka	HLK Sekunder	13.355,20	13.355,20
					Hutan Rawa Sekunder	20,41	20,41
			Pagai Utara	Betumonga	HLK Sekunder	1.648,20	1.648,20
				Saumanganya	HLK Sekunder	8.771,54	8.771,54
				Silabu	HLK Sekunder	7.438,15	7.438,15
			Sikakap	Matobe	HLK Sekunder	1.418,09	1.418,09
				Sikakap	HLK Sekunder	1.690,25	1.690,25
				Taikako	HLK Sekunder	8.997,24	8.997,24
Sub Total						67.947,31	67.947,31
Total						126.113,80	126.113,80

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 59 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C												
Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari	kegiatan	5	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

G. Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi

Kegiatan rehabilitasi dengan rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif yang berada pada arahan produksi dan konversi yang ada di area APL. Untuk kawasan hutan, rehabilitasi dengan rotasi diarahkan pada lahan tidak produktif, budidaya dan perkebunan dalam bentuk hutan rakyat atau agroforestry. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dalam kawasan dengan pelibatan masyarakat atau bersinergi dengan kegiatan perhutanan sosial, memerlukan kelembagaan KPH yang kuat yang berperan besar dalam melakukan fasilitasi.

G.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk peningkatan cadangan karbon dengan rotasi seluas 7.477,52 ha pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 651,01 ha pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 60 dan seluas 6.826,51 ha pada areal yang belum memiliki izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 64.

G.1.1. Areal Berizin

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 334,78 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 137,82 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; serta PT. Multikarya Lisun Prima seluas 178,42 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 60 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

No	Pemegang Izin [Kabupaten]	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)			
					APL	HP	HPK				
1	PT Minas Pagai Lumber [Kepulauan Mentawai]	Pagai Utara	Betumonga	PLKC	-	19,08	-	19,08			
				Semak/Belukar	-	2,40	-	2,40			
			Saumanganya	PLKC	-	14,58	-	14,58			
				Semak/Belukar	2,71	-	-	2,71			
		Silabu	PLKC	1,93	46,03	-	47,95				
				Tanah Terbuka	-	0,84	-	0,84			
			Sikakap	Pertanian Lahan Kering	-	0,13	-	0,13			
				PLKC	-	16,83	-	16,83			
		Taikako	PLKC	1,64	178,97	-	180,61				
			Sawah	0,14	20,09	-	20,23				
			Semak/Belukar	-	29,41	-	29,41				
		Sub Total					6,42	328,36	-	334,78	
		2	PT Multikarya Lisun Prima [Sijunjung]	Kamang Baru	Aie Amo	PLKC	67,25	-	-	67,25	
						Semak/Belukar	18,61	-	-	18,61	
Padang Tarok	Perkebunan				-	-	0,68	0,68			
	PLKC				1,36	-	31,59	32,95			
	Semak/Belukar				-	-	2,24	2,24			
Tanjung Kaliang	PLKC				37,14	-	-	37,14			
	Semak/Belukar				16,57	-	-	16,57			
	Tanah Terbuka				2,98	-	-	2,98			
Sub Total					143,91	-	34,51	178,42			
3	PT Salaki Summa Sejahtera [Kepulauan Mentawai]				Siberut Barat	Simalegi	PLKC	-	0,26	-	0,26
		Siberut Utara	Malancen	PLKC	-	121,69	15,87	137,56			
	Sub Total					-	121,95	15,87	137,82		
Total					150,33	450,31	50,38	651,01			

Ket: PLKC: Pertanian Lahan Kering Campur

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Sebagai aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi, PBBH atas nama PT. Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga melakukan strategi berupa penanaman tanaman kehidupan seperti tanaman buah-buahan dan sosialisasi kegiatan peningkatan cadangan karbon di areal izin. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh

PT. Minas Pagai Lumber dalam mendukung aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi di areal izinnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 61 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	Tahun RKT
				APL	HP		
1	Pagai Utara	Betumonga	PLKC	-	19,08	19,08	2022
			Semak/Belukar	-	2,40	2,40	2022
		Saumanganya	PLKC	-	14,58	14,58	2026
			Semak/Belukar	2,71	-	2,71	2026
		Silabu	PLKC	1,93	46,03	47,95	2026
			Tanah Terbuka	-	0,84	0,84	2027
2	Sikakap	Sikakap	Pertanian Lahan Kering	-	0,13	0,13	2027
			PLKC	-	16,83	16,83	2027
	Sikakap	Taikako	PLKC	1,64	178,97	180,61	2028
			Sawah	0,14	20,09	20,23	2028
			Semak/Belukar	-	29,41	29,41	2028
Sub Total PT Minas Pagai Lumber				6,42	328,36	334,78	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 62 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyediaan Bibit Buah-buahan												
Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	batang	8.592	8.592	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Tabel 63 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penyediaan Bibit Buah-buahan									
Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	batang	117.224	-	26.096	7.120	84.008	-	-
Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul									
PML Irigasi & Penanaman [kg]	Peningkatan produksi sawah	kg	405	-	-	-	405	-	-

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022

G.1.1. Areal Tidak Berizin

Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang paling luas terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 1.931,43 ha dan yang paling sempit terletak di Kabupaten Sijunjung yang hanya seluas 0,28 ha.

Tabel 64 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Perkebunan	-	1,53	-	-	1,53
		Koto Besar	Bonjol	Perkebunan	-	140,64	-	-	140,64
			Koto Besar	Perkebunan	-	288,51	-	-	288,51
		Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	PLKC	15,64	-	-	-	15,64
		Timpeh	Panyubarangan	Perkebunan	-	-	6,40	-	6,40
Sub Total					15,64	430,68	6,40	-	452,72
2	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simalegi	PLKC	-	0,56	-	-	0,56
		Siberut Tengah	Cimpungan	PLKC	-	42,37	-	-	42,37
			Saibi Samukop	PLKC	-	32,38	-	-	32,38
			Saliguma	PLKC	-	1,23	-	-	1,23
		Siberut Utara	Mongan Poula	PLKC	-	2,14	-	-	2,14
			Sotboyak	PLKC	-	21,11	-	-	21,11
Sub Total					-	99,79	-	-	99,79

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
3	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Durian Tinggi	Pertanian Lahan Kering	-	-	421,13	-	421,13
				PLKC	-	-	54,03	-	54,03
				Semak/Belukar	-	-	6,76	-	6,76
			Galugur	Pertanian Lahan Kering	-	-	212,76	-	212,76
				PLKC	-	-	2.077,53	-	2.077,53
				Semak/Belukar	-	-	412,56	-	412,56
				Tanah Terbuka	-	-	5,32	-	5,32
			Sialang	Pertanian Lahan Kering	-	-	1.121,36	-	1.121,36
				PLKC	-	-	1.262,24	-	1.262,24
				Semak/Belukar	-	-	112,18	-	112,18
		Tanah Terbuka		-	-	19,83	-	19,83	
		Pangkalan Koto Baru	Manggilang	PLKC	-	-	42,01	-	42,01
				Semak/Belukar	-	-	95,73	-	95,73
			Tanjung Balik	PLKC	-	-	1,48	-	1,48
Tanjung Pauh	Semak/Belukar		37,72	-	-	-	37,72		
Sub Total					37,72	-	5.844,92	-	5.882,64
4	Pasaman	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	Tanah Terbuka	2,83	-	-	-	2,83
					Sub Total				
5	Pesisir Selatan	Silaut	Sungai Sirah	Perkebunan	-	172,07	-	127,67	299,74
				Pertanian Lahan Kering	-	0,10	-	-	0,10
				PLKC	0,10	88,46	-	-	88,56
				Sub Total					0,10
6	Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Dusun Tengah	Perkebunan	0,14	-	-	-	0,14
					Sub Total				
Total					56,43	791,10	5.851,31	127,67	6.826,51

Ket: PLKC = Pertanian Lahan Kering Campur

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Pada lokasi dengan tutupan lahan berupa tanah terbuka, diupayakan penanaman rehabilitasi dengan pola intensif dengan kepadatan 1.100 batang/ha. Berdasarkan peta arahan, tutupan lahan terbuka terhitung seluas 27,98 ha yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota seluas 25,25 ha dan di Kabupaten Pasaman seluas 2,83 ha yang berlokasi di 3 kecamatan dan 3 nagari pada fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan areal penggunaan lain (APL). Sebaran lokasi implementasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi di wilayah pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehabilitasi pola intensif selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 65 | Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Intensif

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					APL	HPK	
1	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Galugur	Tanah Terbuka	-	5,32	5,32
			Sialang	Tanah Terbuka	-	19,83	19,83
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					-	25,15
2	Pasaman	Mapat Tunggul Selatan	Silayang	Tanah Terbuka	2,83	-	2,83
	Sub Total Kab. Pasaman					2,83	-
Total					2,83	25,15	27,98

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Pada lokasi dengan tutupan lahan berupa semak belukar, diupayakan penanaman rehabilitasi dengan pola semi intensif atau pengkayaan dengan kepadatan 625 batang/ha. Berdasarkan peta arahan, tutupan lahan berupa semak belukar terhitung seluas 664,95 ha yang terletak di Kabupaten Limapuluh Kota dan berada di 2 kecamatan dan 5 nagari. Sebaran lokasi implementasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi di wilayah pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehabilitasi pola semi- intensif atau pengkayaan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 66 | Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Semi-Intensif atau Pengkayaan

Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
				APL	HPK	
Lima Puluh Kota	Kapur IX	Durian Tinggi	Semak/Belukar	-	6,76	6,76
		Galugur	Semak/Belukar	-	412,56	412,56
		Sialang	Semak/Belukar	-	112,18	112,18
	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Semak/Belukar	-	95,73	95,73
		Tanjung Pauh	Semak/Belukar	37,72	-	37,72

Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
				APL	HPK	
Sub Total Kab. Limapuluh Kota				37,72	627,23	664,95
Total				37,72	627,23	664,95

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Pada lokasi dengan tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur (PLCK), pertanian lahan kering, dan perkebunan, diupayakan penanaman rehabilitasi dengan pola agroforestry dengan kepadatan 400 batang/ha. Berdasarkan peta arahan, tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur (PLCK), pertanian lahan kering (PLK), dan perkebunan terhitung seluas 6.133,59 ha yang tersebar di 5 kabupaten, 11 kecamatan dan 18 nagari. Sebaran lokasi implementasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi di wilayah pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehabilitasi pola agroforestry selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 67 | Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Agroforestry

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Perkebunan	-	1,53	-	-	1,53
		Koto Besar	Bonjol	Perkebunan	-	140,64	-	-	140,64
			Koto Besar	Perkebunan	-	288,51	-	-	288,51
		Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	PLKC	15,64	-	-	-	15,64
		Timpeh	Panyubarangan	Perkebunan	-	-	6,40	-	6,40
Sub Total					15,64	430,68	6,40	-	452,72
2	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simalegi	PLKC	-	0,56	-	-	0,56
		Siberut Tengah	Cimpungan	PLKC	-	42,37	-	-	42,37
			Saibi Samukop	PLKC	-	32,38	-	-	32,38
			Saliguma	PLKC	-	1,23	-	-	1,23
		Siberut Utara	Mongan Poula	PLKC	-	2,14	-	-	2,14
			Sotboyak	PLKC	-	21,11	-	-	21,11
Sub Total					-	99,79	-	-	99,79

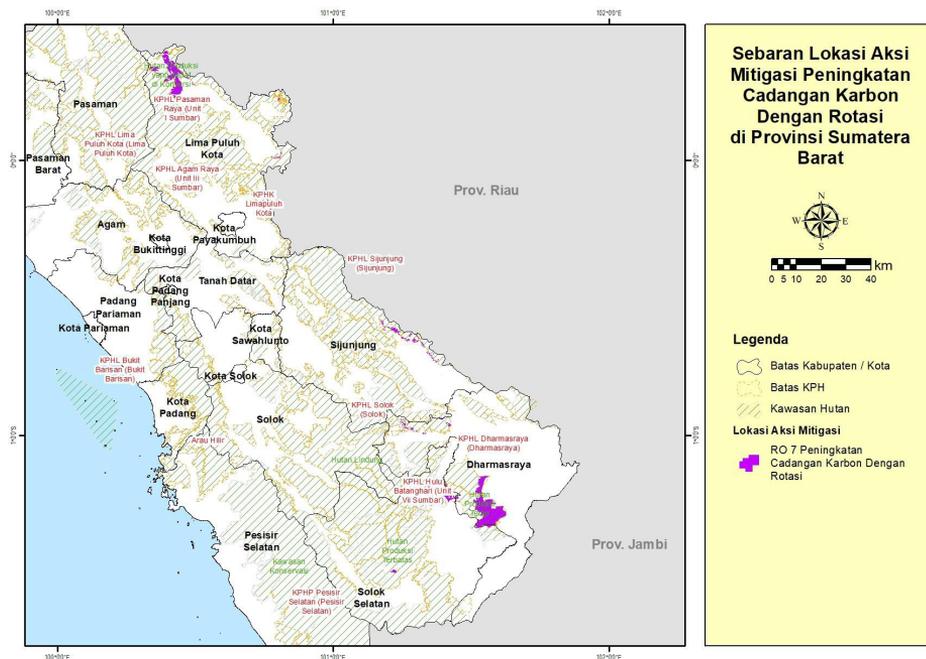
Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024				
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
	Lokasi: Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya Kantor Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai Kantor Bappeda Kab. Limapuluh Kota Kantor Bappeda Kab. Pasaman Kantor Bappeda Kab. Pesisir Selatan Kantor Bappeda Kab. Solok Selatan												
Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin													
Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif di areal seluas 27,98 ha	ha	27,98	27,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0) [ha]	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha pada areal seluas 27,98 ha	ha	27,98	-	-	-	27,98	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1) [ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke-1	ha	27,98	-	-	-	-	-	27,98	-	-	-	-
Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	ha	664,95	664,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0) [ha]	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha pada areal seluas 664,95 ha	ha	664,95	-	-	-	627,23	37,72	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1) [ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke-1	ha	664,95	-	-	-	-	-	265,98	199,49	132,99	66,50	-
Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	ha	6.133,59	6.133,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha pada	ha	6.133,59	-	-	-	3.680,15	2.453,44	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 69 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangku Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin									
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke-2	ha	27,98	27,98	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi- Intensif Tahun ke-2 (P2) [ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke-2	ha	664,95	664,95	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke-2	ha	6.133,59	6.133,59	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 16 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Provinsi Sumatera Barat

G.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang terdapat di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) terdapat pada 2 blok berbeda dengan total seluas 808,40 ha dan merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Multikarya Lisun Prima sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 70 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
						APL	HP	HPT	
1	HP Pemanfaatan HHK-HT	N/A	Kamang Baru	Muaro Takuang	PLKC	-	23,50	-	23,50
2	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK	PT Multikarya Lisun Prima	Kamang Baru	Aie Amo	PLKC	-	-	38,25	38,25
					Semak/Belukar	-	-	24,69	24,69
				Padang Tarok	Perkebunan	-	-	2,34	2,34
					PLKC	-	-	385,36	385,36
					Semak/Belukar	-	-	63,34	63,34
					Tanah Terbuka	-	-	0,15	0,15
				Tanjung Kaliang	PLKC	0,22	-	166,66	166,87
					Semak/Belukar	0,10	-	69,64	69,74
Tanah Terbuka	-	-	34,16		34,16				
Total						0,32	23,50	784,58	808,04

Ket: PLKC = Pertanian Lahan Kering Campur

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 202

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 71 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi pada Areal Berizin												

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Penanaman Reha- bilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin(P- 0)[ha]	Tertanamnya areal lahan terbuka di dalam areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha	ha	34,16				√	√				
Pemeliharaan Reha- bilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1(P- 1)[ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi intensif di tahun ke-1 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha	ha	34,16						√	√	√	√

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 72 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Rehabilitasi pada Areal Berizin									
Pemeliharaan Reha- bilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi intensif di tahun ke-2 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha	ha	34,16	34,16					
Penanaman Rehabil- itasi Semi- Intensif 625 batang/ha di areal berizin [ha]	Tertanamnya areal semak belukar di dalam areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: 1. Aie Amo 24,69 ha 2. Padang Tarok 63,34 ha 3. Tanjung Kaliang 69,74 ha	ha	157,67	157,67					
Pemeliharaan Reha- bilitasi Semi- Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi-intensif di tahun ke-1 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: 1. Aie Amo 24,69 ha 2. Padang Tarok 63,34 ha 3. Tanjung Kaliang 69,74 ha	ha	157,67		157,67				

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pemeliharaan Reha- bilitasi Semi- Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi-intensif di tahun ke-2 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: 1. Aie Amo 24,69 ha 2. Padang Tarok 63,34 ha 3. Tanjung Kaliang 69,74 ha	ha	157,67			157,67			

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

G.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang terdapat di wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) terdapat pada 4 blok berbeda dengan total seluas 1.117,05 ha dan pada Blok HP Pemanfaatan HHK-HA dan HP Pemberdayaan Masyarakat merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Andalas Merapi Timber sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 73 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
						HL	HP	HPK	HPT		
1	HL Peman- faatan	N/A	Kabupaten Dharmasraya								
			Pulau Punjung	Gunung Selasih	Perkebunan	1,11	-	-	-	1,11	
				Sungai Kambut	Perkebunan	1,52	-	-	-	1,52	
			Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Perkebunan	0,06	-	-	-	0,06	
			Timpeh	Panyubarangan	Perkebunan	-	-	0,07	-	0,07	
Sub Total HL Pemanfaatan						2,69	-	0,07	-	2,76	
2	HP Peman- faatan HHK-HA	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan								
			Sangir	Lubuk Gadang	PLKC	-	-	-	84,73	84,73	
					Semak/ Belukar	-	-	-	4,17	4,17	
Sub Total HP Pemanfaatan HHK-HA						-	-	-	88,90	88,90	

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)			
						HL	HP	HPK	HPT				
3	HP Pemanfaatan HHK-HT		Kabupaten Dharmasraya										
			Pulau Punjung	Gunung Selasih	Perkebunan	-	37,51	-	-	37,51			
				Sungai Kambut	Perkebunan	-	60,94	-	-	60,94			
			Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Perkebunan	-	7,33	-	-	7,33			
				Lubuak Karak	Pertanian Lahan Kering	-	89,73	-	-	89,73			
					PLKC	-	77,06	-	-	77,06			
					Sawah	-	68,12	-	-	68,12			
				Silago	PLKC	-	53,38	-	-	53,38			
					Sawah	-	10,94	-	-	10,94			
			Sub Total Kabupaten Dharmasraya						-	405,02	-	-	405,02
			Kabupaten Solok Selatan										
			Sangir Batang Hari	Dusun Tengah	Perkebunan	-	496,28	-	-	496,28			
				Lubuk Ulang Aling Selatan	Pertanian Lahan Kering	-	85,20	-	-	85,20			
				Lubuk Ulang Aling Tengah	Pertanian Lahan Kering	-	36,55	-	-	36,55			
Sub Total Kabupaten Solok Selatan						-	618,02	-	-	618,02			
Sub Total HP Pemanfaatan HHK-HT						-	1.023,05	-	-	1.023,05			
4	HP Pemberdayaan Masyarakat	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan										
			Sangir	Lubuk Gadang	PLKC	-	-	-	0,62	0,62			
		N/A	Kabupaten Dharmasraya										
			Sembilan Koto	Silago	PLKC	-	-	-	1,71	1,71			
Sub Total HP Pemberdayaan Masyarakat						-	-	-	2,34	2,34			
Total						2,69	1.023,05	0,07	91,24	1.117,05			

Ket: PLKC = Pertanian Lahan Kering Campur

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 74 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari	kegiatan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin												
Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin (P-0) [ha]	Terehabilitasinya Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha	ha	130,44				√	√				
Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi intensif di Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha pada tahun ke-1	ha	130,44						√	√	√	√

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 75 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin									
Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi intensif di Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha pada tahun ke-2	ha	130,44	130,44					

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

G.4. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang terdapat di wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) seluas 10.596,75 ha yang seluruhnya berada pada fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 76 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)		
						HP			
N/A	N/A	Dharmasraya	Koto Baru	Koto Padang	Perkebunan	60,93	60,93		
			Koto Besar	Bonjol	Perkebunan	6.323,58	6.323,58		
				Koto Besar	Perkebunan	3.811,91	3.811,91		
			Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Perkebunan	15,29	15,29		
		Sub Total Dharmasraya						10.211,70	10.211,70
		Solok Selatan	Sangir Balai Janggo	Sangir Batang Hari	Sungai Kunyit	Perkebunan	273,17	273,17	
					Abai	Perkebunan	44,69	44,69	
			Dusun Tengah		Perkebunan	58,45	58,45		
			Lubuk Ulang Aling Tengah		Perkebunan	8,74	8,74		
		Sub Total Solok Selatan						385,05	385,05
Total						10.596,75	10.596,75		

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 77 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022		2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi													
Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari	kegiatan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

G.5. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang terdapat di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) terdapat pada fungsi Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Terbatas dengan total seluas 841,53 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 78 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HP	HPT	
N/A	N/A	Pesisir Selatan	Lunang	Sindang Lunang	Perkebunan	510,88	-	510,88
					Pertanian Lahan Kering	4,23	-	4,23
					Pertanian Lahan Kering Campur	14,65	-	14,65
			Silaut	Sungai Sirah	Perkebunan	124,60	15,94	140,54
					Perkebunan	115,72	42,01	157,73
					Pertanian Lahan Kering	13,50	-	13,50
Total						783,58	57,95	841,53

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 79 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

G.6. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

Arahana spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang terdapat di wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada areal seluas 13.230,83 ha dan pada Unit X terdapat area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 2.396,46 ha dan pada Unit XI merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Minas Pagai Lumber seluas 8.546,53 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 80 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)			
						HP				
1	Unit X	PT Salaki Summa Sejahtera	Siberut Barat	Sigapokna	PLK	474,35	474,35			
					PLKC	562,95	562,95			
					Semak/Belukar	90,47	90,47			
				Simalégi	PLKC	156,25	156,25			
			Siberut Utara	Malancan	PLKC	367,89	367,89			
					Semak/Belukar	634,31	634,31			
				Sotboyak	Semak/Belukar	110,24	110,24			
			Sub Total PT Salaki Summa Sejahtera						2.396,46	2.396,46
			Siberut Barat	Sigapokna	PLK	0,08	0,08			
		PLKC			0,23	0,23				
		Siberut Tengah		Cimpungan	PLKC	0,47	0,47			
				Saibi Samukop	PLK	142,42	142,42			
					PLKC	738,54	738,54			
		Siberut Utara		Sotboyak	PLKC	768,99	768,99			
Sub Total pada Blok Unit X						2.287,84	2.287,84			
2	Unit XI	PT Minas Pagai Lumber	Pagai Selatan	Bulasat	PLKC	24,62	24,62			
					Semak/Belukar	303,97	303,97			
				Makalo	PLK	533,56	533,56			
					Semak/Belukar	288,22	288,22			
				Malakopa	PLK	5,18	5,18			
					PLKC	2,98	2,98			
			Semak/Belukar		387,54	387,54				
			Pagai Utara	Sinaka	Belukar Rawa	1,79	1,79			
					PLK	160,19	160,19			
					PLKC	122,26	122,26			
					Sawah	58,39	58,39			
					Semak/Belukar	459,04	459,04			
Pagai Utara	Betumonga	PLKC	161,83	161,83						
		Semak/Belukar	2,11	2,11						

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	
						HP			
				Saumanganya	PLK	445,33		445,33	
					PLKC	873,92		873,92	
					Semak/Belukar	434,19		434,19	
				Silabu	PLK	28,59		28,59	
					PLKC	1.060,12		1.060,12	
					Semak/Belukar	546,94		546,94	
					Tanah Terbuka	5,55		5,55	
			Sikakap	Matobe	PLKC	152,00		152,00	
					Sikakap	PLKC	99,26		99,26
						Semak/Belukar	25,61		25,61
				Taikako	PLK	133,82		133,82	
						PLKC	1.161,37		1.161,37
						Sawah	41,56		41,56
					Semak/Belukar	1.026,60		1.026,60	
Sub Total PT Minas Pagai Lumber						8.546,53		8.546,53	
Total						13.230,83		13.230,83	

Ket: PLK: Pertanian Lahan Kering; PLKC: Pertanian Lahan Kering Campur
Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 81 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari	kegiatan	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin												

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin (P-0) [ha]	Terehabilitasinya areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha	ha	2.145,34				√	√				
Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha pada tahun ke-1	ha	2.145,34						√	√	√	√

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 82 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI) pada tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin									
Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [ha]	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha pada tahun ke-2	ha	2.145,34	2.145,34					

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

H. Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi

Kegiatan rehabilitasi non-rotasi merupakan bagian dari aksi mitigasi untuk peningkatan cadangan karbon pada lahan tidak produktif maupun budidaya yang masuk ke dalam arahan lindung dan rehabilitasi. Sesuai dengan peraturan Menteri KLHK, prioritas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi diarahkan pada lahan kritis dan berada pada DAS yang perlu dipulihkan.

H.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi seluas 2.329,25 ha pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 239,62 ha pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 83 dan seluas 2.089,63 ha pada areal yang belum memiliki izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 86.

H.1.1. Areal Berizin

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 28,51 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 1,32 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; serta PT. Multikarya Lisun Prima seluas 209,79 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 83 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

No	Pemegang Izin	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
						APL	HP	HPK	
1	PT Minas Pagai Lumber	Kepulauan Mentawai	Sikakap	Taikako	Sawah	-	14,40	-	14,40
					Semak/Belukar	-	14,11	-	14,11
					Sub Total PT Minas Pagai Lumber	-	28,51	-	28,51
2	PT Multikarya Lisun Prima	Sijunjung	Kamang Baru	Aie Amo	Pertanian Lahan Kering Campur	2,83	-	-	2,83
					Semak/Belukar	35,27	-	-	35,27
				Padang Tarok	Pertanian Lahan Kering Campur	-	-	4,22	4,22
					Semak/Belukar	-	-	96,26	96,26
					Tanah Terbuka	-	-	0,55	0,55
				Tanjung Kaliang	Pertanian Lahan Kering Campur	17,12	-	-	17,12
					Semak/Belukar	45,95	-	-	45,95
					Tanah Terbuka	7,61	-	-	7,61
				Sub Total PT Multikarya Lisun Prima	108,78	-	101,02	209,79	
3	PT Salaki Summa Sejahtera	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Simalegi	Pertanian Lahan Kering Campur	-	1,32	-	1,32
					Sub Total PT Salaki Summa Sejahtera	-	1,32	-	1,32
Total						108,78	29,83	101,02	239,62

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Sebagai aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi, PBPH atas nama PT. Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga melakukan strategi berupa penanaman tanaman kehidupan seperti tanaman buah-buahan dan sosialisasi kegiatan peningkatan cadangan karbon di areal izin. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Minas Pagai Lumber dalam mendukung aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi di areal izinnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 84 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	Tahun RKT
			APL	HP		
Sikakap	Taikako	Sawah	-	14,40	14,40	2029
		Semak/Belukar	-	14,11	14,11	2030
Sub Total PT Minas Pagai Lumber			6,42	28,51	28,51	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 85 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Penyediaan Bibit Buah-buahan									
Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	batang	5.644	-	-	-	-	-	5.644
Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul									
PML Irigasi & Penanaman [kg]	Peningkatan produksi sawah	kg	288	-	-	-	-	288	-

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022

H.1.2. Areal Tidak Berizin

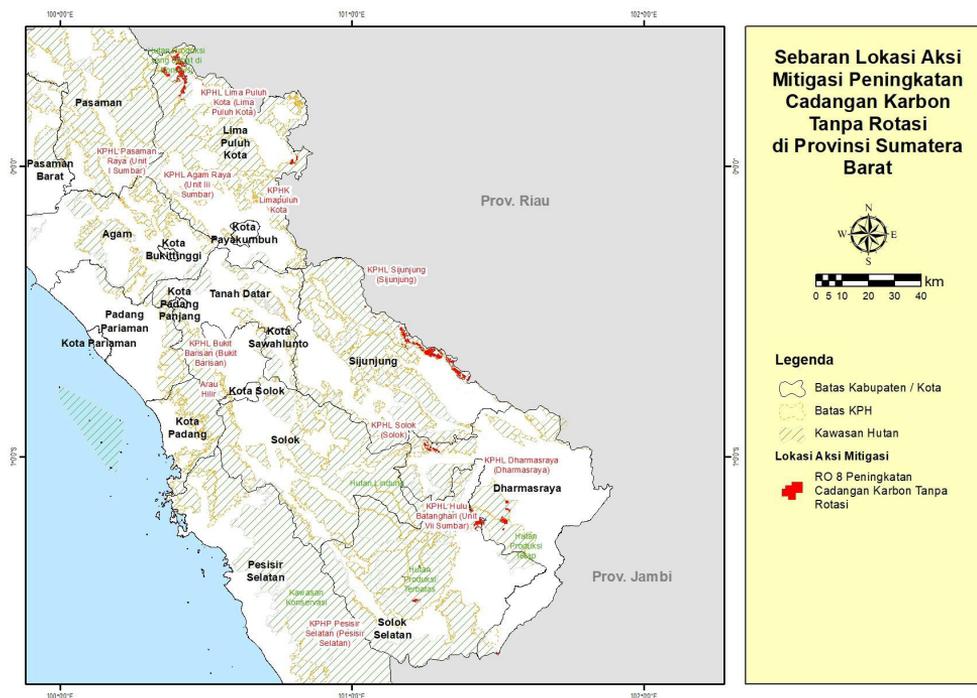
Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi yang paling luas terletak di Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 1.925,73 ha dan yang paling sempit terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai seluas 13,87 ha.

Tabel 86 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Belum Memiliki Izin

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Semak/Belukar	34,13	2,64	-	-	36,77
		Koto Besar	Bonjol	Perkebunan	8,02	-	-	-	8,02
		Padang Laweh	Sopan Jaya	Perkebunan	-	-	0,39	-	0,39

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
		Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Semak/Belukar	-	0,11	-	-	0,11
		Timpeh	Panyubarangan	Perkebunan	-	-	1,76	-	1,76
		Sub Total Dharmasraya				42,15	2,75	2,16	-
2	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Sigapokna	PLK	-	6,90	-	-	6,90
			Simalégi	PLKC	-	6,97	-	-	6,97
		Sub Total Kepulauan Mentawai				-	13,87	-	-
3	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Durian Tinggi	PLK	-	-	37,56	-	37,56
				PLKC	-	-	10,97	-	10,97
				Semak/Belukar	-	-	13,86	-	13,86
			Galugur	PLK	-	-	25,67	-	25,67
				PLKC	-	-	484,02	-	484,02
				Semak/Belukar	-	-	598,17	-	598,17
				Tanah Terbuka	-	-	13,42	-	13,42
			Sialang	PLK	-	-	14,59	-	14,59
				PLKC	-	-	349,37	-	349,37
		Semak/Belukar		-	-	62,27	-	62,27	
		Tanah Terbuka		-	-	12,38	-	12,38	
		Pangkalan Koto Baru	Manggilang	PLKC	-	-	211,44	-	211,44
				Semak/Belukar	-	-	84,50	-	84,50
Tanah Terbuka	-			-	7,50	-	7,50		
Sub Total Lima Puluh Kota				-	-	1.925,73	-	1.925,73	
4	Pesisir Selatan	Silaut	Sungai Sirah	Perkebunan	-	0,12	-	0,93	1,04
				PLKC	-	13,07	-	-	13,07
				Semak/Belukar	-	-	-	7,59	7,59
			Sub Total Pesisir Selatan				-	13,19	-
5	Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Dusun Tengah	Perkebunan	33,53	-	-	-	33,53
			Lubuk Ulang Aling Tengah	Perkebunan	47,73	-	-	-	47,73
		Sub Total Solok Selatan				81,26	-	-	-
Total					123,41	29,81	1.927,89	8,52	2.089,63

Ket: PLK: Pertanian Lahan Kering; PLKC: Pertanian Lahan Kering Campur
Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022



Gambar 17 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Provinsi Sumatera Barat

Pada lokasi dengan tutupan lahan berupa tanah terbuka, diupayakan penanaman rehabilitasi dengan pola intensif dengan kepadatan 1.100 batang/ha. Berdasarkan peta arahan, tutupan lahan terbuka hanya terletak di Kabupaten Limapuluh Kota seluas 33,30 ha yang tersebar di 2 kecamatan dan 3 nagari pada fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sebaran lokasi implementasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi di wilayah pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehabilitasi pola intensif selengkapny disajikan pada tabel berikut.

Tabel 87 | Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Intensif

Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
				HPK	
Lima Puluh Kota	Kapur IX	Galugur	Tanah Terbuka	13,42	13,42
		Sialang	Tanah Terbuka	12,38	12,38
	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Tanah Terbuka	7,50	7,50
Sub Total Lima Puluh Kota				33,30	33,30
Total				33,30	33,30

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Pada lokasi dengan tutupan lahan berupa semak belukar, diupayakan penanaman rehabilitasi dengan pola semi intensif atau pengkayaan dengan kepadatan 625 batang/ha. Berdasarkan peta arahan, tutupan lahan berupa semak belukar terhitung seluas 803,27 ha yang tersebar di 3 kabupaten yaitu di Kabupaten Dharmasraya seluas 36,88 ha; di Kabupaten Limapuluh Kota seluas 758,80 ha dan di Kabupaten Pesisir Selatan seluas 7,59 ha. Sebaran lokasi implementasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi di wilayah pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehabilitasi pola semi- intensif atau pengkayaan selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 88 | Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Semi-Intensif atau Pengkayaan

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
1	Dharmasraya	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	Semak/Belukar	34,13	2,64	-	-	36,77
		Sembilan Koto	Koto Nan Empat Dibawah	Semak/Belukar	-	0,11	-	-	0,11
	Sub Total Dharmasraya				34,13	2,75	-	-	36,88
2	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Durian Tinggi	Semak/Belukar	-	-	13,86	-	13,86
			Galugur	Semak/Belukar	-	-	598,17	-	598,17
			Sialang	Semak/Belukar	-	-	62,27	-	62,27
	Pangkalan Koto Baru	Manggilang	Semak/Belukar	-	-	84,50	-	84,50	
Sub Total Lima Puluh Kota				-	-	758,80	-	758,80	
3	Pesisir Selatan	Silaut	Sungai Sirah	Semak/Belukar	-	-	-	7,59	7,59
	Sub Total Pesisir Selatan				-	-	-	7,59	7,59
Total					34,13	2,75	758,80	7,59	803,27

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Pada lokasi dengan tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur, pertanian lahan kering, dan perkebunan, diupayakan penanaman rehabilitasi dengan pola agroforestry dengan kepadatan 400 batang/ha. Sebaran lokasi implementasi aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi di wilayah pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk rehabilitasi pola agroforestry selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 89 | Sebaran Lokasi Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pola Agroforestry

No	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HP	HPK	HPT	
1	Dharmasraya	Koto Besar	Bonjol	Perkebunan	8,02	-	-	-	8,02
		Padang Laweh	Sopan Jaya	Perkebunan	-	-	0,39	-	0,39
		Timpeh	Panyubarangan	Perkebunan	-	-	1,76	-	1,76
	Sub Total Dharmasraya					8,02	-	2,16	-
2	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Sigapokna	PLK	-	6,90	-	-	6,90
			Simalegi	PLKC	-	6,97	-	-	6,97
	Sub Total Kepulauan Mentawai					-	13,87	-	-
3	Lima Puluh Kota	Kapur IX	Durian Tinggi	PLK	-	-	37,56	-	37,56
				PLKC	-	-	10,97	-	10,97
			Galugur	PLK	-	-	25,67	-	25,67
				PLKC	-	-	484,02	-	484,02
			Sialang	PLK	-	-	14,59	-	14,59
				PLKC	-	-	349,37	-	349,37
	Pangkalan Koto Baru	Manggiling	PLKC	-	-	211,44	-	211,44	
Sub Total Lima Puluh Kota					-	-	1.133,62	-	1.133,62
4	Pesisir Selatan	Silaut	Sungai Sirah	Perkebunan	-	0,12	-	0,93	1,04
				PLKC	-	13,07	-	-	13,07
	Sub Total Pesisir Selatan					-	13,19	-	0,93
5	Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Dusun Tengah	Perkebunan	33,53	-	-	-	33,53
			Lubuk Ulang Aling Tengah	Perkebunan	47,73	-	-	-	47,73
	Sub Total Solok Selatan					81,26	-	-	-
Total					89,28	27,06	1.135,78	0,93	1.253,03

Ket: PLK: Pertanian Lahan Kering; PLKC: Pertanian Lahan Kering Campur
Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 90 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangku Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangku Pemerintah Provinsi Sumatera Barat [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang belum dibebani izin konsesi diketahui masyarakat nagari	kegiatan	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lokasi: Kantor Bappeda Kab. Dharmasraya Kantor Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai Kantor Bappeda Kab. Limapuluh Kota Kantor Bappeda Kab. Pesisir Selatan Kantor Bappeda Kab. Solok Selatan											
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Intensif												
Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	ha	33,30	33,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)[ha]	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha pada areal seluas 33,30 ha	ha	33,30	-	-	-	33,30	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 1	ha	33,30	-	-	-	-	-	33,30	-	-	-
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Semi-Intensif												
Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi- Intensif [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	ha	803,27	803,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Penanaman Tanaman RHL Pola Semi- Intensif (P0)[ha]	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha pada areal seluas 803,27 ha	ha	803,27	-	-	-	758,80	44,47	-	-	-	-
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi- Intensif Tahun ke-1 (P1)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 1	ha	803,27	-	-	-	-	-	321,31	240,98	160,55	80,33

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Agroforestry												
Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	ha	1.253,03	1.253,03	-	-	-	-	-	-	-	
Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)[ha]	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha pada areal seluas 1.253,03 ha	ha	1.253,03	-	-	-	751,82	501,21	-	-	-	
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1(P1)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 1	ha	1.253,03	-	-	-	-	-	501,21	375,91	250,61	
											125,30	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 91 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Intensif									
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke-2	ha	33,30	33,30	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Semi-Intensif									
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi- Intensif Tahun ke-2 (P2) [ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke-2	ha	803,27	803,27	-	-	-	-	-
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Agroforestry									
Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)[ha]	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke-2	ha	1.253,03	1.253,03	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

H.2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi yang terdapat di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) terdapat pada 4 blok berbeda dengan total seluas 2.483,12 ha. Seluas 0,92 ha pada Blok HL-Pemanfaatan dan seluas 2.474,40 ha pada Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK merupakan area konsesi PBPB-HA atas nama PT. Multikarya Lisun Prima sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 92 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
						APL	HL	HP	HPT	
1	HL Pemanfaatan	PT Multikarya	Kamang	Aie Amo	Semak/Belukar	-	0,95	-	-	0,95
		Lisun Prima	Baru							
2	HP Pemanfaatan HHK-HT	N/A	Kamang Baru	Muaro Takuang	Pertanian Lahan Kering Campur	-	0,08	-	-	0,08
					Semak/Belukar	-	0,23	-	-	0,23
		N/A	Kamang Baru	Muaro Takuang	Pertanian Lahan Kering Campur	-	-	0,04	-	0,04
					Semak/Belukar	-	-	4,55	-	4,55
3	HP Pemberdayaan Masyarakat	N/A		Muaro Takuang	Semak/Belukar	-	-	2,79	-	2,79
4	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK	PT Multikarya Lisun Prima	Kamang Baru	Aie Amo	Pertanian Lahan Kering Campur	-	-	-	15,78	15,78
					Semak/Belukar	0,18	-	-	611,64	611,82
				Padang Tarok	Perkebunan	-	-	-	110,52	110,52
					Pertanian Lahan Kering Campur	-	-	-	119,81	119,81
					Semak/Belukar	-	-	-	361,37	361,37
					Tanah Terbuka	-	-	-	37,95	37,95
				Tanjung Kaliang	Pertanian Lahan Kering Campur	-	-	-	98,56	98,56
					Semak/Belukar	-	-	-	912,26	912,26
					Tanah Terbuka	-	-	-	162,09	162,09
				Sijunjung	Durian Gadang	Semak/Belukar	-	-	-	38,13
Tanah Terbuka	-	-	-			7,03	7,03			
N/A	Kamang Baru	Padang Tarok	Pertanian Lahan Kering Campur	-	-	-	0,08	0,08		
Total						0,18	1,26	7,39	2.475,21	2.484,04

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 93 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

H.3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi yang terdapat di wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) terdapat pada 4 blok berbeda dengan total seluas 1.142,96 ha. Seluas 9,09 ha pada Blok HL Pemanfaatan, seluas 122,10 ha pada Blok HP Pemanfaatan HHK-HA, seluas 1.007,28 ha pada Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dan seluas 4,49 ha pada Blok HP Pemberdayaan Masyarakat yang sebagiannya terdapat area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Andalas Merapi Timber seluas 0,11 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 94 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
						HL	HP	HPT	
1	HL Pemanfaatan	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan						8,90
			Sangir	Lubuk Gadang	PLKC	4,02	-	0,00	
					Semak/ Belukar	4,97	-	-	
	N/A	Kabupaten Sijunjung						0,11	
		Kamang Baru	Muaro Takuang	Semak/ Belukar	0,11	-	-		
Sub Total HL Pemanfaatan						9,09	-	-	9,09

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)					
						HL	HP	HPT						
2	HP Peman- faatan HHK- HA	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan											
			Sangir	Lubuk Gadang	PLKC	-	-	53,13	53,13					
					Semak/ Belukar	-	-	32,29	32,29					
			Sangir Jujuan	Padang Limau Sundai	Semak/ Belukar	-	-	25,47	25,47					
			Sungai Pagu	Pasir Talang Timur	Semak/ Belukar	-	-	11,21	11,21					
Sub Total HP Pemanfaatan HHK-HA						-	-	122,10	122,10					
3	HP Peman- faatan HHK- HT	N/A	Kabupaten Dharmasraya											
			Sembilan Koto	Koto Nan Em- pat Dibawah	Semak/ Belukar	-	22,42	-	22,42					
					Lubuak Karak	PLK	-	11,07	-	11,07				
						PLCK	-	104,39	-	104,39				
						Sawah	-	9,18	-	9,18				
						Semak/ Belukar	-	160,01	-	160,01				
			Silago	PLCK	-	121,04	-	121,04						
				Sawah	-	10,11	-	10,11						
				Semak/ Belukar	-	41,03	-	41,03						
			Kabupaten Sijunjung											
			Kamang Baru	Muaro Takuang	Semak/ Belukar	-	0,35	-	0,35					
			Kabupaten Solok Selatan											
			Sangir Batang Hari	Dusun Tengah	Perkebunan	-	391,24	-	391,24					
Pertanian Lahan Kering	-	33,03			-	33,03								
									Lubuk Ulang Aling	Semak/ Belukar	-	11,60	-	11,60
									Lubuk Ulang Aling Selatan	Pertanian Lahan Kering	-	51,21	-	51,21
										Semak/ Belukar	-	12,93	-	12,93
									Lubuk Ulang Aling Tengah	Perkebunan	-	19,99	-	19,99
Pertanian Lahan Kering	-	7,69	-	7,69										
Sub Total HP Pemanfaatan HHK-HT						-	1.007,28	-	1.007,28					

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
						HL	HP	HPT	
4	HP Pemberdayaan Masyarakat	PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan						
			Sangir	Lubuk Gadang	PLKC	-	-	0,11	0,11
		Kabupaten Dharmasraya							
	N/A	Sembilan Koto	Silago	PLKC	-	-	4,38	4,38	
Sub Total HP Pemberdayaan Masyarakat						-	-	4,49	4,49
Total						9,09	1.007,28	126,59	1.142,96

Ket: PLK: Pertanian Lahan Kering; PLKC: Pertanian Lahan Kering Campur

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 95 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari	kegiatan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

H.4. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi yang terdapat di wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) seluas 1.410,39 ha yang berada pada fungsi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 96 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	
						HP		
N/A	N/A	Dharmasraya	Koto Baru	Koto Padang	Perkebunan	17,14	17,14	
			Koto Besar	Bonjol	Perkebunan	897,97	897,97	
					Tanah Terbuka	20,37	20,37	
			Koto Besar	Perkebunan	10,02	10,02		
			Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Perkebunan	42,81	42,81	
		Sub Total Dharmasraya					988,31	988,31
		Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Dusun Tengah	Perkebunan	376,37	376,37	
				Lubuk Ulang Aling Tengah	Perkebunan	45,72	45,72	
		Sub Total Solok Selatan					422,09	422,09
		Total						1.410,39

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 97 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022				2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Program Penysadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi															
Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari	kegiatan	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

H.5. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi yang terdapat di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) terdapat pada fungsi Hutan Produksi Tetap dan hutan produksi terbatas dengan total seluas 187,16 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 98 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HP	HPT	
N/A	N/A	Pesisir Selatan	Lunang	Sindang Lunang	Perkebunan	88,98	-	88,98
					Pertanian Lahan Kering			
					Pertanian Lahan Kering Campur	0,91	-	0,91
					Semak/Belukar	21,15	-	21,15
					Tanah Terbuka	1,13	-	1,13
			Silaut	Silaut	Perkebunan	39,48	-	39,48
					Semak/Belukar	10,41	-	10,41
				Sungai Sirah	Pertanian Lahan Kering Campur	0,70	-	0,70
					Semak/Belukar	-	2,75	2,75
Total						184,41	2,75	187,16

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 99 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

H.6. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

Arahan spasial aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi yang terdapat di wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) terhitung seluas 197,42 ha dan pada Unit X terdapat area konsesi PBPB-HA atas nama PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 69,72 ha dan pada Unit XI merupakan area konsesi PBPB-HA atas nama PT. Minas Pagai Lumber seluas 127,70 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 100 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
						HP	
1	Unit X	PT Salaki Summa Sejahtera	Siberut Barat	Sigapokna	Pertanian Lahan Kering Campur	37,42	37,42
				Simalégi	Semak/Belukar	0,20	0,20
			Siberut Utara	Malancan	Pertanian Lahan Kering Campur	3,23	3,23
					Semak/Belukar	28,88	28,88
Sub Total PT Salaki Summa Sejahtera						69,72	69,72
2	Unit XI	PT Minas Pagai Lumber	Pagai Selatan	Makalo	Semak/Belukar	3,03	3,03
				Saumanganya	Semak/Belukar	6,73	6,73
			Pagai Utara	Silabu	Semak/Belukar	103,94	103,94
					Tanah Terbuka	1,19	1,19
			Sikakap	Taikako	Pertanian Lahan Kering	9,65	9,65
					Tanah Terbuka	3,17	3,17
			Sub Total PT Minas Pagai Lumber				
Total						197,42	197,42

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 101 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyejahteraan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi												
Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

I. Pengelolaan Tata Air Gambut

Pengelolaan lahan gambut merupakan aksi mitigasi kunci yang menentukan keberhasilan sektor kehutanan dan lahan menuju net sink. Melalui PerMenLHK No.15/2017, pemilik perizinan PBPH dan HGU yang terindikasi berada dalam ekosistem gambut, harus mempertahankan tinggi muka air lahan gambut di areanya tidak lebih dari 40 cm, melalui perbaikan tata air di lahan gambut. Aksi mitigasi dari mempertahankan tinggi muka air akan menghasilkan penurunan emisi dibandingkan tinggi muka air kondisi baseline untuk budidaya tanaman komersil.

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, tidak ditemukan adanya arahan spasial yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk pengelolaan tata air gambut pada Sub Nasional Sumatera Barat.

J. Pelaksanaan Restorasi Gambut

Di lahan gambut yang sudah terdegradasi, baik akibat konversi tutupan lahan, pengeringan, maupun kebakaran, memerlukan intervensi restorasi yang ditujukan untuk mengembalikan dan meningkatkan fungsi ekosistem lahan gambut, yakni melalui kegiatan pembasahan dan penanaman komoditas yang adaptif terhadap karakteristik alami lahan gambut atau paludiculture. Keberhasilan implementasi kebijakan tata air dan pelaksanaan restorasi lahan gambut akan berpengaruh terhadap penurunan risiko kebakaran lahan gambut.

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, tidak ditemukan adanya arahan spasial yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk pelaksanaan restorasi gambut pada Sub Nasional Sumatera Barat.

K. Perlindungan Areal Konservasi Tinggi

Konservasi keanekaragaman hayati program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang mencakup; (1) Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, (2) Pengelolaan Kawasan Konservasi, (3) Konservasi Spesies dan Genetik, dan (4) Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, serta juga merupakan bagian dari program peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pembinaan konservasi di luar kawasan hutan negara.

Dalam kerangka aksi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dimulai dari konservasi tumbuhan dan satwa liar, pelestarian dan perlindungan habitat, hingga pelibatan masyarakat lokal dan mengarusutamakan kearifan lokal.

Dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030, terdapat beberapa opsi skema yang dapat dilakukan untuk pengembangan area konservasi baru sesuai dengan jenis fungsi kawasan hutan, yaitu Taman Hutan Rakyat (Tahura), penyesuaian dalam tata ruang menjadi ruang hijau, ekosistem esensial, kawasan konservasi bernilai tinggi, penataan dan pengendalian fragmentasi habitat satwa pada area konsesi hutan.

K.1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk perlindungan areal konservasi tinggi seluas **104.072,61 ha** pada wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian, seluas 2.378,25 ha pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 102 dan seluas 101.649,36 ha pada areal yang belum memiliki izin sebagaimana yang disajikan pada Tabel 105.

K.1.1. Areal Berizin

Pada kawasan yang sudah memiliki izin, terdapat 3 (tiga) pemegang izin konsesi yang tersebar di 2 (dua) wilayah kabupaten, yaitu PT. Minas Pagai Lumber seluas 14,24 ha dan PT. Salaki Summa Sejahtera seluas 2,55 ha yang terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan PT. Multikarya Lisun Prima seluas 2.361,46 ha yang terletak di Kabupaten Sijunjung.

Tabel 102 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Memiliki Izin

No	Pemegang Izin	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
						APL	HP	HPK	
1	PT Minas Pagai Lumber	Kepulauan Mentawai	Pagai Selatan	Sinaka	Hutan Mangrove Primer	0,98	13,27	-	14,24
	Sub Total PT Minas Pagai Lumber					0,98	13,27	-	14,24
2	PT Multikarya Lisun Prima	Sijunjung	Kamang Baru	Aie Amo	HLKS	4,62	-	-	4,62
				Padang Tarok	HLKP	0,07	-	667,68	667,74
					HLKS	-	-	1.052,01	1.052,01
				Tanjung Kaliang	HLKS	15,00	-	-	15,00
			Sijunjung	Durian Gadang	HLKP	-	-	158,37	158,37
				HLKS	-	-	461,75	461,75	
			Sumpur Kudus	Unggan	HLKS	1,97	-	-	1,97
Sub Total PT Multikarya Lisun Prima					21,66	-	2.339,80	2.361,46	
3	PT Salaki Summa Sejahtera	Kepulauan Mentawai	Siberut Barat	Sigapokna	HLKS	-	0,68	-	0,68
				Simalegi	HLKS	-	1,87	-	1,87
				Sub Total PT Salaki Summa Sejahtera					-
Total						22,63	15,82	2.339,80	2.378,25

Ket: HLKP: Hutan Lahan Kering Primer; HLKS: Hutan Lahan Kering Sekunder
Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Sebagai aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi, PBPH atas nama PT. Minas Pagai Lumber di Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga melakukan strategi berupa sosialisasi perlindungan mangrove mengingat areal sasarannya berada di hutan mangrove primer seluas 14,24 ha. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh PT. Minas Pagai Lumber dalam mendukung aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi di areal izinnya selengkapnyanya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 103 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)	Tahun RKT
			APL	HP		
Pagai Selatan	Sinaka	Hutan Mangrove Primer	0,98	13,27	14,24	2023
Sub Total PT Minas Pagai Lumber			0,98	13,27	14,24	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022; PT. Minas Pagai Lumber, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 104 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Nursery dan Penanaman Penyulaman												
Penyemaian bibit dan penamaan [batang]	Terjaganya hutan mangrove	batang	14.240	-	-	14.240	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT. Minas Pagai Lumber, 2022

K1.1.2. Areal Tidak Berizin

Sementara pada areal yang belum memiliki izin, lokasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang paling luas terletak di Kabupaten Solok seluas 17.653,86 ha (17,37%) dan yang paling sempit terletak di Kota Solok seluas 27,99 ha (0,03%).

Tabel 105 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Tidak Berizin

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Fungsi Kawasan					Luas Total (ha)	
		APL	HL	HP	HPK	HPT		
1	Agam	4.154,38	6,63		155,81		4.316,81	4,25%
2	Dharmasraya	4.689,45		7,06	7.709,58	1,17	12.407,26	12,21%
3	Kepulauan Mentawai	3.915,44	1.141,76	80,92	1.002,34		6.140,45	6,04%
4	Kota Padang	280,27	42,77				323,04	0,32%
5	Kota Padang Panjang	37,81					37,81	0,04%
6	Kota Sawahlunto	63,33				0,93	64,26	0,06%
7	Kota Solok	27,99					27,99	0,03%

No	Kabupaten/Kota	Luas Menurut Fungsi Kawasan					Luas Total (ha)	
		APL	HL	HP	HPK	HPT		
8	Lima Puluh Kota	7.554,17	48,19		3.180,52	391,00	11.173,88	10,99%
9	Padang Pariaman	653,20					653,20	0,64%
10	Pasaman	6.794,21	597,84		1.663,10	291,20	9.346,34	9,19%
11	Pasaman Barat	4.998,80	28,39	0,31	17,06		5.044,57	4,96%
12	Pesisir Selatan	4.651,55			5.167,34	2.308,64	12.127,53	11,93%
13	Sijunjung	6.697,77	10,61	1,20	433,40	3,38	7.146,36	7,03%
14	Solok	17.297,99	17,61		333,94	4,32	17.653,86	17,37%
15	Solok Selatan	9.479,77	3,61		3.952,00	0,78	13.436,16	13,22%
16	Tanah Datar	1.748,70	1,12				1.749,82	1,72%
Total		73.044,84	1.898,52	89,50	23.615,09	3.001,42	101.649,36	100%

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 106 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Agam

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
				APL	HL	HPK	
1	Ampek Nagari	Batu Kambing	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	0,27	-	0,27
2	Banuhampu	Cingkariang	Hutan Lahan Kering Sekunder	4,03	-	-	4,03
		Pakan Sinayan	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,38	-	-	0,38
		Sungai Tanang	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,39	-	-	0,39
3	Baso	Padang Tarok	Hutan Lahan Kering Sekunder	6,14	-	-	6,14
		Salo	Hutan Lahan Kering Sekunder	35,25	-	-	35,25
		Simarasok	Hutan Lahan Kering Sekunder	212,74	-	-	212,74
		Tabek Panjang	Hutan Lahan Kering Sekunder	13,82	-	-	13,82
4	IV Koto	Balingka	Hutan Lahan Kering Primer	6,83	-	-	6,83
			Hutan Lahan Kering Sekunder	499,41	-	-	499,41
		Koto Tuo	Hutan Lahan Kering Sekunder	11,26	-	-	11,26
5	Kamang Magek	Kamang Hilia	Hutan Lahan Kering Sekunder	73,86	-	-	73,86
		Kamang Mudiak	Hutan Lahan Kering Sekunder	632,45	-	-	632,45
6	Malalak	Malalak Timur	Hutan Lahan Kering Sekunder	81,87	-	-	81,87
7	Matur	Matua Mudiak	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,30	-	-	0,30
8	Palupuh	Koto Rantang	Hutan Lahan Kering Sekunder	297,95	-	-	297,95
		Nan Tujuh	Hutan Lahan Kering Sekunder	934,86	-	-	934,86
		Pagadih	Hutan Lahan Kering Sekunder	75,39	-	-	75,39
		Pasia Laweh	Hutan Lahan Kering Sekunder	788,88	-	-	788,88

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
				APL	HL	HPK	
9	Pelembaran	Ampek Koto Palembang	Hutan Lahan Kering Primer	-	0,15	-	0,15
			Hutan Lahan Kering Sekunder	182,86	0,13	-	182,99
		Baringin	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,45	0,26	-	0,71
		Salareh Aia	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	-	155,81	155,81
		Tigo Koto Silungkang	Hutan Lahan Kering Sekunder	209,52	3,33	-	212,85
10	Tanjung Raya	Duo Koto	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	0,41	-	0,41
		Koto Kaciak	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	0,32	-	0,32
		Paninjauan	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	1,75	-	1,75
11	Tilatang Kamang	Koto Tangah	Hutan Lahan Kering Sekunder	85,74	-	-	85,74
Sub Total Kabupaten Agam				4.154,38	6,63	155,81	4.316,81

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 107 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HP	HPK	HPT	
1	Asam Jujuhan	Alahan Nan Tigo	Hutan Lahan Kering Sekunder	109,86	-	-	-	109,86
		Lubuk Besar	Hutan Lahan Kering Primer	75,21	7,06	-	-	82,28
			Hutan Lahan Kering Sekunder	244,63	-	-	-	244,63
2	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	Hutan Lahan Kering Sekunder	7,92	-	-	-	7,92
3	Sembilan Koto	Banai	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.584,24	-	6.359,77	1,11	7.945,12
		Koto Nan Empat Dibawah	Hutan Lahan Kering Sekunder	551,95	-	113,45	-	665,40
		Lubuak Karak	Hutan Lahan Kering Sekunder	343,77	-	-	0,06	343,83
		Silago	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.742,38	-	1.236,36	-	2.978,74
4	Sitiung	Gunung Medan	Hutan Lahan Kering Sekunder	29,49	-	-	-	29,49
Sub Total Kabupaten Dharmasraya				4.689,45	7,06	7.709,58	1,17	12.407,26

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 108 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPK	
1	Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	-	-	0,54	-	0,54
			Hutan Mangrove Primer	-	-	14,33	-	14,33
			Hutan Rawa Sekunder	-	-	1,93	-	1,93
		Makalo	Hutan Mangrove Primer	279,71	-	-	-	279,71
		Sinaka	Hutan Mangrove Primer	1.100,58	-	1,05	-	1.101,63
			Hutan Mangrove Sekunder	74,59	-	-	-	74,59
Hutan Rawa Sekunder	0,27		-	35,78	-	36,05		
2	Pagai Utara	Betumonga	Hutan Mangrove Primer	35,20	-	-	-	35,20
		Silabu	Hutan Mangrove Primer	75,51	-	-	-	75,51
3	Siberut Barat	Sigapokna	Hutan Mangrove Primer	90,72	-	-	-	90,72
			Hutan Rawa Sekunder	-	-	0,71	-	0,71
		Simalegi	HLK Sekunder	-	-	0,80	-	0,80
4	Siberut Barat Daya	Katurei	HLK Sekunder	-	107,02	-	15,23	122,25
			Hutan Mangrove Primer	70,08	227,68	17,50	129,07	444,34
			Hutan Mangrove Sekunder	23,58	141,64	-	102,72	267,94
			Hutan Rawa Sekunder	-	52,26	-	-	52,26
		Pasakiat Taileleu	Hutan Mangrove Primer	-	-	0,79	-	0,79
5	Siberut Selatan	Maileppet	Hutan Mangrove Primer	28,99	-	-	-	28,99
			Hutan Mangrove Sekunder	2,35	-	-	-	2,35
		Muara Siberut	HLK Sekunder	-	3,57	-	-	3,57
			Hutan Mangrove Primer	-	62,42	-	43,93	106,35
6	Siberut Tengah	Cimpungan	Hutan Mangrove Primer	217,45	111,13	2,33	141,71	472,62
		Saibi Samukop	HLK Sekunder	-	34,47	-	-	34,47
			Hutan Mangrove Primer	125,12	247,18	-	328,50	700,80
			Hutan Mangrove Sekunder	-	17,50	-	-	17,50
		Saliguma	HLK Sekunder	-	0,30	-	-	0,30
			Hutan Mangrove Primer	-	112,46	-	48,93	161,39

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPK	
7	Siberut Utara	Malancan	Hutan Mangrove Primer	157,09	-	-	20,60	177,70
		Muara Sikabaluhan	Hutan Mangrove Primer	73,87	8,01	-	72,71	154,58
			Hutan Rawa Sekunder	-	-	-	14,51	14,51
		Sirilogui	Hutan Mangrove Primer	123,18	16,13	-	84,41	223,72
			Hutan Mangrove Sekunder	2,82	-	-	-	2,82
8	Sikakap	Hutan Mangrove Primer	380,41	-	1,57	-	381,98	
		Hutan Mangrove Sekunder	82,19	-	-	-	82,19	
	Taikako	Hutan Mangrove Primer	168,19	-	-	-	168,19	
9	Sipora Selatan	Berilou	Hutan Mangrove Primer	-	-	2,85	-	2,85
		Bosua	Hutan Mangrove Primer	39,53	-	-	-	39,53
		Matobe	Hutan Mangrove Primer	4,34	-	-	-	4,34
		Nemnemleleu	Hutan Mangrove Primer	73,01	-	-	-	73,01
			Hutan Mangrove Sekunder	4,07	-	-	-	4,07
		Sioban	Hutan Mangrove Primer	71,17	-	-	-	71,17
10	Sipora Utara	Goisooinan	Hutan Mangrove Primer	322,19	-	-	-	322,19
		Tuapejat	Hutan Mangrove Primer	289,22	-	0,74	-	289,96
Sub Total Kabupaten Kepulauan Mentawai				3.915,44	1.141,76	80,92	1.002,34	6.140,45

Keterangan: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 109 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Padang

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
				APL	HL	
1	Bungus Teluk Kabung	Bungus Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	0,62	-	0,62
		Bungus Timur	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,13	-	0,13
		Teluk Kabung Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	24,97	0,52	25,49
			Hutan Mangrove Sekunder	24,60	-	24,60
		Teluk Kabung Tengah	Hutan Lahan Kering Sekunder	26,87	-	26,87
			Hutan Mangrove Sekunder	47,27	-	47,27
		Teluk Kabung Utara	Hutan Lahan Kering Primer	0,78	-	0,78
			Hutan Lahan Kering Sekunder	0,04	-	0,04
2	Koto Tengah	Balai Gadang	Hutan Lahan Kering Primer	3,31	-	3,31
			Hutan Lahan Kering Sekunder	0,40	-	0,40

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
				APL	HL	
		Lubuk Minturun	Hutan Lahan Kering Primer	2,75	-	2,75
			Hutan Lahan Kering Sekunder	11,73	-	11,73
3	Kuranji	Kuranji	Hutan Lahan Kering Primer	37,15	-	37,15
			Hutan Lahan Kering Sekunder	19,46	-	19,46
4	Lubuk Kilangan	Batu Gadang	Hutan Lahan Kering Primer	25,14	-	25,14
			Hutan Lahan Kering Sekunder	29,99	-	29,99
		Indarung	Hutan Lahan Kering Primer	-	33,13	33,13
			Hutan Lahan Kering Sekunder	0,70	8,40	9,10
5	Pauh	Lambung Bukik	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,66	-	1,66
		Limau Manis	Hutan Lahan Kering Primer	15,38	-	15,38
			Hutan Lahan Kering Sekunder	0,71	-	0,71
		Limau Manis Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	4,71	0,72	5,43
			Hutan Lahan Kering Sekunder	1,89	-	1,89
Sub Total Kota Padang				280,27	42,77	323,04

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 110 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Padang Panjang

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
			APL	
Padang Panjang Barat	Kampung Manggis	HLK Sekunder	25,23	25,23
	Silailing Bawah	HLK Sekunder	7,20	7,20
	Tanah Hitam	Hutan Lahan Kering Sekunder	5,37	5,37
Sub Total Kota Padang Panjang			37,81	37,81

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 111 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Sawahlunto

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
			APL	HPT	
Silungkang	Taratak Boncah	Hutan Lahan Kering Sekunder	63,33	0,93	64,26
Sub Total Kota Sawahlunto			63,33	0,93	64,26

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 112 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kota Solok

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
			APL		
Lubuk Sukarah	Tanah Garam	Hutan Lahan Kering Sekunder	27,99		27,99
Sub Total Kota Solok			27,99		27,99

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 113 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
1	Akabiluru	Batuhampar	HLK Sekunder	12,03	-	-	-	12,03
		Koto Tengah Batu Ampa	HLK Sekunder	10,70	-	-	-	10,70
		Pauh Sangik	HLK Sekunder	228,91	-	-	-	228,91
		Sariak Laweh	HLK Sekunder	33,25	-	-	-	33,25
		Suayan	HLK Sekunder	239,97	-	-	-	239,97
		Sungai Balantiak	HLK Sekunder	104,58	-	-	-	104,58
2	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	HLK Sekunder	143,75	-	-	-	143,75
		Maek	HLK Sekunder	1,60	-	-	-	1,60
3	Guguak	Kubang	HLK Sekunder	54,76	-	-	-	54,76
4	Gunuang Omeh	Koto Tinggi	HLK Sekunder	146,21	-	-	-	146,21
		Pandam Gadang	HLK Sekunder	73,39	-	-	-	73,39
5	Harau	Gurun	HLK Sekunder	0,38	-	-	-	0,38
		Harau	HLK Sekunder	17,77	15,97	-	-	33,73
		Pilubang	HLK Sekunder	124,89	-	-	-	124,89
		Sarilamak	HLK Primer	-	-	-	20,19	20,19
			HLK Sekunder	1.449,30	-	-	52,84	1.502,15
		Taram	HLK Sekunder	105,41	-	-	-	105,41
		Tarantang	HLK Sekunder	5,29	-	-	-	5,29
6	Kapur IX	Durian Tinggi	HLK Sekunder	-	-	-	5,55	5,55
		Galugur	HLK Primer	-	4,93	283,57	-	288,50
			HLK Sekunder	297,35	12,47	2.059,52	84,52	2.453,85
		Koto Bangun	HLK Sekunder	-	-	-	11,09	11,09

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
		Koto Lamo	HLK Sekunder	294,60	-	-	-	294,60
		Sialang	HLK Primer	-	0,59	-	-	0,59
			HLK Sekunder	9,20	0,05	674,03	0,26	683,54
7	Lareh Sago Halaban	Ampalu	HLK Sekunder	472,86	0,24	-	-	473,10
		Balai Panjang	HLK Sekunder	318,83	-	-	-	318,83
		Batu Payuang	HLK Sekunder	277,26	-	-	-	277,26
		Halaban	HLK Sekunder	474,92	-	-	-	474,92
		Sitanang	HLK Sekunder	954,68	-	-	-	954,68
8	Luak	Sungai Kamuyang	HLK Sekunder	0,87	-	-	-	0,87
9	Mungka	Simpang Kapuak	HLK Sekunder	-	0,70	-	-	0,70
10	Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	HLK Sekunder	85,35	-	-	-	85,35
			HLK Primer	-	-	-	17,66	17,66
		Koto Alam	HLK Sekunder	128,17	3,88	-	13,94	145,99
			Manggiling	HLK Sekunder	276,13	4,83	163,40	184,53
		Pangkalan	HLK Sekunder	291,28	3,51	-	0,42	295,22
		Tanjung Balik	HLK Sekunder	365,13	1,02	-	-	366,15
Tanjung Pauh	HLK Sekunder	0,05	-	-	-	0,05		
11	Payakumbuh	Piobang	HLK Sekunder	0,68	-	-	-	0,68
12	Suliki	Kurai	HLK Sekunder	172,97	-	-	-	172,97
		Suliki	HLK Sekunder	381,65	-	-	-	381,65
Sub Total Kabupaten Lima Puluh Kota				7.554,17	48,19	3.180,52	391,00	11.173,88

Keterangan: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 114 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Padang Pariaman

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)	
				APL		
1	2 X 11 Kayu Tanam	Anduriang	Hutan Lahan Kering Sekunder	222,96	222,96	
			Guguak	Hutan Lahan Kering Primer	23,51	23,51
				Hutan Lahan Kering Sekunder	15,34	15,34
2	Batang Anai	Sungai Buluah Utara	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,06	0,06	
3	Lubuk Alung	Lubuk Alung	Hutan Lahan Kering Primer	30,81	30,81	
			Hutan Lahan Kering Sekunder	360,52	360,52	
Sub Total Kabupaten Padang Pariaman				653,20	653,20	

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 115 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Pasaman

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
1	Bonjol	Ganggo Hilia	HLK Sekunder	279,62	-	-	-	279,62
		Ganggo Mudiak	HLK Sekunder	59,76	-	-	-	59,76
		Koto Kaciak	HLK Sekunder	15,59	1,63	-	-	17,22
2	Duo Koto	Cubadak	HLK Sekunder	891,40	-	524,75	-	1.416,15
		Simpang Tonang	HLK Sekunder	1.435,83	3,61	744,89	-	2.184,33
3	Lubuk Sikaping	Aia Manggih	HLK Sekunder	46,48	-	29,18	-	75,66
		Durian Tinggi	HLK Sekunder	13,13	-	-	-	13,13
		Jambak	HLK Sekunder	26,19	-	-	-	26,19
		Pauah	HLK Sekunder	62,70	-	-	-	62,70
		Sundata	HLK Sekunder	552,63	-	240,86	-	793,49
		Tanjung Baringin	HLK Sekunder	85,53	176,93	-	-	262,46
4	Mapat Tunggul	Lubuak Gadang	HLK Primer	0,88	23,01	-	-	23,89
		Muara Tais	HLK Primer	-	20,57	-	25,52	46,09
			HLK Sekunder	-	11,78	-	50,19	61,97
5	Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	HLK Primer	-	119,51	-	-	119,51
			HLK Sekunder	-	77,80	-	215,49	293,29
		Silayang	HLK Primer	0,18	1,82	-	-	2,01
			HLK Sekunder	612,71	-	-	-	612,71
6	Padang Gelugur	Bahagia Padang Gelugua	HLK Sekunder	55,79	-	-	-	55,79
7	Panti	Panti	HLK Sekunder	44,85	-	-	-	44,85
		Panti Selatan	HLK Sekunder	102,50	-	-	-	102,50
		Panti Timur	HLK Sekunder	95,26	-	-	-	95,26
8	Rao	Padang Mantinggi	HLK Sekunder	268,14	8,70	-	-	276,85
		Taruang Taruang	HLK Primer	-	15,52	-	-	15,52
			HLK Sekunder	-	2,14	-	-	2,14
9	Rao Selatan	Lansek Kadok	HLK Primer	-	2,91	-	-	2,91
			HLK Sekunder	31,13	3,20	-	-	34,33
		Lubuak Layang	HLK Sekunder	0,84	0,74	-	-	1,58
		Tanjung Betung	HLK Sekunder	25,48	-	-	-	25,48

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
10	Rao Utara	Koto Nopan	HLK Primer	930,57	93,46	-	-	1.024,03
			HLK Sekunder	397,11	27,85	-	-	424,95
		Koto Rajo	HLK Primer	401,58	2,74	-	-	404,31
			HLK Sekunder	46,10	-	-	-	46,10
		Languang	HLK Sekunder	77,85	-	-	-	77,85
11	Simpang Alahan Mati	Alahan Mati	HLK Sekunder	63,34	3,15	3,16	-	69,65
		Simpang	HLK Sekunder	161,48	0,76	-	-	162,23
12	Tigo Nagari	Binjai	HLK Sekunder	4,20	-	120,26	-	124,46
		Malampah	HLK Sekunder	5,37	-	-	-	5,37
Sub Total Kabupaten Pasaman				6.794,21	597,84	1.663,10	291,20	9.346,34

Ket: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 116 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Pasaman Barat

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPK	
1	Gunungtuleh	Muaro Kiawai	Hutan Lahan Kering Sekunder	40,34	-	-	-	40,34
		Rabi Jonggor	Hutan Lahan Kering Primer	-	7,49	-	-	7,49
			Hutan Lahan Kering Sekunder	2.595,60	3,46	-	-	2.599,06
2	Kinali	Katiagan	Hutan Mangrove Sekunder	89,01	-	-	-	89,01
3	Koto Balingka	Parit	Hutan Lahan Kering Sekunder	375,52	-	-	-	375,52
4	Lembah Melintang	Ujung Gading	Hutan Lahan Kering Primer	12,12	2,63	-	-	14,75
			Hutan Lahan Kering Sekunder	373,64	-	-	-	373,64
5	Ranah Batahan	Batahan	Hutan Lahan Kering Sekunder	409,41	-	-	-	409,41
6	Sungaiaur	Sungai Aua	Hutan Lahan Kering Primer	-	0,27	-	-	0,27
			Hutan Lahan Kering Sekunder	81,04	-	-	-	81,04
			Hutan Mangrove Sekunder	188,35	-	-	-	188,35
7	Sungaiberemas	Aia Bangih	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,61	7,71	-	-	8,33
			Hutan Mangrove Sekunder	55,87	-	0,31	-	56,19
			Hutan Rawa Sekunder	-	3,22	-	-	3,22

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPK	
8	Talamau	Kajai	Hutan Lahan Kering Primer	2,80	-	-	-	2,80
			Hutan Lahan Kering Sekunder	272,33	-	-	-	272,33
		Sinuruik	Hutan Lahan Kering Sekunder	420,08	3,62	-	17,06	440,76
		Talu	Hutan Lahan Kering Sekunder	82,08	-	-	-	82,08
Sub Total Kabupaten Pasaman Barat				4.998,80	28,39	0,31	17,06	5.044,57

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 117 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
				APL	HPK	HPT	
1	Airpura	Inderapura Utara	HLK Sekunder	-	-	156,82	156,82
		Lubuk Betung Inderapura	HLK Sekunder	-	-	127,77	127,77
2	Basa Ampek Balai Tapan	Koto Anau Tapan	Hutan Rawa Sekunder	-	943,25	-	943,25
		Tanjung Pondok Tapan	Hutan Rawa Sekunder	-	421,38	-	421,38
		Tapan	Hutan Rawa Sekunder	-	1.221,10	-	1.221,10
3	Batang Kapas	Iv Koto Hilie	HLK Sekunder	156,65	-	-	156,65
		Taluk Tigo Sakato	HLK Sekunder	14,38	-	-	14,38
		Teratak Tempatih Iv Koto Mudiek	HLK Primer	3,17	-	-	3,17
			HLK Sekunder	108,70	-	-	108,70
		Tuik Iv Koto Mudiek	HLK Sekunder	741,50	-	-	741,50
4	Bayang	Koto Baru Koto Berapak	HLK Primer	2,40	-	-	2,40
			HLK Sekunder	15,10	-	-	15,10
		Kubang Koto Berapak	HLK Sekunder	0,08	-	-	0,08
5	IV Jurai	Batu Kunik Lumpo	HLK Primer	6,02	-	-	6,02
		Koto Rawang	HLK Sekunder	11,84	-	-	11,84
		Lumpo	HLK Primer	4,74	-	-	4,74
		Painan Selatan Painan	HLK Sekunder	5,04	-	-	5,04
		Painan Timur Painan	HLK Sekunder	4,88	-	-	4,88
		Salido Sari Bulan	HLK Sekunder	132,71	-	-	132,71
		Taratak Tengah Lumpo	HLK Primer	0,46	-	-	0,46
			HLK Sekunder	6,55	-	-	6,55

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
				APL	HPK	HPT	
6	IV Nagari Bayang Utara	Koto Ranah	HLK Sekunder	271,60	-	-	271,60
		Limau Gadang Pancung Taba	HLK Primer	2,06	-	-	2,06
			HLK Sekunder	268,69	-	-	268,69
		Muaro Aie	HLK Primer	49,69	-	-	49,69
			HLK Sekunder	205,11	-	-	205,11
		Pancuang Taba	HLK Primer	123,11	-	-	123,11
			HLK Sekunder	359,28	-	-	359,28
Puluik-Puluik	HLK Sekunder	171,89	-	-	171,89		
Puluik-Puluik Selatan	HLK Sekunder	11,83	-	-	11,83		
7	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai	HLK Sekunder	18,05	-	-	18,05
		Barung-Barung Balantai Selatan	HLK Sekunder	83,62	-	-	83,62
		Barung-Barung Balantai Tengah	HLK Sekunder	11,99	-	-	11,99
		Cerocok Anau Ampang Pulai	HLK Sekunder	4,74	-	-	4,74
			Hutan Mangrove Primer	5,11	-	-	5,11
		Duku Utara	HLK Sekunder	53,68	-	-	53,68
		Kampung Baru Korong Nan Ampek	HLK Sekunder	0,73	-	-	0,73
		Mandeh	HLK Sekunder	357,07	-	-	357,07
		Setara Nanggalo	HLK Sekunder	104,99	-	-	104,99
		Siguntur	HLK Primer	3,69	-	-	3,69
			HLK Sekunder	49,44	-	-	49,44
Siguntur Tua	HLK Sekunder	203,18	-	-	203,18		
		Sungai Nyalo Mudiak Aia	HLK Sekunder	25,38	-	-	25,38
		Sungai Pinang	HLK Sekunder	336,68	-	-	336,68
8	Lengayang	Kambang	HLK Sekunder	17,96	-	-	17,96
		Kambang Timur	HLK Sekunder	17,49	-	20,12	37,61
		Kambang Utara	HLK Sekunder	149,23	-	108,95	258,18
		Lakitan Tengah	HLK Sekunder	-	-	10,13	10,13
9	Linggo Sari Baganti	Punggasan Timur	HLK Sekunder	-	-	31,98	31,98
		Sungai Sirah Air Haji	HLK Sekunder	-	0,21	-	0,21
10	Lunang	Lunang	HLK Sekunder	0,09	-	20,83	20,91
		Lunang Tengah	HLK Sekunder	-	-	46,29	46,29
		Lunang Utara	HLK Sekunder	-	-	20,79	20,79

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)
				APL	HPK	HPT	
11	Pancung Soal	Pondok Parian Lunang	HLK Sekunder	-	-	81,36	81,36
			Hutan Rawa Sekunder	174,72	572,87	-	747,59
		Sindang Lunang	HLK Sekunder	-	-	275,45	275,45
		Inderapura Selatan	HLK Sekunder	-	-	96,20	96,20
		Tluk Amplu Inderapura	Hutan Rawa Sekunder	-	26,00	-	26,00
		12	Ranah Ampek Hulu Tapan	Kubu Tapan	Hutan Rawa Sekunder	4,35	865,52
Simpang Gunung Tapan	Hutan Rawa Sekunder			-	612,56	-	612,56
Sungai Gambir Sako Tapan	HLK Sekunder			87,78	-	-	87,78
13	Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	HLK Sekunder	-	10,34	579,03	589,37
		Pelangai Kaciak	HLK Sekunder	-	-	373,26	373,26
		Sungai Liku Pelangai	HLK Sekunder	-	-	1,68	1,68
14	Silaut	Silaut	HLK Sekunder	-	-	41,02	41,02
			Hutan Rawa Sekunder	106,24	494,10	-	600,35
		Sungai Sirah	HLK Primer	-	-	196,27	196,27
			HLK Sekunder	-	-	120,70	120,70
15	Sutera	Ganting Mudiak Selatan Surantih	HLK Sekunder	85,11	-	-	85,11
			HLK Primer	0,84	-	-	0,84
		Ganting Mudiak Utara Surantih	HLK Sekunder	71,91	-	-	71,91
Sub Total Kabupaten Pesisir Selatan				4.651,55	5.167,34	2.308,64	12.127,53

Ket: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 118 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan					Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPK	HPT	
1	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	1.044,91	-	-	-	-	1.044,91
		Kamang	HLK Sekunder	39,43	-	-	-	-	39,43
		Kunangan Parik Rantang	HLK Sekunder	29,47	-	-	-	-	29,47
		Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	311,63	-	-	-	1,48	313,11
		Maloro	HLK Sekunder	420,93	-	-	-	-	420,93
		Muaro Takuang	HLK Sekunder	117,15	0,48	1,14	-	-	118,77

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan					Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPK	HPT	
		Padang Tarok	HLK Primer	107,31	-	-	116,58	0,06	223,95
			HLK Sekunder	356,25	10,08	-	303,30	-	669,64
		Siaur	HLK Sekunder	16,69	-	-	-	-	16,69
		Sungai Lansek	HLK Sekunder	92,66	-	-	-	-	92,66
		Tanjung Kaliang	HLK Sekunder	759,03	-	-	-	-	759,03
2	Koto VII	Padang Laweh	HLK Sekunder	189,28	-	-	-	-	189,28
3	Kupitan	Batu Manjular	HLK Sekunder	-	-	-	-	0,96	0,96
4	Lubuak Tarok	Buluah Kasok	HLK Sekunder	359,04	-	-	-	-	359,04
		Lubuak Tarok	HLK Sekunder	36,85	-	-	-	-	36,85
		Silongo	HLK Sekunder	0,93	-	-	-	-	0,93
5	Sijunjung	Aie Angek	HLK Sekunder	34,20	-	-	-	-	34,20
		Durian Gadang	HLK Primer	-	-	-	13,51	-	13,51
			HLK Sekunder	99,55	-	-	-	0,41	99,96
		Muaro	HLK Sekunder	0,18	-	-	-	-	0,18
		Paru	HLK Sekunder	54,23	-	-	-	-	54,23
		Silokek	HLK Sekunder	58,10	-	-	-	-	58,10
Solok Ambah	HLK Sekunder	32,03	-	-	-	-	32,03		
6	Sumpur Kudus	Manganti	HLK Sekunder	7,81	-	-	-	-	7,81
		Silantai	HLK Sekunder	0,73	-	-	-	-	0,73
		Sisawah	HLK Sekunder	687,32	-	-	-	-	687,32
		Sumpur Kudus	HLK Sekunder	7,97	0,05	-	-	-	8,01
		Sumpur Kudus Selatan	HLK Sekunder	55,26	-	-	-	-	55,26
		Tamparungo	HLK Sekunder	49,64	-	-	-	-	49,64
		Tanjung Bonai Aur Selatan	HLK Sekunder	5,23	-	-	-	-	5,23
		Tanjung Labuah	HLK Sekunder	3,45	-	-	-	-	3,45
Unggan	HLK Sekunder	188,14	-	-	-	0,46	188,61		
7	Tanjung Gadang	Langki	HLK Sekunder	190,08	-	-	-	-	190,08
		Pulasan	HLK Sekunder	327,98	-	-	-	-	327,98
		Sibakur	HLK Sekunder	588,69	-	-	-	-	588,69
		Tanjung Gadang	HLK Sekunder	5,19	-	-	-	-	5,19
		Tanjung Lolo	HLK Sekunder	404,87	-	-	-	-	404,87
		Taratak Baru	HLK Sekunder	5,39	-	-	-	-	5,39
		Timbulun	HLK Sekunder	10,21	-	0,06	-	-	10,27
Sub Total Kabupaten Sijunjung				6.697,77	10,61	1,20	433,40	3,38	7.146,36

Ket: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 119 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
1	Danau Kembar	Simpang Tanjung Nan IV	HLK Primer	864,56	-	-	-	864,56
			HLK Sekunder	1.168,78	-	-	-	1.168,78
2	Gunung Talang	Aie Batumbuak	HLK Primer	460,44	-	-	-	460,44
			HLK Sekunder	4,04	-	-	-	4,04
		Batang Barus	HLK Primer	86,55	-	-	-	86,55
			HLK Sekunder	7,27	-	-	-	7,27
3	Hiliran Gumanti	Sariak Alahan Tigo	HLK Sekunder	8,00	-	-	-	8,00
		Sungai Abu	HLK Sekunder	739,73	-	-	-	739,73
		Talang Babungo	HLK Sekunder	108,07	-	-	-	108,07
4	IX Koto Sungai Lasi	Siaro-Aro	HLK Sekunder	238,07	-	234,61	3,24	475,92
		Sungai Durian	HLK Sekunder	42,19	-	-	-	42,19
		Taruang-Taruang	HLK Sekunder	32,24	-	-	-	32,24
5	Junjung Sirih	Muaro Pingai	HLK Primer	8,86	-	-	-	8,86
			HLK Sekunder	37,07	-	-	-	37,07
		Panninggahan	HLK Primer	674,48	-	-	-	674,48
			HLK Sekunder	306,44	-	-	-	306,44
6	Kubung	Gantuang Ciri	HLK Sekunder	15,63	-	-	-	15,63
		Koto Hilalang	HLK Sekunder	8,74	-	-	-	8,74
		Selayo	HLK Primer	18,02	-	-	-	18,02
			HLK Sekunder	77,51	-	-	-	77,51
7	Lembah Gumanti	Aie Dingin	HLK Sekunder	2,86	-	-	-	2,86
		Alahan Panjang	HLK Sekunder	19,48	-	-	-	19,48
		Salimpat	HLK Sekunder	270,86	-	-	-	270,86
		Sungai Nanam	HLK Primer	3,03	-	-	-	3,03
			HLK Sekunder	221,18	-	-	-	221,18
8	Pantai Cermin	Lolo	HLK Sekunder	4,38	-	-	-	4,38
		Surian	HLK Primer	-	0,26	-	-	0,26
			HLK Sekunder	1,07	-	-	-	1,07
9	Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	1.245,33	-	-	0,41	1.245,74
		Sirukam	HLK Primer	461,41	-	-	-	461,41
			HLK Sekunder	1.149,50	-	8,42	-	1.157,92
		Supayang	HLK Sekunder	1.651,32	-	90,91	0,67	1.742,90

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
10	Tigo Lurah	Batu Bajanjang	HLK Sekunder	1.841,05	-	-	-	1.841,05
		Garabak Data	HLK Primer	273,43	-	-	-	273,43
			HLK Sekunder	1.631,47	17,35	-	-	1.648,82
		Rangkiang Luluh	HLK Primer	4,89	-	-	-	4,89
			HLK Sekunder	1.531,81	-	-	-	1.531,81
		Simanau	HLK Sekunder	529,94	-	-	-	529,94
		Tanjung Balik Sumiso	HLK Primer	336,01	-	-	-	336,01
HLK Sekunder	874,41		-	-	-	874,41		
11	X Koto Singkarak	Koto Sani	HLK Primer	142,05	-	-	-	142,05
			HLK Sekunder	55,80	-	-	-	55,80
		Saniangbaka	HLK Primer	72,76	-	-	-	72,76
			HLK Sekunder	67,26	-	-	-	67,26
Sub Total Kabupaten Solok				17.297,99	17,61	333,94	4,32	17.653,86

Ket: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 120 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Solok Selatan

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
1	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Tengah	HLK Sekunder	0,18	-	-	-	0,18
		Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	-	-	0,10	0,10
			HLK Sekunder	1.339,71	-	-	-	1.339,71
		Pakan Rabaa Utara	HLK Sekunder	36,56	-	-	-	36,56
2	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Primer	18,37	-	-	-	18,37
			HLK Sekunder	26,00	-	-	-	26,00
		Luak Kapau Alam Pauh Duo	HLK Primer	424,07	-	-	-	424,07
			HLK Sekunder	148,74	-	-	-	148,74
3	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Primer	34,25	-	-	-	34,25
			HLK Sekunder	16,37	0,52	-	0,09	16,98
		Lubuk Gadang Selatan	HLK Primer	215,36	-	-	-	215,36
			HLK Sekunder	185,75	-	-	-	185,75
		Lubuk Gadang Utara	HLK Sekunder	210,56	0,08	-	-	210,64
4	Sangir Balai Janggo	Sungai Kunyit	HLK Sekunder	95,04	-	-	-	95,04
		Talao Sungai Kunyit	HLK Sekunder	1.501,74	-	-	-	1.501,74

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HPK	HPT	
5	Sangir Batang Hari	Abai	HLK Sekunder	461,70	-	-	-	461,70
		Dusun Tengah	HLK Sekunder	167,40	-	648,38	-	815,78
		Lubuk Ulang Aling	HLK Sekunder	62,82	-	59,83	-	122,65
		Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Primer	312,21	-	983,69	-	1.295,90
			HLK Sekunder	3.706,73	2,94	2.260,10	-	5.969,77
		Lubuk Ulang Aling Tengah	HLK Sekunder	162,69	-	-	-	162,69
		Ranah Pantai Cermin	HLK Sekunder	61,55	-	-	-	61,55
Sitapus	HLK Sekunder	76,60	-	-	-	76,60		
6	Sangir Jujuan	Lubuk Malako	HLK Sekunder	14,49	-	-	-	14,49
		Padang Air Dingin	HLK Sekunder	128,75	0,06	-	-	128,81
		Padang Gantiang	HLK Sekunder	61,79	-	-	-	61,79
		Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	10,34	-	-	-	10,34
7	Sungai Pagu	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	0,59	0,59
Sub Total Kabupaten Solok Selatan				9.479,77	3,61	3.952,00	0,78	13.436,16

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 121 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi yang Tidak Berizin di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
				APL	HL	
1	Batipuah Selatan	Padang Laweh Malalo	Hutan Lahan Kering Primer	35,35	-	35,35
			Hutan Lahan Kering Sekunder	137,35	-	137,35
2	Batipuh	Batipuah Baruah	Hutan Lahan Kering Primer	258,81	-	258,81
			Hutan Lahan Kering Sekunder	120,35	-	120,35
3	Lintau Buo	Tigo Jangko	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	1,04	1,04
4	Lintau Buo Utara	Lubuak Jantan	Hutan Lahan Kering Sekunder	476,74	0,08	476,82
		Tanjung Bonai	Hutan Lahan Kering Sekunder	318,01	-	318,01
5	Pariangan	Sungai Jambu	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,56	-	1,56
6	X Koto	Jaho	Hutan Lahan Kering Sekunder	10,30	-	10,30
		Paninjauan	Hutan Lahan Kering Sekunder	3,55	-	3,55
		Panyalaian	Hutan Lahan Kering Sekunder	15,29	-	15,29
		Singgalang	Hutan Lahan Kering Primer	0,60	-	0,60
			Hutan Lahan Kering Sekunder	203,61	-	203,61
Tambangan	Hutan Lahan Kering Sekunder	167,18	-	167,18		

No	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
				APL	HL	
Sub Total Kabupaten Tanah Datar				1.748,70	1,12	1.749,82

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Mengingat KPH merupakan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, maka lokasi- lokasi yang menjadi sasaran aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi di wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dibebankan dan diakomodir melalui kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah KPH.

K.2. Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) terhitung seluas 224.277,57 ha yang tersebar di 6 (enam) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 211.165,27 ha dan pada fungsi kawasan hutan produksi terbatas seluas 12.316,44 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 122 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
					APL	HL	HP	HPT		
1	HL Inti	Kabupaten Lima Puluh Kota								
		Kapur IX	Sialang	HLK Primer	-	19,59	-	-	19,59	
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota				-	19,59	-	-	19,59
		Kabupaten Pasaman								
		Bonjol	Ganggo Mudiak	HLK Primer	-	377,11	-	-	377,11	
		Lubuk Sikaping	Durian Tinggi	HLK Primer	-	58,79	-	-	58,79	
			Pauah	HLK Primer	-	1,62	-	-	1,62	
			Tanjung Baringin	HLK Primer	-	177,83	-	-	177,83	
		Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	HLK Primer	-	14.130,83	-	-	14.130,83	
		Sub Total Kab. Pasaman				-	14.746,18	-	-	14.746,18
		Kabupaten Pasaman Barat								
		Gunungtuleh	Rabi Jonggor	HLK Primer	-	18,35	-	-	18,35	
		Koto Balingka	Parit	HLK Primer	-	30,74	-	-	30,74	
		Lembah Melintang	Ujung Gading	HLK Primer	-	3.359,86	-	-	3.359,86	
		Sungaiaur	Sungai Aua	HLK Primer	-	151,34	-	-	151,34	
		Sub Total Kab. Pasaman Barat				-	3.560,30	-	-	3.560,30
		Sub Total Blok HL Inti				-	18.326,06	-	-	18.326,06

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
					APL	HL	HP	HPT		
2	HL Pemanfaatan	Kabupaten Agam								
		Palupuh	Nan Tujuh	HLK Sekunder	-	92,08	-	-	92,08	
		Pelebayan	Tigo Koto Silungkang	HLK Sekunder	-	75,42	-	-	75,42	
		Sub Total Kab. Agam	-	167,50	-	-	167,50	-	-	
		Kabupaten Lima Puluh Kota								
		Kapur IX	Galugur	HLK Primer	-	0,26	-	-	0,26	
				HLK Sekunder	-	0,17	-	-	0,17	
			Sialang	HLK Sekunder	-	8,77	-	2,38	11,15	
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota	-	9,20	-	2,38	11,58	-	-	
		Kabupaten Pasaman								
		Bonjol	Ganggo Hilia	HLK Sekunder	-	364,81	-	-	364,81	
				Ganggo Mudiak	HLK Primer	-	444,88	-	-	444,88
					HLK Sekunder	-	961,56	-	-	961,56
				Koto Kaciak	HLK Sekunder	-	148,29	-	-	148,29
				Limo Koto	HLK Sekunder	-	213,41	-	-	213,41
		Duo Koto	Cubadak	HLK Primer	-	1.294,66	-	-	1.294,66	
				HLK Sekunder	-	8.804,40	-	-	8.804,40	
			Simpang Tonang	HLK Primer	-	1.502,61	-	-	1.502,61	
				HLK Sekunder	-	4.994,11	-	-	4.994,11	
		Lubuk Sikaping	Aia Manggih	HLK Primer	-	556,20	-	-	556,20	
				HLK Sekunder	-	3.061,67	-	-	3.061,67	
			Durian Tinggi	HLK Primer	-	275,92	-	-	275,92	
				HLK Sekunder	-	468,36	-	-	468,36	
Jambak	HLK Primer		-	844,20	-	-	844,20			
	HLK Sekunder		-	3.682,17	-	-	3.682,17			
HL Pemanfaatan	Pauah	HLK Primer	-	281,46	-	-	281,46			
		HLK Sekunder	-	383,66	-	-	383,66			
	Sundata	HLK Primer	-	1.779,09	-	-	1.779,09			
		HLK Sekunder	-	7.441,60	-	-	7.441,60			
	Tanjuang Baringin	HLK Primer	-	331,83	-	-	331,83			
		HLK Sekunder	-	1.784,71	-	-	1.784,71			

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HL	HP	HPT	
2	HL Pemanfaatan	Mapat Tunggul	Lubuak Gadang	HLK Primer	-	2.701,16	-	-	2.701,16
				HLK Sekunder	-	148,54	-	-	148,54
			Muara Tais	HLK Primer	-	4.672,75	-	-	4.672,75
				HLK Sekunder	-	3.117,17	-	-	3.117,17
			Pintu Padang	HLK Primer	-	71,86	-	-	71,86
		Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	HLK Primer	-	6.470,08	-	-	6.470,08
				HLK Sekunder	-	10.001,56	-	20,89	10.022,45
			Silayang	HLK Primer	-	1.524,34	-	-	1.524,34
				HLK Sekunder	-	3.783,74	-	-	3.783,74
		Padang Gelugur	Bahagia Padang Gelugua	HLK Sekunder	-	340,89	-	-	340,89
			Sontang	HLK Primer	-	226,83	-	-	226,83
			Cubadak	HLK Sekunder	-	10,65	-	-	10,65
		Panti	Panti	HLK Sekunder	-	863,02	-	-	863,02
			Panti Selatan	HLK Primer	-	1.218,63	-	-	1.218,63
				HLK Sekunder	-	5.202,26	-	-	5.202,26
			Panti Timur	HLK Sekunder	-	3.277,71	-	-	3.277,71
		Rao	Padang Mantinggi	HLK Primer	-	158,40	-	-	158,40
				HLK Sekunder	22,64	1.332,58	-	-	1.355,22
			Taruang Taruang	HLK Primer	-	1.936,49	-	-	1.936,49
				HLK Sekunder	-	385,22	-	-	385,22
		Rao Selatan	Lansek Kadok	HLK Primer	-	1.896,26	-	-	1.896,26
				HLK Sekunder	-	3.056,10	-	-	3.056,10
			Lubuak Layang	HLK Sekunder	-	220,33	-	-	220,33
			Tanjung Betung	HLK Sekunder	-	148,10	-	-	148,10
		Rao Utara	Koto Nopan	HLK Primer	-	31.374,97	-	-	31.374,97
				HLK Sekunder	-	2.949,31	-	-	2.949,31
			Koto Rajo	HLK Primer	0,44	11.881,50	-	-	11.881,94
				HLK Sekunder	1,58	2.012,26	-	-	2.013,84
			Languang	HLK Sekunder	-	465,26	-	-	465,26
		Simpang Alahan Mati	Alahan Mati	HLK Sekunder	0,15	474,61	-	-	474,76
			Simpang	HLK Sekunder	4,40	319,35	-	-	323,76
		Tigo Nagari	Malampah	HLK Primer	-	92,34	-	-	92,34
HLK Sekunder	-			633,27	-	-	633,27		
Sub Total Kab. Pasaman	29,21	142.587,14	-	20,89	142.637,24				

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HL	HP	HPT	
2	HL Pemanfaatan	Kabupaten Pasaman Barat							
		Gunungtuleh	Muaro Kiawai	HLK Sekunder	-	3.704,19	-	-	3.704,19
			Rabi Jonggor	HLK Primer	-	4.964,37	-	-	4.964,37
				HLK Sekunder	3,00	10.726,84	-	-	10.729,84
		Kinali	Katiagan	Hutan Man-grove Sekunder	-	18,47	-	-	18,47
				Hutan Rawa Sekunder	-	54,29	-	-	54,29
			Kinali	HLK Primer	-	1.505,51	-	-	1.505,51
				HLK Sekunder	-	849,13	-	-	849,13
				Hutan Rawa Sekunder	-	8,14	-	-	8,14
				Hutan Rawa Sekunder	-	8,14	-	-	8,14
		Koto Balingka	Parit	HLK Primer	-	955,66	-	-	955,66
				HLK Sekunder	-	969,51	-	-	969,51
				Hutan Man-grove Sekunder	-	39,26	-	-	39,26
		Lembah Melintang	Ujung Gading	HLK Primer	-	3.705,06	-	-	3.705,06
				HLK Sekunder	-	1.086,31	-	-	1.086,31
		Luhak Nan Duo	Koto Baru	HLK Primer	-	287,48	-	-	287,48
				HLK Sekunder	-	48,90	-	-	48,90
		Pasaman	Aua Kuniang	HLK Primer	-	2.506,09	-	-	2.506,09
				HLK Sekunder	-	453,04	-	-	453,04
			Lingkuang Aua	HLK Sekunder	-	319,34	-	1,84	321,18
		Ranah Batahan	Batahan	HLK Primer	-	3,93	-	-	3,93
				HLK Sekunder	-	3.730,37	-	-	3.730,37
		Sungaiaur	Sungai Aua	HLK Primer	-	1.088,26	-	-	1.088,26
				HLK Sekunder	-	302,00	-	-	302,00
				Hutan Man-grove Sekunder	-	54,72	-	-	54,72
		Sungaiberemas	Aia Bangih	HLK Sekunder	-	1.326,32	-	-	1.326,32
				Hutan Man-grove Sekunder	-	256,91	-	-	256,91
				Hutan Rawa Primer	-	257,01	-	-	257,01
				Hutan Rawa Sekunder	-	280,10	-	-	280,10

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
					APL	HL	HP	HPT		
		Talamau	Kajai	HLK Primer	-	1.094,21	-	-	1.094,21	
				HLK Sekunder	-	1.373,84	-	-	1.373,84	
			Sinuruik	HLK Primer	-	14,95	-	-	14,95	
				HLK Sekunder	-	7.785,37	-	-	7.785,37	
			Talu	HLK Sekunder	-	303,37	-	-	303,37	
		Sub Total Kab. Pasaman Barat				3,00	50.072,94		1,84	50.077,79
		Sub Total Blok HL Pemanfaatan				32,21	192.836,79	-	25,11	192.894,12
3	HP Pemanfaatan HHK-HT	Kabupaten Pasaman Barat								
		Sungaiberemas	Aia Bangih	Hutan Mangrove Sekunder	-	-	133,90	-	133,90	
		Sub Total Kab. Pasaman Barat				-	-	133,90	-	133,90
		Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HT				-	-	133,90	-	133,90
4	HP Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Pasaman								
		Lubuk Sikaping	Sundata	HLK Sekunder	-	-	-	26,67	26,67	
		Sub Total Kab. Pasaman				-	-	-	26,67	26,67
		Kabupaten Pasaman Barat								
		Pasaman	Aua Kuniang	HLK Primer	-	-	-	13,90	13,90	
				HLK Sekunder	-	-	-	29,76	29,76	
			Lingkuang Aua	HLK Sekunder	-	-	-	5,41	5,41	
		Sungaiberemas	Aia Bangih	HLK Sekunder	-	-	0,46	-	0,46	
Hutan Mangrove Sekunder	-			-	242,66	-	242,66			
Hutan Rawa Sekunder	-			-	1,31	-	1,31			
	Talamau	Kajai	HLK Primer	-	-		13,76	13,76		
			HLK Sekunder	-	-	0,58	118,15	118,73		
		Sinuruik	HLK Sekunder	-	-	201,62	7,59	209,21		
		Talu	HLK Sekunder	-	-	83,48		83,48		
		Sub Total Kab. Pasaman Barat				-	-	530,11	188,57	718,68
Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat				-	-	530,11	215,24	745,35		
5	HPT Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Agam								
		Palupuh	Nan Tujuh	HLK Sekunder	-	-	-	77,18	77,18	
		Sub Total Kab. Agam				-	-	-	77,18	77,18
		Kabupaten Pasaman								
		Bonjol	Ganggo Hilia	HLK Sekunder	-	-	-	542,60	542,60	
Ganggo Mudiak	HLK Sekunder		-	-	-	722,71	722,71			

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
		Duo Koto	Simpang Tonang	HLK Sekunder	-	-	-	1.235,86	1.235,86		
		Lubuk Sikaping	Jambak	HLK Primer	-	-	-	0,86	0,86		
				HLK Sekunder	-	-	-	4,11	4,11		
			Sundata	HLK Sekunder	-	-	-	49,99	49,99		
		Mapat Tunggul	Muara Tais	HLK Sekunder	-	-	-	14,44	14,44		
		Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	HLK Sekunder	-	0,32	-	1.227,84	1.228,17		
		Sub Total Kab. Pasaman					-	0,32	-	3.798,42	3.798,74
		Kabupaten Pasaman Barat									
		Pasaman	Aua Kuniang	HLK Primer	-	-	-	57,76	57,76		
				HLK Sekunder	-	-	-	111,24	111,24		
			Lingkuang Aua	HLK Sekunder	-	-	-	3,13	3,13		
		Sungaiberemas	Aia Bangih	Hutan Mangrove Sekunder	-	-	99,64	-	99,64		
		Talamau	Kajai	HLK Primer	-	-	-	82,94	82,94		
				HLK Sekunder	-	-	-	190,47	190,47		
			Sinuruik	HLK Sekunder	-	-	-	197,11	197,11		
Sub Total Kab. Pasaman Barat					-	-	99,64	642,66	742,29		
Sub Total Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat					-	0,32	99,64	4.518,25	4.618,21		
6	HPT Perlindungan	Kabupaten Lima Puluh Kota									
		Kapur IX	Galugur	HLK Sekunder	-	1,33	-	1,03	2,36		
			Sialang	HLK Sekunder	-	-	-	5,04	5,04		
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					-	1,33	-	6,07	7,40
		Kabupaten Pasaman									
		Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	HLK Primer	-	-	-	258,04	258,04		
				HLK Sekunder	-	0,76	-	7.293,73	7.294,49		
		Sub Total Kab. Pasaman					-	0,76	-	7.551,77	7.552,53
Sub Total Blok HPT Perlindungan					-	2,09	-	7.557,84	7.559,93		
Total					32,21	211.165,27	763,64	12.316,44	224.277,57		

Ket: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Pasaman Raya yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 69,35% dari luas total wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 17,60% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 123 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
1	HL Inti	18.334,56	18.326,06	3,54	99,95%	0,02%
2	HL Pemanfaatan	252.509,74	192.894,12	37.866,08	76,39%	19,63%
3	HP Pemanfaatan HHK-HT	5.797,18	133,90	-	2,31%	-
4	HP Pemberdayaan Masyarakat	12.075,21	745,35	-	6,17%	-
5	HPT Pemberdayaan Masyarakat	14.115,71	4.618,21	1.296,70	32,72%	28,08%
6	HPT Perlindungan	20.560,65	7.559,93	315,45	36,77%	4,17%
Total		323.392,05	224.277,57	39.481,75	69,35%	17,60%

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 37 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 39.481,75 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HL Pemanfaatan. Lembaga tersebut terdiri dari 11 unit Kelompok Tani (KT), 11 unit Kelompok Tani Hutan (KTH) dan 15 unit Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN). Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 124 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Inti					
A.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Primer	3,54
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					3,54
	Sub Total Blok HL Inti					
B	Blok HL Pemanfaatan					
B.1.	Kab. Agam					
1	Palembayan	Tigo Koto Silu- ngkang	PPHD	LPHD/N Tigo Koto Silu- ngkang	Hutan Lahan Kering Sekunder	74,84
	Sub Total Kab. Agam					74,84
B.2.	Kab. Pasaman					
1	Bonjol	Ganggo Hilia	PPHKm	KT Musus Saiyo	Hutan Lahan Kering Sekunder	169,84
2		Ganggo Mudiak	PPHD	LPHD/N Ganggo Mudiak	Hutan Lahan Kering Primer	328,14
					Hutan Lahan Kering Sekunder	704,34
3	Bonjol	Limo Koto	PPHD	LPHD/N Limo Koto	Hutan Lahan Kering Sekunder	138,63

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
4	Duo Koto	Nagari Cubadak	PPHKm	KT Beringin Sakti	Hutan Lahan Kering Sekunder	106,60
5			PPHKm	KT Rap Hita Siyo	Hutan Lahan Kering Sekunder	88,66
6			PPHKm	KTH Harapan Baru Batang Kundur	Hutan Lahan Kering Sekunder	80,81
7	Duo Koto	Nagari Simpang Tonang	PPHKm	KTH Pangduhu Maju	Hutan Lahan Kering Sekunder	127,77
8	Lubuk Silkaping	Jambak	PPHD	LPHD/N Jambak	Hutan Lahan Kering Primer	354,78
					Hutan Lahan Kering Sekunder	3.403,71
9		Nagari Tanjung Baringin	PPHKm	KT Piudang Sepakat	Hutan Lahan Kering Sekunder	149,64
10		Tanjung Baringin	PPHKm	KT Sepakat Bersaudara	Hutan Lahan Kering Sekunder	60,45
11	Mapat Tunggal Selatan	Lubuk Gadang	PPHD	LPHD/N Lubuk Gadang	Hutan Lahan Kering Primer	1.108,59
12		Silayang	PPHD	LPHD/N Silayang	Hutan Lahan Kering Primer	667,29
					Hutan Lahan Kering Sekunder	3.049,70
13	Mapat Tunggal	Muaro Tais	PPHD	LPHD/N Muaro Tais	Hutan Lahan Kering Primer	4.251,36
					Hutan Lahan Kering Sekunder	3.019,80
14	Padang Gelugur	Padang Gelugur	PPHKm	KT Saiyo Nagari	Hutan Lahan Kering Primer	90,99
15	Panti	Panti	PPHKm	KTH HARAPAN JAYA BATU AMPAR	Hutan Lahan Kering Sekunder	38,98
16	Rao	Padang Metinggi	PPHD	LPHD/N Padang Metinggi	Hutan Lahan Kering Primer	344,21
17		Tanjung Betung	PPHD	LPHD/N Tanjung Betung	Hutan Lahan Kering Primer	62,26
18	Rao Selatan	Nagari Lansek Kadok	PPHKm	KT Tombang Pinang	Hutan Lahan Kering Sekunder	64,44
19	Rao Utara	Koto Nopan	PPHD	Koto Nopan	Hutan Lahan Kering Primer	8.317,38
20		Nagari Langung	PPHKm	KTH Bukit Lestari	Hutan Lahan Kering Sekunder	187,00
21	Simpang Alahan Mati	Alahan Mati	PPHD	LPHD/N Alahan Mati	Hutan Lahan Kering Sekunder	332,40
22		Simpang	PPHD	LPHD Simpang	Hutan Lahan Kering Sekunder	314,23
Sub Total Kab. Pasaman						30.582,17
B.3. Kab. Pasaman Barat						
1	Kinali	Katiagan	PPHD	LPHD/N Katiagan	Hutan Mangrove Sekunder	18,47
2	Lembah Melintang	Ujung Gading	PPHKm	KTH Kemasyarakatan Roba Julu	Hutan Lahan Kering Primer	0,46
3			PPHKm	KTH Kemasyarakatan Situak	Hutan Lahan Kering Primer	103,39
					Hutan Lahan Kering Sekunder	67,73

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
4	Ranah Batahan	Batahan	PPHKm	KTH Gunung Sigantang	Hutan Lahan Kering Primer	130,72
					Hutan Lahan Kering Sekunder	288,79
5			PPHKm	KTH Islamic Centre Ummah	Hutan Lahan Kering Primer	0,11
		Hutan Lahan Kering Sekunder			2.799,09	
6		Nagari Desa Baru	PPHKm	KT Marguna Alam [Jorong Simpang Tolang]	Hutan Lahan Kering Sekunder	852,41
7					PPHKm	KT Gunung Leco
8		Sungai Aur	Sungai Aua	PPHKm	KTH Pasada Roha Bulu Laga	Hutan Lahan Kering Primer
	Hutan Lahan Kering Sekunder					232,48
9	Talamau	Nagari Kajai	PPHKm	KT Maju Bersama	Hutan Lahan Kering Primer	95,00
10		Sinuruik	PPHKm	KTH Ingin Makmur	Hutan Lahan Kering Sekunder	479,79
11					PPHKm	KTH Suka Menang Aia Kacang
Sub Total Kab. Pasaman Barat						7.209,07
Sub Total Blok HL Pemanfaatan						37.866,08
C Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat						
C.1. Kab. Pasaman						
1	Bonjol	Ganggo Hilia	PPHKm	KT Musus Saiyo	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
2		Ganggo Mudiak	PPHD	LPHD/N Ganggo Mudiak	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.216,93
3		Limo Koto	PPHD	LPHD/N Limo Koto	Hutan Lahan Kering Sekunder	72,58
4	Lubuk Silkaping	Jambak	PPHD	LPHD/N Jambak	Hutan Lahan Kering Primer	0,29
					Hutan Lahan Kering Sekunder	4,11
5	Mapat Tunggul	Muaro Tais	PPHD	LPHD/N Muaro Tais	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,28
Sub Total Kab. Pasaman						1.294,20
C.2. Kab. Pasaman Barat						
1	Talamau	Sinuruik	PPHKm	KTH Suka Menang Aia Kacang	Hutan Lahan Kering Sekunder	2,50
Sub Total Kab. Pasaman Barat						2,50
Sub Total Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat						1.296,70
D Blok HPT Perlindungan						
D.1. Kab. Pasaman						
1	Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sungai Lolo	PPHD	LPHD/N Muaro Sungai Lolo	Hutan Lahan Kering Sekunder	204,02
2			PPHKm	KT Pertemuan Saiyo	Hutan Lahan Kering Sekunder	111,43
Sub Total Kab. Pasaman						315,45
Sub Total Blok HPT Perlindungan						315,45
Total Arah PIAPS di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)						39.481,75

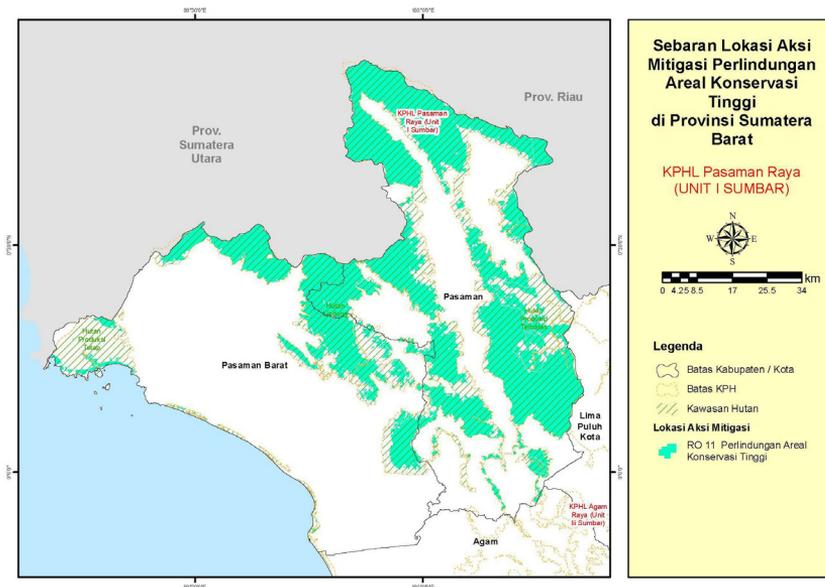
Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

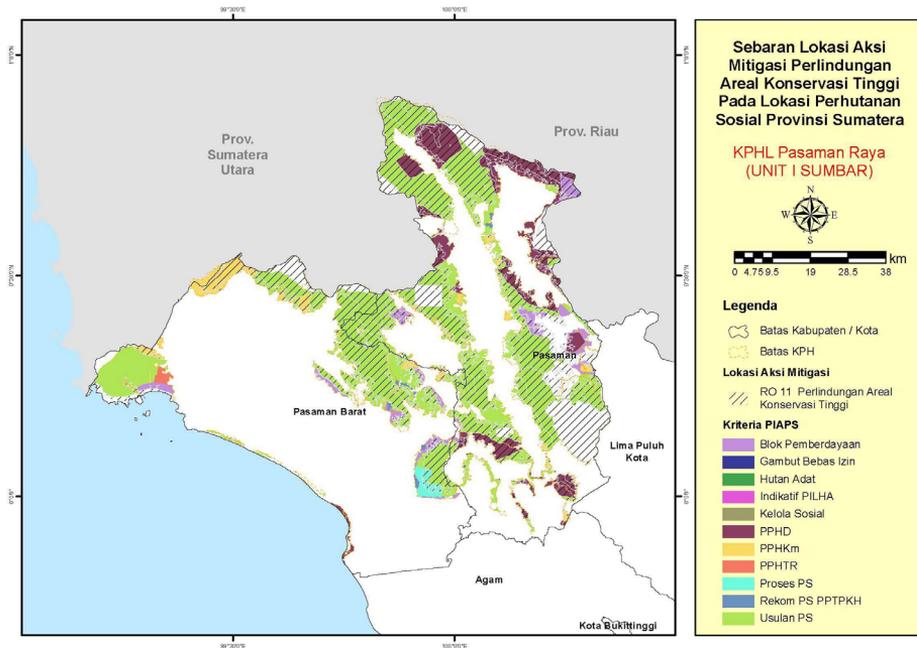
Tabel 125 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022				2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi															
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya diketahui masyarakat nagari	kegiatan	6	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-		

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 18 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)



Gambar 19 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) pada Areal Perhutanan Sosial

K.3. Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) terhitung seluas 69.534,18 ha yang tersebar di 7 (tujuh) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 58.898,37 ha dan pada fungsi kawasan hutan produksi terbatas seluas 10.635,82 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 126 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					HL	HPT	
1	HL Inti	Bukik Barisan	Maek	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.128,82	-	3.128,82
		Kapur IX	Koto Lamo	Hutan Lahan Kering Sekunder	5.804,60	-	5.804,60
			Lubuak Alai	Hutan Lahan Kering Sekunder	29,41	-	29,41
			Sialang	Hutan Lahan Kering Primer	1.946,80	-	1.946,80
				Hutan Lahan Kering Sekunder	4.695,63	-	4.695,63
Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	Hutan Lahan Kering Sekunder	363,67	-	363,67		

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					HL	HPT	
	Sub Total Blok HL Inti				15.968,92	-	15.968,92
2	HL Pemanfaatan	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	Hutan Lahan Kering Sekunder	2.212,70	-	2.212,70
			Maek	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.515,55	-	4.515,55
		Gunuang Omeh	Koto Tinggi	Hutan Lahan Kering Sekunder	2,96	-	2,96
		Harau	Harau	Hutan Lahan Kering Primer	5,85	-	5,85
				Hutan Lahan Kering Sekunder	830,93	-	830,93
		Kapur IX	Durian Tinggi	Hutan Lahan Kering Sekunder	378,69	-	378,69
				Hutan Lahan Kering Primer	1.622,50	-	1.622,50
			Galugur	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.947,80	-	1.947,80
				Hutan Lahan Kering Sekunder	196,82	-	196,82
			Koto Bangun	Hutan Lahan Kering Sekunder	196,82	-	196,82
			Koto Lamo	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.882,63	-	3.882,63
			Lubuak Alai	Hutan Lahan Kering Sekunder	274,71	-	274,71
			Muaro Paiti	Hutan Lahan Kering Sekunder	14,29	-	14,29
		Hutan Lahan Kering Primer		386,98	-	386,98	
		Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	2.466,31	-	2.466,31	
			Hutan Lahan Kering Sekunder	56,84	-	56,84	
		Mungka	Simpang Kapuak	Hutan Lahan Kering Sekunder	56,84	-	56,84
				Hutan Lahan Kering Sekunder	247,14	-	247,14
		Pangkalan Koto Baru	Gunuang Malintang	Hutan Lahan Kering Sekunder	8.269,50	-	8.269,50
				Hutan Lahan Kering Primer	158,13	-	158,13
			Koto Alam	Hutan Lahan Kering Sekunder	7.534,85	-	7.534,85
				Hutan Lahan Kering Sekunder	199,30	-	199,30
			Manggilang	Hutan Lahan Kering Primer	199,30	-	199,30
				Hutan Lahan Kering Sekunder	4.337,71	-	4.337,71
			Pangkalan	Hutan Lahan Kering Sekunder	720,50	-	720,50
			Tanjung Balik	Hutan Lahan Kering Primer	1,63	-	1,63
		Hutan Lahan Kering Sekunder		653,60	-	653,60	
		Tanjung Pauh	Hutan Lahan Kering Primer	82,25	-	82,25	
			Hutan Lahan Kering Sekunder	1.929,26	-	1.929,26	
			Sub Total Blok HL Pemanfaatan				42.929,44
3	HP Perlindungan	Kapur IX	Koto Lamo	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	412,00	412,00
			Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	2.682,37	2.682,37
	Sub Total Blok HP Perlindungan				-	3.094,36	3.094,36

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
					HL	HPT	
4	HP Pemanfaatan HHK-HA	Kapur IX	Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	1.521,66	1.521,66
			Manggiling	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	46,62	46,62
		Pangkalan Koto Baru	Tanjung Balik	Hutan Lahan Kering Primer	-	4,11	4,11
				Hutan Lahan Kering Sekunder	-	686,94	686,94
			Tanjung Pauh	Hutan Lahan Kering Primer	-	41,74	41,74
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HA					-	2.301,06	2.301,06
5	HP Pemanfaatan HHK-HT	Kapur IX	Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	43,52	43,52
6	HP Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK	Kapur IX	Galugur	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	598,31	598,31
			Koto Lamo	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	59,53	59,53
			Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	4.332,56	4.332,56
		Sub Total Blok HP Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK					-
7	HP Pemberdayaan Masyarakat	Kapur IX	Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	-	206,47	206,47
Total					58.898,37	10.635,82	69.534,18

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 63,36% dari luas total wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 16,59% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 127 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
1	HL Inti	18.779,72	15.968,92	2,78	85,03%	0,02%
2	HL Pemanfaatan	69.911,69	42.929,44	9.894,36	61,41%	23,05%
3	HP Pemanfaatan HHK-HA	6.014,96	2.301,06	73,74	38,26%	3,20%
4	HP Pemanfaatan HHK-HT	1.456,50	43,52	6,73	2,99%	15,46%

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan R0 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan R0 11 dari Luas Total	PS dari Arahan R0 11
5	HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK	7.334,32	4.990,40	606,12	68,04%	12,15%
6	HP Pemberdayaan Masyarakat	2.445,58	206,47	168,21	8,44%	81,47%
7	HP Perlindungan	3.794,48	3.094,36	786,86	81,55%	25,43%
	Total	109.737,25	69.534,18	11.538,81	63,36%	16,59%

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

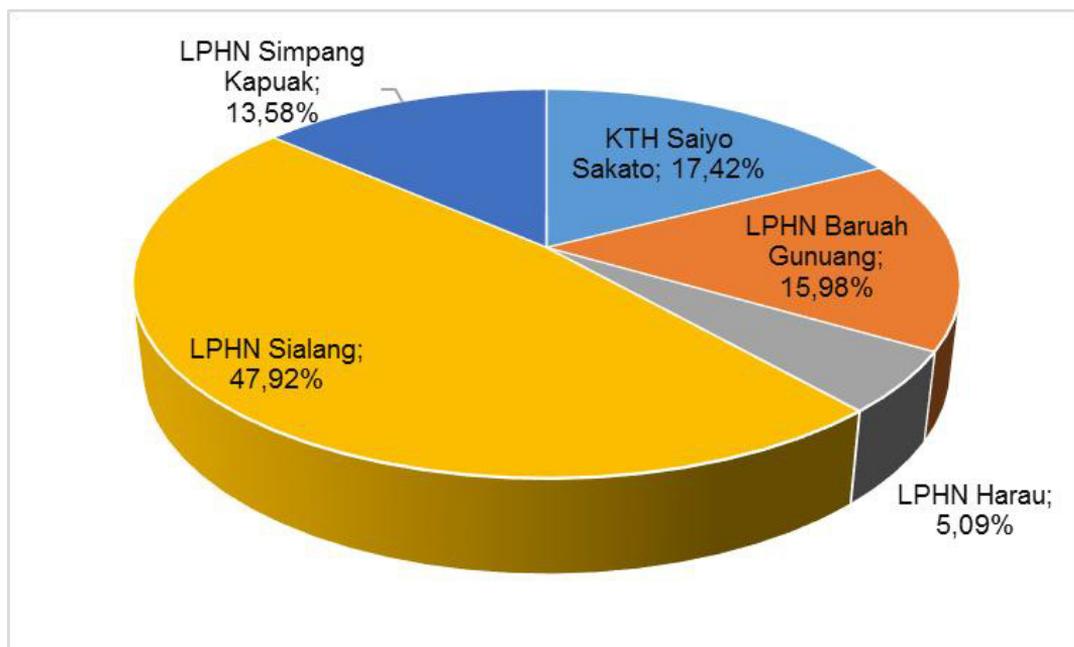
Tercatat sebanyak 5 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 11.538,81 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HL Pemanfaatan. Kelima pemegang izin tersebut yaitu: KTH Saiyo Sakato seluas 2.010,24 ha (17,42%); LPHN Baruah Gunuang seluas 1.844,13 ha (15,98%); LPHN Harau seluas 587,71 ha (5,09%); LPHD Sialang seluas 5.529,47 ha (47,92%); dan LPHN Simpang Kapuak seluas 1.567,27 ha (13,58%). Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 128 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Inti					
A.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Primer	0,09
					Hutan Lahan Kering Sekunder	2,69
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					2,78
	Sub Total Blok HL Inti					2,78
B	Blok HL Pemanfaatan					
B.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Bukit Barisan	Baruah Gunuang	PPHD	LPHD/N Baruah Gunuang	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.844,13
2	Harau	Harau	PPHD	LPHD/N Harau	Hutan Lahan Kering Sekunder	587,71
3	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Primer	385,70
					Hutan Lahan Kering Sekunder	3.499,43
4	Mungka	Simpang Kapuak	PPHD	LPHD/N Simpang Kapuak	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.567,27
5	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	PPHKm	KTH Saiyo Sakato	Hutan Lahan Kering Primer	82,19
					Hutan Lahan Kering Sekunder	1.927,94
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					9.894,36
	Sub Total Blok HL Pemanfaatan					9.894,36
C	Blok HP Pemanfaatan HHK-HA					
C.1.	Kab. Lima Puluh Kota					

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	73,63
2	Pangkalan Koto Baru	Tanjung Pauh	PPHKm	KTH Saiyo Sakato	Hutan Lahan Kering Primer	0,11
Sub Total Kab. Lima Puluh Kota						73,74
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HA						73,74
D	Blok HP Pemanfaatan HHK-HT					
D.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	6,73
Sub Total Kab. Lima Puluh Kota						6,73
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HT						6,73
E	Blok HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK					
E.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	606,12
Sub Total Kab. Lima Puluh Kota						606,12
Sub Total Blok HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK						606,12
F	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					
F.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	168,21
Sub Total Kab. Lima Puluh Kota						168,21
Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat						168,21
G	Blok HP Perlindungan					
G.1.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Kapur IX	Sialang	PPHD	LPHD/N Sialang	Hutan Lahan Kering Sekunder	786,86
Sub Total Kab. Lima Puluh Kota						786,86
Sub Total Blok HP Perlindungan						786,86
Total Arahkan PIAPS di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)						11.538,81

Sumber: Analisis Arahkan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022



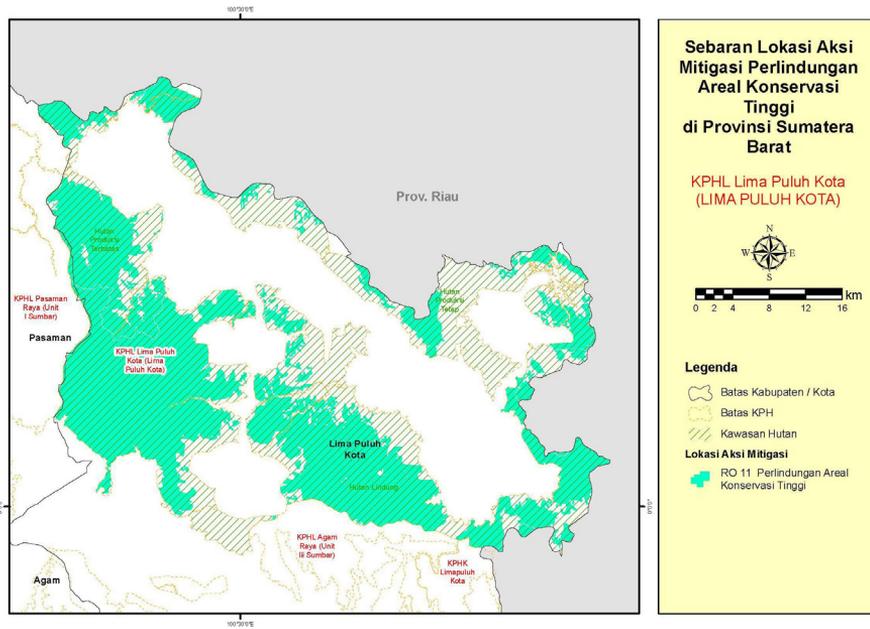
Gambar 20 | Persentase Luas Areal Perhutanan Sosial yang Menjadi Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPH Lima Puluh Kota (Unit II)

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

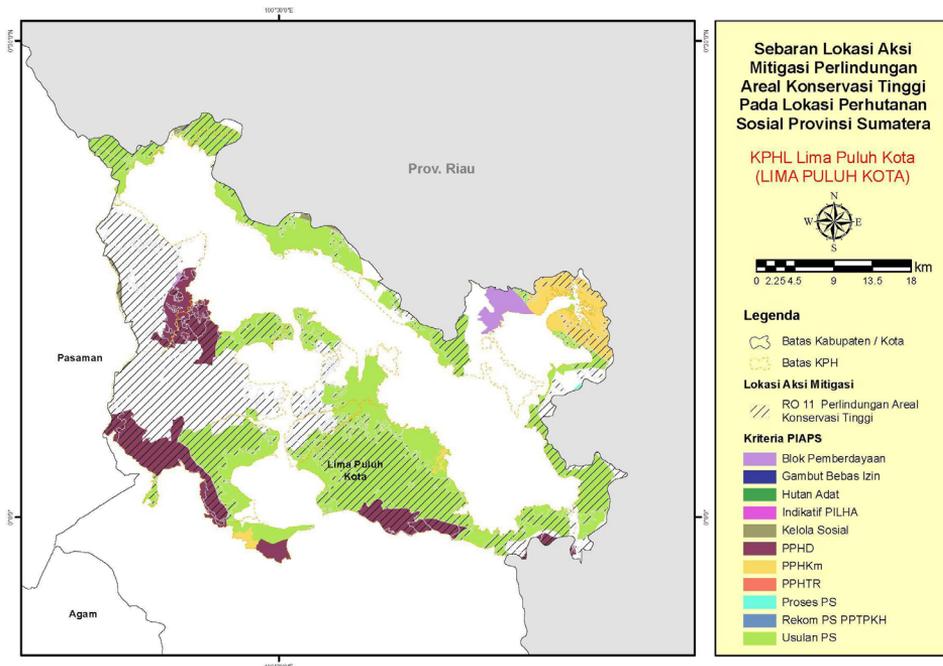
Tabel 129 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal	kegiatan	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota [kegiatan]	Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota diketahui masyarakat nagari											

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 21 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)



Gambar 22 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II) pada Areal Perhutanan Sosial

K.4. Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) terhitung seluas 26.359,23 ha yang tersebar di 3 (tiga) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 22.575,30 ha dan pada fungsi kawasan hutan produksi terbatas seluas 3.782,96 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 130 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Latan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)	
					HL	HP	HPT		
1	HL Inti	Kabupaten Agam							
		Kamang Magek	Kamang Mudiak	HLK Sekunder	333,13	-	-	333,13	
		Palupuh	Pasia Laweh	HLK Sekunder	304,92	-	-	304,92	
		Sub Total Kab. Agam			638,05	-	-	638,05	
		Kabupaten Lima Puluh Kota							
		Suliki	Kurai	HLK Sekunder	140,88	-	-	140,88	
			Suliki	HLK Sekunder	225,46	-	-	225,46	
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota			366,34	-	-	366,34	
		Sub Total Blok HL Inti			1.004,39	-	-	1.004,39	
		2	HL Pemanfaatan	Kabupaten Agam					
Ampek Nagari	Batu Kambang			HLK Primer	56,99	-	-	56,99	
				HLK Sekunder	52,43	-	-	52,43	
	Sitalang			HLK Primer	261,43	-	-	261,43	
				HLK Sekunder	20,31	-	-	20,31	
	Sitanang			HLK Primer	126,18	-	-	126,18	
				HLK Sekunder	291,23	-	-	291,23	
Baso	Padang Tarok			HLK Sekunder	278,75	-	-	278,75	
	Salo			HLK Sekunder	124,99	-	-	124,99	
	Simarasok			HLK Sekunder	762,34	-	-	762,34	
	Tabek Panjang			HLK Sekunder	42,92	-	-	42,92	
IV Koto	Balingka			HLK Sekunder	38,15	-	-	38,15	
	Sungai Landia			HLK Sekunder	107,49	-	-	107,49	
Kamang Magek	Kamang Hilia			HLK Sekunder	314,12	-	-	314,12	
	Kamang Mudiak			HLK Sekunder	2.488,48	-	-	2.488,48	
Lubuk Basung	Lubuk Basung			HLK Sekunder	19,24	-	-	19,24	
Malalak	Malalak			Malalak Selatan	HLK Sekunder	0,33	-	-	0,33
				Malalak Timur	HLK Sekunder	23,17	-	-	23,17
				Malalak Utara	HLK Sekunder	2,59	-	-	2,59

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)		
					HL	HP	HPT			
2	HL Pemanfaatan	Matur	Lawang	HLK Sekunder	37,13	-	-	37,13		
			Matua Mudiak	HLK Sekunder	281,21	-	-	281,21		
			Panta Pauh	HLK Sekunder	112,91	-	-	112,91		
		Palupuh	Koto Rantang	HLK Sekunder	1.449,59	-	-	1.449,59		
			Nan Tujuh	HLK Sekunder	50,08	-	-	50,08		
			Pasia Laweh	HLK Sekunder	1.387,59	-	-	1.387,59		
		Pelebayan	Ampek Koto Palembang	HLK Primer	89,74	-	-	89,74		
				HLK Sekunder	4,86	-	-	4,86		
			Baringin	HLK Sekunder	276,86	-	-	276,86		
			Salareh Aia	HLK Sekunder	254,57	-	-	254,57		
		Sungai Puar	Sungai Puar	HLK Primer	14,84	-	-	14,84		
				HLK Sekunder	20,38	-	-	20,38		
			Tigo Koto Silungkang	HLK Primer	94,65	-	-	94,65		
				HLK Sekunder	1.537,35	-	-	1.537,35		
		Tanjung Raya	Bayua	HLK Sekunder	121,75	-	-	121,75		
			Duo Koto	HLK Sekunder	46,86	-	-	46,86		
			Koto Gadang	HLK Primer	8,03	-	-	8,03		
				HLK Sekunder	95,08	-	-	95,08		
			Koto Kaciak	HLK Primer	2,59	-	-	2,59		
				HLK Sekunder	48,20	-	-	48,20		
			Koto Malintang	HLK Sekunder	123,59	-	-	123,59		
			Maninjau	HLK Sekunder	118,98	-	-	118,98		
			Paninjauan	HLK Primer	0,31	-	-	0,31		
				HLK Sekunder	79,22	-	-	79,22		
		Sungai Batang	HLK Sekunder	233,69	-	-	233,69			
		Tilatang Kamang	Koto Tengah	HLK Sekunder	428,37	-	-	428,37		
		Sub Total Kab. Agam					11.929,57	-	-	11.929,57
		Kota Payakumbuh								
		Payakumbuh Barat	Kubu Gadang	HLK Sekunder	61,24	-	-	61,24		
			Payolansek	HLK Sekunder	20,60	-	-	20,60		
		Payakumbuh Selatan	Balai Panjang	HLK Sekunder	26,08	-	-	26,08		
		Sub Total Kota Payakumbuh					107,92	-	-	107,92
Kabupaten Lima Puluh Kota										

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)		
					HL	HP	HPT			
2	HL Pemanfaatan	Akabiluru	Batuhampar	HLK Sekunder	47,51	-	-	47,51		
			Durian Gadang	HLK Sekunder	26,42	-	-	26,42		
			Koto Tengah Batu Ampa	HLK Sekunder	125,08	-	-	125,08		
			Pauh Sangik	HLK Sekunder	212,00	-	-	212,00		
			Sariak Laweh	HLK Sekunder	395,35	-	-	395,35		
			Suayan	HLK Sekunder	1.175,74	-	-	1.175,74		
			Sungai Balantiak	HLK Sekunder	592,66	-	-	592,66		
		Bukik Barisan	Maek	HLK Sekunder	22,74	-	-	22,74		
		Gunuang Omeh	Koto Tinggi	HLK Sekunder	98,54	-	-	98,54		
			Pandam Gadang	HLK Sekunder	345,49	-	-	345,49		
		Harau	Gurun	HLK Sekunder	177,37	-	-	177,37		
			Harau	HLK Sekunder	919,27	-	-	919,27		
			Sarilamak	HLK Primer	12,56	-	-	12,56		
				HLK Sekunder	144,44	-	-	144,44		
			Solok Bio Bio	HLK Sekunder	52,36	-	-	52,36		
			Taram	HLK Sekunder	734,17	-	-	734,17		
			Tarantang	HLK Sekunder	22,06	-	-	22,06		
		Lareh Sago Halaban	Balai Panjang	HLK Sekunder	150,59	-	-	150,59		
			Batu Payuang	HLK Sekunder	0,94	-	-	0,94		
		Mungka	Simpang Kapuak	HLK Sekunder	149,54	-	-	149,54		
			Talang Maur	HLK Sekunder	1.247,22	-	-	1.247,22		
		Pangkalan Koto Baru	Koto Alam	HLK Sekunder	304,95	-	-	304,95		
		Payakumbuh	Piobang	HLK Sekunder	108,41	-	-	108,41		
			Sungai Beringin	HLK Sekunder	26,09	-	-	26,09		
			Taeh Bukik	HLK Sekunder	198,91	-	-	198,91		
		Suliki	Kurai	HLK Sekunder	1.145,27	-	-	1.145,27		
			Suliki	HLK Sekunder	1.087,80	-	-	1.087,80		
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					9.523,48	-	-	9.523,48
		Kabupaten Pasaman								
			Bonjol	Limo Koto	HLK Sekunder	9,93	-	-	9,93	
		Sub Total Kab. Pasaman					9,93	-	-	9,93
		Sub Total Blok HL Pemanfaatan					21.570,91	-	-	21.570,91
3	Kabupaten Agam									
	Lubuk Basung	Lubuk Basung	HLK Primer	-	0,98	-	0,98			

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas (ha)		
					HL	HP	HPT			
3	HP Pem-berdayaan Masyarakat	Palupuh	Nan Tujuh	HLK Sekunder	-	-	1.305,30	1.305,30		
			Pagadih	HLK Sekunder	-	-	494,46	494,46		
			Pasia Laweh	HLK Sekunder	-	-	893,21	893,21		
		Pelebayan	Ampek Koto Palembang	HLK Sekunder	-	-	47,04	47,04		
					Sub Total Kab. Agam			-	0,98	2.740,00
		Kabupaten Lima Puluh Kota								
		Gunuang Omeh			Koto Tinggi	HLK Sekunder	-	-	818,10	818,10
					Pandam Gadang	HLK Sekunder	-	-	138,14	138,14
		Harau	Sarilamak	HLK Sekunder	-	-	83,00	83,00		
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota		-	-	1.039,24	1.039,24			
		Kabupaten Pasaman								
		Bonjol	Limo Koto	HLK Sekunder	-	-	3,72	3,72		
		Sub Total Kab. Pasaman		-	-	3,72	3,72			
		Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					-	0,98	3.782,96	3.783,93
		Total					22.575,30	0,98	3.782,96	26.359,23

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 45,61% dari luas total wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 63,60% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 131 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
1	HL Inti	1.004,39	1.004,39	564,64	100,00%	56,22%
2	HL Pemanfaatan	44.392,66	21.570,91	13.732,33	48,59%	63,66%
3	HP Khusus	16,77	-	-	-	-
4	HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK	87,03	-	-	-	-
5	HP Pemberdayaan Masyarakat	12.292,89	3.783,93	2.466,84	30,78%	65,19%
Total		57.793,74	26.359,23	16.763,81	45,61%	63,60%

Sumber: Analisis Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 26 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 16.763,81 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HL Pemanfaatan. Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 132 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Inti					
A.1.	Kab. Agam					
1	Kamang Magek	Kamang Mudiak	PPHD	LPHD/N Kamang Mudiak	Hutan Lahan Kering Sekunder	241,95
2	Palupuh	Pasia Laweh	PPHD	LPHD/N Pasia Laweh	Hutan Lahan Kering Sekunder	321,41
	Sub Total Kab. Agam					563,36
A.2.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Gunung Omeh	Padam Gadang	PPHD	LPHD Padam Gadang	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,13
2	Suliki	Kurai	PPHD	LPHD/N Kurai	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,15
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					1,28
	Sub Total Blok HL Inti					564,64
B	Blok HL Pemanfaatan					
B.1.	Kab. Agam					
1	Ampek Nagari	Sitalang	PPHD	LPHD/N Sitalang	Hutan Lahan Kering Primer	223,69
					Hutan Lahan Kering Sekunder	10,99
2	Baso	Koto Kaciak	PPHD	LPHD Koto Kaciak	Hutan Lahan Kering Primer	2,63
					Hutan Lahan Kering Sekunder	48,16
3		Padang Tarok	PPHD	LPHD Padang Tarok	Hutan Lahan Kering Sekunder	195,42
4		Simarasok	PPHD	LPHD Simarasok	Hutan Lahan Kering Sekunder	394,19
5	Kamang Magek	Kamang Hilia	PPHD	LPHD Kamang Hilia	Hutan Lahan Kering Sekunder	356,54
6	Kamang Magek	Kamang Mudiak	PPHD	LPHD/N Kamang Mudiak	Hutan Lahan Kering Sekunder	2.384,09
7	Lubuk Basung	Lubuk Basung	PPHD	LPHD Lubuk Basung	Hutan Lahan Kering Sekunder	19,22
8	Matur	Matua Mudik	PPHKm	KTH PADANG KUBUAK	Hutan Lahan Kering Sekunder	121,89
9	Palembayan	Baringin	PPHD	LPHD Baringin	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.128,41
10		Tigo Koto Silungkang	PPHD	LPHD/N Tigo Koto Silungkang	Hutan Lahan Kering Primer	129,25
					Hutan Lahan Kering Sekunder	1.644,31
11	Palupuh	Pasia Laweh	PPHD	LPHD/N Pasia Laweh	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.853,27
12	Tanjung Jaya	Paninjauan	PPHD	LPHD/N Paninjauan	Hutan Lahan Kering Primer	0,31
					Hutan Lahan Kering Sekunder	34,61
13	Tilatang Kamang	Koto Tangah	PPHKm	KTH Rambayan Manduang	Hutan Lahan Kering Sekunder	323,85
	Sub Total Kab. Agam					8.870,84
B.2.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Akabiluru	Sungai Balantiak	PPHD	LPHD/N Sungai Balantiak	Hutan Lahan Kering Sekunder	467,57

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
2	Gunuang Omeh	Nagari Koto Tinggi	PPHD	LPHD/N Koto Tinggi	Hutan Lahan Kering Sekunder	76,01
3		Padam Gadang	PPHD	LPHD Padam Gadang	Hutan Lahan Kering Sekunder	405,80
4	Harau	Harau	PPHD	LPHD/N Harau	Hutan Lahan Kering Sekunder	957,70
5		Sarilamak	PPHD	LPHD/N Sarilamak	Hutan Lahan Kering Primer	12,54
					Hutan Lahan Kering Sekunder	129,05
6		Taram	PPHD	LPHD Taram	Hutan Lahan Kering Sekunder	616,65
7	Lareh Lago Salaban	Balai Panjang	PPHD	LPHD/N Balai Panjang	Hutan Lahan Kering Sekunder	268,87
8	Mungka	Simpang Kapuak	PPHD	LPHD/N Simpang Kapuak	Hutan Lahan Kering Sekunder	486,56
9	Payakumbuh	Taeh Bukik	PPHD	LPHD Taeh Bukik	Hutan Lahan Kering Sekunder	62,55
10	Suliki	Kurai	PPHD	LPHD/N Kurai	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.346,98
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					4.830,27
B.3.	Kab. Pasaman					
1	Bonjol	Ganggo Hilia	PPHKm	KT Musus Saiyo	Hutan Lahan Kering Sekunder	31,23
2		Limo Koto	PPHD	LPHD/N Limo Koto	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
	Sub Total Kab. Pasaman					31,23
	Sub Total Blok HL Pemanfaatan					13.732,33
C	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					
C.1.	Kab. Agam					
1	Palupuh	Pagadih	PPHD	LPHD Pagadih	Hutan Lahan Kering Sekunder	333,68
2		Pasia Laweh	PPHD	LPHD/N Pasia Laweh	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.080,47
	Sub Total Kab. Agam					1.414,15
C.2.	Kab. Lima Puluh Kota					
1	Gunuang Omeh	Nagari Koto Tinggi	PPHD	LPHD/N Koto Tinggi	Hutan Lahan Kering Sekunder	690,67
2		Padam Gadang	PPHD	LPHD Padam Gadang	Hutan Lahan Kering Sekunder	279,02
3	Harau	Sarilamak	PPHD	LPHD/N Sarilamak	Hutan Lahan Kering Sekunder	82,97
	Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					1.052,66
C.3.	Kab. Pasaman					
1	Bonjol	Ganggo Hilia	PPHKm	KT Musus Saiyo	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,02
2		Limo Koto	PPHD	LPHD/N Limo Koto	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
	Sub Total Kab. Pasaman					0,03
	Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					2.466,84
	Total Arah PIAPS di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)					16.763,81

Sumber: Analisis Arah Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

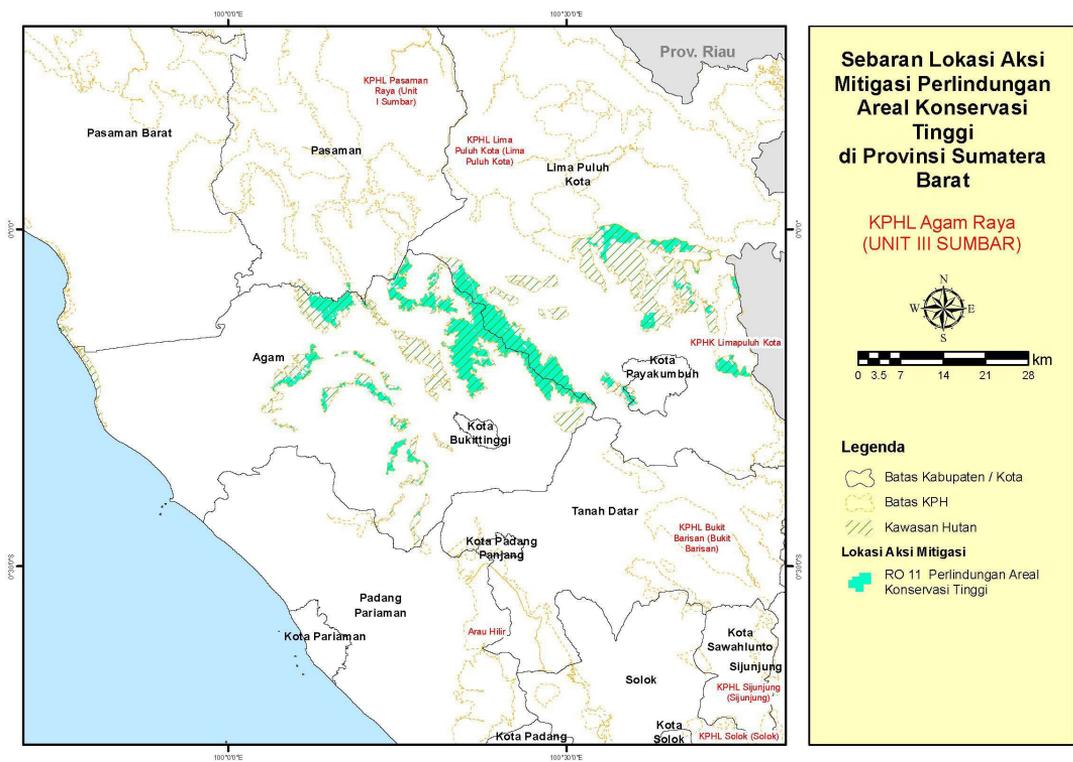
Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 133 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) pada Tahun 2022-2024

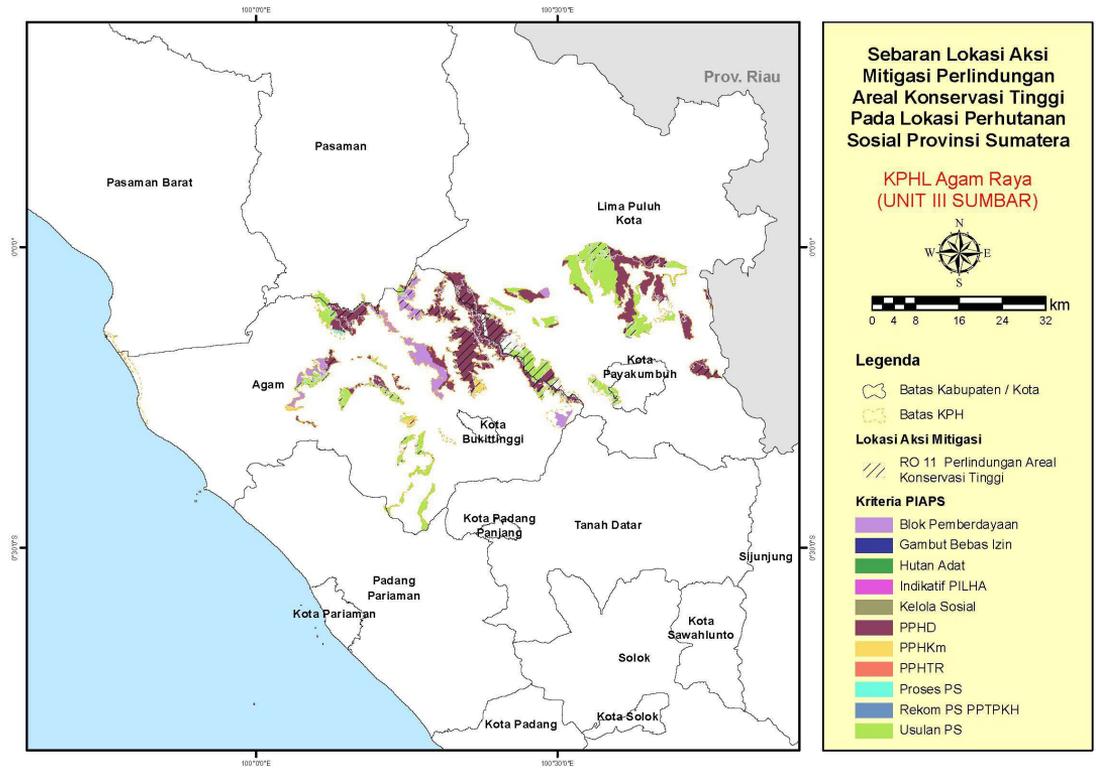
Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya diketahui masyarakat nagari	kegiatan	9	3	3	3	-	-	-	-	-	-
Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan												
Patroli pengendalian kebakaran hutan [kegiatan]	Jumlah patroli pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan	kegiatan	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Patroli dan operasi pengamanan hutan [kegiatan]	Jumlah kegiatan patroli dan operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan	kegiatan	27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Program Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan												
Pembangunan sarpras wisata [unit]	Jumlah sarana dan prasarana wisata yang terbangun	unit	6	2	-	-	2	-	-	-	2	-
Pemanfaatan HHBK [kegiatan]	Jumlah kegiatan dalam pemanfaatan HHBK	kegiatan	12	4	-	4	-	-	-	4	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat												
Pengembangan unit percontohan penyuluhan kehutanan [unit]	Jumlah unit percontohan penyuluhan kehutanan yang dibangun	unit	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-
Penyediaan alat ekonomi produktif [unit]	Jumlah alat ekonomi produktif yang tersedia	unit	5	1	-	2	-	-	-	-	2	-
Pengembangan stup lebah madu [stup koloni]	Jumlah lebah madu yang dikembangkan	stup koloni	600	200	-	200	-	-	-	-	200	-
Program Fasilitasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial												

Program Fasilitasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial									
Forum/workshop pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah workshop pengembangan perhutanan sosial yang dilaksanakan	kegiatan	12	2	2	2	2	2	2
Fasilitasi usulan perhutanan sosial	Jumlah perhutanan sosial yang difasilitasi	kelompok	96	16	16	16	16	16	16

Sumber: KPHL Agam Raya Unit III, 2022



Gambar 23 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)



Gambar 24 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) pada Areal Perhutanan Sosial

K.5. Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) terhitung seluas 42.369,81 ha yang tersebar di 6 (enam) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 42.171,40 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 135 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HL	HP	HPT	
1	HL Inti	Kabupaten Padang Pariaman							
		2 X 11 Kayu Tanam	Anduriang	HLK Primer	-	459,37	-	-	459,37
				HLK Sekunder	-	33,25	-	-	33,25
		Batang Anai	Sungai Buluah	HLK Primer	-	103,65	-	-	103,65
				Sungai Buluah Timur	HLK Primer	-	186,97	-	-
		Lubuk Alung	Lubuk Alung	HLK Primer	-	1.011,91	-	-	1.011,91
		Sub Total Kab. Padang Pariaman			-	1.795,13	-	-	1.795,13
Sub Total Blok HL Inti					-	1.795,13	-	-	1.795,13
2	HL Pemanfaatan	Kota Padang							
		Bungus Teluk Kabung	Bungus Barat	HLK Sekunder	-	176,35	-	-	176,35
			Bungus Selatan	HLK Primer	-	76,47	-	-	76,47
			Bungus Timur	HLK Primer	-	47,31	-	-	47,31
				HLK Sekunder	-	199,78	-	-	199,78
			Teluk Kabung Selatan	HLK Sekunder	-	770,84	-	-	770,84
				Hutan Mangrove Sekunder	-	5,13	-	-	5,13
			Teluk Kabung Tengah	HLK Sekunder	-	948,42	-	-	948,42
				Hutan Mangrove Sekunder	-	2,77	-	-	2,77
			Teluk Kabung Utara	HLK Primer	-	151,35	-	-	151,35
				HLK Sekunder	-	66,88	-	-	66,88
		Koto Tangah	Balai Gadang	HLK Primer	-	668,59	-	-	668,59
				HLK Sekunder	-	273,34	-	-	273,34
			Lubuk Minturun	HLK Primer	-	586,27	-	-	586,27
		HLK Sekunder		-	55,59	-	-	55,59	
		Kuranji	Gunung Sarik	HLK Sekunder	-	0,61	-	-	0,61
				Kuranji	HLK Primer	-	243,01	-	-
HLK Sekunder	-		63,68		-	-	63,68		
Lubuk Begalung	Gates Nan XX	HLK Sekunder	-	226,75	-	-	226,75		

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
2	HL Pemanfaatan		Kampung Jua Nan XX	HLK Sekunder	-	14,04	-	-	14,04		
			Pagambiran Ampalu Nan XX	HLK Sekunder	-	113,58	-	-	113,58		
			Pampangan Nan XX	HLK Sekunder	-	48,11	-	-	48,11		
		Lubuk Kilangan	Baringin	HLK Sekunder	-	108,55	-	-	108,55		
			Batu Gadang	HLK Primer	-	66,17	-	-	66,17		
				HLK Sekunder	-	176,05	-	-	176,05		
			Indarung	HLK Primer	-	180,25	-	-	180,25		
				HLK Sekunder	-	129,99	-	-	129,99		
		Tarantang	HLK Sekunder	-	35,51	-	-	35,51			
		Pauh	Lambung Bukik	HLK Primer	-	339,85	-	-	339,85		
				HLK Sekunder	-	234,44	-	-	234,44		
			Limau Manis	HLK Primer	-	784,16	-	-	784,16		
			Limau Manis Selatan	HLK Primer	-	124,44	-	-	124,44		
				HLK Sekunder	-	24,81	-	-	24,81		
		Sub Total Kota Padang					-	6.943,10	-	-	6.943,10
		Kota Padang Panjang									
		Padang Panjang Barat	Kampung Manggis	HLK Sekunder	-	109,40	-	-	-	109,40	
			Silaing Bawah	HLK Sekunder	-	1,98	-	-	-	1,98	
			Tanah Hitam	HLK Sekunder	-	88,82	-	-	-	88,82	
		Padang Panjang Timur	Koto Panjang	HLK Primer	-	1,51	-	-	-	1,51	
				HLK Sekunder	-	40,46	-	-	-	40,46	
		Sub Total Kota Padang Panjang					-	242,15	-	-	242,15
		Kota Sawahlunto									
		Barangin	Lumindai	HLK Sekunder	-	18,55	-	-	-	18,55	
		Lembah Segar	Lunto Barat	HLK Sekunder	-	1,45	-	-	-	1,45	
			Lunto Timur	HLK Sekunder	-	0,33	-	-	-	0,33	
		Sub Total Kota Sawahlunto					-	20,33	-	-	20,33
		Kota Solok									
		Lubuk Sikarah	Tanah Garam	HLK Primer	-	3,90	-	-	-	3,90	
				HLK Sekunder	-	15,77	-	-	-	15,77	
		Tanjung Harapan	Laing	HLK Sekunder	-	124,94	-	-	-	124,94	
		Sub Total Kota Solok					-	144,61	-	-	144,61
Kabupaten Lima Puluh Kota											

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
2	HL Pemanfaatan	Lareh Sago Halaban	Ampalu	HLK Sekunder	-	1.377,38	-	-	1.377,38		
			Halaban	HLK Sekunder	-	337,58	-	-	337,58		
			Sitanang	HLK Sekunder	-	156,59	-	-	156,59		
		Sub Total Kab. Lima Puluh Kota					-	1.871,55	-	-	1.871,55
		Kabupaten Padang Pariaman									
		2 X 11 Kayu Tanam	Anduriang	HLK Primer	-	620,16	-	-	-	620,16	
				HLK Sekunder	-	824,90	-	-	-	824,90	
			Guguak	HLK Primer	-	453,14	-	-	-	453,14	
				HLK Sekunder	1,98	649,00	-	-	-	650,98	
		Batang Anai	Kasang	HLK Primer	-	31,48	-	-	-	31,48	
				HLK Sekunder	-	166,13	-	-	-	166,13	
			Sungai Buluah	HLK Primer	-	29,18	-	-	-	29,18	
			Sungai Buluah Selatan	HLK Primer	-	154,83	-	-	-	154,83	
			Sungai Buluah Timur	HLK Primer	-	617,10	-	-	-	617,10	
				HLK Sekunder	-	32,73	-	-	-	32,73	
		Lubuk Alung	Lubuk Alung	HLK Primer	-	3.212,95	-	-	-	3.212,95	
				HLK Sekunder	-	823,90	-	-	-	823,90	
			Pasie Laweh	HLK Sekunder	-	128,46	-	-	-	128,46	
			Lubuk Alung								
		Patamuhan	Tandikek Utara	HLK Sekunder	-	2,07	-	-	-	2,07	
		V Koto Timur	Gunung Padang Alai	HLK Sekunder	-	237,20	-	-	-	237,20	
		Sub Total Kab. Padang Pariaman					1,98	7.983,25	-	-	7.985,23
		Kabupaten Pesisir Selatan									
		Bayang	Kapujan Koto Berapak	HLK Sekunder	-	23,83	-	-	-	23,83	
			Kubang Koto Berapak	HLK Sekunder	-	23,16	-	-	-	23,16	
		Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai	HLK Sekunder	-	636,27	-	-	-	636,27	
			Barung-Barung Balantai Selatan	HLK Sekunder	-	270,18	-	-	-	270,18	

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)			
					APL	HL	HP	HPT				
2	HL Pemanfaatan	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Tengah	HLK Primer	-	58,83	-	-	58,83			
				HLK Sekunder	-	146,58	-	-	146,58			
			Barung-Barung Balantai Timur	HLK Primer	-	168,19	-	-	168,19			
				HLK Sekunder	-	341,92	-	-	341,92			
			Duku	HLK Sekunder	-	11,02	-	-	11,02			
			Duku Utara	HLK Sekunder	-	248,09	-	-	248,09			
			Kampung Baru Korong Nan Ampek	HLK Primer	-	250,75	-	-	250,75			
				HLK Sekunder	-	476,86	-	-	476,86			
			Mandeh	HLK Sekunder	-	1.002,12	-	-	1.002,12			
			Setara Nangalo	HLK Sekunder	-	58,52	-	-	58,52			
			Siguntur	HLK Primer	-	203,50	-	-	203,50			
				HLK Sekunder	-	196,31	-	-	196,31			
			Siguntur Tua	HLK Primer	-	22,92	-	-	22,92			
				HLK Sekunder	-	676,28	-	-	676,28			
			Sungai Nyalo Mudiak Aia	HLK Sekunder	-	974,43	-	-	974,43			
			Sungai Pinang	HLK Sekunder	-	2.681,16	-	-	2.681,16			
			Taratak Sungai Lundang	HLK Primer	-	40,00	-	-	40,00			
				HLK Sekunder	-	225,51	-	-	225,51			
			Sub Total Kab. Pesisir Selatan					-	8.736,41	-	-	8.736,41
			Kabupaten Sijunjung									
		Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	HLK Sekunder	-	9,06	-	-	-	9,06		
				Unggan	-	15,97	-	-	-	15,97		
		Sub Total Kab. Sijunjung					-	25,03	-	-	25,03	
		Kabupaten Solok										
		IX Koto Sungai Lasi	Guguak Sarai	HLK Sekunder	-	101,65	-	-	-	101,65		
				Indudur	-	196,28	-	-	-	196,28		
				Koto Laweh	-	25,15	-	-	-	25,15		
				Pianggu	-	49,58	-	-	-	49,58		
		Junjung Sirih	Paninggahan	HLK Primer	-	11,41	-	-	-	11,41		
				HLK Sekunder	-	10,61	-	-	-	10,61		
		Kubung	Gantuang Ciri	HLK Primer	-	148,97	-	-	-	148,97		
				HLK Sekunder	-	39,47	-	-	-	39,47		
			Koto Hilalang	HLK Primer	-	5,49	-	-	-	5,49		
				HLK Sekunder	0,20	140,92	-	-	-	141,13		

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
2	HL Pemanfaatan		Selayo	HLK Primer	-	74,91	-	-	74,91		
				HLK Sekunder	-	28,49	-	-	28,49		
		X Koto Diatas	Kuncir	HLK Sekunder	-	327,35	-	-	327,35		
		X Koto Singkarak	Koto Sani	HLK Primer	-	0,45	-	-	0,45		
				HLK Sekunder	-	10,07	-	-	10,07		
		Sub Total Kab. Solok					0,20	1.170,79	-	-	1.171,00
		Kabupaten Tanah Datar									
		Batipuah Selatan	Guguak Malalo	HLK Primer	-	1.148,16	-	-	-	1.148,16	
				HLK Sekunder	-	1.258,54	-	-	1.258,54		
			Padang Laweh Malalo	HLK Primer	-	136,72	-	-	136,72		
				HLK Sekunder	-	469,79	-	-	469,79		
		Batipuh	Batipuah Baruah	HLK Primer	-	67,70	-	-	67,70		
				HLK Sekunder	-	253,51	-	-	253,51		
		Lintau Buo	Pangjan	HLK Sekunder	-	371,35	-	-	371,35		
			Tigo Jangko	HLK Sekunder	-	799,87	-	-	799,87		
		Lintau Buo Utara	Batu Bulek	HLK Sekunder	-	245,81	-	-	245,81		
			Lubuak Jantan	HLK Sekunder	-	1.306,52	-	-	1.306,52		
			Tanjung Bonai	HLK Sekunder	-	1.768,50	-	-	1.768,50		
			Tapi Selo	HLK Sekunder	-	1.747,75	-	-	1.747,75		
		Sungayang	Andaleh Baruh Bukik	HLK Sekunder	-	203,24	-	-	203,24		
			Minang Kabau	HLK Sekunder	-	31,61	-	-	31,61		
			Sungayang	HLK Sekunder	-	23,01	-	-	23,01		
		Tanjung Emas	Koto Tangah	HLK Sekunder	-	289,67	-	-	289,67		
			Pagaruyung	HLK Sekunder	-	93,26	-	-	93,26		
			Saruaso	HLK Sekunder	-	930,13	-	-	930,13		
			Tanjung Barulak	HLK Sekunder	-	109,90	-	-	109,90		
		X Koto	Jaho	HLK Primer	-	218,86	-	-	218,86		
				HLK Sekunder	-	104,37	-	-	104,37		
			Singgalang	HLK Primer	-	195,09	-	-	195,09		
				HLK Sekunder	-	555,60	-	-	555,60		
			Tambangan	HLK Primer	-	330,34	-	-	330,34		
				HLK Sekunder	-	129,38	-	-	129,38		
		Sub Total Kab. Tanah Datar					-	12.788,70	-	-	12.788,70
		Sub Total Blok HL Pemanfaatan					2,18	39.925,93	-	-	39.928,11

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
3	HL Khusus	Kota Padang									
		Pauh	Lambung Bukik	HLK Primer	-	1,75	-	-	1,75		
			Limau Manis	HLK Primer	-	47,98	-	-	47,98		
		Sub Total Kota Padang					-	49,73	-	-	49,73
		Kabupaten Padang Pariaman									
		Batang Anai	Sungai Buluah	HLK Primer	-	242,31	-	-	242,31		
			Sungai Buluah Selatan	HLK Primer	-	59,36	-	-	59,36		
			Sungai Buluah Timur	HLK Primer	-	98,93	-	-	98,93		
Sub Total Kabupaten Padang Pariaman					-	400,61	-	-	400,61		
Sub Total Blok HL Khusus					-	450,34	-	-	450,34		
4	HP Pemberdayaan Masyarakat	Kota Sawahlunto									
		Silungkang	Taratak Boncah	HLK Sekunder	-	-	1,41	-	1,41		
		Sub Total Kota Sawahlunto					-	-	1,41	-	1,41
Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					-	-	1,41	-	1,41		
5	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK	Kota Padang									
		Lubuk Kilangan	Batu Gadang	HLK Primer	-	-	-	121,97	121,97		
				HLK Sekunder	-	-	-	9,88	9,88		
		Sub Total Kota Padang					-	-	-	131,85	131,85
Sub Total Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK					-	-	-	131,85	131,85		
6	HPT Pemberdayaan Masyarakat	Kota Sawahlunto									
		Silungkang	Taratak Boncah	HLK Sekunder				27,67	27,67		
		Sub Total Kota Sawahlunto					-	-	-	27,67	27,67
		Kabupaten Sijunjung									
		Kupitan	Batu Manjular	HLK Sekunder	-	-	-	1,24	1,24		
			Desa Kampung Baru	HLK Sekunder	-	-	-	33,93	33,93		
		Sub Total Kab. Sijunjung					-	-	-	35,17	35,17
		Kabupaten Solok									
IX Koto Sungai Lasi	Siaro-Aro	HLK Sekunder	-	-	-	0,11	0,11				
Sub Total Kab. Solok					-	-	-	0,11	0,11		
Sub Total Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat					-	-	-	62,95	62,95		
Total					2,18	42.369,81	1,41	194,81	42.369,81		

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 45,55% dari luas total wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 12,96% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 136 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan R0 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan R0 11 dari Luas Total	PS dari Arahan R0 11
1	HL Inti	1.795,13	1.795,13	122,25	100,00%	6,81%
2	HL Khusus	513,85	450,34	-	87,64%	-
3	HL Pemanfaatan	63.130,72	39.928,11	5.304,67	63,25%	13,29%
4	HP Pemanfaatan HHK-HT	253,02	-	-	-	-
5	HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK	12.610,06	-	-	-	-
6	HP Pemberdayaan Masyarakat	1.560,11	1,41	1,41	0,09%	100,00%
7	HPK Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK	1.323,30	-	-	-	-
8	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK	244,77	131,85	-	53,87%	-
9	HPT Pemberdayaan Masyarakat	138,21	62,95	62,50	45,55%	99,29%
Total		81.569,17	42.369,81	5.490,83	51,94%	12,96%

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 13 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 5.490,83 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HL Pemanfaatan. Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 137 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Inti					
A.1.	Kab. Padang Pariaman					
1	Lubuk Alung	Salibutan Lubuk Alung	PPHD	LPHD/N Salibutan Lubuk Alung	Hutan Lahan Kering Primer	122,25
	Sub Total Kab. Padang Pariaman					122,25
	Sub Total Blok HL Inti					122,25
B	Blok HL Pemanfaatan					

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
B.1.	Kota Padang					
1	Pauh	Lambung Bukit	PPHKm	KTH Padang Janiah	Hutan Lahan Kering Primer	194,52
2		Limau Manis	PPHKm	KTH Sikayan Balumuik	Hutan Lahan Kering Primer	115,42
					Hutan Lahan Kering Sekunder	24,73
Sub Total Kota Padang						334,67
B.2.	Kota Padang Panjang					
1	Padang Panjang Timur	Koto Katik	PPHKm	KT Agroforestry Aro Sepakat	Hutan Lahan Kering Primer	78,46
					Hutan Lahan Kering Sekunder	32,98
Sub Total Kota Padang Panjang						111,44
B.3.	Kab. Lima Puluh Kota					
	Larah Sago Halaban	Halaban	PPHD	LPHD/N Halaban	Hutan Lahan Kering Sekunder	332,41
Sub Total Kab. Lima Puluh Kota						332,41
B.4.	Kab. Padang Pariaman					
1	Lubuk Alung	Salibutan Lubuk Alung	PPHD	LPHD/N Salibutan Lubuk Alung	Hutan Lahan Kering Primer	1.905,06
					Hutan Lahan Kering Sekunder	687,44
2	V Koto Kampung Dalam	Gunung Padang Alai	PPHKm	KT Sialangan	Hutan Lahan Kering Sekunder	193,16
3		Sikucur	PPHKm	KT Leter W	Hutan Lahan Kering Sekunder	43,29
Sub Total Kab. Padang Pariaman						2.828,95
B.5.	Kab. Pesisir Selatan					
1	Koto XI Tarusan	Barung-Barung Balantai Selatan	PPHD	LPHD/N Barung-Ba-rung Balantai Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	330,41
2		Kampung Baru Korong Nan Ampek	PPHD	LPHD/N Kampung Baru Korong Nan Ampek	Hutan Lahan Kering Primer	282,41
					Hutan Lahan Kering Sekunder	458,86
3		Taratak Sungai Lundang	PPHD	LPHD/N Taratak Sungai Lundang	Hutan Lahan Kering Primer	38,14
					Hutan Lahan Kering Sekunder	179,93
Sub Total Kab. Pesisir Selatan						1.289,75
B.6.	Kab. Sijunjung					
1	Simpur Kudus	Unggan	PPHD	LPHD/N Nagari Unggan	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,43
Sub Total Kab. Sijunjung						0,43
B.7.	Kab. Tanah Datar					
1	Batiputih	Batipuah Baruah	PPHD	LPHD/N Batipuah Baruah	Hutan Lahan Kering Primer	123,10
					Hutan Lahan Kering Sekunder	283,92
Sub Total Kab. Tanah Datar						407,02
Sub Total Blok HL Pemanfaatan						5.304,67
C	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					
C.1.	Kab. Sawahlunto					

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
1	Silungkang	Tarantak Bancah	PPHKm	KTH Tak Bancah Batu Badaguak	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,41
	Sub Total Kab. Sawahlunto					1,41
Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat						1,41
D	Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat					
D.1.	Kab. Sawahlunto					
	Silungkang	Tarantak Bancah	PPHKm	KTH Tak Bancah Batu Badaguak	Hutan Lahan Kering Sekunder	62,50
	Sub Total Kab. Sawahlunto					62,50
Sub Total Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat						62,50
Total Arahan PIAPS di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)						5.490,83

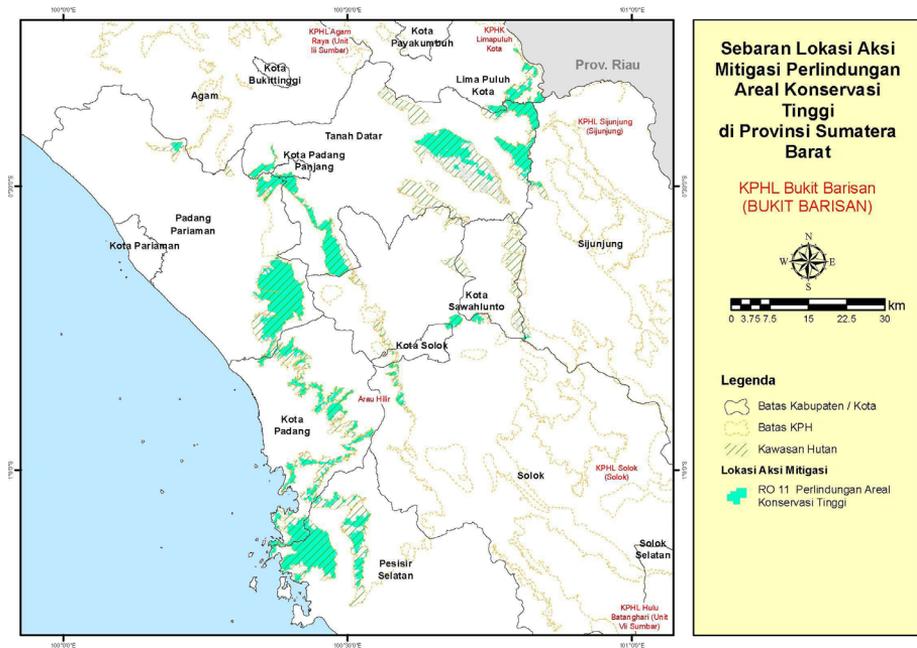
Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

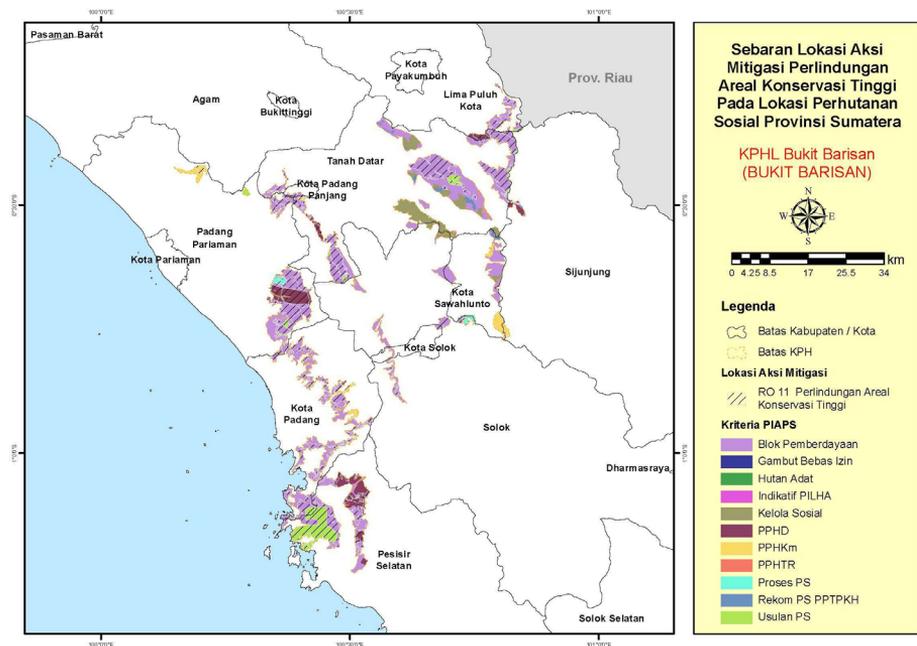
Tabel 138 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan diketahui masyarakat nagari	kegiatan	7	1	2	2	2	-	-	-	-	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 25 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)



Gambar 26 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) pada Areal Perhutanan Sosial

K.6. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) terhitung seluas 79.698,91 ha yang tersebar di 11 (sebelas) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 52.809,53 ha dan fungsi kawasan hutan produksi terbatas seluas 21.693,88 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 139 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
				APL	HL	HP	HPT		
Blok HL Inti				-	3.519,41	-	-	3.519,41	
(blank)	Kabupaten Sijunjung								
	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	-	94,28	-	-	94,28	
		Kamang	HLK Sekunder	-	1,34	-	-	1,34	
		Maloro	HLK Sekunder	-	73,56	-	-	73,56	
	Lubuak Tarok	Buluah Kasok	HLK Sekunder	-	860,41	-	-	860,41	
	Sumpur Kudus	Manganti	HLK Sekunder	-	1.014,83	-	-	1.014,83	
		Silantai	HLK Sekunder	-	940,05	-	-	940,05	
		Sumpur Kudus	HLK Sekunder	-	214,17	-	-	214,17	
		Tanjung Bonai Aur	HLK Sekunder	-	30,34	-	-	30,34	
	Tanjung Gadang	Unggan	HLK Sekunder	-	186,59	-	-	186,59	
		Sibakur	HLK Sekunder	-	73,67	-	-	73,67	
		Tanjung Lolo	HLK Sekunder	-	0,52	-	-	0,52	
	Kabupaten Solok								
		Tigo Lurah	Tanjung Balik Sumiso	HLK Sekunder	-	3,29	-	-	3,29
		Kabupaten Tanah Datar							
		Lintau Buo	Tigo Jangko	HLK Sekunder	-	26,14	-	-	26,14
	Lintau Buo Utara	Tanjung Bonai	HLK Sekunder	-	0,21	-	-	0,21	
Blok HL Pemanfaatan				-	49.277,77	30,25	-	49.308,02	
PT Multikarya Lisun Prima	Kabupaten Sijunjung								
	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	-	2,88	-	-	2,88	
		Padang Tarok	HLK Sekunder	-	4,46	-	-	4,46	

Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
	Sijunjung	Durian Gadang	HLK Sekunder	-	0,41	-	-	0,41
	Sumpur Kudus	Unggan	HLK Sekunder	-	0,04	-	-	0,04
(blank)	Kabupaten Lima Puluh Kota							
	Lareh Sago Halaban	Ampalu	HLK Sekunder	-	2,22	-	-	2,22
	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Mundam Sakti	HLK Sekunder	-	284,98	-	-	284,98
	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	-	472,00	-	-	472,00
		Kamang	HLK Sekunder	-	183,78	-	-	183,78
		Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	-	217,40	-	-	217,40
		Maloro	HLK Sekunder	-	95,17	-	-	95,17
		Muaro Takuang	HLK Sekunder	-	348,49	0,18	-	348,67
		Padang Tarok	HLK Sekunder	-	1.066,43	-	-	1.066,43
		Siaur	HLK Sekunder	-	118,13	-	-	118,13
		Sungai Batuang	HLK Sekunder	-	474,22	-	-	474,22
		Sungai Lansek	HLK Sekunder	-	60,98	-	-	60,98
		Tanjung Kaling	HLK Sekunder	-	95,88	-	-	95,88
	Koto VII	Padang Laweh	HLK Sekunder	-	191,22	-	-	191,22
	Lubuak Tarok	Buluah Kasok	HLK Sekunder	-	755,57	-	-	755,57
		Lalan	HLK Sekunder	-	5,08	-	-	5,08
		Lubuak Tarok	HLK Sekunder	-	1.099,82	-	-	1.099,82
		Silongo	HLK Sekunder	-	17,44	-	-	17,44
	Sijunjung	Aie Angek	HLK Sekunder	-	1.603,10	-	-	1.603,10
		Durian Gadang	HLK Sekunder	-	12.070,54	16,73	-	12.087,2
		Muaro	HLK Sekunder	-	1,06	-	-	1,06
		Paru	HLK Sekunder	-	6.403,61	-	-	6.403,61
		Silokek	HLK Sekunder	-	1.880,16	-	-	1.880,16
		Solok Ambah	HLK Sekunder	-	1.149,22	-	-	1.149,22

Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
				APL	HL	HP	HPT		
	Sumpur Kudus	Manganti	HLK Sekunder	-	3.008,53	-	-	3.008,53	
		Silantai	HLK Sekunder	-	1.679,23	-	-	1.679,23	
		Sisawah	HLK Sekunder	-	2.315,10	13,34	-	2.328,45	
		Sumpur Kudus	HLK Sekunder	-	2.833,95	-	-	2.833,95	
		Sumpur Kudus Selatan	HLK Sekunder	-	476,68	-	-	476,68	
		Tamparungo	HLK Sekunder	-	424,57	-	-	424,57	
		Tanjung Bonai Aur	HLK Sekunder	-	54,67	-	-	54,67	
		Tanjung Bonai Aur Selatan	HLK Sekunder	-	143,07	-	-	143,07	
		Tanjung Labuah	HLK Sekunder	-	232,02	-	-	232,02	
		Unggan	HLK Primer	-	1.118,88	-	-	1.118,88	
			HLK Sekunder	-	5.056,15	-	-	5.056,15	
	Tanjung Gadang	Langki	HLK Sekunder	-	436,60	-	-	436,60	
		Pulasan	HLK Sekunder	-	241,82	-	-	241,82	
		Sibakur	HLK Sekunder	-	2.313,74	-	-	2.313,74	
		Tanjung Gadang	HLK Sekunder	-	1,81	-	-	1,81	
		Tanjung Lolo	HLK Sekunder	-	139,50	-	-	139,50	
		Taratak Baru	HLK Sekunder	-	3,23	-	-	3,23	
		Timbulun	HLK Sekunder	-	3,71	-	-	3,71	
	Kabupaten Solok								
	Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	-	0,06	-	-	0,06	
	Tigo Lurah	Tanjung Balik Sumiso	HLK Primer	-	0,21	-	-	0,21	
			HLK Sekunder	-	147,83	-	-	147,83	
	Kabupaten Tanah Datar								
	Lintau Buo	Tigo Jangko	HLK Sekunder	-	21,62	-	-	21,62	
	Lintau Buo Utara	Lubuak Jantan	HLK Sekunder	-	19,33	-	-	19,33	
		Tanjuang Bonai	HLK Sekunder	-	1,20	-	-	1,20	
Blok HP Pemanfaatan HHK-HA				-	-	342,24	-	342,24	
(blank)	Kabupaten Sijunjung								
	Sijunjung	Durian Gadang	HLK Sekunder	-	-	342,24	-	342,24	

Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
Blok HP Pemanfaatan HHK-HT				-	9,19	313,78	-	322,96
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Mundam Sakti	HLK Sekunder	-	-	4,10	-	4,10
	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	-	-	47,94	-	47,94
		Muaro Takuang	HLK Sekunder	-	-	40,17	-	40,17
	Lubuak Tarok	Lalan	HLK Sekunder	-	-	0,40	-	0,40
	Sijunjung	Aie Angek	HLK Sekunder	-	-	95,46	-	95,46
		Silokek	HLK Sekunder	-	-	1,36	-	1,36
	Sumpur Kudus	Tanjung Bonai Aur	HLK Sekunder	-	9,19	29,25	-	38,44
		Tanjung Bonai Aur Selatan	HLK Sekunder	-	-	9,46	-	9,46
	Tanjung Gadang	Timbulun	HLK Sekunder	-	-	79,09	-	79,09
	Kabupaten Tanah Datar							
	Lintau Buo	Tigo Jangko	HLK Sekunder	-	-	6,56	-	6,56
Blok HP Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK				-	-	255,89	-	255,89
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	Koto VII	Padang Laweh	HLK Sekunder	-	-	5,71	-	5,71
	Sijunjung	Silokek	HLK Sekunder	-	-	220,17	-	220,17
Blok HP Pemberdayaan Masyarakat				-	-	2.163,79	-	2.163,79
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Mundam Sakti	HLK Sekunder	-	-	62,58	-	62,58
	Kamang Baru	Kunungan Parik Rantang	HLK Sekunder	-	-	14,27	-	14,27
		Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	-	-	385,17	-	385,17
		Muaro Takuang	HLK Sekunder	-	-	204,93	-	204,93
		Lalan	HLK Sekunder	-	-	39,41	-	39,41
	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	HLK Sekunder	-	-	115,80	-	115,80

Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
	Sijunjung	Durian Gadang	HLK Sekunder	-	-	539,53	-	539,53
		Muaro	HLK Sekunder	-	-	143,19	-	143,19
		Sijunjung	HLK Sekunder	-	-	99,91	-	99,91
		Silokek	HLK Sekunder	-	-	558,99	-	558,99
Blok HP Perlindungan				-	-	2.119,23	-	2.119,23
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Mundam Sakti	HLK Sekunder	-	-	25,49	-	25,49
	Lubuak Tarok	Lalan	HLK Sekunder	-	-	1,84	-	1,84
		Lubuak Tarok	HLK Sekunder	-	-	77,25	-	77,25
	Sijunjung	Aie Angek	HLK Sekunder	-	-	145,57	-	145,57
		Muaro	HLK Sekunder	-	-	1.057,60	-	1.057,60
		Sijunjung	HLK Sekunder	-	-	85,10	-	85,10
		Silokek	HLK Sekunder	-	-	563,59	-	563,59
	Sumpur Kudus	Sisawah	HLK Sekunder	-	-	162,79	-	162,79
Blok HPT Pemanfaatan HHK-HT				-	-	-	333,80	333,80
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	Iv Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	147,74	147,74
	Kupitan	Batu Manjular	HLK Sekunder	-	-	-	172,22	172,22
	Kabupaten Solok							
	IX Koto Sungai Lasi	Siaro-Aro	HLK Sekunder	-	-	-	13,84	13,84
Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK				-	-	-	131,12	131,12
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	131,12	131,12
Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK				0,33	3,16	-	21.138,47	21.141,97
PT Multikarya Lisun Prima	Kabupaten Sijunjung							
	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	-	3,16	-	1.160,51	1.163,67
		Padang Tarok	HLK Primer	-	-	-	1.729,66	1.729,66
			HLK Sekunder	-	-	-	1.358,90	1.358,90
		Tanjung Kaliasang	HLK Sekunder	0,33	-	-	1.730,21	1.730,55
	Sijunjung	Durian Gadang	HLK Primer	-	-	-	697,63	697,63
			HLK Sekunder	-	-	-	9.255,67	9.255,67
	Sumpur Kudus	Unggan	HLK Primer	-	-	-	46,20	46,20
HLK Sekunder			-	-	-	4.066,70	4.066,70	

Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
(blank)	Kota Sawahlunto							
	Silungkang	Taratak Boncah	HLK Sekunder	-	-	-	2,94	2,94
	Kabupaten Sijunjung							
	Iv Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	14,96	14,96
	Kamang Baru	Aie Amo	HLK Sekunder	-	-	-	109,91	109,91
		Padang Tarok	HLK Primer	-	-	-	27,07	27,07
			HLK Sekunder	-	-	-	5,52	5,52
		Tanjung Kaliang	HLK Sekunder	-	-	-	141,86	141,86
	Kupitan	Batu Man-julur	HLK Sekunder	-	-	-	31,61	31,61
	Sijunjung	Durian Gadang	HLK Primer	-	-	-	488,71	488,71
			HLK Sekunder	-	-	-	139,56	139,56
	Sumpur Kudus	Unggan	HLK Primer	-	-	-	5,41	5,41
			HLK Sekunder	-	-	-	110,84	110,84
	Kabupaten Solok							
		IX Koto Sungai Lasi	Siaro-Aro	HLK Sekunder	-	-	-	14,61
Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat				-	-	-	71,29	71,29
(blank)	Kabupaten Dharmasraya							
	Sembilan Koto	Lubuak Karak	HLK Sekunder	-	-	-	1,87	1,87
	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	58,52	58,52
	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	-	-	-	10,90	10,90
Blok HPT Perlindungan				-	-	-	19,21	19,21
(blank)	Kabupaten Sijunjung							
	IV Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	19,21	19,21
Total				0,33	52.809,53	5.195,17	21.693,88	79.698,91

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 62,79% dari luas total wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 27,91% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 140 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
1	HL Inti	4.302,35	3.519,41	5,79	81,80%	0,16%
2	HL Pemanfaatan	74.237,73	49.308,02	22.212,80	66,42%	45,05%
3	HP Pemanfaatan HHK-HA	858,27	342,24	-	39,88%	-
4	HP Pemanfaatan HHK-HT	5.559,92	322,96	24,90	5,81%	7,71%
5	HP Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK	1.952,67	225,89	-	11,57%	-
6	HP Pemberdayaan Masyarakat	7.277,34	2.163,79	0,02	29,73%	0,00%
7	HP Perlindungan	4.797,03	2.119,23	0,17	44,18%	0,01%
8	HPT Pemanfaatan HHK-HT	1.477,48	333,80	0,07	22,59%	0,02%
9	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK	394,55	131,12	-	33,23%	-
10	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling HHKBK	25.218,27	21.141,97	0,18	83,84%	0,00%
11	HPT Pemberdayaan Masyarakat	549,02	71,29	1,61	12,98%	2,26%
12	HPT Perlindungan	304,52	19,21	-	6,31%	-
Total		126.929,15	79.698,91	22.245,55	62,79%	27,91%

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 25 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 22.245,55 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HL Pemanfaatan. Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 141 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Inti					
A.1.	Kab. Sijunjung					
1	Lubuk Tarok	Buluh Kasok	PPHD	LPHD/N Buluh Kasok	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,52
2	Simpur Kudus	Unggan	PPHD	LPHD/N Unggan	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,11
3		Manganti	PPHD	LPHD/N Manganti	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
4		Silantai	PPHD	LPHD/N Silantai	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,25
5		Sumpur Kudus	PPHD	LPHD/N Sumpur Kudus	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,50
6		Tanjung Bonai Aur	PPHD	LPHD/N Tanjung Bonai Aur	Hutan Lahan Kering Sekunder	4,43
Sub Total Kab. Sijunjung						5,79
Sub Total Blok HL Inti						5,79

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
B	Blok HL Pemanfaatan					
B.1.	Kab. Sijunjung					
1	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	PPHD	LPHD/N Lubuk Tarantang	Hutan Lahan Kering Sekunder	217,06
2		Muaro Takung	PPHD	LPHD Muaro Takung	Hutan Lahan Kering Sekunder	346,58
3		Nagari Sungai Lansek	PPHD	LPHD/N Sungai Lansek	Hutan Lahan Kering Sekunder	101,17
4		Sungai Bantuang	PPHD	LPHD/N Sungai Bantuang	Hutan Lahan Kering Sekunder	294,76
5	Lubuk Tarok	Buluh Kasok	PPHD	LPHD/N Buluh Kasok	Hutan Lahan Kering Sekunder	531,81
6		Kampung Dalam	PPHD	LPHD/N Kampung Dalam	Hutan Lahan Kering Sekunder	116,55
7		Lalan	PPHD	LPHD/N Lalan	Hutan Lahan Kering Sekunder	9,29
8		Lubuk Tarok	PPHD	LPHD/N Lubuk Tarok	Hutan Lahan Kering Sekunder	834,98
9		Silongo	PPHD	LPHD/N Silongo	Hutan Lahan Kering Sekunder	54,18
10	Sijunjung	Aie angek	PPHD	LPHD/N Aie angek	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.584,42
11		Durian Gadang	PPHD	LPHD/N Durian Gadang	Hutan Lahan Kering Sekunder	2.629,94
12		Paru	PPHD	LPHD/N Paru	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.145,69
13		Solok Ambah	PPHD	LPHD/N Solok Ambah	Hutan Lahan Kering Sekunder	168,63
14	Simpur Kudus	Unggan	PPHD	LPHD/N Nagari Unggan	Hutan Lahan Kering Primer	1.118,41
					Hutan Lahan Kering Sekunder	3.270,30
15		Manganti	PPHD	LPHD/N Manganti	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.171,79
16		Silantai	PPHD	LPHD/N Silantai	Hutan Lahan Kering Sekunder	422,17
17		Sisawah	PPHD	LPHD Sisawah	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.929,35
18		Sumpur Kudus	PPHD	LPHD/N Sumpur Kudus	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.570,85
19	Tamparungo	PPHD	LPHD/N Tamparungo	Hutan Lahan Kering Sekunder	92,11	
20		Tanjung Bonai Aur	PPHD	LPHD/N Tanjung Bonai Aur	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,08
21	Tanjung Gadang	Langki	PPHD	LPHD Langki	Hutan Lahan Kering Sekunder	346,78
22		Pulasan	PPHD	LPHD/N Pulasan	Hutan Lahan Kering Sekunder	148,80
23		Timbulun	PPHD	LPHD/N Timbulun	Hutan Lahan Kering Sekunder	107,09
	Sub Total Kab. Sijunjung					22.212,80
	Sub Total Blok HL Pemanfaatan					22.212,80
C	Blok HP Pemanfaatan HHK-HT					
C.1.	Kab. Sijunjung					
1	Kamang Baru	Muaro Takung	PPHD	LPHD Muaro Takung	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,01
2	Sijunjung	Aie angek	PPHD	LPHD/N Aie angek	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,10
3	Sumpur Kudus	Tanjung Bonai Aur	PPHD	LPHD/N Tanjung Bonai Aur	Hutan Lahan Kering Sekunder	24,79
	Sub Total Kab. Sijunjung					24,90
	Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HT					24,90
D	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					
D.1.	Kab. Sijunjung					

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
1	Lubuk Tarok	Lalan	PPHD	LHPD/N Lalan	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
2	Sumpur Kudus	Sisawah	PPHD	LPHD Sisawah	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,02
	Sub Total Kab. Sijunjung					0,02
	Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					0,02
E	Blok HP Perlindungan					
E.1.	Kab. Sijunjung					
1	Lubuk Tarok	Lubuk Tarok	PPHD	LPHD/N Lubuk Tarok	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
2	Sijunjung	Aie angek	PPHD	LPHD/N Aie angek	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,06
3	Sumpur Kudus	Sisawah	PPHD	LPHD Sisawah	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,12
	Sub Total Kab. Sijunjung					0,17
	Sub Total Blok HP Perlindungan					0,17
F	Blok HPT Pemanfaatan HHK-HT					
F.1.	Kab. Sawahlunto					
1	Silungkang	Tarantak Bancah	PPH-Km	KTH Tak Boncah Batu Badaguak	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,07
	Sub Total Kab. Sawahlunto					0,07
	Sub Total Blok HPT Pemanfaatan HHK-HT					0,07
G	Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK					
G.1.	Kab. Sawahlunto					
1	Silungkang	Tarantak Bancah	PPH-Km	KTH Tak Boncah Batu Badaguak	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,11
	Sub Total Kab. Sawahlunto					0,11
G.2.	Kab. Sijunjung					
1	Sijunjung	Durian Gadang	PPHD	LPHD/N Durian Gadang	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
2	Simpur Kudus	Unggan	PPHD	LPHD/N Nagari Unggan	Hutan Lahan Kering Primer	0,01
					Hutan Lahan Kering Sekunder	0,03
3		Sumpur Kudus	PPHD	LPHD/N Sumpur Kudus	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,03
	Sub Total Kab. Sijunjung					0,07
	Sub Total Blok HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK					0,18
H	Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat					
H.1.	Kab. Dharmasraya					
	Sembilan Koto	Lubuk Karak	PPHD	LPHD/N Lubuk Karak	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,61
	Sub Total Kab. Dharmasraya					1,61
	Sub Total Blok HPT Pemberdayaan Masyarakat					1,61
	Total Arahan PIAPS di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)					22.245,55

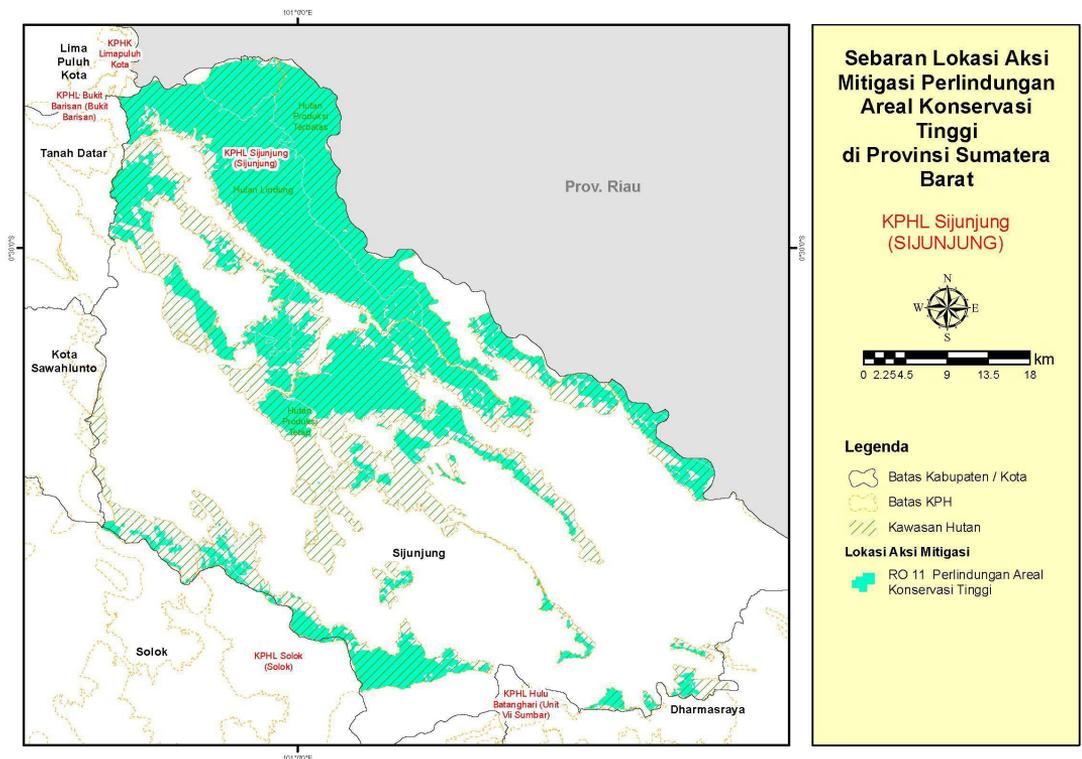
Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

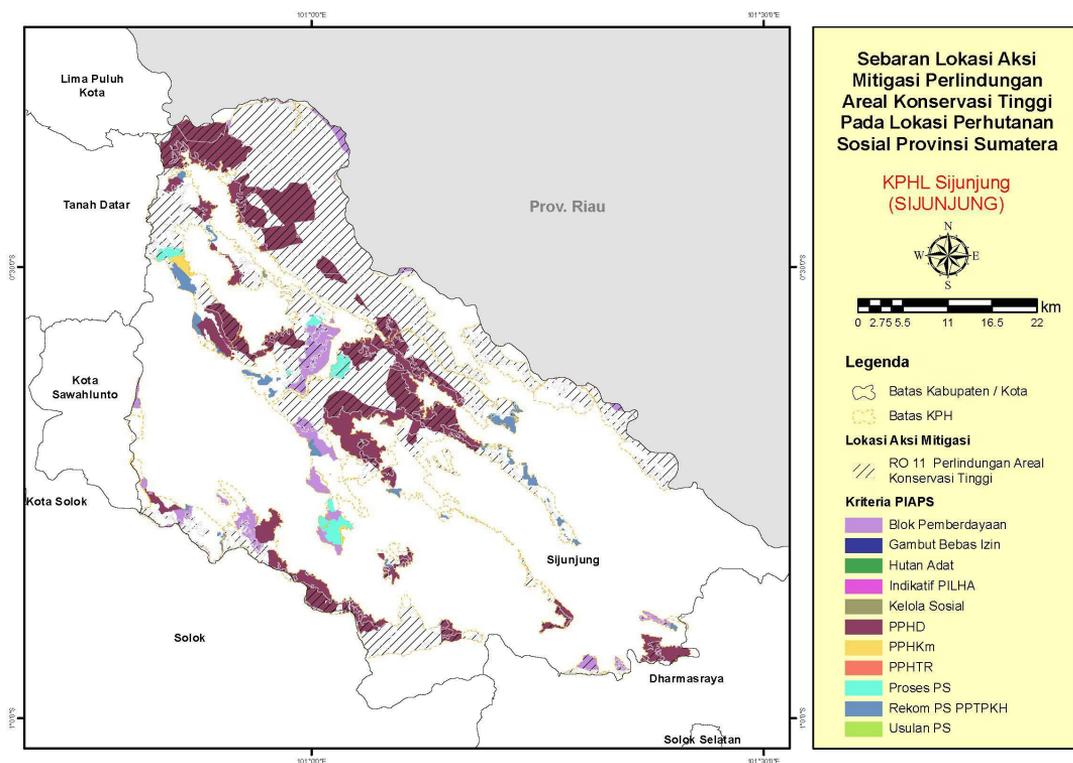
Tabel 142 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022				2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4			
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi															
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari	kegiatan	6	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-		

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 27 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)



Gambar 28 |Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) pada Areal Perhutanan Sosial

K.7. Wilayah KPHL Solok (Unit VI)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Solok (Unit VI) terhitung seluas 105.588,65 ha yang tersebar di 8 (delapan) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 95.996,61 ha dan fungsi kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.712,70 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 143 |Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HL	HP	HPT	
1	HL Inti	Kab. Dharmasraya							
		Sembilan Koto	Banai	HLK Primer	-	2,24	-	-	2,24
				HLK Sekunder	-	49,28	-	-	49,28
		Sub Total Kab. Dharmasraya			-	51,52	-	-	51,52
Kab. Sijunjung									

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
1	HL Inti	IV Nagari	Mundam Sakti	HLK Sekunder	-	22,02	-	-	22,02		
		Lubuak Tarok	Buluah Kasok	HLK Sekunder	-	55,48	-	-	55,48		
			Lubuak Tarok	HLK Sekunder	-	29,25	-	-	29,25		
		Tanjung Gadang	Sibakur	HLK Sekunder	-	2,54	-	-	2,54		
		Sub Total Kab. Sijunjung					-	109,29	-	-	109,29
		Kab. Solok									
		Hiliran Gumanti	Sungai Abu	HLK Primer	-	1.031,96	-	-	-	1.031,96	
				HLK Sekunder	-	144,00	-	-	144,00		
		Lembah Gumanti	Sungai Nanam	HLK Primer	-	244,63	-	-	-	244,63	
				HLK Sekunder	-	73,27	-	-	73,27		
		Pantai Cermin	Lolo	HLK Sekunder	-	1.499,40	-	-	-	1.499,40	
			Surian	HLK Primer	-	1.671,76	-	-	-	1.671,76	
				HLK Sekunder	-	1.130,95	-	-	1.130,95		
		Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	1,56	752,45	-	-	-	754,01	
			Sirukam	HLK Primer	-	206,17	-	-	-	206,17	
		Tigo Lurah	Batu Bajan-jang	HLK Primer	-	1.061,05	-	-	-	1.061,05	
				HLK Sekunder	-	2.282,66	-	-	2.282,66		
			Garabak Data	HLK Primer	-	22.493,09	-	-	-	22.493,09	
				HLK Sekunder	-	9.059,82	-	-	9.059,82		
			Rangkiang Luluih	HLK Primer	-	59,09	-	-	-	59,09	
				HLK Sekunder	-	269,34	-	-	269,34		
		Tanjung Balik Sumiso	HLK Primer	-	1.662,27	-	-	-	1.662,27		
			HLK Sekunder	-	4.546,50	-	-	-	4.546,50		
		Sub Total Kab. Solok					1,56	48.188,41	-	-	48.189,97
		Kab. Solok Selatan									
		2	HL Pemanfaatan	Kab. Sijunjung							
				Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	HLK Sekunder	-	56,26	-	-	56,26
Sub Total Kab. Sijunjung					-	56,26	-	-	56,26		
Kab. Solok											
Gunung Talang	Aie Batumbuak			HLK Primer	-	685,23	-	-	-	685,23	
				HLK Sekunder	-	4,05	-	-	4,05		
	Batang Barus			HLK Primer	-	316,98	-	-	316,98		
	Koto Gadang Guguak			HLK Primer	-	86,40	-	-	86,40		
	Sungai Janiah			HLK Primer	-	159,66	-	-	159,66		
HLK Sekunder				-	15,95	-	-	15,95			

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)		
					APL	HL	HP	HPT			
		Hiliran Gumanti	Sariak Alahan Tigo	HLK Sekunder	-	1.243,01	-	-	1.243,01		
			Sungai Abu	HLK Primer	-	1.157,79	-	-	1.157,79		
				HLK Sekunder	-	4.963,29	-	-	4.963,29		
		Talang Babungo	HLK Sekunder	-	2.011,26	-	-	2.011,26			
		Lembah Gumanti	Aie Dingin	HLK Sekunder	-	1.982,39	-	-	1.982,39		
			Salimpat	HLK Sekunder	-	1.139,51	-	-	1.139,51		
			Sungai Nanam	HLK Primer	-	235,33	-	-	235,33		
				HLK Sekunder	-	1.237,79	-	-	1.237,79		
		Lembang Jaya	Batu Bajan-jang	HLK Primer	-	0,11	-	-	0,11		
		Pantai Cermin	Lolo	HLK Sekunder	-	1.481,08	-	-	1.481,08		
			Surian	HLK Primer	-	27,60	-	-	27,60		
				HLK Sekunder	-	1.911,50	-	-	1.911,50		
		Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	-	23,67	-	-	23,67		
			Sirukam	HLK Primer	-	1.484,19	-	-	1.484,19		
				HLK Sekunder	-	1.701,23	-	-	1.701,23		
			Supayang	HLK Sekunder	-	283,07	-	-	283,07		
		Tigo Lurah	Batu Bajan-jang	HLK Primer	-	506,26	-	-	506,26		
				HLK Sekunder	-	6.121,63	-	-	6.121,63		
			Garabak Data	HLK Primer	-	5.206,18	-	-	5.206,18		
				HLK Sekunder	-	4.420,85	-	-	4.420,85		
			Rangkiang Luluih	HLK Primer	-	439,38	-	-	439,38		
				HLK Sekunder	-	132,55	-	-	132,55		
		Tanjung Balik Sumiso	HLK Primer	-	1.971,08	-	-	1.971,08			
			HLK Sekunder	-	5.519,00	-	-	5.519,00			
		Sub Total Kab. Solok					-	46.467,99	-	-	46.467,99
		Kab. Solok Selatan									
		Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	60,84	-	-	-	60,84	
HLK Sekunder	-			0,13	-	-	-	0,13			
Sub Total Kab. Solok Selatan					-	60,97	-	-	60,97		
Sub Total HL Pemanfaatan					-	46.585,22	-	-	46.585,22		
3	HL Khusus	Kab. Solok									
		Payung Sekaki	Sirukam	HLK Sekunder	-	320,47	-	-	-	320,47	
			Supayang	HLK Sekunder	-	658,63	-	-	-	658,63	
		Sub Total Kab. Solok					-	979,09	-	-	979,09
Sub Total HL Khusus					-	979,09	-	-	979,09		

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)
					APL	HL	HP	HPT	
4	HP Perlindungan	Kabupaten Sijunjung							
		Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	HLK Sekunder	-	-	1,28	-	1,28
		Sub Total Kab. Sijunjung			-	-	1,28	-	1,28
		Kabupaten Solok							
		Tigo Lurah	Tanjung Balik Sumiso	HLK Sekunder	-	-	468,22	-	468,22
		Sub Total Kab. Solok			-	-	468,22	-	468,22
Sub Total HP Perlindungan				-	-	469,50	-	469,50	
5	HP Pemanfaatan HHK-HA	Kabupaten Sijunjung							
		IV Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	31,58	31,58
		Sub Total Kab. Sijunjung			-	-	-	31,58	31,58
		Kabupaten Solok							
		Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	-	-	-	1.731,71	1.731,71
			Sirukam	HLK Sekunder	-	-	-	5,02	5,02
			Supayang	HLK Sekunder	0,40	-	-	102,44	102,85
		Tigo Lurah	Simanau	HLK Sekunder	-	-	-	230,11	230,11
Sub Total Kab. Solok			0,40	-	-	2.069,28	2.069,68		
Sub Total HP Pemanfaatan HHK-HA				0,40	-	-	2.100,86	2.101,26	
6	HP Pemanfaatan HHK-HT	Kabupaten Solok							
		Tigo Lurah	Garabak Data	HLK Sekunder	-	-	-	251,53	251,53
		Sub Total Kab. Solok			-	-	-	251,53	251,53
Sub Total HP Pemanfaatan HHK-HT				-	-	-	251,53	251,53	
7	HP Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK	Kabupaten Solok							
		Hiliran Gumanti	Talang Babungo	HLK Sekunder	-	-	-	72,36	72,36
		IX Koto Sungai Lasi	Siaro-Aro	HLK Sekunder	-	-	173,69	413,92	587,61
		Lembah	Salimpat	HLK Sekunder	-	-	-	127,28	127,28
		Gumanti	Sungai Nanam	HLK Sekunder	-	-	-	14,09	14,09
		Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	-	-	213,26	-	213,26
			Supayang	HLK Sekunder	-	-	20,32	-	20,32
		Sub Total Kab. Solok			-	-	407,26	627,65	1.034,91
Sub Total HP Pemanfaatan Kawasan Jasling HHBK				-	-	407,26	627,65	1.034,91	

No	Blok	Kecamatan	Nagari	Lutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas (ha)	
					APL	HL	HP	HPT		
8	HP Pemberdayaan Masyarakat	Kabupaten Sijunjung								
		IV Nagari	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	53,85	53,85	
		Sub Total Kab. Sijunjung				-	-	-	53,85	53,85
		Kabupaten Solok								
		Payung Sekaki	Aie Luo	HLK Sekunder	-	-	-	2.770,65	2.770,65	
			Supayang	HLK Sekunder	0,61	-	-	1.286,64	1.287,25	
		Tigo Lurah	Rangkiang Luluih	HLK Sekunder	-	-	-	28,28	28,28	
			Simanau	HLK Sekunder	-	-	-	1.593,24	1.593,24	
		Sub Total Kab. Solok				0,61	-	-	5.678,81	5.679,42
		Sub Total HP Pemberdayaan Masyarakat				0,61	-	-	5.732,65	5.733,26
Total				2,57	95.996,61	876,77	8.712,70	105.588,65		

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Solok (Unit VI) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 82,30% dari luas total wilayah KPHL Solok (Unit VI) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 5,36% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 144 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
1	HL Inti	49.698,19	48.433,85	23,15	97,46%	0,05%
2	HL Khusus	979,09	979,09	-	100,00%	-
3	HL Pemanfaatan	63.065,09	46.585,22	5.631,91	73,87%	12,09%
4	HP Pemanfaatan HHK-HA	2.849,35	2.101,26	-	73,75%	-
5	HP Pemanfaatan HHK-HT	1.602,12	251,53	-	15,70%	-
6	HP Pemanfaatan Kawasan Jasing HHBK	1.729,53	1.034,91	2,76	59,84%	0,27%
7	HP Pemberdayaan Masyarakat	7.396,09	5.733,26	-	77,52%	-
8	HP Perlindungan	970,65	469,50	-	48,37%	-
Total		128.290,12	105.588,65	5.657,83	82,30%	5,36%

Sumber: Analisis Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 8 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 22.245,55 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HL Pemanfaatan. Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 145 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Inti					
A.1.	Kab. Sijunjung					
1	Lubuk Tarok	Buluh Kasok	PPHD	LPHD/N Buluh Kasok	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,03
2		Lubuk Tarok	PPHD	LPHD/N Lubuk Tarok	Hutan Lahan Kering Sekunder	2,71
	Sub Total Kab. Sijunjung					2,74
A.2.	Kab. Solok					
1	Pantai Cermin	Surian	PPHD	LPHD/N Surian	Hutan Lahan Kering Primer	0,14
					Hutan Lahan Kering Sekunder	1,22
2	Tigo Lurah	Rangkiang Luluih	PPHD	LPHD/N Rangkiang Luluih	Hutan Lahan Kering Primer	19,05
	Sub Total Kab. Solok					20,41
	Sub Total Blok HL Inti					23,15
B	Blok HL Pemanfaatan					
B.1.	Kab. Sijunjung					
	Lubuk Tarok	Lubuk Tarok	PPHD	LPHD/N Lubuk Tarok	Hutan Lahan Kering Sekunder	29,00
	Sub Total Kab. Sijunjung					29,00
B.2.	Kab. Solok					
1	Hiliran Gumanti	Talang Babungo	PPHKm	KSU Ekonomi Desa Tabek	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.152,57
2	Lembah Gumanti	Aie Dingin	PPHKm	Koperasi Produsen Serba Usaha Solok Rajo	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.119,32
3	Pantai Cermin	Surian	PPHD	LPHD/N Surian	Hutan Lahan Kering Primer	27,53
					Hutan Lahan Kering Sekunder	1.886,42
4	Tigo Lurah	Rangkiang Luluih	PPHD	LPHD/N Rangkiang Luluih	Hutan Lahan Kering Primer	455,75
		Hutan Lahan Kering Sekunder	37,59			
5	Tigo Lurah	Simanau	PPHD	LPHD/N Simanau	Hutan Lahan Kering Primer	232,11
					Hutan Lahan Kering Sekunder	691,62
	Sub Total Kab. Solok					5.602,91
	Sub Total Blok HL Pemanfaatan					5.631,91
C	Blok HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK					
C.1.	Kab. Sawahlunto					
1	Silungkang	Tarantak Bancah	PPHKm	KTH Tak Boncah Batu Badaguak	Hutan Lahan Kering Sekunder	2,76
	Sub Total Kab. Sawahlunto					2,76

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
Sub Total Blok HP Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK						2,76
Total Arahan PIAPS di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)						5.657,83

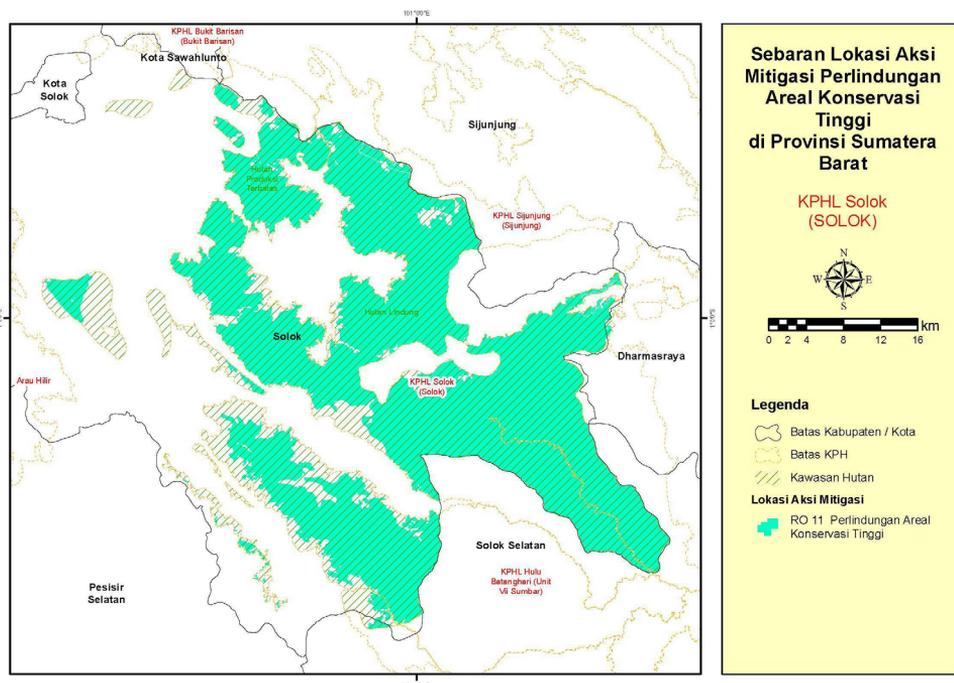
Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

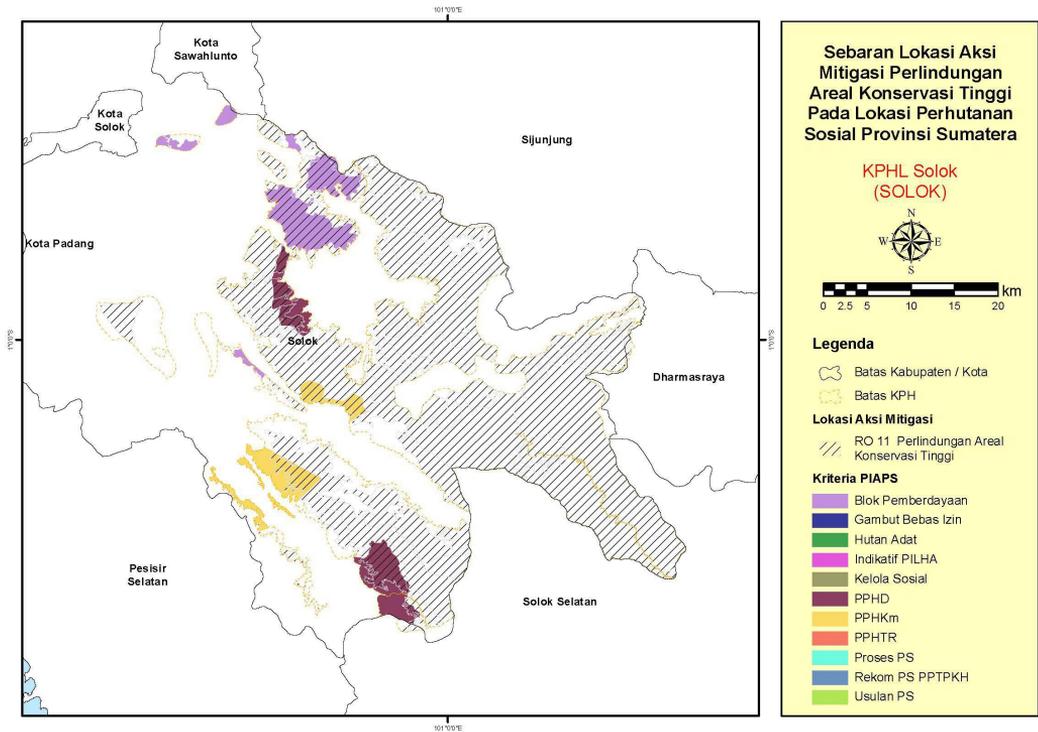
Tabel 146 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022			2023			2024		
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok diketahui masyarakat nagari	kegiatan	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 29 |Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)



Gambar 30 |Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI) pada Areal Perhutanan Sosial

K.8. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) terhitung seluas 131.187,04 ha yang tersebar di 6 (enam) blok pengelolaan. Berdasarkan fungsi kawasannya, areal terluas berada di fungsi kawasan hutan lindung seluas 79.302,66 ha dan fungsi kawasan hutan produksi terbatas seluas 48.812,64 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 147 |Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas Total (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
HL Inti								
	Kabupaten Solok Selatan							
	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	10.890,56	-	-	10.890,56
	Sub Total Kab. Solok Selatan			-	10.890,56	-	-	10.890,56
Sub Total Blok HL Inti				-	10.890,56	-	-	10.890,56

Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas Total (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
HL Khusus								
	Kabupaten Dharmasraya							
	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	HLK Sekunder	1.010,03	2,27	-	-	1.012,30
	Sub Total Kab. Dharmasraya			1.010,03	2,27	-	-	1.012,30
Sub Total Blok HL Khusus				1.010,03	2,27	-	-	1.012,30
HL Pemanfaatan								
PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan							
	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Sekunder	-	9,28	-	-	9,28
	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	9,96	-	-	9,96
	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Sekunder	-	2,84	-	-	2,84
	Sub Total Kab. Solok Selatan			-	22,08	-	-	22,08
N/A	Kabupaten Dharmasraya							
	Asam Jujuhan	Lubuk Besar	HLK Primer	-	92,39	-	-	92,39
			HLK Sekunder	30,91	336,37	-	-	367,28
	Sembilan Koto	Banai	HLK Primer	-	2.771,14	-	-	2.771,14
			HLK Sekunder	-	2.059,43	-	-	2.059,43
		Koto Nan Empat Dibawah	HLK Sekunder	-	65,65	-	-	65,65
		Lubuak Karak	HLK Sekunder	-	71,09	-	-	71,09
	Timpeh	Panyubarangan	HLK Sekunder	-	3,50	-	-	3,50
		Timpeh	HLK Sekunder	-	86,95	-	-	86,95
	Sub Total Kab. Dharmasraya			30,91	5.486,51	-	-	5.517,42
	Kabupaten Sijunjung							
	Kamang Baru	Muaro Takuang	HLK Sekunder	-	14,70	-	-	14,70
	Sub Total Kab. Sijunjung			-	14,70	-	-	14,70
	Kabupaten Solok							
	Hiliran Gumanti	Sungai Abu	HLK Primer	-	19,23	-	-	19,23
	Pantai Cermin	Surian	HLK Primer	-	201,32	-	-	201,32
			HLK Sekunder	-	169,52	-	-	169,52
	Tigo Lurah	Garabak Data	HLK Primer	-	622,75	-	-	622,75
			HLK Sekunder	-	134,47	-	-	134,47
	Sub Total Kab. Solok			-	1.147,28	-	-	1.147,28
Kabupaten Solok Selatan								
Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	8.554,84	-	-	8.554,84	
		HLK Sekunder	-	10.386,35	-	-	10.386,35	
	Pakan Rabaa Utara	HLK Primer	-	18,41	-	-	18,41	

Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas Total (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	1.580,27	-	-	1.580,27
	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	779,77	-	-	779,77
		Lubuk Gadang Selatan	HLK Sekunder	-	15,55	-	-	15,55
		Lubuk Gadang Timur	HLK Sekunder	-	98,72	-	-	98,72
		Lubuk Gadang Utara	HLK Sekunder	-	2.304,66	-	-	2.304,66
	Sangir Balai Janggo	Talao Sungai Kunyiit	HLK Primer	-	53,73	-	-	53,73
			HLK Sekunder	1,63	378,32	-	-	379,95
	Sangir Batang Hari	Abai	HLK Sekunder	-	688,46	-	-	688,46
		Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Primer	-	3.882,47	-	-	3.882,47
			HLK Sekunder	-	11.258,83	-	-	11.258,83
		Sitapus	HLK Sekunder	-	26,84	-	-	26,84
	Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	HLK Sekunder	-	1.389,26	-	-	1.389,26
		Padang Gantiang	HLK Sekunder	-	156,91	-	-	156,91
		Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	-	81,64	-	-	81,64
	Sungai Pagu	Koto Baru	HLK Sekunder	-	542,90	-	-	542,90
		Pasir Talang	HLK Primer	-	1,86	-	-	1,86
		Pasir Talang Barat	HLK Primer	-	26,02	-	-	26,02
		Pasir Talang Selatan	HLK Sekunder	-	404,02	-	-	404,02
		Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	79,36	-	-	79,36
		Pulakek Koto Baru	HLK Sekunder	-	360,23	-	-	360,23
Sub Total Kab. Solok Selatan				1,63	43.069,43	-	-	43.071,06
Sub Total Blok HL Pemanfaatan				32,54	49.740,00	-	-	49.772,54
HP Pemanfaatan HHK-HA								
PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan							
	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Sekunder	-	48,95	-	5.954,26	6.003,20
	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	-	-	283,17	283,17
	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	-	-	3.369,78	3.369,78
		Lubuk Gadang Utara	HLK Sekunder	-	-	-	12,00	12,00
	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Sekunder	-	-	-	778,74	778,74
	Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	HLK Sekunder	-	-	-	858,53	858,53
		Padang Gantiang	HLK Sekunder	-	-	-	2.516,15	2.516,15
Padang Limau Sundai		HLK Sekunder	-	-	-	4.112,55	4.112,55	

Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas Total (ha)
				APL	HL	HP	HPT	
	Sungai Pagu	Koto Baru	HLK Sekunder	-	-	-	643,80	643,80
		Pasir Talang Selatan	HLK Sekunder	-	-	-	1.592,74	1.592,74
		Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	4,05	-	7.185,45	7.189,50
	Sub Total Kab. Solok Selatan			-	52,99	-	27.307,17	27.360,16
N/A	Kabupaten Solok Selatan							
	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	-	-	25,53	25,53
			HLK Sekunder	-	-	-	475,11	475,11
	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	-	-	8,73	8,73
	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	-	-	581,48	581,48
		Lubuk Gadang Utara	HLK Sekunder	-	-	-	938,98	938,98
	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Sekunder	-	-	-	792,44	792,44
	Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	HLK Sekunder	-	-	-	673,28	673,28
		Padang Gantiang	HLK Sekunder	-	-	-	770,70	770,70
		Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	-	-	-	3.484,99	3.484,99
	Sungai Pagu	Pasir Talang Selatan	HLK Sekunder	-	-	-	177,37	177,37
		Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	-	-	56,07	56,07
	Sub Total Kab. Solok Selatan			-	-	-	7.984,68	7.984,68
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HA				-	52,99	-	35.291,86	35.344,85
HP Pemanfaatan HHK-HT								
N/A	Kabupaten Dharmasraya							
	Sembilan Koto	Banai	HLK Sekunder	-	-	338,48	-	338,48
		Koto Nan Empat Dibawuh	HLK Sekunder	-	-	142,99	-	142,99
		Lubuak Karak	HLK Sekunder	-	-	511,18	-	511,18
		Silago	HLK Sekunder	-	-	509,37	-	509,37
	Sub Total Kab. Dharmasraya			-	-	1.502,03	-	1.502,03
	Kabupaten Sijunjung							
	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	-	-	32,74	-	32,74
		Muaro Takuang	HLK Sekunder	-	-	19,62	-	19,62
	Sub Total Kab. Sijunjung			-	-	52,36	-	52,36
	Kabupaten Solok Selatan							
	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling	HLK Sekunder	-	-	3,19	-	3,19
		Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Sekunder	-	-	72,58	-	72,58
Lubuk Ulang Aling Tengah		HLK Sekunder	-	-	398,01	-	398,01	
Sub Total Kab. Solok Selatan			-	-	473,78	-	473,78	

Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas Total (ha)	
				APL	HL	HP	HPT		
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HT				-	-	2.028,18	-	2.028,18	
HP Pemberdayaan Masyarakat									
PT Andalas Merapi Timber	Kabupaten Solok Selatan								
	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	HLK Sekunder	-	0,63	-	-	0,63	
	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	-	-	171,63	171,63	
	Sub Total Kab. Solok Selatan			-	0,63	-	171,63	172,26	
N/A	Kabupaten Dharmasraya								
	Sembilan Koto	Banai	HLK Primer	-	-	-	161,99	161,99	
			HLK Sekunder	1,00	-	-	1.656,38	1.657,39	
		Lubuak Karak	HLK Sekunder	-	753,39	-	490,27	1.243,67	
		Silago	HLK Sekunder	-	-	-	6,00	6,00	
	Sub Total Kab. Dharmasraya			1,00	753,39	-	2.314,65	3.069,05	
	Kabupaten Sijunjung								
	Kamang Baru	Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	-	-	-	3,11	3,11	
	Sub Total Kab. Sijunjung			-	-	-	3,11	3,11	
	Kabupaten Solok								
	Tigo Lurah	Garabak Data	HLK Sekunder	-	1,84	-	19,17	21,01	
	Sub Total Kab. Solok			-	1,84	-	19,17	21,01	
	Kabupaten Solok Selatan								
	Koto Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa	HLK Sekunder	-	-	-	20,77	20,77	
		Pakan Rabaa Tengah	HLK Sekunder	-	-	-	395,59	395,59	
		Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	1.986,23	-	79,64	2.065,86	
			HLK Sekunder	-	3.567,90	-	2.064,08	5.631,98	
	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	3.789,70	-	473,52	4.263,22	
	Sangir	Lubuk Gadang	HLK Sekunder	-	32,22	-	2.360,47	2.392,69	
		Lubuk Gadang Selatan	HLK Sekunder	-	104,35	-	570,60	674,94	
		Lubuk Gadang Utara	HLK Sekunder	-	381,27	-	-	381,27	
	Sangir Batang Hari	Abai	HLK Sekunder	-	364,09	-	-	364,09	
		Lubuk Ulang Aling Selatan	HLK Primer	-	-	-	670,19	670,19	
			HLK Sekunder	-	754,18	-	1.183,54	1.937,71	
		Ranah Pantai Cermin	HLK Sekunder	-	118,45	-	-	118,45	
	Sitapus	HLK Sekunder	-	-	-	49,83	49,83		

Blok	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan				Luas Total (ha)	
				APL	HL	HP	HPT		
N/A	Sangir Jujuan	Lubuk Malako	HLK Sekunder	-	348,32	-	-	348,32	
		Padang Air Dingin	HLK Sekunder	-	1.509,17	-	-	1.509,17	
		Padang Gantiang	HLK Sekunder	-	1.038,57	-	-	1.038,57	
		Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	-	1.549,74	-	-	1.549,74	
	Sungai Pagu	Koto Baru	HLK Sekunder	-	151,60	-	811,31	962,92	
		Pasir Talang Selatan	HLK Sekunder	-	158,50	-	385,00	543,50	
		Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	1.585,03	-	1.660,24	3.245,27	
		Pulakek Koto Baru	HLK Sekunder	-	421,67	-	287,45	709,11	
	Sub Total Kab. Solok Selatan				-	17.860,98	-	11.012,22	28.873,21
	Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat				1,00	18.616,84	-	13.520,78	32.138,63
Total				1.043,57	79.302,66	2.028,18	48.812,64	131.187,04	

Keterangan: HLK: Hutan Lahan Kering

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 71,13% dari luas total wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 18,82% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 148 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (RO11) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

No	Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
			Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
1	HL Inti	10.917,86	10.890,56	-	99,75%	-
2	HL Khusus	1.404,51	1.012,30	-	72,07%	-
3	HL Pemanfaatan	61.891,16	49.772,54	20,71	80,42%	0,04%
4	HP Pemanfaatan HHK-HA	35.927,14	35.344,85	3,40	98,38%	0,01%
5	HP Pemanfaatan HHK-HT	20.593,48	2.028,18	0,08	9,85%	0,00%
6	HP Pemberdayaan Masyarakat	53.702,19	32.138,63	24.663,39	59,85%	76,74%
	Total	184.436,35	131.187,04	24.687,57	71,13%	18,82%

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 16 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 24.687,57 ha yang sebagian besar lokasinya terletak di Blok HP Pemberdayaan Masyarakat. Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 149 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
A	Blok HL Pemanfaatan					
A.1.	Kab. Dharmasraya					
1	Sembilan Koto	Lubuk Karak	PPHD	LPHD/N Lubuk Karak	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,19
	Sub Total Kab. Dharmasraya					0,19
A.2.	Kab. Sijunjung					
1	Kamang Baru	Muaro Takung	PPHD	LPHD Muaro Takung	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,73
	Sub Total Kab. Sijunjung					1,73
A.3.	Kab. Solok Selatan					
1	Kota Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	PPHD	LPHD/N Pakan Rabaa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	0,28
					Hutan Lahan Kering Sekunder	0,09
2	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	PPHD	LPHD/N Alam Pauh Duo	Hutan Lahan Kering Sekunder	11,26
3	Sangir Batang	Ranah Pantai Cermin	PPHD	LPHD/N Ranah Pantai Cermin	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,23
4	Sangir Jujuan	Lubuk Gadang Selatan	PPHD	LPHD/N Lubuk Gadang Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,05
5		Lubuk Malako	PPHD	LPHD/N Lubuk Malako	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,13
6		Padang Air Dingin	PPHD	LPHD/N Padang Air Dingin	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,10
7		Padang Gantiang	PPHD	LPHD/N Padang Gantiang	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,00
8		Padang Limau Sundai	PPHD	LPHD/N Padang Limau Sundai	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,82
9		Sungai Pagu	Koto Baru	PPHD	LPHD/N Koto Baru	Hutan Lahan Kering Sekunder
10	Pasir Talang Timur		PPHD	LPHD/N Pasir Talang Timur	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,05
11	Pulakek Koto Baru		PPHD	LPHD/N Pulakek Koto Baru	Hutan Lahan Kering Sekunder	4,67
12	Sako Utara Pasia Talang		PPHD	LPHD/N Sako Utara Pasia Talang	Hutan Lahan Kering Primer	0,02
	Sub Total Kab. Solok Selatan					18,78
	Sub Total Blok HL Pemanfaatan					20,71
B	Blok HP Pemanfaatan HHK-HA					
B.1.	Kab. Solok Selatan					
1	Kota Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	PPHD	LPHD/N Pakan Rabaa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	0,00
					Hutan Lahan Kering Sekunder	0,13
2	Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa	PPHD	LPHD/N Pakan Rabaa	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,47

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
3	Sangir Jujuan	Padang Air Dingin	PPHD	LPHD/N Padang Air Dingin	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,39
4		Padang Gantiang	PPHD	LPHD/N Padang Gantiang	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,08
5		Padang Limau Sundai	PPHD	LPHD/N Padang Limau Sundai	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,37
6	Sungai Pagu	Koto Baru	PPHD	LPHD/N Koto Baru	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,79
7		Pulakek Koto Baru	PPHD	LPHD/N Pulakek Koto Baru	Hutan Lahan Kering Sekunder	1,16
Sub Total Kab. Solok Selatan						3,40
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HA						3,40
C	Blok HP Pemanfaatan HHK-HT					
C.1.	Kab. Dharmasraya					
1	Sembilan Koto	Lubuk Karak	PPHD	LPHD/N Lubuk Karak	Hutan Lahan Kering Sekunder	0,08
Sub Total Kab. Dharmasraya						0,08
Sub Total Blok HP Pemanfaatan HHK-HT						0,08
D	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat					
D.1.	Kab. Dharmasraya					
1	Sembilan Koto	Lubuk Karak	PPHD	LPHD/N Lubuk Karak	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.110,30
Sub Total Kab. Dharmasraya						1.110,30
D.2.	Kab. Solok Selatan					
1	Kota Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa Timur	PPHD	LPHD/N Pakan Rabaa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	2.065,47
					Hutan Lahan Kering Sekunder	2.308,13
2	Koto Parik Gadang	Pakan Rabaa Tengah	PPHD	LPHD/N Pakan Rabaa Tengah	Hutan Lahan Kering Sekunder	286,51
3	Parik Gadang Diateh	Pakan Rabaa	PPHD	LPHD/N Pakan Rabaa	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.811,45
4	Pauh Duo	Alam Pauh Duo	PPHD	LPHD/N Alam Pauh Duo	Hutan Lahan Kering Sekunder	373,42
5	Sangir Batang	Ranah Pantai Cermin	PPHD	LPHD/N Ranah Pantai Cermin	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.064,53
6	Sangir Jujuan	Lubuk Gadang Selatan	PPHD	LPHD/N Lubuk Gadang Selatan	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.228,54
7		Lubuk Malako	PPHD	LPHD/N Lubuk Malako	Hutan Lahan Kering Sekunder	348,03
8		Padang Air Dingin	PPHD	LPHD/N Padang Air Dingin	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.823,14
9		Padang Gantiang	PPHD	LPHD/N Padang Gantiang	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.218,56
10		Padang Limau Sundai	PPHD	LPHD/N Padang Limau Sundai	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.606,48

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
11	Sungai Pagu	Koto Baru	PPHD	LPHD/N Koto Baru	Hutan Lahan Kering Sekunder	600,63
12		Pasir Talang Timur	PPHD	LPHD/N Pasir Talang Timur	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.736,12
13		Pulakek Koto Baru	PPHD	LPHD/N Pulakek Koto Baru	Hutan Lahan Kering Sekunder	3.082,09
Sub Total Kab. Solok Selatan						23.553,08
Sub Total Blok HP Pemberdayaan Masyarakat						24.663,39
Total Arah PIAPS di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)						

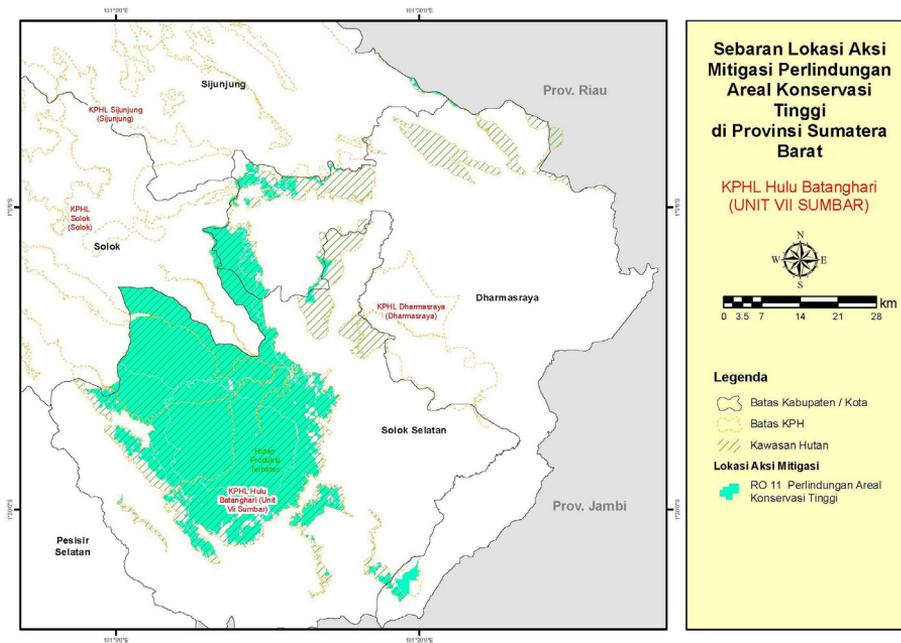
Sumber: Analisis Arah Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

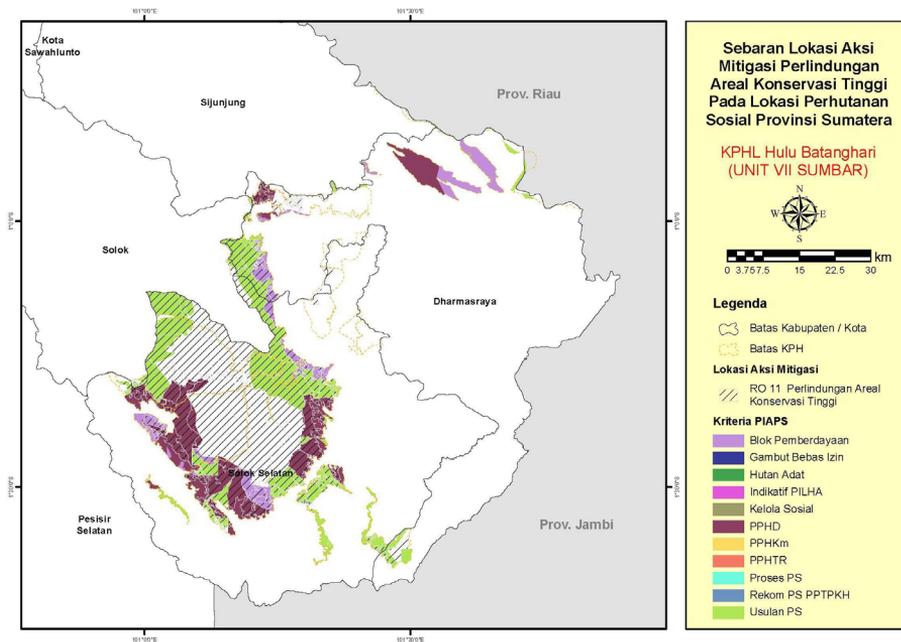
Tabel 150 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari	kegiatan	8	1	2	2	2	1	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 31 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)



Gambar 32 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) pada Areal Perhutanan Sosial

K.9. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) terhitung hanya seluas 47,11 ha yang seluruhnya berada di fungsi kawasan hutan produksi terbatas dan berada di dua wilayah nagari yakni Nagari Tebing Tinggi di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya dan Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah di Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 151 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

No	Blok	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
						HPT	
1	N/A	Dharmasraya	Pulau Punjung	Tebing Tinggi	HLK Sekunder	44,28	44,28
		Solok Selatan	Sangir Batang Hari	Lubuk Ulang Aling Tengah	HLK Sekunder	2,83	2,83
Total						47,11	47,11

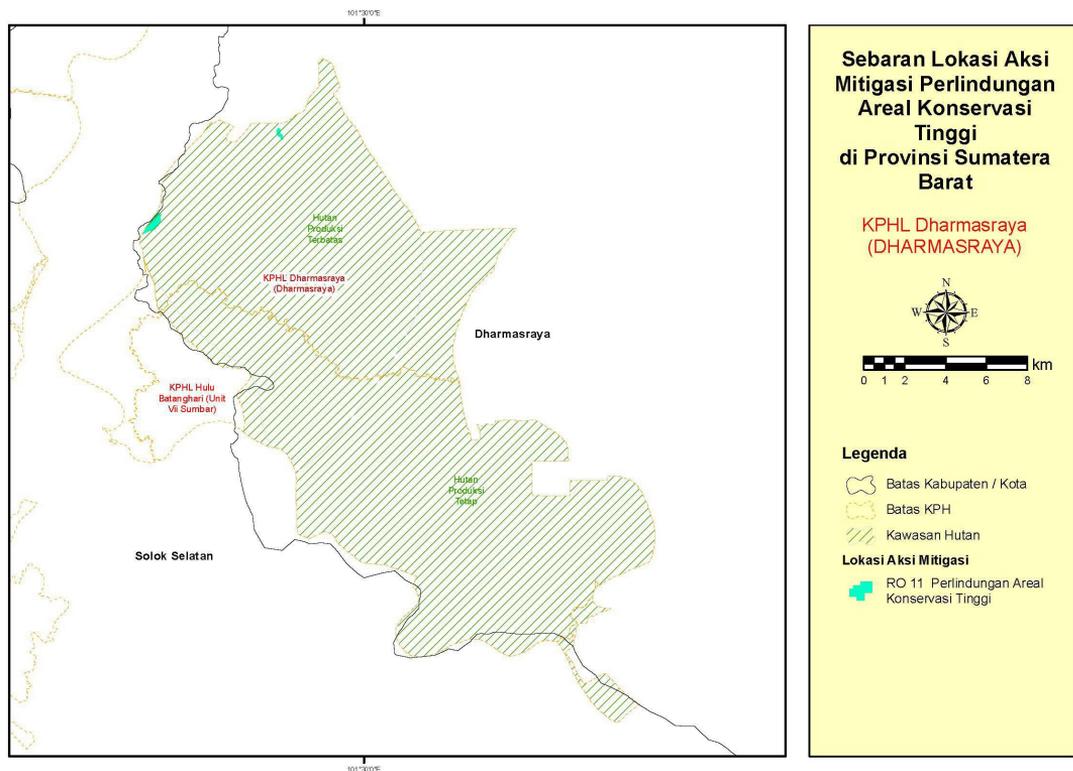
Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 152 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 33 |Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)

K.10. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) terhitung seluas 14.849,81 ha yang terletak di hutan lindung seluas 784,97 ha; hutan produksi tetap seluas 108,34 ha dan hutan produksi terbatas seluas 13.956,50 ha. Seluruh arahan secara administrasi terletak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) belum melakukan penataan hutan, maka wilayah administrasi dijadikan sebagai dasar perencanaan sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 153 |Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas Total (ha)
			HL	HP	HPT	
Airpura	Inderapura Utara	HLK Sekunder	-	-	1.221,11	1.221,11
	Lubuk Betung Inderapura	HLK Sekunder	-	-	1.804,33	1.804,33

Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan			Luas Total (ha)
			HL	HP	HPT	
Basa Ampek Balai Tapan	Ampang Tulak Tapan	HLK Sekunder	-	-	13,33	13,33
	Bukit Buai Tapan	HLK Sekunder	-	-	4,34	4,34
	Riak Danau Tapan	HLK Sekunder	-	-	10,77	10,77
Lengayang	Lakitan Tengah	HLK Sekunder	-	-	1.165,32	1.165,32
Linggo Sari Baganti	Lagan Mudik Punggasan	HLK Sekunder	-	-	101,59	101,59
	Padang Xi Punggasan	HLK Sekunder	-	-	346,62	346,62
	Punggasan Timur	HLK Sekunder	-	-	406,71	406,71
	Rantau Simalenang Air Haji	HLK Sekunder	-	-	31,43	31,43
	Sungai Sirah Air Haji	HLK Sekunder	-	-	232,13	232,13
Lunang	Lunang	HLK Sekunder	-	-	696,83	696,83
	Lunang Tengah	HLK Sekunder	-	-	660,09	660,09
	Lunang Utara	HLK Sekunder	-	-	323,19	323,19
	Pondok Parian Lunang	HLK Sekunder	-	-	563,82	563,82
	Sindang Lunang	HLK Sekunder	-	39,19	1.413,17	1.452,36
Pancung Soal	Inderapura Selatan	HLK Sekunder	-	-	845,32	845,32
	Tiuk Amplu Inderapura	Hutan Rawa Sekunder	126,52	-	-	126,52
Ranah Ampek Hulu Tapan	Binjai Tapan	HLK Sekunder	-	-	1,64	1,64
	Sungai Gambir Sako Tapan	HLK Sekunder	-	-	298,57	298,57
	Tebing Tinggi Tapan	HLK Sekunder	-	-	15,22	15,22
Ranah Pesisir	Pelangai Gadang	HLK Sekunder	-	-	1.139,79	1.139,79
	Pelangai Kaciak	HLK Sekunder	-	-	500,65	500,65
	Sungai Liku Pelangai	HLK Sekunder	-	-	807,35	807,35
Silaut	Silaut	HLK Sekunder	-	69,15	570,62	639,77
		Hutan Rawa Sekunder	658,46	-	-	658,46
	Sungai Sirah	HLK Primer	-	-	3,09	3,09
		HLK Sekunder	-	-	779,46	779,46
Total			784,97	108,34	13.956,50	14.849,81

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan arahan PIAPS, terdapat areal perhutanan sosial di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) yang telah definitif dan menjadi lokasi sasaran implementasi aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi. Lokasi yang menjadi arahan aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi terhitung sebesar 25,87% dari luas total wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) dan dari luas tersebut, terdapat sebesar 15,71% yang menjadi areal perhutanan sosial yang juga menjadi lokasi sasaran untuk aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi sebagai agenda FOLU Net Sink 2030.

Tabel 154 | Perbandingan Luas Areal Arahan Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi (R011) dan Perhutanan Sosial di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

Blok	Luas Total	Lokasi Sasaran Aksi Mitigasi		Persentase	
		Arahan RO 11	Areal Perhutanan Sosial	Arahan RO 11 dari Luas Total	PS dari Arahan RO 11
Total	57.404,79	14.849,81	2.332,40	25,87%	15,71%

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Tercatat sebanyak 4 lembaga pemegang izin perhutanan sosial dengan luas 2.332,40 ha yang terdiri dari 1 lembaga PPHKm dan 3 lembaga LPHN. Data sebaran lokasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 155 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif Perhutanan Sosial di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)

No	Kecamatan	Nagari	Kriteria PIAPS	Lembaga	Tutupan Lahan 2020	Luas (ha)
1	Airpura	Lubuk Betung Inderapura	PPHKm	KSU Tetesan Embun	Hutan Lahan Kering Sekunder	7,34
2	Lunang	Lunang	PPHD	LPHD/N Lunang	Hutan Lahan Kering Sekunder	1.384,59
3		Lunang Tengah	PPHD	LPHD/N Lunang Tengah	Hutan Lahan Kering Sekunder	399,79
4		Pondok Parian Lunang	PPHD	LPHD/N Pondok Parian Lunang	Hutan Lahan Kering Sekunder	540,68
Total Arahan PIAPS di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)						2.332,40

Sumber: Analisis Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat dan PIAPS Revisi VII, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 156 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari	kegiatan	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-
Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan												
Patroli Pengamanan Hutan Polhut [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	kegiatan	48	-	6	6	6	6	6	6	6	6
Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	kegiatan	48	-	6	6	6	6	6	6	6	6
Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	kegiatan	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	kegiatan	48	-	6	6	6	6	6	6	6	6
Pemantauan Titik Api [kegiatan]	Berkurangnya titik api	kegiatan	96	-	12	12	12	12	12	12	12	12
Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	kegiatan	18	-	-	4	5	-	-	4	5	-
FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait [kegiatan]	Meningkatnya pemahaman para pihak untuk ikut menjaga kawasan hutan pada areal gambut dan ikut membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan	kegiatan	18	-	-	3	3	3	-	3	3	3
Program Pemberdayaan Masyarakat												
Pengadaan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) [unit]	Adanya peningkatan kapasitas usaha kelompok PS di wilayah KPHP Pesisir Selatan	unit	20	-	-	-	10	-	-	-	10	-
Program Fasilitas dan Pendampingan Perhutanan Sosial												
Pendataan penggarap oleh masyarakat [kegiatan]	Terkumpulnya data penggarap lahan di wilayah KPHL Pesisir Selatan	kegiatan	25	-	6	6	6	7	-	-	-	-
Pengusulan izin perhutanan sosial [kegiatan]	Terbitnya izin PS di lokasi RO 11 KPHP Pesisir Selatan	kegiatan	15	-	-	8	-	-	-	7	-	-

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial [kegiatan]	Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok PS	kegiatan	50	-	6	6	6	7	6	6	6	7

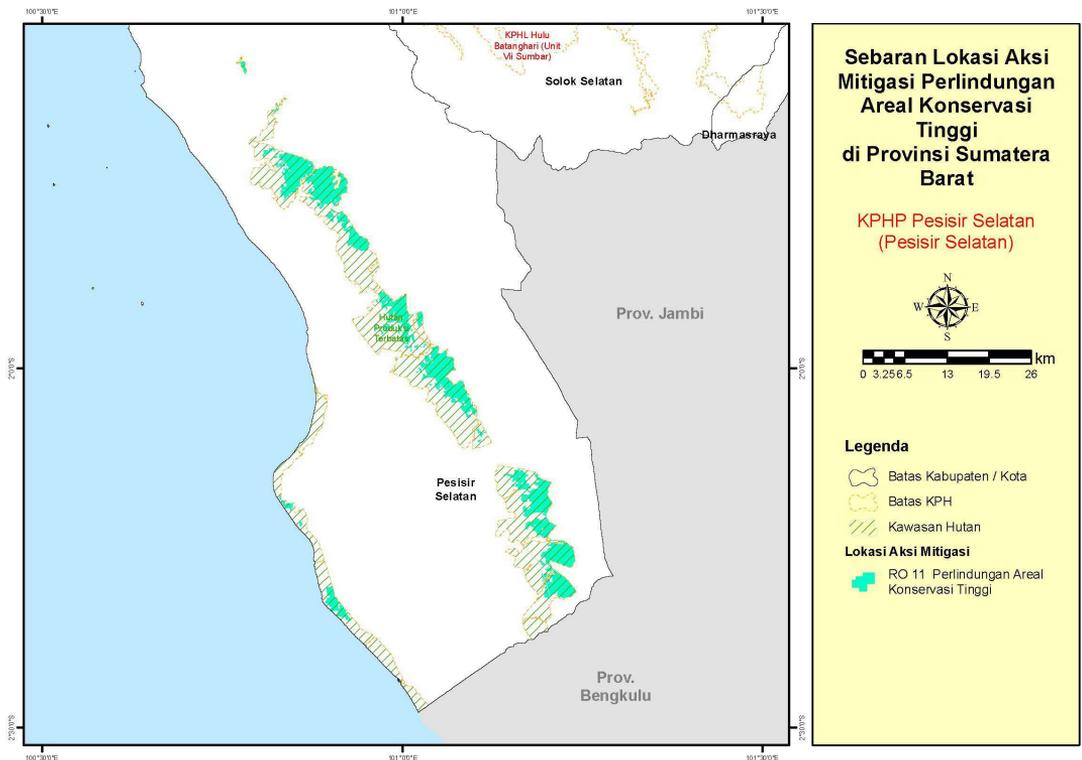
Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022; KPHL Pesisir Selatan, 2022

Tabel 157 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada Tahun 2025-2030

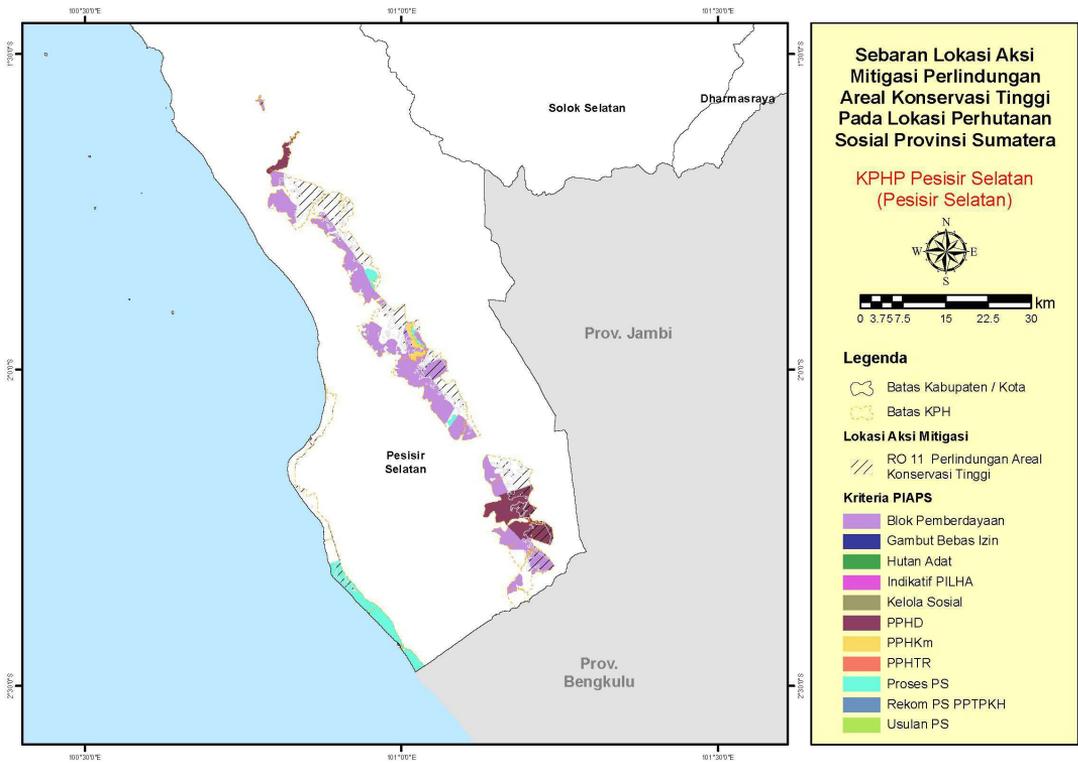
Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan									
Patroli Pengamanan Hutan Polhut [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	kegiatan	144	24	24	24	24	24	24
Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	kegiatan	144	24	24	24	24	24	24
Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	kegiatan	6	1	1	1	1	1	1
Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	kegiatan	144	24	24	24	24	24	24
Pemantauan Titik Api [kegiatan]	Berkurangnya titik api	kegiatan	288	48	48	48	48	48	48
Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	kegiatan	54	9	9	9	9	9	9
FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait [kegiatan]	Meningkatnya pemahaman para pihak untuk ikut menjaga kawasan hutan pada areal gambut dan ikut membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan	kegiatan	54	9	9	9	9	9	9
Program Pemberdayaan Masyarakat									
Pengadaan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP)[unit]	Adanya peningkatan kapasitas usaha kelompok PS di wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	unit	60	10	10	10	10	10	10

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Fasilitas dan Pendampingan Perhutanan Sosial									
Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial [kegiatan]	Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok PS	kegiatan	150	25	25	25	25	25	25

Sumber: KPHL Pesisir Selatan, 2022



Gambar 34 | Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)



Gambar 35 |Peta Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) pada Areal Perhutanan Sosial

K.11. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) terhitung seluas 5.155,69 ha dan seluruhnya berada pada wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada Unit XI, terdapat areal yang merupakan area konsesi PBPH-HA atas nama PT. Minas Pagai Lumber seluas 3,84 ha sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 158 |Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)
						HL	HP	
1	Unit X	N/A	Siberut Barat Daya	Katurei	HLK Sekunder	25,44	-	25,44
					Hutan Mangrove Primer	72,64	23,33	95,97
				Pasakiat Taillelu	Hutan Mangrove Primer	-	61,33	61,33

No	Blok	Lokasi Petak	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan		Luas (ha)		
						HL	HP			
2	Unit XI	N/A	Siberut Selatan	Muara Siberut	HLK Sekunder	0,92	-	0,92		
					Hutan Mangrove Primer	31,51	-	31,51		
			Siberut Tengah	Saibi Samukop	HLK Sekunder	1,44	-	1,44		
					Hutan Mangrove Primer	117,50	128,02	245,52		
			Siberut Utara	Muara Sikabalu	Hutan Mangrove Primer	43,00	-	43,00		
			Sub Total Unit X					292,44	212,67	505,12
			PT Minas Pagai Lumber	Pagai Selatan	Sinaka	Hutan Mangrove Primer	-	1,04	1,04	
						Hutan Mangrove Sekunder	-	2,81	2,81	
			Sub Total Unit XI PT Minas Pagai Lumber					-	3,84	3,84
			Pagai Selatan	Bulasat	HLK Sekunder	-	1,98	1,98		
					Hutan Mangrove Primer	-	66,53	66,53		
					Hutan Mangrove Sekunder	-	13,40	13,40		
				Makalo	HLK Sekunder	3,29	-	3,29		
					HLK Sekunder	1.171,75	-	1.171,75		
Sinaka	Hutan Mangrove Primer	-		613,35	613,35					
	Hutan Mangrove Sekunder	-		161,53	161,53					
Pagai Utara	Saumanganya	HLK Sekunder		17,26	-	17,26				
	Silabu	HLK Sekunder		1.787,39	-	1.787,39				
Hutan Mangrove Primer		-		4,63	4,63					
Sikakap	Sikakap	Hutan Mangrove Primer		-	41,47	41,47				
	Taikako	Hutan Mangrove Primer		-	21,45	21,45				
Sipora Selatan	Berikulou	Hutan Mangrove Primer	-	20,72	20,72					
	Mara	HLK Sekunder	357,33	-	357,33					
		HLK Sekunder	124,54	-	124,54					
	Hutan Mangrove Primer	-	8,98	8,98						
	Saureinu	HLK Sekunder	4,75	-	4,75					
Sioban	HLK Sekunder	139,82	-	139,82						
Sipora Utara	Betumonga	Hutan Mangrove Sekunder	-	32,26	32,26					
		Hutan Mangrove Primer	-	54,29	54,29					
Sub Total Unit XI					3.606,13	1.040,60	4.646,73			
Total					3.898,57	1.257,12	5.155,69			

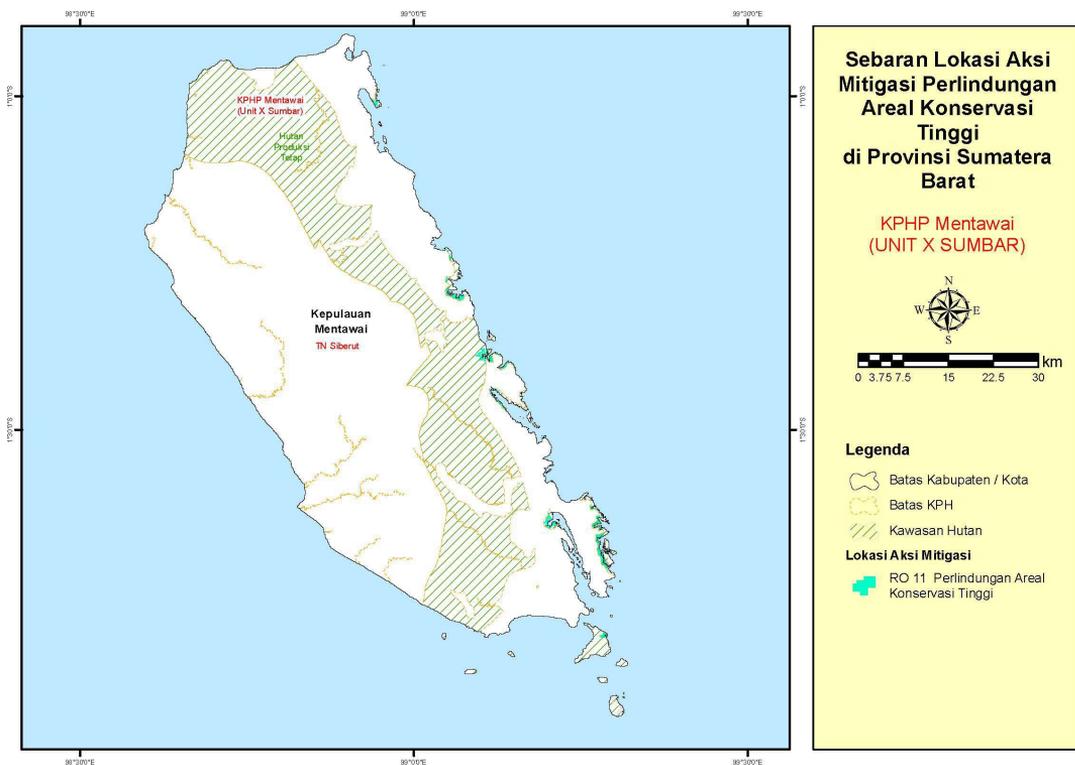
Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

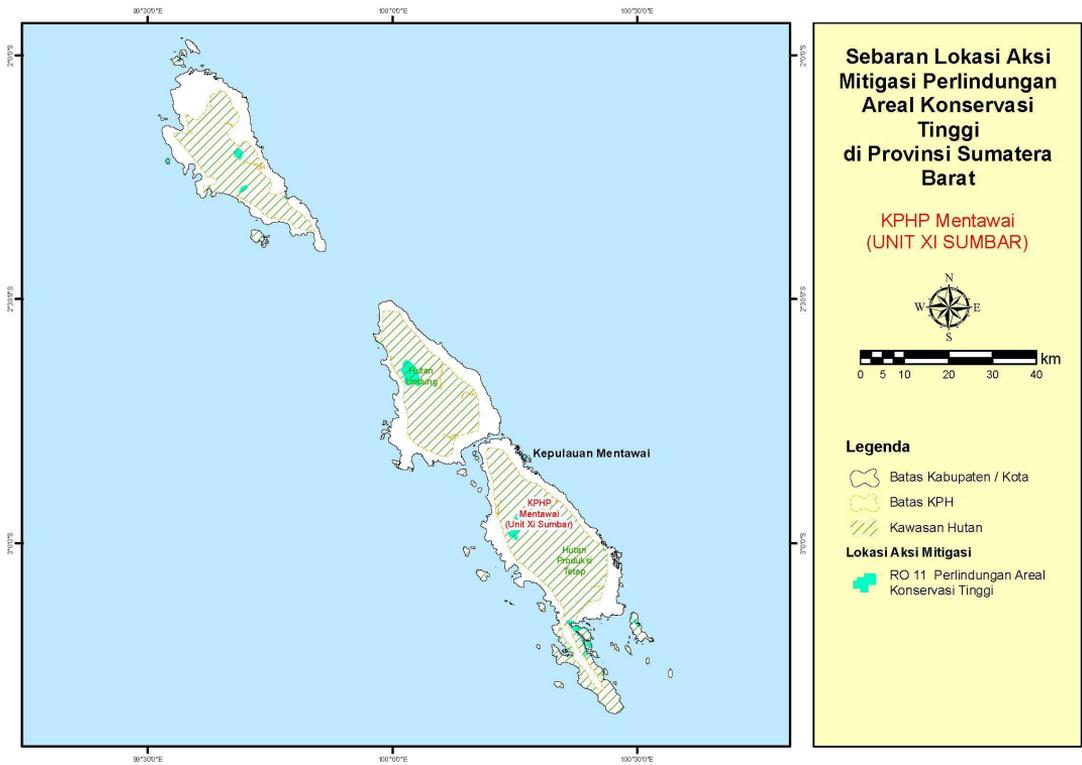
Tabel 159 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari	kegiatan	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022



Gambar 36 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)



Gambar 37 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit XI)

K.12. Wilayah BKSDA Sumatera Barat

Arahan spasial aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi yang terdapat di wilayah BKSDA Sumatera Barat terhitung hanya seluas 15,93 ha dan terletak di 2 nagari di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 160 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat

Zona	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan	Luas (ha)
					APL	
Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir dan Barisan	Pesisir Selatan	IV Nagari Bayang Utara	Muaro Aie	HLK Primer	7,93	7,93
			Pancuan Taba	HLK Primer	8,01	8,01
Total					15,93	15,93

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 161 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat pada Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi												
Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

K.12. Intervensi BPSKL Sumatera

Berdasarkan arahan dari BPSKL Wilayah Sumatera, terdapat arahan pada lokasi definitif perhutanan sosial untuk Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat seluas 130.041,87 ha yang tersebar di 126 unit lembaga perhutanan sosial.

Tabel 162 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam Arahan PIAPS dengan Skema Hutan Nagari

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
1	Koto Nopan	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Rao Utara Nagari Koto Nopan	HLK Primer	0,10	-	-	-	-
				HLK Primer	-	8.317,38	-	-	-
				HLK Sekunder	-	1.531,95	-	-	-
2	LHPD/N Lalan	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Lubuk Tarok Nagari Lalan	HLK Sekunder	-	9,29	0,00	-	-
3	LPHD Baringin	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Agam	HLK Sekunder	1,75	0,26	-	-	-
				HLK Sekunder	-	1.128,41	-	-	-
4	LPHD Kamang Hilia	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Agam Kec. Kamang Magek Nagari Kamang Hilia	HLK Sekunder	0,19	-	-	-	-
				HLK Sekunder	-	356,54	-	-	-
5	LPHD Koto Kaciak	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Agam Kec. Baso Nagari Koto Kaciak	HLK Sekunder	-	0,31	-	-	-
				Hutan Lahan Kering Primer	-	2,63	-	-	-
				HLK Sekunder	-	48,16	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
6	LPHD Langki	-	Kab. Sijunjung Kec. Tanjung Gadang Nagari Langki	HLK Sekunder	0,00	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	346,78	-	-	-
7	LPHD Lubuk Basung	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Agam Kec. Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung	HLK Sekunder	-	19,22	-	-	-
8	LPHD Muaro Takung	-	Kab. Sijunjung Kec. Kamang Baru Nagari Muaro Takung	HLK Sekunder	0,01	0,47	-	-	-
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	1,73	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	346,58	0,01	-	-
9	LPHD Padam Gadang	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Gunung Omeh Nagari Padam Gadang	HLK Sekunder	0,22	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	406,93	-	-	279,02
10	LPHD Padang Tarok	-	Kab. Agam Kec. Baso Nagari Padang Tarok	HLK Sekunder	0,02	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	195,42	-	-	-
11	LPHD Pagadih	-	Kab. Agam Kec. Palu-puh Nagari Pagadih	HLK Sekunder	0,11	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	-	-	-	333,68
12	LPHD Simarasok	-	Kab. Agam Kec. Baso Nagari Simarasok	HLK Sekunder	0,01	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	394,19	-	-	-
13	LPHD Simpang	-	Kab. Pasaman Kec. Simpang Alahan Mati Nagari Simpang	HLK Sekunder	0,37	3,21	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	314,23	-	-	-
14	LPHD Sisawah	-	Kab. Sijunjung Kec. Sumpur Kudus Nagari Sisawah	HLK Sekunder	0,29	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	1.929,35	0,14	-	-
15	LPHD Taeh Bukik	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Payakumbuh Nagari Taeh Bukik	HLK Sekunder	-	62,55	-	-	-
16	LPHD Taram	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Harau Nagari Taram	HLK Sekunder	0,07	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	616,65	-	-	-
17	LPHD/N Aie angek	-	Kab. Sijunjung Kec. Sijunjung Nagari Aie angek	HLK Sekunder	0,13	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	1.584,42	0,15	-	-
18	LPHD/N Alahan Mati	-	Kab. Pasaman Kec. Simpang Alahan Mati Nagari Alahan Mati	HLK Sekunder	0,11	0,15	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	0,00	332,40	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
19	LPHD/N Alam	-	Kab. Solok Selatan	HLK Sekunder	1,34	-	-	-	-
	Pauh Duo	KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]	Kec. Pauh Duo Nagari Alam Pauh Duo	HLK Sekunder	-	384,68	-	-	-
20	LPHD/N Balai Panjang	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Lareh Lago Salaban Nagari Balai Panjang	HLK Sekunder	0,11	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	268,87	-	-	-
21	LPHD/N Baruah Gunuang	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Bukit Barisan Nagari Baruah Gunuang	HLK Sekunder	0,25	-	-	-	-
		KPHL Limapuluh Kota [Unit II]		HLK Sekunder	-	1.844,13	-	-	-
22	LPHD/N Barung-Barung Balantai Selatan	-	Kab. Pesisir Selatan Kec. Koto XI Tarusan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan	HLK Sekunder	0,06	-	-	-	-
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Sekunder	-	330,41	-	-	-
23	LPHD/N Batipuah Baruah	-	Kab. Tanah Datar Kec. Batiputih Nagari Batipuah Baruah	HLK Primer	0,11	-	-	-	-
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Sekunder	0,10	-	-	-	-
				Hutan Lahan Kering Primer	-	123,10	-	-	-
				HLK Sekunder	-	283,92	-	-	-
24	LPHD/N Buluh Kasok	-	Kab. Sijunjung Kec. Lubuk Tarok Nagari Buluh Kasok	HLK Sekunder	0,06	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	532,33	-	-	-
		KPHL Solok [Unit VI]		HLK Sekunder	-	0,03	-	-	-
25	LPHD/N Durian Gadang	-	Kab. Sijunjung Kec. Sijunjung Nagari Durian Gadang	HLK Sekunder	0,24	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	2.629,94	-	-	0,00
26	LPHD/N Ganggo Mudiak	-	Kab. Pasaman Kec. Bonjol Nagari Ganggo Mudiak	HLK Sekunder	0,04	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	328,14	-	-	-
				HLK Sekunder	-	704,34	-	-	1.216,93
27	LPHD/N Halaban	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Larah Sago Halaban Nagari Halaban	HLK Sekunder	0,19	-	-	-	-
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Sekunder	-	332,41	-	-	-
28	LPHD/N Harau	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Harau Nagari Harau	HLK Sekunder	0,01	1,66	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	957,70	-	-	-
		KPHL Limapuluh Kota [Unit II]		HLK Sekunder	-	587,71	-	-	-
29	LPHD/N Jambak	-	Kab. Pasaman Kec. Lubuk Sikaping Nagari Jambak	HLK Sekunder	0,11	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	354,78	-	-	0,29
				HLK Sekunder	-	3.403,71	-	-	4,11

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
30	LPHD/N Kamang Mudiak	-	Kab. Agam Kec. Kamang Magek Nagari Kamang Mudiak	HLK Sekunder	4,53	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Pesisir Selatan Kec. Lengayang Nagari Kambang Timur	HLK Sekunder	-	2.626,04	-	-	-
		-	Kab. Pesisir Selatan Kec. Koto XI Tarusan Kampung Baru Nagari Korong Nan Ampek	HLK Sekunder	-	-	-	-	29,82
31	LPHD/N Kampung Baru Korong Nan Ampek	KPHL Bukit Barisan [Unit IV]	Kab. Pasaman Barat Kec. Kinali Nagari Katiagan	HLK Primer	-	282,41	-	-	-
				HLK Sekunder	-	458,86	-	-	-
32	LPHD/N	-	Kab. Sijunjung	HLK Sekunder	0,00	-	-	-	-
	Kampung Dalam	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kec. Lubuk Tarok Nagari Kampung Dalam	HLK Sekunder	-	116,55	-	-	-
33	LPHD/N Katiagan	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Solok Selatan Kec. Sungai Pagu Nagari Koto Baru	Hutan Mangrove Sekunder	0,13	-	-	-	-
				Hutan Mangrove Sekunder	-	18,47	-	-	-
				Hutan Rawa Sekunder	-	51,03	-	-	-
34	LPHD/N Koto Baru	KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Gunung Omeh Nagari Koto Tinggi	HLK Sekunder	-	242,89	-	-	358,60
35	LPHD/N Koto Tinggi	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Suliki Nagari Kurai	HLK Sekunder	0,20	-	-	-	-
				HLK Sekunder	-	76,01	-	-	690,67
36	LPHD/N Kurai	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Pasaman Kec. Mapat Tunggal Selatan Nagari Lubuk Gadang	HLK Sekunder	0,36	-	-	-	-
				HLK Sekunder	-	1.347,13	-	-	-
37	LPHD/N Limo Koto	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Pasaman Kec. Sangir Jujuan Nagari Lubuk Gadang Selatan	HLK Sekunder	-	0,00	-	-	0,00
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Lubuk Gadang Selatan	HLK Sekunder	-	138,63	-	-	72,58
38	LPHD/N Lubuk Gadang	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Lubuk Gadang Selatan	HLK Primer	0,01	15,16	-	-	-
				HLK Primer	-	1.108,59	-	-	-
				HLK Sekunder	-	129,82	-	-	-
39	LPHD/N Lubuk Gadang Selatan	KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Lubuk Gadang Selatan	HLK Sekunder	0,28	0,00	-	-	0,00
				HLK Sekunder	-	1.987,66	-	-	1.240,93

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
40	LPHD/N Lubuk Karak	-	Kab. Dharmasraya Kec. Sembilan Koto Nagari Lubuk Karak	HLK Sekunder	0,18	-	-	-	0,08
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	754,29	0,08	-	356,21
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	-	-	-	1,61
41	LPHD/N Lubuk Malako	-	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Lubuk Malako	HLK Sekunder	0,00				
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder		348,17			
42	LPHD/N Lubuk Tarantang	-	Kab. Sijunjung Kec. Kamang Baru Nagari Lubuk Tarantang	HLK Sekunder	0,21				
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder		217,06			
43	LPHD/N Lubuk Tarok	-	Kab. Sijunjung Kec. Lubuk Tarok Nagari Lubuk Tarok	HLK Sekunder	0,15				
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder		834,98	0,00		
		KPHL Solok [Unit VI]		HLK Sekunder		31,71			
44	LPHD/N Lunang	-	Kab. Pesisir Selatan Kec. Lunang Nagari Lunang	HLK Sekunder	0,00				233,47
		KPHP Mentawai [Unit IX]		HLK Sekunder					1.384,59
45	LPHD/N Lunang Tengah	-	Kab. Pesisir Selatan Kec. Lunang Nagari Lunang Tengah	HLK Sekunder					11,88
		KPHP Mentawai [Unit IX]		HLK Sekunder					399,79
46	LPHD/N Manganti	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Sumpur Kudus Nagari Manganti	HLK Sekunder		1.171,79			
47	LPHD/N Muaro Sungai Lolo	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Mapat Tunggul Selatan Muaro Sungai Lolo	HLK Sekunder					204,02
48	LPHD/N Muaro Tais	-	Kab. Pasaman Kec. Mapat Tunggul Nagari Muaro Tais	HLK Sekunder					0,02
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	4.251,36	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	3.019,80	-	-	0,28
49	LPHD/N Nagari Unggan	-	Kab. Sijunjung Kec. Simpur Kudus Nagari Unggan	HLK Sekunder	0,41	0,07	-	-	-
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Sekunder	-	0,43	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Primer	-	1.118,41	-	-	0,01
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	3.270,40	-	-	0,03
50	LPHD/N Padang Air Dingin	-	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Padang Air Dingin	HLK Sekunder	0,31	-	-	-	-
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	1.823,25	-	-	0,39

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
51	LPHD/N Padang Gantiang	-	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Padang Gantiang	HLK Sekunder	0,07	-	-	-	-
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	1.218,57	-	-	0,08
52	LPHD/N Padang Limau Sundai	-	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Jujuan Nagari Padang Limau Sundai	HLK Sekunder	0,04	0,00	-	-	-
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	1.607,29	-	-	0,37
53	LPHD/N Padang Metinggi	-	Kab. Pasaman Kec. Rao Nagari Padang Metinggi	HLK Sekunder	0,12	3,04	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	344,21	-	-	-
				HLK Sekunder	0,02	1.358,36	-	-	-
54	LPHD/N Pakan Rabaa	-	Kab. Solok Selatan Kec. Parik Gadang Diatesh Nagari Pakan Rabaa	HLK Sekunder	0,19	-	-	-	-
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	2.458,43	-	-	1.353,48
55	LPHD/N Pakan Rabaa Tengah	KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]	Kab. Solok Selatan Kec. Koto Parik Gadang Nagari Pakan Rabaa Tengah	HLK Sekunder	-	-	-	-	286,51
56	LPHD/N Pakan Rabaa Timur	-	Kab. Solok Selatan Kec. Kota Parik Gadang Diatesh Nagari Pakan Rabaa Timur	HLK Primer	-	-	-	-	0,00
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	0,40	-	-	-	-
				HLK Primer	-	1.986,15	-	-	79,61
				HLK Sekunder	-	1.828,35	-	-	479,99
57	LPHD/N Paninjauan	-	Kab. Agam Kec. Tanjung Jaya Nagari Paninjauan	HLK Sekunder	-	0,32	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Primer	-	0,31	-	-	-
				HLK Sekunder	-	34,61	-	-	-
58	LPHD/N Paru	-	Kab. Sijunjung Kec. Sijunjung Nagari Paru	HLK Sekunder	0,33	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	3.145,69	-	-	-
59	LPHD/N Pasia Laweh	-	Kab. Agam Kec. Palupuh Nagari Pasia Laweh	HLK Sekunder	1,54	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	2.174,68	-	-	1.080,47
60	LPHD/N Pasir Talang Timur	KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]	Kab. Solok Selatan Kec. Sungai Pagu Nagari Pasir Talang Timur	HLK Sekunder	-	781,41	-	-	954,76
61	LPHD/N Pondok Parian Lunang	-	Kab. Pesisir Selatan Kec. Lunang Nagari Pondok	HLK Sekunder	-	-	-	-	36,97
		KPHP Mentawai		HLK Sekunder	-	-	-	-	540,68
		[Unit IX]	Parian Lunang						

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
62	LPHD/N Pulakek Koto Baru	-	Kab. Solok Selatan Kec. Sungai Pagu Nagari Pulakek Koto Baru	HLK Sekunder	0,03	-	-	-	0,05
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	2.136,98	-	-	950,95
63	LPHD/N Pulasan	-	Kab. Sijunjung Kec. Tanjung Gadang Nagari Pulasan	HLK Sekunder	0,18	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	148,80	-	-	-
64	LPHD/N Ranah Pantai Cermin	-	Kab. Solok Selatan Kec. Sangir Batang Nagari Ranah Pantai Cermin	HLK Sekunder	0,05	0,08	-	-	-
		KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]		HLK Sekunder	-	1.065,75	-	-	-
65	LPHD/N Rangkiang Luluh	KPHL Solok [Unit VI]	Kab. Solok Kec. Tigo Lurah Nagari Rangkiang Luluh	HLK Primer	-	474,80	-	-	-
				HLK Sekunder	-	37,59	-	-	-
66	LPHD/N Sako Utara Pasia Talang	KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]	Kab. Solok Selatan Kec. Sungai Pagu Nagari Sako Utara Pasia Talang	HLK Primer	-	0,02	-	-	-
67	LPHD/N Salibutan Lubuk Alung	-	Kab. Padang Pariaman Kec. Lubuk Alung Nagari Salibutan Lubuk Alung	HLK Sekunder	0,12	-	-	-	-
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Primer	-	2.027,31	-	-	-
				HLK Sekunder	-	687,44	-	-	-
68	LPHD/N Sarilamak	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Harau Nagari Sarilamak	HLK Primer	-	-	-	-	0,00
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	0,07	-	-	-	0,03
				HLK Primer	-	12,54	-	-	-
				HLK Sekunder	-	129,05	-	-	82,97
69	LPHD/N Sialang	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Kapur IX Nagari Sialang	HLK Primer	-	18,33	-	-	-
		KPHL Limapuluh Kota [Unit II]		HLK Sekunder	0,08	-	-	0,08	-
				HLK Primer	-	385,78	-	-	-
				HLK Sekunder	-	3.502,12	-	-	1.641,56
				HLK Primer	-	3,54	-	-	-
70	LPHD/N Silantai	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Sumpur Kudus Nagari Silantai	HLK Sekunder	-	422,42	-	-	-
				HLK Sekunder	0,41	-	-	-	-
71	LPHD/N Silayang	-	Kab. Pasaman Kec. Mapat Tunggal Selatan Nagari Silayang	HLK Primer	-	667,29	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	3.049,70	-	-	-
				HLK Sekunder	0,00	-	-	-	-
72	LPHD/N Silongo	-	Kab. Sijunjung Kec. Lubuk Tarok Nagari Silongo	HLK Sekunder	0,00	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	54,18	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
73	LPHD/N Simanau	-	Kab. Solok Kec. Tigo Lurah Nagari Simanau	HLK Primer	0,16	-	-	-	-
				HLK Sekunder	7,84	-	-	-	-
		KPHL Solok [Unit VI]		HLK Primer	-	232,11	-	-	-
				HLK Sekunder	-	691,62	-	-	-
74	LPHD/N Simpang Kapuak	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Mungka Nagari Simpang Kapuak	HLK Sekunder	-	4,58	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	486,56	-	-	-
		KPHL Limapuluh Kota [Unit II]		HLK Sekunder	-	1.567,27	-	-	-
75	LPHD/N Sitalang	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Agam Kec. Ampek Nagari Nagari Sitalang	HLK Primer	-	223,69	-	-	-
				HLK Sekunder	-	10,99	-	-	-
76	LPHD/N Solok Ambah	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Sijunjung Nagari Solok Ambah	HLK Sekunder	-	168,63	-	-	-
77	LPHD/N Sumpur Kudus	-	Kab. Sijunjung Kec. Sumpur Kudus Nagari Sumpur Kudus	HLK Sekunder	0,01	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	3.571,34	-	-	0,03
78	LPHD/N Sungai Balantiak	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Akabiluru Nagari Sungai Balantiak	HLK Sekunder	0,11	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	467,57	-	-	-
79	LPHD/N Sungai Bantuang	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Kamang Baru Nagari Sungai Bantuang	HLK Sekunder	-	294,76	-	-	-
80	LPHD/N Sungai Lansek	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Kamang Baru Nagari Sungai Lansek	HLK Sekunder	-	101,17	-	-	-
81	LPHD/N Surian	KPHL Solok [Unit VI]	Kab. Solok Kec. Pantai Cermin Nagari Surian	HLK Primer	-	27,66	-	-	-
				HLK Sekunder	-	1.887,64	-	-	-
82	LPHD/N Tamparungo	-	Kab. Sijunjung Kec. Sumpur Kudus Nagari Tamparungo	HLK Sekunder	0,13	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung [Unit V]		HLK Sekunder	-	92,11	-	-	-
83	LPHD/N Tanjung Betung	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Rao Nagari Tanjung Betung	HLK Primer	-	62,26	-	-	-
84	LPHD/N Tanjung Bonai Aur	KPHL Sijunjung [Unit V]	Kab. Sijunjung Kec. Sumpur Kudus Nagari Tanjung Bonai Aur	HLK Sekunder	-	13,61	15,69	-	-
85	LPHD/N Taratak Sungai Lundang	KPHL Bukit Barisan [Unit IV]	Kab. Pesisir Selatan Kec. Koto XI Tarusan Nagari Taratak Sungai Lundang	HLK Primer	-	38,14	-	-	-
				HLK Sekunder	-	179,93	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
86	LPHD/N Tigo Koto Silungkang	-	Kab. Agam Kec. Palembayan Nagari Tigo Koto Silungkang	HLK Sekunder	0,03	2,54	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Primer	-	129,25	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	1.644,31	-	-	-
				HLK Sekunder	-	74,84	-	-	-
87	LPHD/N Timbulun	-	Kab. Sijunjung Kec. Tanjung Gadang Nagari Timbulun	HLK Sekunder	0,10	-	-	-	-
		KPHL Sijunjung Unit V		HLK Sekunder	-	107,09	-	-	-
Total					24,80	100.302,87	16,07	0,08	14.307,54

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Tabel 163 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Provinsi Sumatera Barat dalam Arahan PIAPS dengan Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
1	Koperasi Produsen Serba Usaha Solok Rajo	KPHL Solok [Unit VI]	Kab. Solok Kec. Lembah Gumanti Nagari Aie Dingin	HLK Sekunder	-	1.119,32	-	-	-
2	KSU Ekonomi Desa Tabek	-	Kab. Solok Kec. Hiliran Gumanti Nagari Talang Babungo	HLK Sekunder	0,08	-	-	-	-
		KPHL Solok [Unit VI]		HLK Sekunder	-	1.152,57	-	-	-
3	KSU Tetesan Embun	KPHP Mentawai [Unit IX]	Kab. Pesisir Selatan Kec. Airpura Nagari Lubuk Betung Inderapura	HLK Sekunder	-	-	-	-	7,34
4	KT Agroforestry Aro Sepakat	KPHL Bukit Barisan [Unit IV]	Kota Padang Panjang Kec. Padang Panjang Timur Nagari Koto Katik	HLK Primer	-	78,46	-	-	-
				HLK Sekunder	-	32,98	-	-	-
5	KT Beringin Sakti	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Duo Koto Nagari Cubadak	HLK Sekunder	-	106,60	-	-	-
6	KT Gunung Leco	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Ranah Batahan Nagari Desa Baru	HLK Sekunder	0,61	3,43	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	748,87	-	-	-
7	KT Leter W	KPHL Bukit Barisan [Unit IV]	Kab. Padang Pariaman Kec. V Koto Kampung Dalam Nagari Sikucur	HLK Sekunder	-	43,29	-	-	-
8	KT Maju Bersama	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Barat Kec. Talamau Nagari Kajai	HLK Primer	-	95,00	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
9	KT Marguna Alam	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Barat Kec. Ranah Batahan Jorong Simpang Tol- ang Nagari Batahan	HLK Sekunder	-	852,41	-	-	-
10	KT Musus Saiyo	KPHL Agam Raya [Unit III]	Kab. Pasaman Kec. Bonjol Nagari Ganggo Hilia	HLK Sekunder	-	31,23	-	-	0,02
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	169,84	-	-	0,00
11	KT Pertemuan Saiyo	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Mapat Tunggul Selatan Nagari Muaro Sei Lolo	HLK Sekunder	-	-	-	-	111,43
12	KT Piudang Sepakat	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Lubuk Sikaping Nagari Tanjuang Baringin	HLK Sekunder	-	149,64	-	-	-
13	KT Rap Hita Siyo	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Duo Koto Nagari Cubadak	HLK Sekunder	-	88,66	-	-	-
14	KT Saiyo Nagari	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Padang Gelugur Nagari Padang Gelugur	HLK Primer	-	90,99	-	-	-
15	KT Sepakat Ber-saudara	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Lubuk Sikaping Nagari Tanjuang Baringin	HLK Sekunder	-	60,45	-	-	-
16	KT Sialangan	KPHL Bukit Barisan [Unit IV]	Kab. Padang Paria- man Kec. V Koto Kampung Dalam Nagari Gunung Padang Alai	HLK Sekunder	-	193,16	-	-	-
17	KT Tombang Pinang	-	Kab. Pasaman Kec. Rao Selatan Nagari Lansek Kadok	HLK Sekunder	0,00	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	64,44	-	-	-
18	KTH Bukit Lestari	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Rao Utara Nagari Langung	HLK Sekunder	-	187,00	-	-	-
19	KTH Gunung Sigantang	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Ranah Batahan	HLK Sekunder	0,04	-	-	-	-
		KPHL Pasaman		HLK Primer	-	130,72	-	-	-
		Raya [Unit I]	Nagari Bantahan	HLK Sekunder	-	288,79	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
20	KTH Harapan Baru Batang Kundur	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Duo Koto Nagari Cubadak	HLK Sekunder	-	80,81	-	-	-
21	KTH Harapan Jaya Batu Ampar	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Panti Nagari Panti	HLK Sekunder	-	38,98	-	-	-
22	KTH Ingin Makmur	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Talamau Nagari Sinuruik	HLK Sekunder	0,48	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	479,79	-	-	-
23	KTH Islamic Centre Ummah	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Ranah Batahan Nagari Batahan	HLK Sekunder	0,05	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	0,11	-	-	-
				HLK Sekunder	-	2.799,09	-	-	-
24	KTH Karya Setia	-	Kab. Pasaman Kec. Rao Selatan Nagari Lansek Kodok	HLK Sekunder	3,38	-	-	-	-
25	KTH Kemasyarakatan Roba Julu	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Lembah Melintang Nagari Ujung Gading	HLK Sekunder	0,21	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	0,46	-	-	-
				HLK Sekunder	-	358,84	-	-	-
26	KTH Kemasyarakatan Situak	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Lembah Melintang Nagari Ujung Gading	HLK Primer	0,01	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	0,04	-	-	-	-
				HLK Primer	-	103,39	-	-	-
				HLK Sekunder	-	67,73	-	-	-
27	KTH Padang Janiah	KPHL Bukit Barisan [Unit IV]	Kota Padang Kec. Pauh Nagari Lambung Bukit	HLK Primer	-	194,52	-	-	-
28	KTH Padang Kubuak	-	Kab. Agam Kec. Matur Nagari Matua Mudik	HLK Sekunder	0,00	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	121,89	-	-	-
29	KTH Pangduhu Maju	KPHL Pasaman Raya [Unit I]	Kab. Pasaman Kec. Duo Koto Nagari Simpang Tonang	HLK Sekunder	-	127,77	-	-	-
30	KTH Pasada Roha Bulu Laga	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Sungai Aur Nagari Sungai Aua	HLK Sekunder	0,16	-	-	-	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Primer	-	894,05	-	-	-
				HLK Sekunder	-	232,48	-	-	-
31	KTH Rambayan Manduang	-	Kab. Agam Kec. Tilatang Kamang Nagari Koto Tengah	HLK Sekunder	0,24	-	-	-	-
		KPHL Agam Raya [Unit III]		HLK Sekunder	-	323,85	-	-	-
32	KTH Saiyo Sakato	-	Kab. Lima Puluh Kota Kec. Pangkalan Koto Baru Nagari Tanjung Pauh	HLK Sekunder	0,01	-	-	-	-
		KPHL Limapuluh Kota [Unit II]		HLK Primer	-	82,19	-	-	0,11
				HLK Sekunder	-	1.927,94	-	-	-

No	Nama Lembaga Pengelola	Wilayah KPH	Wilayah Administrasi	Tutupan Lahan 2020	Luas Menurut Fungsi Kawasan (ha)				
					APL	HL	HP	HPK	HPT
33	KTH Sikayan Balumuik	-	Kota Padang Kec. Pauh Nagari Limau Manis	HLK Primer	0,01	-	-	-	-
		-		HLK Sekunder	0,02	-	-	-	-
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Primer	-	115,42	-	-	-
				HLK Sekunder	-	24,73	-	-	-
34	KTH Suka Menang Aia Kacang	-	Kab. Pasaman Barat Kec. Talamau Nagari Sinuruik	HLK Sekunder	0,00	-	-	0,00	-
		KPHL Pasaman Raya [Unit I]		HLK Sekunder	-	87,84	-	-	2,50
35	KTH Tak Boncah Batu Badaguak	-	Kab. Sawahlunto Kec. Silungkang Nagari Tarantak	HLK Sekunder	0,02	-	-	-	0,01
		KPHL Bukit Barisan [Unit IV]		HLK Sekunder	-	-	1,41	-	62,50
		KPHL Sijunjung [Unit V]	Bancah	HLK Sekunder	-	-	-	-	0,18
		KPHL Solok [Unit VI]		HLK Sekunder	-	-	-	-	2,76
Grand Total					30,18	114.052,61	17,49	0,08	14.494,39

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 164 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif PS Tahun 2022-2024

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat												
Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	RKPS	23	-	-	-	8	-	-	-	15	-
Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	KUPS	23	-	-	-	8	-	-	-	15	-
Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum	KUPS	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-
Program Kemitraan Lingkungan												

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	orang	378	126	-	-	126	-	-	-	126	-
Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PKS	189	63	-	-	63	-	-	-	63	-

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

Tabel 165 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Indikatif PS Tahun 2022-2024

	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial												
Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK	Ha	253.637	-	-	-	-	-	253.637,75	-	-	-
Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyara	Ha	253.637	-	-	-	-	-	12.681,87	-	-	-
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat												
Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	RKPS	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	KUPS	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum	KUPS	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Program Kemitraan Lingkungan												

	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022	2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	orang	208	-	-	-	-	-	-	-	208	-
Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PKS	104	-	-	-	-	-	-	-	104	-

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

Tabel 166 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Definitif PS Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat									
Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	RKPS	103	25	25	25	15	8	5
Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	KUPS	103	25	25	25	15	8	5
Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/platinum	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/Platinum	KUPS	12	2	2	2	2	2	2
Program Kemitraan Lingkungan									
Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial	orang	756	126	126	126	126	126	126
Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PKS	378	63	63	63	63	63	63

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

Tabel 167 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi pada Areal Indikatif PS Tahun 2025-2030

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat									
Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	RKPS	188	20	30	48	40	30	20
Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	KUPS	188	20	30	48	40	30	20
Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum	Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang Ditingkatkan Menjadi Kelas Gold/ Platinum	KUPS	76	8	12	16	16	12	12

Sumber: BPSKL Wilayah Sumatera, 2022

L. Pengelolaan Mangrove

Mangrove mempunyai potensi yang sangat besar untuk bisa menunjukkan ambisi Indonesia dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem mangrove sangat luas, maka ekosistem mangrove harus dikelola dan digunakan secara bijak dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan dalam mengelola mangrove, diantaranya adalah melakukan program rehabilitasi hutan mangrove yang bertujuan untuk memulihkan hutan mangrove yang mengalami kerusakan. Disamping kebijakan penyelamatan ekosistem mangrove lainnya seperti kebijakan dan kerangka regulasi mangrove dengan pertimbangan kondisi dan kearifan lokal promosi manfaat mangrove yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, keterlibatan dalam pengelolaan, meningkatkan produktivitas, memperkuat kerjasama terutama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove dan langkah *law enforcement*.

Rehabilitasi mangrove bukan hanya sekedar menanam, akan tetapi dengan memperhatikan bentang alam/lansekap mangrove. Bentang alam/lansekap mangrove, yaitu sistem ekologi-sosial yang terdiri dari mosaik ekosistem alami dan buatan manusia dengan karakteristik konfigurasi topografi, vegetasi, penggunaan lahan dan pemukiman sebagai hasil proses ekologi, sejarah, serta proses ekonomi, sosial dan aktivitas manusia di area tersebut.

Dalam dokumen LTS-LCCR, mangrove belum termasuk dalam sektor hutan dan lahan. Direncanakan untuk ke depan Mangrove akan termasuk dalam *blue carbon* (karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir, meliputi ekosistem perairan yaitu mangrove, padang lamun dan terumbu karang). Mangrove telah dimasukkan dalam GRK nasional dalam kategori lahan basah (lebih pada *vegetation cover*, belum kepada *below ground* dan *soil*) serta dalam penetapan tingkat *Forest Reference Emission Level* (FREL) untuk REDD+ dan estimasi hasil REDD+.

Berdasarkan hasil analisis tim penyusun, areal yang menjadi lokasi implementasi aksi mitigasi untuk pengelolaan mangrove seluas **1,61 ha** pada Sub Nasional Sumatera Barat yang berlokasi di wilayah KPHP Mentawai Unit X pada fungsi Hutan Produksi Tetap.

Tabel 168 | Sebaran Lokasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)

No	Blok	Lokasi Petak	Kabupaten	Kecamatan	Nagari	Tutupan Lahan 2020	Fungsi Kawasan HP	Luas (ha)
1	Unit X	N/A	Kepulauan Mentawai	Siberut Tengah	Saibi Samukop	Hutan Mangrove Primer	1,61	1,61
Total							1,61	1,61

Sumber: Arahana Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Adapun program dan kegiatan sebagai terkait aksi mitigasi ini selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 169 | Program dan Kegiatan yang Mendukung Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit Satuan	Volume Kegiatan	2022				2023				2024			
				T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3
Program Penysadartahuan IFNet 2030 RO 12 Pengelolaan Mangrove															
Sosialisasi target lokasi RO 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) [kegiatan]	Area lokasi target lokasi RO 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) diketahui masyarakat nagari	kegiatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove [kegiatan]	1. Adanya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove 2. Adanya manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat dari keberadaan hutan mangrove	kegiatan	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	

Sumber: Program & Kegiatan Alternatif, 2022

Tabel 170 | Rencana Aksi Mitigasi Sub Nasional Tahun 2022 s/d 2030

NO	STRATEGI PROGRAM	LOKASI	ANGGARAN	LUAS (ha)	STATUS KAWASAN
	KEGIATAN				
1	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral				
1.1.	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat				
1.1.1.	Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan [RKPS]	Areal Definitif PS	Rp 40 juta	16,04	
		Areal Indikatif PS	Rp 20 juta	134	
1.1.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	Areal Definitif PS	Rp 200 juta	16,04	
		Areal Indikatif PS	Rp 100 juta	134	
1.2.	Program Kemitraan Lingkungan				
1.2.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial [orang]	Areal Definitif PS	Rp 648 juta	16,04	
		Areal Indikatif PS	Rp 288 juta	134	
1.2.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	Areal Definitif PS	Rp 113 juta	16,04	
		Areal Indikatif PS	Rp 100 juta	134	
1.3.	Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial				
1.3.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [PKS]	Areal Indikatif PS	Rp 13,4 juta	134	
1.3.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [PKS]	Areal Indikatif PS	Rp 6,7 juta	134	
1.4.	Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan				
1.4.1.	Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Areal izin PT. Multikarya Lisun Prima Kec. Kamang Baru Nagari Padang Tarok seluas 1,00 ha di HPK Kec. Sumpur Kudus Nagari Unggan seluas 1,10 ha di APL	Rp 335 juta	4,8	HPK dan APL
2	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut				
3	Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi				
3.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi				
3.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 3 di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Kantor Nagari Padang Tarok Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung	Rp 32 juta	2,00	HPT
3.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 3 di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Rp 129 juta	1.886,77	HP
3.2.	Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan				
3.2.1.	Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutan [ha]	Areal izin PT. Multikarya Lisun Prima Kec. Kamang Baru Nagari Padang Tarok seluas 1,00 ha di HPK Kec. Sumpur Kudus Nagari Unggan seluas 1,10 ha di APL	Rp 572,4 juta	2,10	HPK dan APL

	2022	2023				2024				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	TW ke-4	TW ke-1	TW ke-2	TW ke-3	TW ke-4	TW ke-1	TW ke-2	TW ke-3	TW ke-4						
	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	2	2
		1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1
	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1
	134	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	134	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

4	Pembangunan Hutan Tanaman					
5	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)					
5.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)					
5.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Rp 97 juta	464,32	HP dan HPT	
5.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) [kegiatan]	Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Rp 97 juta	509,68	HP dan HPT	
5.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) [kegiatan]	Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Rp 32 juta	25,99	HP	
5.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) [kegiatan]	Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Rp 161 juta	126.396,65	HP	
5.2.	Program Sosialisasi PHBM					
5.2.1.	Penyuluhan dan Penanaman [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Pagai Selatan [Nagari Bulasat seluas 4,89 ha dan Nagari Makalo seluas 0,17 ha]	Rp 5 juta	5,06	APL	
5.2.2.	Penyuluhan dan Penanaman [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber RKT 2023 Kec. Pagai Utara [Nagari Saumanganya seluas 19,65 ha] RKT 2024 Kec. Pagai Utara [Nagari Silabu seluas 6,11 ha] & Kec. Sikakap [Nagari Matobe seluas 3,49 ha] RKT 2025 Kec. Sikakap [Nagari Sikakap seluas 4,75 ha dan Nagari Taikako seluas 9,94 ha] RKT 2026 Kec. Pagai Selatan [Nagari Malakopa seluas 36,82 ha dan Nagari Sinaka seluas 5,05 ha]	Rp 102 juta	85,82	APL	
5.3.	Program Pengayaan Tanaman					
5.3.1.	Penanaman permudaan alam [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber RKT 2023 Kec. Pagai Utara [Nagari Betumonga seluas 251,09 ha] RKT 2024 Kec. Pagai Utara [Nagari Silabu seluas 104,83 ha] RKT 2025 Kec. Sikakap [Nagari Sikakap seluas 106,64 ha dan Nagari Taikako seluas 216,20 ha] RKT 2026 Kec. Pagai Selatan [Nagari Sinaka seluas 52,74 ha]	Rp 871,7 juta	726,44	HP	

	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	7.860	-	-	-	-	-	2.444	1.396	5.876	16.748	-	-	-	-
	-	-	-	100.436	-	-	-	41.932	-	129.136	19.072				

6	Penerapan RIL-C					
6.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C					
6.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Rp 32 juta	419,69	HP dan HPT	
6.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) [kegiatan]	Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Rp 97 juta	509,28	HP dan HPT	
6.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) [kegiatan]	Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Rp 32 juta	24,72	HP	
6.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) [kegiatan]	Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Rp 161 juta	126.113,80	HP	
6.2.	Program Penanaman Tanaman Konservasi					
6.2.1.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2022 [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Pagai Selatan [Nagari Bulasat seluas 4,89 ha dan Nagari Makalo seluas 0,17 ha]	Rp 5 juta	5,06	APL	
6.2.2.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2023 [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Pagai Utara [Nagari Betumonga seluas 251,09 ha dan Nagari Saumanganya seluas 19,65 ha]	Rp 324,9 juta	270,74	HP dan APL	
6.2.3.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2024 [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Pagai Utara [Nagari Silabu seluas 110,94 ha] Kec. Sikakap [Nagari Matobe seluas 3,49 ha]	Rp 137,3 juta	114,43	HP dan APL	
6.2.4.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2025 [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Sikakap [Nagari Sikakap seluas 111,39 ha dan Nagari Taikako seluas 226,14 ha]	Rp 405 juta	337,53	HP dan APL	
6.2.5.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2026 [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Pagai Selatan [Nagari Malakopa seluas 36,82 ha dan Nagari Sinaka seluas 52,74 ha]	Rp 107,5 juta	89,56	HP dan APL	
6.3.	Program Penerapan RIL-C					
6.3.1.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber	Rp 12,89 M	817,32	HP dan APL	

	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	100.436	7.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	44.376	1.396	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.012	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.824	-	-	-	-
	5,06	108,30	81,22	54,15	27,07	45,77	34,33	22,89	11,44	337,53	89,56	-	-	-	-

	Pagai Lumber [ha]	RKT 2022 seluas 5,06 ha RKT 2023 seluas 270,74 ha RKT 2024 seluas 114,43 ha RKT 2025 seluas 337,53 ha RKT 2026 seluas 89,56 ha				
6.3.2.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima [ha]	Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima	Rp 1,44 M	70,94	HPK dan APL	
6.3.3.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera [ha]	Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera	Rp 7,58 M	1.059,64	HP, HPK dan APL	
7	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi					
7.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi					
7.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) [kegiatan]	Kantor Kecamatan Kamang Baru	Rp 32 juta	808,04	APL, HP dan HPT	
7.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) [kegiatan]	Kantor Kecamatan Sembilan Koto Kab. Dharmasraya Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan	Rp 64 juta	1.117,05	HL, HP, HPK dan HPT	
7.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) [kegiatan]	Kantor Kecamatan Koto Besar Kab. Dharmasraya Kantor Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan	Rp 64 juta	10.596,75	HP	
7.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) [kegiatan]	Kantor Kecamatan Lunang Kab. Pesisir Selatan	Rp 32 juta	841,53	HP dan HPT	
7.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI) [kegiatan]	Kantor Kec. Siberut Barat Kab. Mentawai Kantor Kec. Siberut Utara Kab. Mentawai Kantor Kec. Pagai Utara Kab. Mentawai Kantor Kec. Sikakap Kab. Mentawai	Rp 129 juta	13.230,83	HP	
7.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat [kegiatan]	Kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Kantor Bappeda Kabupaten Limapuluh Kota Kantor Bappeda Kabupaten Pasaman Kantor Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kantor Bappeda Kabupaten Solok Selatan	Rp 193 juta	6.826,51	HP, HPT, HPK dan APL	
7.2.	Program Rehabilitasi pada Areal Berizin					

7.2.1.	Penanaman Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin (P-0) [hektar]	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK [Areal Izin PT Multikarya Lisun Prima] Nagari Padang Tarok seluas 0,15 ha Nagari Tanjung Kaliang seluas 34,16 ha	Rp 546 juta	34,16	HPT	
7.2.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [hektar]		Rp 129 juta			
7.2.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [hektar]		Rp 52 juta			
7.2.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin [hektar]	HPT Pemanfaatan Kawasan Jasling dan HHBK [Areal Izin PT Multikarya Lisun Prima] Nagari Aie Amo seluas 24,69 ha Nagari Padang Tarok seluas 63,34 ha Nagari Tanjung Kaliang seluas 69,74 ha	Rp 1,4 M	157,67	HPT dan APL	
7.2.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [hektar]		Rp 407 juta			
7.2.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [hektar]		Rp 175 juta			
7.3.	Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin					
7.3.1.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin (P-0) [hektar]	Blok HP Pemanfaatan HHK-HT KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) Kab. Dharmasraya Kec. Sembilan Koto Nagari Lubuak Karak seluas 77,06 ha Nagari Silago seluas 53,38 ha	Rp 1,2 M	130,44	HP	
7.3.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [hektar]		Rp 337 juta			
7.3.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [hektar]		Rp 145 juta			
7.3.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin (P-0) [hektar]	Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) Kec. Siberut Barat Nagari Simalegi seluas 0,23 ha Kec. Siberut Tengah Nagari Cimpungan seluas 0,47 ha; Nagari Saibi Samukop seluas 738,54 ha; Nagari Saliguma seluas 637,12 ha Kec. Siberut Utara Nagari Sotboyak seluas 768,99 ha	Rp 19,5 M	2.145,34	HP	
7.3.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1) [hektar]		Rp 5,5 M			
7.3.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2) [hektar]		Rp 2,4 M			
7.3.7.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	Kab. Limapuluh Kota Kec. Kapur IX [Nagari Galugur seluas 5,32 ha; dan Nagari Sialang seluas 19,83 ha] Kab. Pasaman Kec. Mapat Tunggul Selatan [Nagari Silayang seluas 2,83 ha]	Rp 11,5 juta	27,98	HPK dan APL	
7.3.8.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)		Rp 360,6 juta			
7.3.9.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)		Rp 121,2 juta			
7.3.10.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)		Rp 87,5 juta			

	-	-	-	17,00	17,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	34,16	34,16	34,16	34,16	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,16	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,67	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,67	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,67	-	-	-
	-	-	-	130,44	130,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	130,44	130,44	130,44	130,44	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,44	-	-	-	-	-
	-	-	-	739,24	1.406,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2.145,34	2.145,34	2.145,34	2.145,34	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.145,34	-	-	-	-	-
	27,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	27,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,98	-	-	-	-	-

7.3.11.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	Kab. Limapuluh Kota Kec. Kapur IX [Nagari Durian Tinggi seluas 6,76 ha; Nagari Galugur seluas 412,56 ha; dan Nagari Sialang seluas 112,18 ha]	Rp 273,96 juta	664,95	HPK dan APL	
7.3.12.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi- Intensif (P0)	Kec. Pangkalan Koto Baru [Nagari Manggilang seluas 95,73 ha dan Nagari Tanjung Pauh seluas 37,72 ha]	Rp 5,5 M			
7.3.13.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi- Intensif Tahun ke-1 (P1)		Rp 2,1 M			
7.3.14.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi- Intensif Tahun ke-2 (P2)		Rp 1,6 M			
7.3.15.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	Kab. Dharmasraya: 452,72 ha Kab. Kepulauan Mentawai: 99,79 ha	Rp 2,5 M	6.133,59	HP, HPT, HPK dan APL	
7.3.16.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)	Kab. Limapuluh Kota: 5.192,54 ha	Rp 45,5 M			
7.3.17.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)	Kab. Pesisir Selatan: 388,40 ha	Rp 15,4 M			
7.3.18.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)	Kab. Solok Selatan: 0,14 ha	Rp 12,3 M			
7.4.	Program Penyediaan Bibit Buah-buahan					
7.4.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber RKT 2022 [Kec. Pa- gai Utara, Nagari Betumon- ga seluas 19,08+2,40 ha] RKT 2026 [Kec. Pagai Utara, Nagari Saumanganya seluas 14,58+2,71 ha dan Nagari Silabu seluas 47,95 ha] RKT 2027 [Kec. Pagai Utara, Nagari Silabu seluas 0,84 ha dan Kec. Sikakap, Nagari Sikakap seluas 0,13+16,83 ha] RKT 2028 [Kec. Sikakap, Nagari Taikako seluas 180,61+29,41 ha]	Rp 2,2 M	314,54	HP dan APL	
7.5.	Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul					
7.5.1.	PML Irigasi dan Penanaman [kg]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber RKT 2028 [Kec. Sikakap, Nagari Taikako seluas 20,23 ha]	Rp 30,9 juta	20,23	HP dan APL	
8	Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi					
8.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi					
8.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) [kegiatan]	Kantor Kecamatan Kamang Baru	Rp 32 juta	2.484,04	APL, HL, HP dan HPT	

8.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)[kegiatan]	Kantor Kecamatan Sembilan Koto Kab. Dharmasraya Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan	Rp 64 juta	1.142,96	HL, HP dan HPT	
8.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)[kegiatan]	Kantor Kecamatan Koto Besar Kab. Dharmasraya Kantor Kecamatan Sangir Batang Hari	Rp 64 juta	1.410,39	HP	
		Kab. Solok Selatan				
8.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)[kegiatan]	Kantor Kecamatan Lunang Kab. Pesisir Selatan	Rp 32 juta	187,16	HP dan HPT	
8.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) [kegiatan]	Kantor KPHP Mentawai	Rp 32 juta	197,42	HP	
8.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat [kegiatan]	Kantor Bappeda Kabupaten Dharmasraya Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai Kantor Bappeda Kabupaten Limapuluh Kota Kantor Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan Kantor Bappeda Kabupaten Solok Selatan	Rp 161 juta	2.089,63	HP, HPT, HPK dan APL	
8.2.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Intensif					
8.2.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	Kabupaten Limapuluh Kota Kecamatan Kapur IX [Nagari Galugur seluas 13,42 ha; dan Nagari Sialang seluas 12,38 ha] Kecamatan Pangkalan Koto Baru [Nagari Manggilang seluas 7,50 ha]	Rp 13,7 juta	33,30	HPK	
8.2.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)		Rp 429,1 juta			
8.2.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)		Rp 144,3 juta			
8.2.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)		Rp 104,1 juta			
8.3.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Semi-Intensif					
8.3.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	Kab. Dharmasraya: 36,88 ha Kab. Limapuluh Kota: 758,80 ha Kab. Pesisir Selatan: 7,59 ha	Rp 330,9 juta	803,27	HP, HPT, HPK dan APL	
8.3.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)		Rp 6,6 M			
8.3.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1)		Rp 2,5 M			
8.3.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)		Rp 1,9 M			
8.4.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan Pola Agroforestry					

	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	33,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	33,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,30	-	-	-	-	-
	803,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	758,80	44,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	321,31	240,98	160,65	80,33	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803,27	-	-	-	-	-

8.4.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	Kab. Dharmasraya: 10,17 ha	Rp 516,2 juta	1.253,03	HP, HPT, HPK dan APL	
8.4.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)	Kab. Kepulauan Mentawai: 13,87 ha	Rp 9,3 M			
8.4.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)	Kab. Limapuluh Kota: 1.133,62 ha	Rp 3,1 M			
8.4.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)	Kab. Pesisir Selatan: 14,11 ha Kab. Solok Selatan: 81,26 ha	Rp 2,5 M			
8.5.	Program Penyediaan Bibit Buah-buahan					
8.5.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber RKT 2030 [Kec. Sikakap, Nagari Taikako seluas 14,11 ha]	Rp 98,8 juta	14,11	HP	
8.6.	Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul					
8.6.1.	PML Irigasi dan Penanaman [kg]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber RKT 2029 [Kec. Sikakap, Nagari Taikako seluas 14,40 ha]	Rp 22 juta	14,40	HP	
9	Pengelolaan Tata Air Gambut					
10	Pelaksanaan Restorasi Gambut					
11	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi					
11.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi					
11.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I) [kegiatan]	Kantor KPHL Pasaman Raya Kantor Camat Mapat Tunggul Selatan Kab. Pasaman Kantor Camat Rao Utara Kab. Pasaman Kantor Camat Lubuk Sikaping Kab. Pasaman Kantor Camat Gunungtuleh Kab. Pasaman Barat Kantor Camat Talamau	Rp 193 juta	224.277,57	APL, HL, HP dan HPT	
11.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Limapuluh Kota (Unit II) [kegiatan]	Kantor KPHL Limapuluh Kota Kantor Camat Kapur IX Kantor Camat Pangkalan Koto Baru	Rp 97 juta	69.534,18	HI dan HPT	

11.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III) [kegiatan]	Kantor KPHL Agam Raya Kantor Kec. Baso Kab. Agam Kantor Kec. Kamang Magek Kab. Agam Kantor Kec. Palupuh Kab. Agam Kantor Kec. Palembang Kab. Agam Kantor Kec. Akabiluru Kab. Limapuluh Kota Kantor Kec. Harau Kab. Lima-puluh Kota Kantor Kec. Suliki Kab. Limapuluh Kota Kantor Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	Rp 290 juta	26.359,23	HL, HP dan HPT
11.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV) [kegiatan]	Kantor Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang Kantor Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Kantor Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang Kantor Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman Kantor Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan Kantor Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar Kantor Kec. Tanjung Emas Kab. Tanah Datar	Rp 226 juta	42.369,81	HL, HP, HPT dan APL
11.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) [kegiatan]	Kantor KPHL Sijunjung Unit V Kantor Kecamatan Kamang Baru Kantor Kecamatan Lubuak Tarok Kantor Kecamatan Sijunjung Kantor Kecamatan Sumpur Kudus Kantor Kecamatan Tanjung Gadang	Rp 193 juta	79.698,91	HL, HP dan HPT
11.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI) [kegiatan]	Kantor KPHL Solok Unit VI Kantor Kecamatan Gunung Talang Kantor Kecamatan Lembah Gumanti Kantor Kecamatan Payung Sekaki Kantor Kecamatan Tigo Lurah	Rp 161 juta	105.588,65	HL, HP dan HPT

11.1.7.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) [kegiatan]	Kantor KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) Kantor Kec. Sembilan Koto Kab. Dharmasraya Kantor Kec. Tigo Lurah Kab. Solok Kantor Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kab. Solok Selatan Kantor Kec. Sangir Kab. Solok Selatan Kantor Kec. Sangir Batang Hari Kab. Solok Selatan Kantor Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan Kantor Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan	Rp 258 juta	131.187,04	HL, HP, HPT dan APL	
11.1.8.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) [kegiatan]	Kantor KPHP Dharmasraya	Rp 32 juta	47,11	HPT	
11.1.9.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) [kegiatan]	Kantor KPHP Pesisir Selatan Kantor Kecamatan Airpura Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti Kantor Kecamatan Lunang Kantor Kecamatan Ranah Pesisir	Rp 161 juta	14.849,81	HL, HP dan HPT	
11.1.10.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan XI) [kegiatan]	Kantor KPHP Mentawai Kantor Kecamatan Siberut Tengah Kantor Kecamatan Pagai Selatan Kantor Kecamatan Sipora Selatan	Rp 129 juta	5.155,69	HL dan HP	
11.1.11.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat	Kantor Resort Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir dan Barisan	Rp 32 juta	15,93	APL	
11.2.	Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan					
11.2.1.	Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan [kegiatan]	Kecamatan Baso dan Kecamatan Kamang Magek Blok HL Inti Wilayah KPHL Agam Raya Unit III	Rp 2,1 M	638,09	HL	
11.2.2.	Patroli dan Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Kec. Palupuh, Kec. Palembang dan Kec. Tanjung Raya Blok HL Pemanfaatan Wilayah KPHL Agam Raya Unit III	Rp 2,1 M	11.919,36	HL	

	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	12	12	12
	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	12	12	12	12

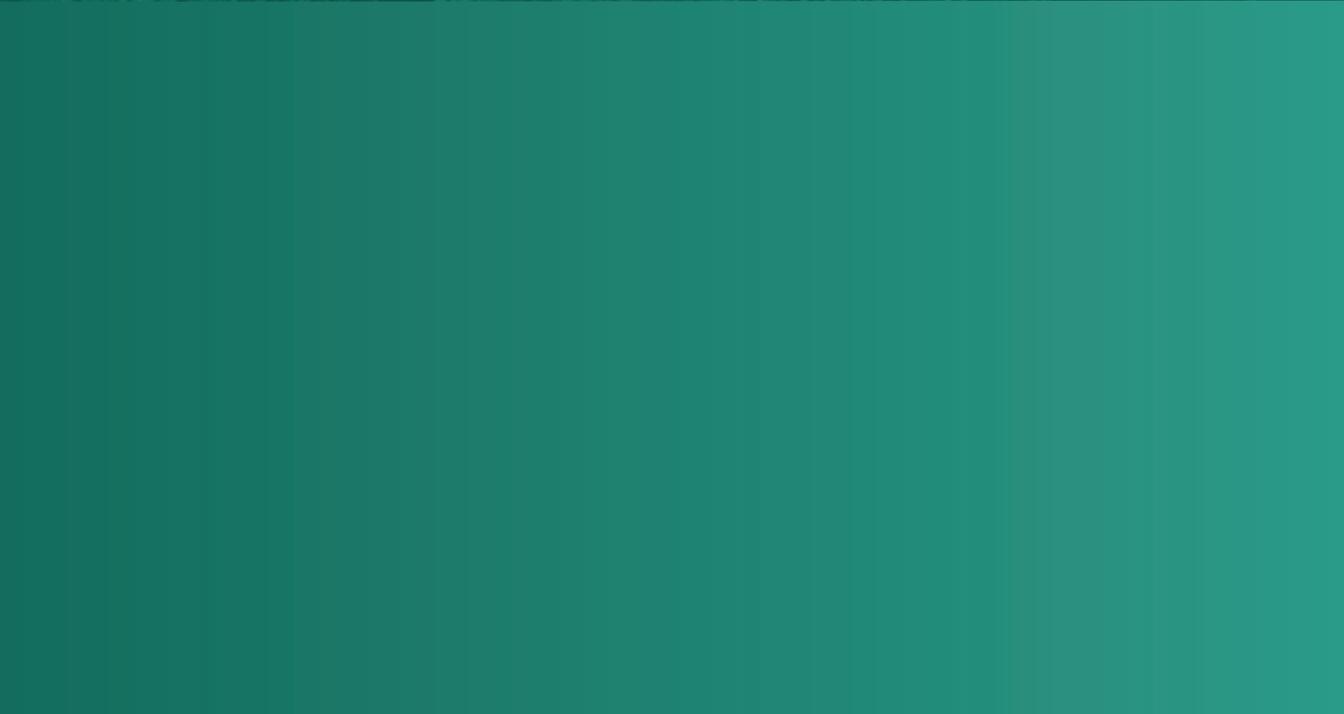
11.2.3.	Patroli Pengamanan Hutan Polhut [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 3,1 M	14.849,81	HL, HP dan HPT	
11.2.4.	Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 4,4 M			
11.2.5.	Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 228 juta			
11.2.6.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 3,1 M			
11.2.7.	Pemantauan Titik Api [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 1 M			
11.2.8.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 2,35 M			
11.2.9.	FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan Unit IX	Rp 773 juta			
11.3.	Program Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan					
11.3.1.	Pembangunan Sarpras Wisata [unit]	Kec. Palupuh, Kec. Palembang dan Kec. Tanjung Raya Blok HL Pemanfaatan Wilayah KPHL Agam Raya Unit III	Rp 3,6 M	11.919,36	HL	
11.3.2.	Pemanfaatan HHBK	Kec. Palupuh, Kec. Palembang dan Kec. Tanjung Raya Blok HL Pemanfaatan Wilayah KPHL Agam Raya Unit III	Rp 450 juta	11.919,36	HL	
11.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat					
11.4.1.	Pengembangan unit percontohan penyuluhan kehutanan [unit]	Blok HL Pemanfaatan KPHL Agam Raya Unit III meliputi 1 kecamatan:	Rp 675 juta	3.548,58	HL, HP dan HPT	
11.4.2.	Penyediaan Alat Ekonomi Produktif [unit]	Kec. Ampek Nagari seluas 808,58 ha	Rp 1,8 M			
11.4.3.	Pengembangan stup lebah madu [stup koloni]	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat KPHL Agam Raya Unit III meliputi 2 kecamatan: Kec. Palembang seluas 47,04 ha Kec. Palupuh seluas 2.692,96 ha	Rp 1,8 M			
11.4.4.	Pengadaan Bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP)[unit]	KPHP Pesisir Selatan dan KUPS	Rp 5,44 M			
11.5.	Program Fasilitasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial					
11.5.1.	Forum/workshop pengembangan usaha perhutanan sosial [kegiatan]	Blok HL Pemanfaatan KPHL Agam Raya Unit III meliputi 1 kecamatan: Kec. Ampek Nagari seluas 808,58 ha	Rp 602 juta	3.548,58	HL, HP dan HPT	

-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24	24	24	24
-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24	24	24	24
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	24	24	24	24
-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	48	48	48	48	48	48
-	-	4	5	-	-	4	5			9	9	9	9	9	9
-	-	3	3	3	-	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9
2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2
4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	4	4	4	4	4	4
1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1
2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	2	2	2	2	2
200	-	-	200	-	-	-	200	-	-	200	200	200	200	200	200
-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	10	10	10	10	10	10
2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	2	2	2	2

11.5.2.	Fasilitasi usulan perhutanan sosial [kelompok]	Blok HP Pemberdayaan Masyarakat KPHL Agam Raya Unit III meliputi 2 kecamatan: Kec. Palembayan seluas 47,04 ha Kec. Palupuh seluas 2.692,96 ha	Rp 1,2 M			
11.5.3.	Pendataan penggarap oleh masyarakat [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan	Rp 660 juta	14.849,81	HL, HP dan HPT	
11.5.4.	Pengusulan izin perhutanan sosial [izin]	Wilayah RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di KPHL Pesisir Selatan	Rp 192 juta	14.849,81	HL, HP dan HPT	
11.5.5.	Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial [kegiatan]	Wilayah KPHL Pesisir Selatan	Rp 3,76 M			
11.6.	Program Nursery dan Penanaman Penyulaman					
11.6.1.	Penyemaian bibit dan penanaman [batang]	Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber Kec. Pagai Selatan Nagari Sinaka seluas 14,24 ha	Rp 42,7 juta	14,24	HP dan APL	
11.7.	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat					
11.7.1.	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan [RKPS]	Areal Definitif PS	Rp 2,5 M	130.041,87		
		Areal Indikatif PS	Rp 4,2 M	253.637		
11.7.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	Areal Definitif PS	Rp 12,6 M	130.041,87		
		Areal Indikatif PS	Rp 20,8 M	253.637		
11.7.3.	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum [KUPS]	Areal Definitif PS	Rp 1,1 M	130.041,87		
		Areal Indikatif PS	Rp 1,7 M	253.637		
11.8.	Program Kemitraan Lingkungan					
11.8.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial [orang]	Areal Definitif PS	Rp 40,8 M	130.041,87		
		Areal Indikatif PS	Rp 7,7 M	253.637		
11.8.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	Areal Definitif PS	Rp 14,2 M	130.041,87		
		Areal Indikatif PS	Rp 2,8 M	253.637		
11.9.	Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial					
11.9.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [ha]	Areal Indikatif PS	Rp 2,5 M	25.363,75		
11.9.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [ha]	Areal Indikatif PS	Rp 1,3 M	12.681,87		

12	Pengelolaan Mangrove					
12.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 12 Pengelolaan Mangrove					
12.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X)[kegiatan]	Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) Nagari Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	Rp 32,2 juta	1,61	HP	
12.1.2.	Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove [kegiatan]	Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) Nagari Saibi Samukop Kec. Siberut Tengah	Rp 37,6 juta	1,61	HP	

Sumber: Analisis Data, 2022



BAB 04



PENDANAAN KEGIATAN

BAB IV | PENDANAAN KEGIATAN

A. Kebutuhan Anggaran

Berdasarkan arahan spasial, setiap instansi pelaksana aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat memiliki sasaran target lokasinya sendiri-sendiri sebagaimana yang disajikan pada Tabel 171. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran disusun berdasarkan upaya aksi menurut instansi pelaksanaanya.

Tabel 171 | Sebaran Lokasi Sasaran FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat Menurut Luas Area dan Aksi Mitigasinya

Instansi Pelaksana Aksi	Luas Area Sasaran FOLU Net Sink 2030 Menurut Aksi Mitigasi (ha)											
	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	RO 9	RO 10	RO 11	RO 12
BKSDA Sumatera Barat												
Suaka Margasatwa Tarusan Arau Hilir dan Barisan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,93	-
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat												
[Unit I] KPHL Pasaman Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.277,57	-
[Unit II] KPHL Limapuluh Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.534,18	-
[Unit III] KPHL Agam Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.359,23	-
[Unit IV] KPHL Bukit Barisan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.369,81	-
[Unit V] KPHL Sijunjung	-	-	2,00	-	464,32	419,69	808,40	.484,04	-	-	79.698,91	-
[Unit VI] KPHL Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	05.588,65	-
[Unit VII] KPHL Hulu Batanghari	-	-	-	-	509,68	509,28	1.117,05	.142,96	-	-	31.187,04	-
[Unit VIII] KPHP Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	0.596,75	.410,39	-	-	47,11	-
[Unit IX] KPHP Pesisir Selatan	-	-	-	-	25,99	24,72	841,53	187,16	-	-	14.849,81	-
[Unit X] KPHP Mentawai	-	-	.886,77	-	58.212,57	58.166,49	4.684,29	69,72	-	-	505,12	1,61
[Unit XI] KPHP Mentawai	-	-	-	-	68.184,08	67.947,31	8.546,53	127,70	-	-	4.650,57	-
Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota												
Kab. Agam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.316,81	-
Kab. Dharmasraya	2,32	-	3,58	-	55,10	55,10	452,72	47,06	-	-	12.407,26	-
Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	1.853,34	1.851,65	99,79	13,87	-	-	6.157,24	-
Kota Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323,04	-
Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,81	-
Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,26	-
Kota Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,99	-
Kab. Lima Puluh Kota	.368,23	-	-	-	22,29	-	5.882,64	.925,73	-	-	11.173,88	-
Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653,20	-
Kab. Pasaman	2,17	-	-	-	-	-	2,83	-	-	-	9.346,34	-

Instansi Pelaksana Aksi	Luas Area Sasaran FOLU Net Sink 2030 Menurut Aksi Mitigasi (ha)											
	RO 1	RO 2	RO 3	RO 4	RO 5	RO 6	RO 7	RO 8	RO 9	RO 10	RO 11	RO 12
Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.044,57	-
Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	-	-	-	388,40	21,70	-	-	12.127,53	-
Kab. Sijunjung	15,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.507,82	-
Kab. Solok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.653,86	-
Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	1,55	1,55	0,14	81,26	-	-	13.436,16	-
Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.749,82	-
Pemegang Izin PBPH												
PT Minas Pagai Lumber	-	-	-	-	817,32	817,32	334,78	28,51	-	-	14,24	-
PT Multikarya Lisun Prima	2,10	-	1,00	-	71,81	70,94	178,42	209,79	-	-	2.361,46	-
PT Salaki Summa Sejahtera	-	-	282,39	-	1.076,53	1.059,64	137,82	1,32	-	-	2,55	-
Grand Total	.390,07	-	.175,74	-	31.294,59	30.923,68	4.072,07	.751,22	-	-	05.609,83	1,61

Sumber: Arahan Spasial IFNet 2030 Sub Nasional Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan Tabel 171, masing-masing aksi mitigasi dijabarkan lagi menurut pemangku wilayahnya sebagaimana lokasinya secara detail telah dirincikan pada Bab 3. Kebutuhan anggaran per tahun selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 172 | Kebutuhan Anggaran per Tahun untuk Rencana Aksi Implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat Tahun 2022 - 2030

Tahun		Kebutuhan Anggaran
2022	Triwulan ke-4	Rp 12.895.419.470
2023	Triwulan ke-1	Rp 4.773.075.742
	Triwulan ke-2	Rp 4.281.900.799
	Triwulan ke-3	Rp 65.159.536.236
	Triwulan ke-4	Rp 37.858.922.731
2024	Triwulan ke-1	Rp 18.877.898.544
	Triwulan ke-2	Rp 11.627.151.701
	Triwulan ke-3	Rp 30.152.202.457
	Triwulan ke-4	Rp 4.192.633.214
2025		Rp 45.836.740.869
2026		Rp 20.892.178.450
2027		Rp 20.940.897.890
2028		Rp 19.981.933.680
2029		Rp 16.382.843.180
2030		Rp 14.899.581.180
Total		Rp 328.752.916.142

Sumber: Analisis Tim Penyusun, 2022

Setiap kegiatan yang membutuhkan anggaran, perlu dilakukan pendetailan kebutuhannya mengingat perencanaan implementasi menggunakan mekanisme anggaran dari APBN dan APBD dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat. Detail kebutuhan anggaran menurut pemangku kawasan dan jenis kegiatannya selengkapya disajikan pada sub bab berikut.

A.1. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01]

Pada aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral [R01], teridentifikasi kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan dari stakeholder PBPH a.n. PT. Multikarya Lisun Prima sebesar Rp572.360.000,- dan BPSKL sebesar Rp1.528.960.000,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 173 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1.1. Areal Berizin PT. Multikarya Lisun Prima				
1.4.1.	Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	4,8	69.800.000	335.040.000
	Sub Total PT. Multikarya Lisun Prima			335.040.000
2. Intervensi BPSKL				
1.1.1.	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan [RKPS]	2	20.000.000	40.000.000
		1	20.000.000	20.000.000
1.1.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	2	100.000.000	200.000.000
		1	100.000.000	100.000.000
1.2.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial [orang]	18	36.000.000	648.000.000
		8	36.000.000	288.000.000
1.2.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	9	12.500.000	112.500.000
		8	12.500.000	100.000.000
1.3.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [ha]	134	100.000	13.400.000
1.3.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [ha]	134	50.000	6.700.000
	Sub Total BPSKL			1.528.960.000
Total Kebutuhan Anggaran R01				1.864.000.000

Sumber: Analisis Data, 2022

A.2. Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [RO2]

Tidak ada sasaran lokasi FOLU Net Sink 2030 untuk aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan gambut di Sub Nasional Sumatera Barat.

A.3. Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3]

Pada aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi [RO3], teridentifikasi kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan dari stakholder PBBH a.n. PT. Multikarya Lisun Prima sebesar Rp572.360.000,-; KPHL Sijunjung (Unit V) sebesar Rp32.220.000,- dan KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) sebesar Rp128.880.000,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 174 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1.1. Areal Berizin PT. Multikarya Lisun Prima				
3.2.1.	Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	8,2	69.800.000	572.360.000
	Sub Total PT. Multikarya Lisun Prima			572.360.000
2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)				
3.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHL Sijunjung (Unit V)			32.220.000
3. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
3.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	4	32.220.000	128.880.000
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			128.880.000
Total Kebutuhan Anggaran RO3				733.460.000

Sumber: Analisis Data, 2022

A.4. Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]

Tidak ada sasaran lokasi FOLU Net Sink 2030 untuk aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di Sub Nasional Sumatera Barat.

A.5. Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [R05]

Pada aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) [R05], teridentifikasi kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan dari stakeholder PBPH a.n. Minas Pagai Lumber sebesar Rp979.760.000,-; KPHL Sijunjung (Unit V) sebesar Rp96.660.000,-; KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) sebesar Rp96.660.000,-; KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) sebesar Rp32.220.000,- dan KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) sebesar Rp161.100.000,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 175 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [R05] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1.1. Areal Berizin				
A. PT. Minas Pagai Lumber				
5.2.1.	Penyuluhan dan Penanaman RKT 2022 [batang]	2.024	2.500	5.060.000
5.2.2.	Penyuluhan dan Penanaman RKT 2023 - 2026 [batang]	34.324	3.000	102.972.000
5.3.1.	Penanaman Permudaan Alam [batang]	290.576	3.000	871.728.000
	Sub Total PT. Minas Pagai Lumber			979.760.000
2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)				
5.1.1.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	3	32.220.000	96.660.000
	Sub Total KPHL Sijunjung (Unit V)			96.660.000
3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)				
5.1.2.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	3	32.220.000	96.660.000
	Sub Total KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)			96.660.000
4. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)				
5.1.3.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)			32.220.000
5. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
5.1.4.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	5	32.220.000	161.100.000
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			161.100.000
Total Kebutuhan Anggaran R05				1.366.400.000

Sumber: Analisis Data, 2022

A.6. Penerapan RIL-C [RO6]

Pada aksi mitigasi penerapan RIL-C [RO6], teridentifikasi kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan dari stakholder PBPH a.n. PT. Minas Pagai Lumber sebesar Rp13.872.995.000,-; PBPH a.n. PT. Multikarya Lisun Prima sebesar Rp1.440.406.890,-; dan PBPH a.n. PT. Salaki Summa Sejahtera sebesar Rp7.583.398.290,-; KPHL Sijunjung (Unit V) sebesar Rp32.220.000,-; KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) sebesar Rp96.660.000,-; KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) sebesar Rp32.220.000,- dan KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) sebesar Rp161.100.000,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 176 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [RO6] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1.1. Areal Berizin				
A. PT. Minas Pagai Lumber				
6.2.1.	Penanaman dan Pembuatan Guludan RKT 2022 [batang]	2.024	2.500	5.060.000
6.2.2.	Penanaman dan Pembuatan Guludan RKT 2023 [batang]	108.296	3.000	324.888.000
6.2.3.	Penanaman dan Pembuatan Guludan RKT 2024 [batang]	45.772	3.000	137.316.000
6.2.4.	Penanaman dan Pembuatan Guludan RKT 2025 [batang]	135.012	3.000	405.036.000
6.2.5.	Penanaman dan Pembuatan Guludan RKT 2026 [batang]	35.824	3.000	107.472.000
6.3.1.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber [ha]	817,32	15.775.000	12.893.223.000
	Sub Total PT. Minas Pagai Lumber			13.872.995.000
B. PT. Multikarya Lisun Prima				
6.3.2.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima [ha]	70,94	18.057.000	1.440.406.890
	Sub Total PT. Multikarya Lisun Prima			1.440.406.890
C. PT. Salaki Summa Sejahtera				
6.3.3.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera [ha]	1.059,64	18.057.000	7.583.398.290
	Sub Total PT. Salaki Summa Sejahtera			7.583.398.290
	Sub Total Areal Berizin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat			22.896.800.180
2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)				
6.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHL Sijunjung (Unit V)			32.220.000

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)				
6.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	3	32.220.000	96.660.000
	Sub Total KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)			96.660.000
4. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)				
6.1.3.	Sosialisasi target RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)			32.220.000
5. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
6.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	5	32.220.000	161.100.000
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			161.100.000
Total Kebutuhan Anggaran RO6				23.219.000.180

Sumber: Analisis Data, 2022

A.7. Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [RO7]

Pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7], teridentifikasi kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan dari stakeholder PBPH a.n. PT. Minas Pagai Lumber sebesar Rp2.232.762.500,-; Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp85.923.370.224,-; KPHL Sijunjung (Unit V) sebesar Rp2.773.209.296,-; KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) sebesar Rp1.730.732.736,-; KPHP Dharmasraya (Unit VIII) sebesar Rp64.440.000,-; KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) sebesar Rp32.220.000,- dan KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) sebesar Rp27.534.311.296,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 177 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [R07] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1. 1. Areal Berizin				
A. PT. Minas Pagai Lumber				
7.4.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	125.816	17.500	2.201.780.000
7.5.1.	PML Irigasi & Penanaman [kg]	405	76.500	30.982.500
	Sub Total PT. Minas Pagai Lumber			2.232.762.500
	Sub Total Areal Berizin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat			2.232.762.500

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. 2. Areal Tidak Berizin				
7.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemangkuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	6	32.220.000	193.320.000
7.3.7.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	27,98	412.000	11.527.760
7.3.8.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)[ha]	27,98	12.886.440	360.562.591
7.3.9.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)[ha]	27,98	4.332.500	121.223.350
7.3.10.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)[ha]	27,98	3.125.500	87.451.490
7.3.11.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif [ha]	664,95	412.000	273.959.400
7.3.12.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)[ha]	664,95	8.234.940	5.475.823.353
7.3.13.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1)[ha]	664,95	3.082.250	2.049.542.138
7.3.14.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)[ha]	664,95	2.397.250	1.594.051.388
7.3.15.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	6.133,59	412.000	2.527.039.080
7.3.16.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)[ha]	6.133,59	7.419.600	45.509.336.387
7.3.17.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)[ha]	6.133,59	2.508.500	15.386.110.515
7.3.18.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)[ha]	6.133,59	2.010.800	12.333.422.772
	Sub Total Areal Tidak Berizin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat			85.923.370.224
2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)				
7.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
7.2.1.	Penanaman Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin (P-0)[ha]	34,16	15.981.800	545.938.288
7.2.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1)[ha]	34,16	3.761.000	128.475.760
7.2.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2)[ha]	34,16	1.535.000	52.435.600
7.2.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin [ha]	157,67	9.080.400	1.431.706.668
7.2.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1)[ha]	157,67	2.581.000	406.946.270
7.2.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2)[ha]	157,67	1.113.000	175.486.710
	Sub Total KPHL Sijunjung (Unit V)			2.773.209.296

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)				
7.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	2	32.220.000	64.440.000
7.3.1.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin (P-0)[ha]	130,44	9.080.400	1.184.447.376
7.3.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-1(P-1)[ha]	130,44	2.581.000	336.665.640
7.3.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-2(P-2)[ha]	130,44	1.113.000	145.179.720
	Sub Total KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)			1.730.732.736
4. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)				
7.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya [kegiatan]	2	32.220.000	64.440.000
	Sub Total KPHP Dharmasraya (Unit VIII)			64.440.000
5. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)				
7.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)			32.220.000
6. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
7.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	4	32.220.000	128.880.000
7.3.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin (P-0)[ha]	2.145,34	9.080.400	19.480.545.336
7.3.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-1(P-1)[ha]	2.145,34	2.581.000	5.537.122.540
7.3.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di luar areal berizin Tahun ke-2(P-2)[ha]	2.145,34	1.113.000	2.387.763.420
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			27.534.311.296
Total Kebutuhan Anggaran RO7				120.291.046.052

Sumber: Analisis Data, 2022

A.8. Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [RO8]

Pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi [RO8], teridentifikasi kebutuhan anggaran untuk berbagai macam kegiatan dari stakholder PBPH a.n. PT. Minas Pagai Lumber sebesar Rp120.802.000,-; Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp27.675.795.912,-; KPHL Sijunjung (Unit V) sebesar Rp32.220.000,-; KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) sebesar Rp64.440.000,-; KPHP Dharmasraya (Unit VIII) sebesar Rp64.440.000,-; KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) sebesar Rp32.220.000,- dan KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) sebesar Rp32.220.000,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 178 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [R08] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1.1. Areal Berizin				
A. PT. Minas Pagai Lumber				
8.5.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	5.644	17.500	98.770.000
8.6.1.	PML Irigasi & Penanaman [kg]	288	76.500	22.032.000
	Sub Total PT. Minas Pagai Lumber			120.802.000
	Sub Total Areal Berizin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat			120.802.000
1.2. Areal Tidak Berizin				
8.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat [kegiatan]	5	32.220.000	161.100.000
8.2.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	33,30	412.000	13.719.600
8.2.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)[ha]	33,30	12.886.440	429.118.452
8.2.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1(P1)[ha]	33,30	4.332.500	144.272.250
8.2.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)[ha]	33,30	3.125.500	104.079.150
8.3.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif [ha]	803,27	412.000	330.947.240
8.3.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)[ha]	803,27	12.886.440	6.614.880.254
8.3.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1)[ha]	803,27	4.332.500	2.475878.958
8.3.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)[ha]	803,27	3.125.500	1.925.639.008
8.4.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry [ha]	1.253,03	412.000	516.248.360
8.4.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)[ha]	1.253,03	12.886.440	9.297.094.161
8.4.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1(P1) [ha]	1.253,03	4.332.500	3.143.225.755
8.4.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2(P2) [ha]	1.253,03	3.125.500	2.519.592.724
	Sub Total Areal Tidak Berizin Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat			27.675.795.912
2. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)				
8.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V) [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHL Sijunjung (Unit V)			32.220.000
3. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)				

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
8.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) [kegiatan]	2	32.220.000	64.440.000
	Sub Total KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)			64.440.000
4. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)				
8.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII) [kegiatan]	2	32.220.000	64.440.000
	Sub Total KPHP Dharmasraya (Unit VIII)			64.440.000
5. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)				
8.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX) [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)			32.220.000
6. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
8.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			32.220.000
Total Kebutuhan Anggaran RO8				28.022.137.912

Sumber: Analisis Data, 2022

A.9. Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]

Tidak ada sasaran lokasi FOLU Net Sink 2030 untuk aksi mitigasi pengelolaan tata air gambut di Sub Nasional Sumatera Barat.

A.10. Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]

Tidak ada sasaran lokasi FOLU Net Sink 2030 untuk aksi mitigasi pelaksanaan restorasi gambut di Sub Nasional Sumatera Barat.

A.11. Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO11]

Pada aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi, arahan spasial tersebar di seluruh wilayah pemangkuan, mulai dari wilayah pemangkuan pemerintah daerah provinsi, sampai ke wilayah konservasi yang menjadi pemangkuan KLHK seperti BKSDA Sumatera Barat. Hal ini, tidak ditemui pada aksi mitigasi lainnya. Data kebutuhan anggaran menurut kegiatan pemangku wilayahnya selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 179 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [R011] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat				
1.1. Areal Berizin				
A. PT. Minas Pagai Lumber				
11.6.1.	Penyemaian bibit dan penamaan [batang]	14.240	3.000	42.720.000
	Sub Total PT. Minas Pagai Lumber			42.720.000
2. Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)				
11.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya [kegiatan]	6	32.220.000	193.320.000
	Sub Total KPHL Pasaman Raya (Unit I)			193.320.000
3. Wilayah KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)				
11.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Lima Puluh Kota [kegiatan]	3	32.220.000	96.660.000
	Sub Total KPHL Lima Puluh Kota (Unit II)			96.660.000
4. Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)				
11.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya [kegiatan]	9	32.220.000	289.980.000
11.2.1	Patroli pengendalian kebakaran hutan [kegiatan]	99	20.850.000	2.064.150.000
11.2.2.	Patroli dan operasi pengamanan hutan [kegiatan]	99	20.800.000	2.059.200.000
11.3.1.	Pembangunan sarpras wisata [unit]	18	200.000.000	3.600.000.000
11.3.2.	Pemanfaatan HHBK [kegiatan]	36	12.500.000	450.000.000
11.4.1.	Pengembangan unit percontohan penyuluhan kehutanan [unit]	9	75.000.000	675.000.000
11.4.2.	Penyediaan alat ekonomi produktif [unit]	17	100.000.000	1.700.000.000
11.4.3.	Pengembangan stup lebah madu [stup koloni]	1.800	1.000.000	1.800.000.000
11.5.1.	Forum/workshop pengembangan usaha perhutanan sosial [kegiatan]	18	33.420.000	601.560.000
11.5.2.	Fasilitasi usulan perhutanan sosial [kelompok]	128	9.375.000	1.200.000.000
	Sub Total KPHL Agam Raya (Unit III)			14.439.890.000
5. Wilayah KPHL Bukit Barisan Kota (Unit IV)				

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
11.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan [kegiatan]	7	32.220.000	225.540.000
	Sub Total KPHL Bukit Barisan Kota (Unit IV)			225.540.000
6. Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)				
11.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung [kegiatan]	6	32.220.000	193.320.000
	Sub Total KPHL Sijunjung (Unit V)			193.320.000
7. Wilayah KPHL Solok (Unit VI)				
11.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok [kegiatan]	5	32.220.000	161.100.000
	Sub Total KPHL Solok (Unit VI)			161.100.000
8. Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)				
11.1.7.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari [kegiatan]	8	32.220.000	257.760.000
	Sub Total KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)			257.760.000
9. Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)				
11.1.8.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total KPHP Dharmasraya (Unit VIII)			32.220.000
10. Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)				
11.1.9.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan [kegiatan]	5	32.220.000	161.100.000
11.2.3.	Patroli Pengamanan Hutan Polhut [kegiatan]	192	16.300.000	3.129.600.000
11.2.4.	Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat [kegiatan]	192	22.820.000	4.381.440.000
11.2.5.	Operasi Pengaman Hutan [kegiatan]	8	28.500.000	228.000.000
11.2.6.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	192	16.300.000	3.129.600.000
11.2.7.	Pemantauan Titik Api [kegiatan]	384	2.700.000	1.036.800.000
11.2.8.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	72	32.700.000	2.354.400.000
11.2.9.	FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait [kegiatan]	72	10.740.000	773.280.000
11.4.4.	Pengadaan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP)[unit]	80	68.000.000	5.440.000.000

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
11.5.3.	Pendataan penggarap oleh masyarakat [kegiatan]	25	26.400.000	660.000.000
11.5.4.	Pengusulan izin perhutanan sosial [kegiatan]	15	12.800.000	192.000.000
11.5.5.	Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial [kegiatan]	200	18.800.000	3.760.000.000
	Sub Total KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)			25.246.220.000
11. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
11.1.10.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai [kegiatan]	4	32.220.000	128.880.000
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			128.880.000
12. Wilayah BKSDA Sumatera Barat				
11.1.11.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
	Sub Total BKSDA Sumatera Barat			32.220.000
13. Intervensi BPSKL				
11.7.1.	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan	126	20.000.000	2.520.000.000
	Sosial untuk mendapatkan pengesahan [RKPS]	208	20.000.000	4.160.000.000
11.7.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	126	100.000.000	12.600.000.000
		208	100.000.000	20.800.000.000
11.7.3.	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) untuk ditingkatkan menjadi kelas gold/ platinum [KUPS]	14	80.000.000	1.120.000.000
		84	20.000.000	1.680.000.000
11.8.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial [orang]	1.134	36.000.000	40.824.000.000
		214	36.000.000	7.704.000.000
11.8.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	567	25.000.000	14.175.000.000
		110	25.000.000	2.750.000.000
11.9.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [ha]	25.363,75	100.000	2.536.375.000
11.9.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [ha]	12.681,87	100.000	1.268.187.000
	Sub Total BPSKL			112.137.562.000
Total Kebutuhan Anggaran R011				153.187.412.000

Sumber: Analisis Data, 2022

A.12. Pengelolaan Mangrove [R012]

Pada aksi mitigasi pengelolaan mangrove [R012], teridentifikasi kebutuhan anggaran hanya untuk stakeholder KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI) sebesar Rp69.820.000,- sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

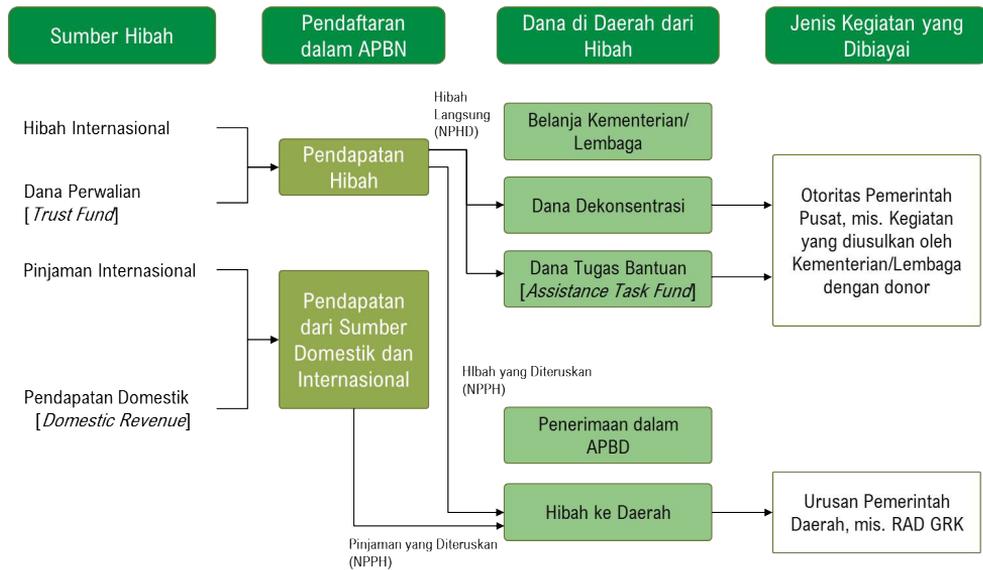
Tabel 180 | Kebutuhan Anggaran pada Rencana Implementasi Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R012] pada Sub Nasional Sumatera Barat

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Total Anggaran
1. Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)				
12.1.1.	Sosialisasi target lokasi R0 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) [kegiatan]	1	32.220.000	32.220.000
12.1.2.	Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove [kegiatan]	2	18.800.000	37.600.000
	Sub Total KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)			69.820.000
Total Kebutuhan Anggaran R012				69.820.000

Sumber: Analisis Data, 2022

B. Mekanisme Pendanaan

Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui UU 16 tahun 2017 dan menyerahkan NDC (*Nationally Determined Contribution*) Indonesia kepada UNFCCC pada 24 September 2017. Sebagaimana diuraikan dalam NDC, Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 29% pada tahun 2030 dalam skenario bisnis seperti biasa (*business as usual*- BAU) dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Pengurangan emisi ini difokuskan pada sektor kehutanan, energi, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah. NDC diurusutamakan melalui rencana pembangunan di semua tingkatan (tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa). Sumber pendanaan untuk rencana pembangunan ini dianggarkan di semua tingkat dan dari sumber-sumber lainnya, seperti sektor swasta dan bantuan dana internasional yang sedang berjalan (GIZ, 2018).



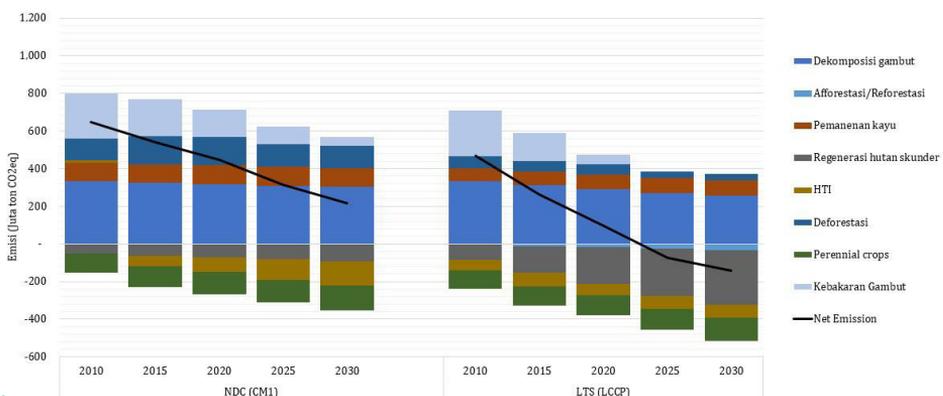
* apakah dana pendamping diperlukan, terserah kesepakatan dengan donor

NPHD: Surat Perjanjian Hibah Daerah

NPPH: Surat Persetujuan Alokasi Hibah

Gambar 38 | Mekanisme Penyaluran Hibah ke Daerah (GIZ, 2018)

Dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030, NDC berperan untuk menjembatani komitmen penurunan emisi menuju *net sink* melalui penguatan dan peningkatan aksi mitigasi dan dukungan internasional, terutama pada sektor lahan dan kehutanan sebagai salah satu sektor kunci. Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak tahun 2010, namun masih sebagai sektor pengemisi GRK (*net emitter*), dengan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO₂e, sementara pada skenario LTS yang sejalan dari target Perjanjian Paris (LCCP), sektor ini sudah mencapai kondisi *net sink* dengan nilai serapan sebesar 140 juta ton CO₂e



Gambar 39 | Proyeksi emisi sektor FOLU pada skenario NDC (CM1) dan LTS (LCCP)

C. Sumber Pendanaan

Pendanaan NDC berbasis proyek dan berbasis sektor, dana dapat bersumber dari sumber nasional dan subnasional, hibah (pendanaan multilateral dan bilateral) dan dari sumber lain, termasuk sektor swasta. Mekanisme bilateral berasal dari Norwegia untuk REDD+, Jerman untuk efisiensi energi dan Jepang untuk efisiensi energi dan transfer teknologi melalui *Joint Crediting Mechanism* (JCM). Pendanaan multilateral diberikan oleh Dana Adaptasi di bawah Protokol Kyoto; Dana khusus untuk perubahan iklim dan Dana untuk negara miskin yang dikelola oleh *Global Environmental Fund* (GEF) dan *Green Climate Fund* (GCF) di bawah UNFCCC untuk adaptasi dan mitigasi. Akses ke GCF dikelola oleh Dewan GCF dan *Designated National Authority* (DNA) di Kementerian Keuangan. Selain itu, pendanaan multilateral non-UNFCCC dari bank pembangunan multilateral tersedia, seperti dari Bank Dunia (*BioCarbon Fund*) dan ADB (Mitigasi Perubahan Iklim, Program Energi Bersih, Dana dan Kemitraan) (GIZ, 2018).

Beberapa alternatif sumber pendanaan untuk implementasi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat terdiri dari APBN, Non-APBN dan Internasional, yang selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 181 | Alternatif Sumber Pendanaan untuk Implementasi FOLU Net Sink 2030

No	Alternatif Sumber Pendanaan		
	APBN	Non APBN	Internasional
1	Mekanisme penganggaran K/L	Skema PPP	Global Environment Facility (GEF)
2	Insentif Fiskal ¹	Swasta murni	Green Climate Fund (GCF)
3	Dana Alokasi Khusus	Green Bond	Bilateral Agency
4	-	Green Sukuk	Lembaga Multilateral
5	-	Kredit Usaha Rakyat	-

Sumber: GIZ, 2018

Total pendanaan untuk implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat terhitung sebesar Rp328.752.916.142,- dengan rincian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

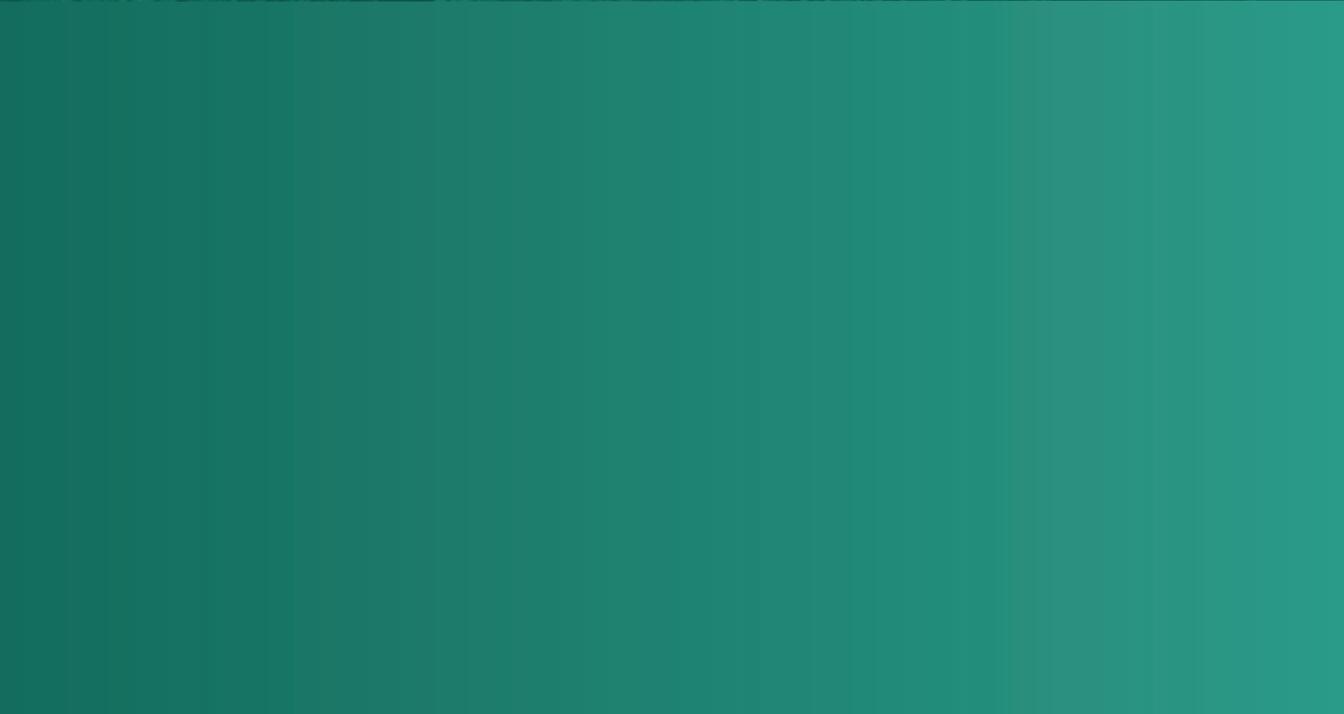
Tabel 182 | Rencana Sumber Pendanaan Implementasi FOLU Net Sink 2030 di Sub Nasional Sumatera Barat

No	Aksi Mitigasi	Total Pendanaan (Rp)	Sumber Pendanaan (Rp)		
			APBN	APBD Provinsi	PBPH
1	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral	1.864.000.000	1.528.960.000	-	335.040.000
2	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut	-	-	-	-

1. Insentif fiskal dapat berupa *tax holiday*, *tax allowance*, pembebasan PPN untuk barang modal, PPh DTP Geothermal, Pembebasan Bea Impor Barang Modal, dsb

3	Pencegahan Degradasi pada Area Koneksi	733.460.000	-	161.100.000	572.360.000
4	Pembangunan Hutan Tanaman	-	-	-	-
5	Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)	1.366.400.000	-	386.640.000	979.760.000
6	Penerapan RIL-C	23.219.000.180	-	322.200.000	22.896.800.180
7	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi	120.291.046.052	118.058.283.552	-	2.232.762.500
8	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi	28.022.137.912	27.901.335.912	-	120.802.000
9	Pengelolaan Tata Air Gambut	-	-	-	-
10	Pelaksanaan Restorasi Gambut	-	-	-	-
11	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi	153.187.412.000	112.169.782.000	40.974.910.000	42.720.000
12	Pengelolaan Mangrove	69.820.000	-	69.820.000	-
Total		328.752.916.142	259.658.361.464	41.914.670.000	27.180.244.680

Sumber: Analisis Data, 2022



BAB 05



MONITORING DAN EVALUASI

BAB V | MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Sebagaimana yang telah dimuat dalam dokumen Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030, monitoring pelaksanaan aksi mitigasi dilakukan untuk identifikasi sumber hambatan atau masalah sesegera mungkin; memacu kemajuan kerja pada setiap tahapan kerja sesuai rencana; membangun upaya-upaya tindak lanjut dan hal-hal yang harus dikembangkan lebih jauh, serta untuk mendapatkan inspirasi dan inovasi baru; juga mendorong kegiatan unggulan yang memberikan dampak signifikan terhadap penurunan emisi GRK.

Sistem monitoring pada Rencana Kerja Sub Nasional Sumatera Barat yang disajikan pada tabel berikut memberikan informasi aspek-aspek dalam pemantauan dan metode pemantauannya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan.

A.1. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral [RO1] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk Mendapatkan Pengesahan**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial
2. Daftar kegiatan rencana pengelolaan
3. Target jangka pendek pada setiap kegiatan pengelolaan
4. Lokasi prioritas untuk kegiatan pengelolaan jangka pendek
5. Alternatif pendanaan kegiatan pengelolaan dan alokasinya

Pada kegiatan **Pengembangan Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jenis fasilitas yang dikembangkan
2. Jenis hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya

Pada kegiatan **Pengembangan dan Peningkatan Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tenaga pendamping PS yang diajukan
2. Frekuensi pengajuan tenaga pendamping PS yang diajukan

Pada kegiatan **Pengembangan Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, aspek yang dipantau adalah substansi kemitraan.

Pada kegiatan **Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Penetapan calon areal PS
2. Luas calon areal PS
3. Penetapan skema dan calon pengurus PS

Pada kegiatan **Penetapan Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR Kepada Kelompok Masyarakat**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan regu penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS
2. Penyusunan rencana teknis jalur penataan batas areal PS
3. Persiapan alat, bahan dan logistik
4. Peta hasil penataan areal kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS

Pada kegiatan **Pembuatan Batas, Penanaman dan Patroli Rutin**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Tren deforestasi tahunan
2. Tingkat kesadaran masyarakat
3. Pola pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar area saaraan FOLU Net Sink 2030
4. Laporan pemantauan kegiatan FOLU Net Sink

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral [RO1] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 183 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
1.1.	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
1.1.1.	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan [RKPS]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial 2. Daftar kegiatan rencana pengelolaan 3. Target jangka pendek pada setiap kegiatan pengelolaan 4. Lokasi prioritas untuk kegiatan pengelolaan jangka pendek 5. Alternatif pendanaan kegiatan pengelolaan dan alokasinya 	
1.1.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis fasilitas yang dikembangkan 2. Jenis hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya 	
1.2.	Program Kemitraan Lingkungan			
1.2.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial [orang]	Jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tenaga pendamping PS yang diajukan 2. Frekuensi pengajuan tenaga pendamping PS yang diajukan 	
1.2.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	Substansi kemitraan	
1.3.	Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
1.3.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [hektar]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan calon areal PS 2. Luas calon areal PS 3. Penetapan skema dan calon pengurus PS 	
1.3.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [hektar]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan regu penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS 2. Penyusunan rencana teknis jalur penataan batas areal PS 3. Persiapan alat, bahan dan logistik 4. Peta hasil penataan areal kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS 	
1.4.	Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan			

Kegiatan Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Jika di wilayah KPH, maka perlu dilengkapi dengan Surat Tugas KakPH terkait	
	Jika di wilayah KPH, sebaiknya secara garis besar mengacu pada dokumen RPHJP KPH yang sudah ada atau sudah di sahkan agar perencanaan dapat terintegrasi	
	Target jangka pendek (1 tahun) sebaiknya ditentukan untuk mengetahui kapasitas kinerja lembaga dan capaian pengelolaan	
	Sebaiknya ditentukan lokasi yang dapat memberikan manfaat secara lingkungan, ekonomi dan sosial sekaligus	
	Jika di wilayah KPH, sebaiknya secara garis besar mengacu pada dokumen RPHJP KPH yang sudah ada atau sudah di sahkan agar perencanaan dapat terintegrasi dan memperoleh dukungan pendanaan	
	Fasilitas yang dikembangkan perlu dihitung seberapa besar tingkat manfaat terhadap ekonomi wilayah	
	Pengembangan hasil hutan atau jasa lingkungan dilakukan atas dasar prinsip kelestarian kawasan hutan, peningkatan ekonomi wilayah dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan hutan	
	Jumlah tenaga PS yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan PS di lapangan	
	Frekuensi pengajuan tenaga pendamping PS dalam satu tahun dibandingkan dengan tenaga pendamping PS yang berhasil didatangkan dan melakukan pendampingan di lapangan	
	Durasi perjanjian kerjasama, pemenuhan kewajiban dalam kerjasama, kontrak harga, aspek kelestarian hasil hutan yang dikerjasamakan dan aspek lainnya	
	Perlu dipastikan calon areal PS yang diusulkan bebas dari konflik	
	Luas calon areal PS yang diusulkan sebaiknya mampu dikelola oleh calon pengurus	
	Skema PS yang ditetapkan perlu ditinjau dari segi tingkat kemanfaatannya dan pengurus yang diajukan dipastikan merupakan yang berdomisili di area dimana calon area PS ditetapkan	
	Pembentukan regu perlu melibatkan stakeholder lokal dan calon pengurus PS	
	Peta rencana teknis jalur penataan batas perlu dirancang dan dibuat secara partisipatif dengan memperhatikan batas-batas kawasan yang sudah tersedia di lapangan, baik berupa batas alam maupun batas buatan yang sengaja dibuat seperti patok batas.	
	Daftar kebutuhan logistik personil selama proses penataan batas, termasuk blanko Berita Acara Hasil Penataan Batas	
	Peta hasil penataan areal perlu di sosialisasikan untuk menghindari potensi konflik dan memperoleh legitimasi areal PS	

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
	KEGIATAN		Aspek yang Dipantau	
1.4.1.	Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Laju deforestasi berkurang, masyarakat semakin sadar dan pertanian menetap	1. Tren deforestasi tahunan	
			2. Tingkat kesadaran masyarakat	
			3. Pola pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar area saaraan FOLU Net Sink 2030	
			4. Laporan pemantauan lokasi sasaran FOLU Net Sink	

Sumber: Analisis Data, 2022

A.2. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [RO2]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan gambut di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dipantau pada aksi mitigasi ini.

Tabel 184 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [RO2]

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN		
	KEGIATAN		Aspek yang Dipantau	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
2	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut				
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis Data, 2022

A.3. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi [RO3] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 3**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi [RO3] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Analisis Citra dan atau Drone	2023- 2030 secara triwulan
	Survey sosial dengan menanyakan persepsi dan kepehaman akan pentingnya fungsi hutan primer bagi ekologi dan pengatur tata air	
	Perlu dipantau saat pembukaan ladang tahunan, apakah luas pembukaan dan atau pembersihan lahan menekan area lokasi sasaran FOLU Net Sink yang saat ini dijaga dan dipertahankan keberadaan hutannya	
	Laporan pemantauan perlu disusun oleh PBPH a.n. PT. Multikarya Lisun Prima selaku pemegang izin konsesi dan penanggung jawab kegiatan FOLU Net Sink di wilayahnya.	

Tabel 185 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
3.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi			
3.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 3 di Wilayah KPHL Sijunjung	Area lokasi target lokasi R03 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
3.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 3 di Wilayah KPHP Mentawai	Area lokasi target lokasi R03 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

Sumber: Analisis Data, 2022

Litigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [R03]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Sijunjung	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Kamang Baru Wali Nagari Padang Tarok	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Siberut Utara dan Camat Siberut Tengah, Wali Nagari Bojakan, Malancan, Sotboyak dan Saibi Samukop	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

A.4. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dipantau pada aksi mitigasi ini.

Tabel 186 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN		
	KEGIATAN		Aspek yang Dipantau	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
4	Pembangunan Hutan Tanaman				
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis Data, 2022

A.5. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [RO5]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) [RO5] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Penyuluhan dan Penanaman**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tanaman yang berhasil ditanam
2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh

Pada kegiatan **Penanaman Permudaan Alam**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tanaman yang berhasil ditanam
2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) [RO5] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 187 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
5.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)			
5.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
5.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

Kegiatan Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [R05]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Sijunjung	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Kamang Baru, Camat Sijunjung, dan Camat Sumpur Kudus 2. Wali Nagari Lubuk Tarantang, Muaro Tangkuang, Aie Amo, Padang Tarok, Tanjung Kaliang, Durian Gadang dan Unggan 3. Pemegang Izin a.n. PT Multikarya Lisun Prima	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Hulu Batanghari	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Stakeholder wilayah Kab. Solok Selatan 1. Camat Koto Parik Gadang Diateh; Camat Pauh Duo; Camat Sangir; Camat Sangir Jujuan; Camat Sungai Pagu; Camat Sangir Batang Hari 2. Pemegang Izin a.n. PT Andalas Merapi Timber 3. Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Alam Pauh Duo, Lubuk Gadang, Padang Air Dingin, Padang Gantiang, Padang Limau Sundai, Koto Baru, Pasir Talang Timur, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah Stakeholder wilayah Kab. Dharmasraya 1. Camat Sembilan Koto 2. Wali Nagari Banai, Koto Nan Empat Dibawuh, Lubuak Karak dan Silago Stakeholder wilayah Kabupaten Sijunjung 1. Camat Kamang Baru 2. Wali Nagari Lubuk Tarantang dan Muaro Takuang	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

5.1.3.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
5.1.4.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
5.2.	Program Sosialisasi PHBM			
5.2.1.	Penyuluhan dan Penanaman [batang]	Prosen tumbuh	1. Jumlah tanaman yang berhasil ditanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
5.2.2.	Penyuluhan dan Penanaman [batang]	Prosen tumbuh	1. Jumlah tanaman yang berhasil ditanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
5.3.	Program Pengayaan Tanaman			
5.3.1.	Penanaman Permudaan Alam [batang]	Prosen tumbuh	1. Jumlah tanaman yang berhasil ditanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	

Sumber: Analisis Data, 2022

	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Pesisir Selatan	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Lunang dan Camat Silaut Wali Nagari Sindang Lunang dan Silaut	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Siberut Barat; Camat Siberut Tengah; Camat Siberut Utara; Camat Pagai Selatan; Camat Pagai Utara; Camat Sikakap 2. Wali Nagari Sigapokna, Simalegi, Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma, Bojakan, Malancan, Sotboyak, Bulasat, Makalo, Malakopa, Sinaka, Betumonga, Saumanganya, Silabu, Matobe, Sikakap, dan Taikako. 3. Pemegang Izin a.n. PT. Minas Pagai Lumber dan PT. Salaki Summa Sejahtera	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Laporan hasil penanaman dari PT. Minas Pagai Lumber	2022
	Laporan hasil pemantauan dari PT. Minas Pagai Lumber	2023
	Laporan hasil penanaman dari PT. Minas Pagai Lumber	2023; 2024;
	Laporan hasil pemantauan dari PT. Minas Pagai Lumber	2025; 2026; 2027
	Laporan hasil penanaman dari PT. Minas Pagai Lumber	2023; 2024;
	Laporan hasil pemantauan dari PT. Minas Pagai Lumber	2025; 2026; 2027

A.6. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [RO6]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi penerapan RIL-C [RO6] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 6 Penerapan RIL-C**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Penanaman dan Pembuatan Guludan**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam
2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh

Pada kegiatan **Penerapan RIL-C di Areal Izin PBPH**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Perencanaan pemanenan
2. Pelaksanaan pemanenan
3. Pasca pemanenan

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi penerapan RIL-C [RO6] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 188 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
6.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C			
6.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung	Area lokasi target lokasi R06 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
6.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi R06 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
6.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	

tiga Penerapan RIL-C [R06]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Sijunjung	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Kamang Baru; Camat Sijunjung; dan Camat Sumpur Kudus 2. Wali Nagari Lubuk Tarantang, Aie Amo, Padang Tarok, 3. Tanjung Kaling, Durian Gadang dan Unggan 3. Pemegang Izin a.n. PT Multikarya Lisun Prima	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Hulu Batanghari	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Stakeholder wilayah Kab. Solok Selatan 1. Camat Koto Parik Gadang Diateh; Camat Pauh Duo; Camat Sangir; Camat Sangir Jujuan; Camat Sungai Pagu; Camat Sangir Batang Hari 2. Pemegang Izin a.n. PT Andalas Merapi Timber 3. Wali Nagari Pakan Rabaa Timur, Alam Pauh Duo, Lubuk Gadang, Padang Air Dingin, Padang Gantiang, Padang Limau Sundai, Koto Baru, Pasir Talang Timur, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah Stakeholder wilayah Kab. Dharmasraya 1. Camat Sembilan Koto 2. Wali Nagari Banai, Koto Nan Empat Dibawah, Lubuak Karak dan Silago Stakeholder wilayah Kabupaten Sijunjung 1. Camat Kamang Baru 2. Wali Nagari Lubuk Tarantang dan Muaro Takuang	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Pesisir Selatan	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Lunang dan Camat Silaut 2. Wali Nagari Sindang Lunang dan Silaut	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
			4. Data-data kegiatan	
6.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Area lokasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
6.2.	Program Penanaman Tanaman Konservasi			
6.2.1.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2022 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
6.2.2.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2023 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
6.2.3.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2024 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
6.2.4.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2025 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
6.2.5.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2026 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Siberut Barat; Camat Siberut Tengah; Camat Siberut Utara; Camat Pagai Selatan; Camat Pagai Utara; Camat Sikakap 2. Wali Nagari Sigapokna, Simalegi, Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma, Bojakan, Malancan, Sotboyok, Bulasat, Makalo, Malakopa, Sinaka, Betumonga, Saumanganya, Silabu, Matobe, Sikakap, dan Taikako. 3. Pemegang Izin a.n. PT. Minas Pagai Lumber dan PT. Salaki Summa Sejahtera	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Salinan Laporan Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2022 PT. Minas Pagai Lumber	2022
	Salinan Laporan Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2023 PT. Minas Pagai Lumber	2023
	Salinan Laporan Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2024 PT. Minas Pagai Lumber	2024
	Salinan Laporan Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2025 PT. Minas Pagai Lumber	2025
	Salinan Laporan Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2026 PT. Minas Pagai Lumber	2026

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
6.3.1.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	1. Perencanaan pemanenan	
			2. Pelaksanaan pemanenan	
			3. Pasca pemanenan	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	<p>Penerapan Perencanaan RIL dilakukan pada Perencanaan Pemanenan Kayu rencana jangka panjang (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan/RKUPH) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan/RKTPH).</p> <p>Perencanaan RKUPH dalam penerapan RIL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi areal PBPH atas areal produksi dan kawasan lindung; 2. Perhitungan Annual Allowable Cut (AAC) berbasis data Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) berdasarkan luas, jumlah volume, dan komposisi jenis pohon; 3. Penataan areal atas blok-blok RKTPH sesuai dengan potensi dan siklus tebang; dan 4. Perencanaan umum Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) sesuai dengan standar jalan hutan dan prasarana lainnya. <p>Perencanaan RKTPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi kawasan lindung dalam areal RKTPH tahun berjalan; 2. Target produksi RKTPH harus sesuai dengan AAC dalam RKUPH yang meliputi target luas, target volume, jumlah batang, dan komposisi jenis pohon yang ditebang; 3. Perencanaan produksi RKTPH harus memperhitungkan intensitas logging yang sesuai dengan komposisi jenis pohon dalam tegakan, dan menyediakan pohon induk yang tersebar merata di areal produksi. 4. Perencanaan jaringan jalan dalam areal RKTPH; dan 5. Penataan petak tebang/kompartemen dalam areal RKTPH. <p>Perencanaan pemanenan kayu di petak tebang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peta rencana pemanenan kayu; 2. Perencanaan lokasi TPn dan blok tebang; 3. Perencanaan jaringan jalan sarad; 4. Perencanaan arah rebah pohon; dan 5. Pемindahan rencana pemanenan kayu di atas peta ke lapangan 	
	<p>Pelaksanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Jalan Sarad; 2. Penebangan; dan 3. Penyaradan 	
	<p>Kegiatan paska pemanenan dilaksanakan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, yang dilakukan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan jalan sarad. 2. Penutupan TPn. 	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
6.3.2.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	1. Perencanaan pemanenan	
			2. Pelaksanaan pemanenan	
			3. Pasca pemanenan	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	<p>Penerapan Perencanaan RIL dilakukan pada Perencanaan Pemanenan Kayu rencana jangka panjang (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan/RKUPH) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan/RKTPH).</p> <p>Perencanaan RKUPH dalam penerapan RIL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi areal PBPH atas areal produksi dan kawasan lindung; 2. Perhitungan Annual Allowable Cut (AAC) berbasis data Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) berdasarkan luas, jumlah volume, dan komposisi jenis pohon; 3. Penataan areal atas blok-blok RKTPH sesuai dengan potensi dan siklus tebang; dan 4. Perencanaan umum Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) sesuai dengan standar jalan hutan dan prasarana lainnya. <p>Perencanaan RKTPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi kawasan lindung dalam areal RKTPH tahun berjalan; 2. Target produksi RKTPH harus sesuai dengan AAC dalam RKUPH yang meliputi target luas, target volume, jumlah batang, dan komposisi jenis pohon yang ditebang; 3. Perencanaan produksi RKTPH harus memperhitungkan intensitas logging yang sesuai dengan komposisi jenis pohon dalam tegakan, dan menyediakan pohon induk yang tersebar merata di areal produksi. 4. Perencanaan jaringan jalan dalam areal RKTPH; dan 5. Penataan petak tebang/kompartemen dalam areal RKTPH. <p>Perencanaan pemanenan kayu di petak tebang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peta rencana pemanenan kayu; 2. Perencanaan lokasi TPn dan blok tebang; 3. Perencanaan jaringan jalan sarad; 4. Perencanaan arah rebah pohon; dan <p>Pemindahan rencana pemanenan kayu di atas peta ke lapangan</p>	
	<p>Pelaksanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Jalan Sarad; 2. Penebangan; dan 3. Penyaradan 	
	<p>Kegiatan paska pemanenan dilaksanakan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, yang dilakukan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan jalan sarad. 2. Penutupan TPn. 	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
6.3.3.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	1. Perencanaan pemanenan	
			2. Pelaksanaan pemanenan	
			3. Pasca pemanenan	

Sumber: Analisis Data, 2022

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	<p>Penerapan Perencanaan RIL dilakukan pada Perencanaan Pemanenan Kayu rencana jangka panjang (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan/RKUPH) dan rencana jangka pendek (Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan/RKTPH).</p> <p>Perencanaan RKUPH dalam penerapan RIL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi areal PBPH atas areal produksi dan kawasan lindung; 2. Perhitungan Annual Allowable Cut (AAC) berbasis data Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) berdasarkan luas, jumlah volume, dan komposisi jenis pohon; 3. Penataan areal atas blok-blok RKTPH sesuai dengan potensi dan siklus tebang; dan 4. Perencanaan umum Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) sesuai dengan standar jalan hutan dan prasarana lainnya. <p>Perencanaan RKTPH harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deliniasi kawasan lindung dalam areal RKTPH tahun berjalan; 2. Target produksi RKTPH harus sesuai dengan AAC dalam RKUPH yang meliputi target luas, target volume, jumlah batang, dan komposisi jenis pohon yang ditebang; 3. Perencanaan produksi RKTPH harus memperhitungkan intensitas logging yang sesuai dengan komposisi jenis pohon dalam tegakan, dan menyediakan pohon induk yang tersebar merata di areal produksi. 4. Perencanaan jaringan jalan dalam areal RKTPH; dan 5. Penataan petak tebang/kompartemen dalam areal RKTPH. <p>Perencanaan pemanenan kayu di petak tebang sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peta rencana pemanenan kayu; 2. Perencanaan lokasi TPn dan blok tebang; 3. Perencanaan jaringan jalan sarad; 4. Perencanaan arah rebah pohon; dan <p>Pemindahan rencana pemanenan kayu di atas peta ke lapangan</p>	
	<p>Pelaksanaan pemanenan dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan Jalan Sarad; 2. Penebangan; dan 3. 3. Penyaradan 	
	<p>Kegiatan paska pemanenan dilaksanakan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut, yang dilakukan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penutupan jalan sarad. 2. Penutupan TPn. 	

A.7. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [RO7]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Penanaman Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di Areal Berizin (P-0), Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Areal Berizin, Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin (P-0), Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin (P-0)** dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Penanaman Rehabilitasi Intensif
2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan
3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur
4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan
5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan
6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal

Pada kegiatan **Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1)** dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah bibit sulaman
2. Jumlah tanaman yang hidup
3. Kondisi tanaman
4. Akses terhadap cadangan air
5. Kendala dan gangguan tumbuh
6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke-1 dengan masyarakat lokal

Pada kegiatan **Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di Areal Berizin**

Tahun ke-2 (P-2), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2) dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah bibit sulaman
2. Jumlah tanaman yang hidup
3. Kondisi tanaman
4. Akses terhadap cadangan air
5. Kendala dan gangguan tumbuh
6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke-2 dengan masyarakat lokal

Pada kegiatan **Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL Pola Intensif, Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL Pola Semi-Intensif, dan Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif, Semi-Intensif dan atau Agroforestry
2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan
3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan
4. Pemilihan waktu untuk groundcheck ke lokasi perencanaan
5. Penentuan Skema rancangan penanaman
6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi
7. Pengadaan alat dan bahan

Pada kegiatan **Pengolahan Tanah dan Penanaman**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tanaman buah yang berhasil di tanam
2. Jumlah tanaman buah yang berhasil hidup
3. Kendala dan gangguan tumbuh

Pada kegiatan **PML Irigasi & Penanaman**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Keberhasilan menyemai bibit
2. Ketahanan terhadap hama penyakit
3. Keberhasilan tumbuh

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 189 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi			
7.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
7.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
7.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [R07]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Sijunjung	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Kamang Baru 2. Wali Nagari Muaro Takuang, Aie Amo, Padang Tarok dan Tanjung Kaliang 3. Pemegang Izin a.n. PT. Multikarya Lisun Prima	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Hulu Batanghari	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Stakeholder wilayah Kab. Solok Selatan 1. Camat Sangir dan Camat Batang Hari 2. Pemegang Izin a.n. PT. Andalas Merapi Timber 3. Wali Nagari Lubuk Gadang, Dusun Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah Stakeholder wilayah Kab. Dharmasraya 1. Camat Sembilan Koto; Camat Pulau Punjung; dan Camat Timpeh 2. Wali Nagari Gunung Selasih, Sungai Kambut, Koto Nan Empat Dibawuh, Panyubarangan, Lubuk Karak, dan Silago	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Dharmasraya	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Stakeholder wilayah Kab. Dharmasraya 1. Camat Koto Baru, Camat Koto Besar, dan Camat Pulau Punjung 2. Wali Nagari Koto Padang, Bonjol, Koto Besar, Tebing Tinggi Stakeholder wilayah Kab. Solok Selatan 1. Camat Sangir Balai Janggo dan Camat Sangir Batang Hari 2. Wali Nagari Sungai Kunyit, Abai, Dusun Tengah dan Lubuk Ulang Aling Tengah	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
7.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
7.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang belum dibebani izin konsesi diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Pesisir Selatan	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Lunang dan Camat Silaut 2. Wali Nagari Sindang Lunang, Silaut dan Sungai Sirah	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Siberut Barat; Camat Siberut Tengah; Camat Siberut Utara; Camat Pagai Selatan; Camat Pagai Utara dan Camat Sikakap 2. Wali Nagari Sigapokna, Simalegi, Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma, Malancan, Sotboyak, Bulasat, Makalo, Malakopa, Sinaka, Betumoga, Saumanganya, Silabu, Matobe, Sikakap dan Taikako. 3. Pemilik Izin a.n. PT. Minas Pagai Lumber dan PT. Salaki Summa Sejahtera	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
7.2.	Program Rehabilitasi pada Areal Berizin			
7.2.1.	Penanaman Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin (P-0)	Tertanamnya areal lahan terbuka di dalam areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha [ha]	1. Pembentukan Tim Penanaman Rehabilitasi Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: BPDASHL Agam Kuantan</p> <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Dharmasraya 1. Camat Asam Jujuhan; 2. Wali Nagari Lubuk Besar 3. Camat Koto Besar; 4. Wali Nagari Bonjol; 5. Wali Nagari Koto Besar 6. Camat Sembilan Koto; 7. Wali Nagari Koto Nan Empat Dibawah 8. Camat Timpeh; 9. Wali Nagari Panyubarangan</p> <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 1. Camat Siberut Barat; 2. Wali Nagari Simalegi; 3. Camat Siberut Tengah; 4. Wali Nagari Cimpungan; 5. Wali Nagari Saibi Samukop; 6. Wali Nagari Saliguma; 7. Camat Siberut Utara; 8. Wali Nagari Mongan Poula; 9. Wali Nagari Sotboyak</p> <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota 1. Camat Kapur IX; 2. Wali Nagari Durian Tinggi; 3. Wali Nagari Galugur; 4. Wali Nagari Sialang; 5. Camat Pangkalan Koto Baru; 6. Wali Nagari Manggilang; 7. Wali Nagari Tanjung Balik; 8. Wali Nagari Tanjung Pauh</p> <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Pasaman 1. Camat Mapat Tunggul Selatan; 2. Wali Nagari Silayang</p> <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 1. Camat Silaut; 2. Wali Nagari Sungai Sirah</p> <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Solok Selatan 1. Camat Sangir Batang Hari; 2. Wali Nagari Dusun Tengah</p>	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari PT. Multikarya Lisun Prima Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam; - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Padang Tarok dan Tanjung Kaliang.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.2.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi intensif di tahun ke-1 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
7.2.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi intensif di tahun ke-2 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Padang Tarok dan Tanjung Kaliang.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Padang Tarok dan Tanjung Kaliang.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.2.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin	Tertanamnya areal semak belukar di dalam areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: Aie Amo 24,69 ha Padang Tarok 63,34 ha Tanjung Kaling 69,74 ha [hektar]	1. Pembentukan Tim Penanaman Rehabilitasi Semi- Intensif 625	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	
7.2.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi-intensif di tahun ke-1 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: Aie Amo 24,69 ha Padang Tarok 63,34 ha Tanjung Kaling 69,74 ha [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
7.2.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi-intensif di tahun ke-2 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut:	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari PT. Multikarya Lisun Prima Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Aie Amo, Padang Tarok dan Tanjung Kiliang.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Aie Amo, Padang Tarok dan Tanjung Kiliang.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
		Aie Amo 24,69 ha Padang Tarok 63,34 ha Tanjung Kaliang 69,74 ha [hektar]	4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	
7.3.	Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin			
7.3.1.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin (P-0)	Terehabilitasinya Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha [hektar]	1. Pembentukan Tim Penanaman Rehabilitasi Semi- Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	
7.3.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi intensif di Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha pada tahun ke-1 [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Aie Amo, Padang Tarok dan Tanjung Kaliang.	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Kepala KPHL Hulu Batanghari (Unit VII) Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuak Karak dan Silago.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuak Karak dan Silago.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi intensif di Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha pada tahun ke-2 [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	
7.3.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin (P-0)	Terehabilitasinya areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha [hektar]	1. Pembentukan Tim Penanaman Rehabilitasi Semi- Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merana lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuak Karak dan Silago.	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Kepala KPHP Mentawai (Unit X) Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Simalegi, Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma dan Sotboyak.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha pada tahun ke-1 [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
7.3.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha pada tahun ke-2 [hektar]	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merana lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Simalegi, Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma dan Sotboyak.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merana lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Simalegi, Cimpungan, Saibi Samukop, Saliguma dan Sotboyak.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.7.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif di areal seluas 27,98 ha	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan	
			4. Pemilihan waktu untuk gronchek ke lokasi perencanaan	
			5. Penentuan Skema rancangan penanaman	
			6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi	
			7. Pengadaan alat dan bahan	
7.3.8.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (PO)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha pada areal seluas 27,98 ha	1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (PO)	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	
7.3.9.	Pemeliharaan Tanaman	Terlaksananya	1. Jumlah bibit sulaman	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi, atau dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga jika memungkinkan	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan ilmiah, ketersediaan bibit dan lokasi keberadaan bibit - Jika tidak memungkinkan, dapat melalui penyemaian benih terlebih dahulu 	
	Data hasil groundcheck terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - titik koordinat, - tutupan lahan eksisting, - jenis tegakan dominan - tingkat kerapatan tegakan di calon lokasi kegiatan, - kondisi sosial ekonomi di calon lokasi, termasuk ketersediaan tenaga kerja buruh harian lepas yang dapat dilibatkan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Skema penanaman disesuaikan dengan tingkat kerapatan tegakan eksisting, atau pertimbangan lain yang akan dimuat dalam rancangan teknis. - Skema penanaman terdiri dari skema agroforestri dengan kepadatan 400 pohon/ha, skema semi intensif dengan kepadatan 625 pohon/ha dan skema intensif dengan kepadatan 1.100 pohon/ha 	
	Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian keberhasilan rehabilitasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tata waktu pelaksanaan rehabilitasi - Target penilaian rehabilitasi (% tanaman hidup) - Intensitas sampling penilaian rehabilitasi (% dari luas total yang disampling untuk dinilai) 	
	Disesuaikan dengan perencanaan kegiatan, termasuk pengadaan bibit yang jenisnya sudah dipertimbangkan	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam; - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Galugur, Sialang dan Silayang.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
	RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)	pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 1	2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
7.3.10.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 2	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Galugur, Sialang dan Silayang.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Galugur, Sialang dan Silayang.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.11.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan	
			4. Pemilihan waktu untuk grounchek ke lokasi perencanaan	
			5. Penentuan Skema rancangan penanaman	
			6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi	
			7. Pengadaan alat dan bahan	
7.3.12.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha pada areal seluas 664,95 ha	1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi, atau dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga jika memungkinkan	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	Pertimbangan ilmiah, ketersediaan bibit dan lokasi keberadaan bibit Jika tidak memungkinkan, dapat melalui penyemaian benih terlebih dahulu	
	Data hasil groundchek terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - titik koordinat, - tutupan lahan eksisting, - jenis tegakan dominan - tingkat kerapatan tegakan di calon lokasi kegiatan, - kondisi sosial ekonomi di calon lokasi, termasuk ketersediaan tenaga kerja buruh harian lepas yang dapat dilibatkan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Skema penanaman disesuaikan dengan tingkat kerapatan tegakan eksisting, atau pertimbangan lain yang akan dimuat dalam rancangan teknis. - Skema penanaman terdiri dari skema agroforestri dengan kepadatan 400 pohon/ha, skema semi intensif dengan kepadatan 625 pohon/ha dan skema intensif dengan kepadatan 1.100 pohon/ha 	
	Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian keberhasilan rehabilitasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tata waktu pelaksanaan rehabilitasi - Target penilaian rehabilitasi (% tanaman hidup) - Intensitas sampling penilaian rehabilitasi (% dari luas total yang disampling untuk dinilai) 	
	Disesuaikan dengan perencanaan kegiatan, termasuk pengadaan bibit yang jenisnya sudah dipertimbangkan	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang dan Tanjung Pauh.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.13.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 1	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
7.3.14.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke-2	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang dan Tanjung Pauh.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang dan Tanjung Pauh.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.15.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan	
			4. Pemilihan waktu untuk grounchek ke lokasi perencanaan	
			5. Penentuan Skema rancangan penanaman	
			6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi	
			7. Pengadaan alat dan bahan	
7.3.16.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (PO)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha pada areal seluas 6.133,59 ha	1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (PO)	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi, atau dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga jika memungkinkan	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan ilmiah, ketersediaan bibit dan lokasi keberadaan bibit - Jika tidak memungkinkan, dapat melalui penyemaian benih terlebih dahulu 	
	Data hasil groundcheck terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - titik koordinat, - tutupan lahan eksisting, - jenis tegakan dominan - tingkat kerapatan tegakan di calon lokasi kegiatan, - kondisi sosial ekonomi di calon lokasi, termasuk ketersediaan tenaga kerja buruh harian lepas yang dapat dilibatkan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Skema penanaman disesuaikan dengan tingkat kerapatan tegakan eksisting, atau pertimbangan lain yang akan dimuat dalam rancangan teknis. - Skema penanaman terdiri dari skema agroforestri dengan kepadatan 400 pohon/ha, skema semi intensif dengan kepadatan 625 pohon/ha dan skema intensif dengan kepadatan 1.100 pohon/ha 	
	Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian keberhasilan rehabilitasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tata waktu pelaksanaan rehabilitasi - Target penilaian rehabilitasi (% tanaman hidup) - Intensitas sampling penilaian rehabilitasi (% dari luas total yang disampling untuk dinilai) 	
	Disesuaikan dengan perencanaan kegiatan, termasuk pengadaan bibit yang jenisnya sudah dipertimbangkan	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam; - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Besar, Bonjol, Koto Besar, Koto Nan Empat Dibawah, Panyubarangan, Simalegi, Cimpungan, Saibi Simukop. Saliguma, Mongan Poula, Sotboyak, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, Tanjung Balik, Sungai Sirah dan Dusun Tengah.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.3.17.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 1	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
7.3.18.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 2	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	
7.4.	Program Penyediaan Bibit Buah-buahan			
7.4.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	1. Jumlah tanaman buah yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman buah yang berhasil hidup	
			3. Kendala dan gangguan tumbuh	
7.5.	Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul			

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwaliar.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Besar, Bonjol, Koto Besar, Koto Nan Empat Dibawah, Panyubarangan, Simalegi, Cimpungan, Saibi Simukop. Saliguma, Mongan Poula, Sotboyak, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, Tanjung Balik, Sungai Sirah dan Dusun Tengah.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwaliar.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Besar, Bonjol, Koto Besar, Koto Nan Empat Dibawah, Panyubarangan, Simalegi, Cimpungan, Saibi Simukop. Saliguma, Mongan Poula, Sotboyak, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, Tanjung Balik, Sungai Sirah dan Dusun Tengah.	
	Laporan pemantauan kegiatan pengolahan tanah dan penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2023; 2026; 2027 dan

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
7.5.1.	PML Irigasi & Penanaman [kg]	Peningkatan produksi sawah	1. Keberhasilan menyemai bibit	
			2. Ketahanan terhadap hama penyakit	
			3. Keberhasilan tumbuh	

Sumber: Analisis Data, 2022

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Laporan pemantauan kegiatan PML Irigasi & Penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2028

A.8. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [RO8]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL Pola Intensif** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif, Semi-Intensif dan atau Agroforestry
2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan
3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan
4. Pemilihan waktu untuk groundcheck ke lokasi perencanaan
5. Penentuan Skema rancangan penanaman
6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi
7. Pengadaan alat dan bahan

Pada kegiatan **Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)
2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan
3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur
4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan
5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan
6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal

Pada kegiatan **Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah bibit sulaman
2. Jumlah tanaman yang hidup
3. Kondisi tanaman
4. Akses terhadap cadangan air
5. Kendala dan gangguan tumbuh
6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke-1 dengan masyarakat lokal

Pada kegiatan **Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah bibit sulaman
2. Jumlah tanaman yang hidup
3. Kondisi tanaman
4. Akses terhadap cadangan air
5. Kendala dan gangguan tumbuh
6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke-2 dengan masyarakat lokal

Pada kegiatan **Pengolahan Tanah dan Penanaman**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tanaman buah yang berhasil di tanam
2. Jumlah tanaman buah yang berhasil hidup
3. Kendala dan gangguan tumbuh

Pada kegiatan **PML Irigasi & Penanaman**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Keberhasilan menyemai bibit
2. Ketahanan terhadap hama penyakit
3. Keberhasilan tumbuh

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi [RO8] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 190 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi			
8.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
8.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
8.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

Kegiatan Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [R08]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Sijunjung	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Kamang Baru 2. Wali Nagari Muaro Takuang, Aie Amo, Padang Tarok, Tanjung Kaling, dan Durian Gadang 3. Pemegang Izin a.n. PT. Multikarya Lisun Prima	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Hulu Batanghari	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Pemegang Izin a.n. PT. Andalas Merapi Timber Stakeholder wilayah Kab. Dharmasraya 1. Camat Sembilan Koto 2. Wali Nagari Koto Nan Empat Dibawah, Lubuak Karakt dan Silago Stakeholder wilayah Kab. Solok Selatan 1. Camat Sangir, Camat Sangir Batang Hari, Camat Sangir Jujuan dan Camat Sungai Pagu 2. Wali Nagari Lubuk Gadang, Dusun Tengah, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah, Padang Limau Sundai, dan Pasir Talang Timur	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Dharmasraya	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Stakeholder wilayah Kab. Dharmasraya 1. Camat Koto Baru, Camat Koto Besar dan Camat Pulau Punjung 2. Wali Nagari Koto Padang, Bonjol, Koto Besar dan Tebing Tinggi Stakeholder wilayah Kab. Solok Selatan 1. Camat Sangir Batang Hari 2. Wali Nagari Dusun Tengah dan Lubuk Ulang Aling Tengah	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.1.4.	Sosialisasi target lokasi R0 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi R0 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
8.1.5.	Sosialisasi target lokasi R0 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Area lokasi target lokasi R0 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
8.1.6.	Sosialisasi target lokasi R0 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Area lokasi target lokasi R0 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang belum dibebani izin konsesi diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Pesisir Selatan	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: 1. Camat Lunang dan Camat Silaut 2. Wali Nagari Sindang Lunang, Silaut dan Sungai Sirah	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Pemegang Izin a.n. PT. Salaki Summa Sejahtera dan PT. Minas Pagai Lumber	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: BPDAS Agam Kuantan Stakeholder di Wilayah Kabupaten Dharmasraya 1. Camat Asam Jujuhan 2. Wali Nagari Lubuk Besar 3. Camat Koto Besar 4. Wali Nagari Bonjol 5. Camat Padang Laweh 6. Wali Nagari Sopan Jaya 7. Camat Sembilan Koto 8. Wali Nagari Koto Nan Empat Dibawah 9. Camat Timpeh 10. Wali Nagari Panyubarangan Stakeholder di Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 1. Camat Siberut Barat 2. Wali Nagari Sigapokna 3. Wali Nagari Simalegi	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
8.2.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan			
8.2.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan	
			4. Pemilihan waktu untuk groudcheck ke lokasi perencanaan	
			5. Penentuan Skema rancangan penanaman	
			6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi	
			7. Pengadaan alat dan bahan	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	<p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Limapuluh Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Kapur IX 2. Wali Nagari Durian Tinggi 3. Wali Nagari Galugur 4. Wali Nagari Sialang 5. Camat Pangkalan Koto Baru 6. Wali Nagari Manggilang <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Silaut 2. Wali Nagari Sungai Sirah <p>Stakeholder di Wilayah Kabupaten Solok Selatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat Sangir Batang Hari 2. Wali Nagari Dusun Tengah 3. Wali Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah 	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
Pola Intensif		
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi, atau dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga jika memungkinkan	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan ilmiah, ketersediaan bibit dan lokasi keberadaan bibit - Jika tidak memungkinkan, dapat melalui penyemaian benih terlebih dahulu 	
	<p>Data hasil groundchek terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - titik koordinat, - tutupan lahan eksisting, - jenis tegakan dominan - tingkat kerapatan tegakan di calon lokasi kegiatan, - kondisi sosial ekonomi di calon lokasi, termasuk ketersediaan tenaga kerja buruh harian lepas yang dapat dilibatkan 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Skema penanaman disesuaikan dengan tingkat kerapatan tegakan eksisting, atau pertimbangan lain yang akan dimuat dalam rancangan teknis. - Skema penanaman terdiri dari skema agroforestri dengan kepadatan 400 pohon/ha, skema semi intensif dengan kepadatan 625 pohon/ha dan skema intensif dengan kepadatan 1.100 pohon/ha 	
	<p>Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian keberhasilan rehabilitasi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana tata waktu pelaksanaan rehabilitasi - Target penilaian rehabilitasi (% tanaman hidup) - Intensitas sampling penilaian rehabilitasi (% dari luas total yang disampling untuk dinilai) 	
	Disesuaikan dengan perencanaan kegiatan, termasuk pengadaan bibit yang jenisnya sudah dipertimbangkan	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.2.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola intensif	1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	
8.2.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 1	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tanaman yang ditanam; - Jenis-jenis pohon yang ditanam - Kepadatan pohon yang ditanam; - Teknis penanaman - Pemilihan waktu penanaman 	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Galugur, Sialang, dan Manggilang.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Galugur, Sialang, dan Manggilang.	
	Metode Pemantauan	Waktu

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.2.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 2	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	
8.3.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan			
8.3.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan	
			4. Pemilihan waktu untuk grouchek ke lokasi perencanaan	
			5. Penentuan Skema rancangan penanaman	
			6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi	
			7. Pengadaan alat dan bahan	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Galugur, Sialang, dan Manggilang.	
Pola Semi-Intensif		
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi, atau dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga jika memungkinkan	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	Pertimbangan ilmiah, ketersediaan bibit dan lokasi keberadaan bibit Jika tidak memungkinkan, dapat melalui penyemaian benih terlebih dahulu	
	Data hasil groundchek terdiri dari: titik koordinat, tutupan lahan eksisting, jenis tegakan dominan tingkat kerapatan tegakan di calon lokasi kegiatan, kondisi sosial ekonomi di calon lokasi, termasuk ketersediaan tenaga kerja buruh	
	harian lepas yang dapat dilibatkan	
	Skema penanaman disesuaikan dengan tingkat kerapatan tegakan eksisting, atau pertimbangan lain yang akan dimuat dalam rancangan teknis. Skema penanaman terdiri dari skema agroforestri dengan kepadatan 400 pohon/ha, skema semi intensif dengan kepadatan 625 pohon/ha dan skema intensif dengan kepadatan 1.100 pohon/ha	
	Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian keberhasilan rehabilitasi antara lain: Rencana tata waktu pelaksanaan rehabilitasi Target penilaian rehabilitasi (% tanaman hidup) Intensitas sampling penilaian rehabilitasi (% dari luas total yang disampling untuk dinilai)	
	Disesuaikan dengan perencanaan kegiatan, termasuk pengadaan bibit yang jenisnya sudah dipertimbangkan	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.3.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha pada areal seluas 803,27 ha	1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (P0)	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	
8.3.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif	Terlaksananya pemeliharaan	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang	
	Tahun ke-1(P1)	tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 1	hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	Jumlah tanaman yang ditanam; Jenis-jenis pohon yang ditanam Kepadatan pohon yang ditanam; Teknis penanaman Pemilihan waktu penanaman	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Besar, Koto Nan Empat Dibawah, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, dan Sungai Sirah.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman	
	yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalir.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Besar, Koto Nan Empat Dibawah, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, dan Sungai Sirah.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.3.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 2	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	
8.4.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan			
8.4.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Pertimbangan penentuan jenis tanaman rehabilitasi hutan	
			4. Pemilihan waktu untuk gronchek ke lokasi perencanaan	
			5. Penentuan Skema rancangan penanaman	
			6. Pertimbangan parameter penilaian hasil rehabilitasi	
			7. Pengadaan alat dan bahan	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Lubuk Besar, Koto Nan Empat Dibawah, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, dan Sungai Sirah.	
Pola Agroforestry		
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi, atau dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga jika memungkinkan	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	Pertimbangan ilmiah, ketersediaan bibit dan lokasi keberadaan bibit Jika tidak memungkinkan, dapat melalui penyemaian benih terlebih dahulu	
	Data hasil groundchek terdiri dari: titik koordinat, tutupan lahan eksisting, jenis tegakan dominan tingkat kerapatan tegakan di calon lokasi kegiatan, kondisi sosial ekonomi di calon lokasi, termasuk ketersediaan tenaga kerja buruh harian lepas yang dapat dilibatkan	
	Skema penanaman disesuaikan dengan tingkat kerapatan tegakan eksisting, atau pertimbangan lain yang akan dimuat dalam rancangan teknis. Skema penanaman terdiri dari skema agroforestri dengan kepadatan 400 pohon/ha, skema semi intensif dengan kepadatan 625 pohon/ha dan skema intensif dengan kepadatan 1.100 pohon/ha	
	Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk penilaian keberhasilan rehabilitasi antara lain: Rencana tata waktu pelaksanaan rehabilitasi Target penilaian rehabilitasi (% tanaman hidup) Intensitas sampling penilaian rehabilitasi (% dari luas total yang disampling untuk dinilai)	
	Disesuaikan dengan perencanaan kegiatan, termasuk pengadaan bibit yang jenisnya sudah dipertimbangkan	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
8.4.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha pada areal seluas 1.253,03 ha	1. Pembentukan Tim Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)	
			2. Pertimbangan penentuan lokasi kegiatan	
			3. Aspek kesesuaian teknis penanaman tanaman penyerap karbon dengan kaidah silvikultur	
			4. Efektivitas pemenuhan target dengan waktu kegiatan	
			5. Hambatan kegiatan pengadaan alat dan bahan	
			6. Kerjasama kegiatan penanaman dengan masyarakat lokal	
8.4.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 1	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	
			3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 1 dengan masyarakat lokal	
8.4.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola	1. Jumlah bibit sulaman	
			2. Jumlah tanaman yang hidup	

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas/Mandat dari Dinas Kehutanan Provinsi. Jika menggunakan pihak ke-3, maka perlu dipantau pemahaman pelaksana kegiatan dalam menelaah rencana teknis penanaman yang disusun serta pemenuhan alat dan bahan kegiatan penanaman serta keterlibatan tenaga kerja lokal di lokasi penanaman	
	Pertimbangan biofisik, administrasi wilayah, aksesibilitas, anggaran dan personil	
	Jumlah tanaman yang ditanam; Jenis-jenis pohon yang ditanam Kepadatan pohon yang ditanam; Teknis penanaman Pemilihan waktu penanaman	
	Tata waktu dipertimbangkan saat penanaman untukantisipasi musim kemarau yang panjang yang akan menyebabkan beban biaya yang lebih besar dari rencana untuk perawatan tanaman khususnya penyiraman.	
	Dipantau kesesuaiannya dengan rencana teknis	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Bonjol, Sopan Jaya, Panyubarangan, Sigapokna, Simalegi, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, Sungai Sirah, Dusun Tengah dan Lubuk Ulang Aling Tengah.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun pertama (P-1) tidak kurang dari 20%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pasca tanam dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-1. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalier.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Bonjol, Sopan Jaya, Panyubarangan, Sigapokna, Simalegi, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, Sungai Sirah, Dusun Tengah dan Lubuk Ulang Aling Tengah.	
	Pastikan bibit sulaman untuk pemeliharaan tahun kedua (P-2) tidak kurang dari 10%	
	Kegiatan pendangiran, penyiangan dan pemupukan akan terlihat dari setiap tanaman yang dirawat dan yang tidak dirawat.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
		Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 2	3. Kondisi tanaman	
			4. Akses terhadap cadangan air	
			5. Kendala dan gangguan tumbuh	
			6. Kerjasama kegiatan pemantauan pada pemeliharaan tahun ke- 2 dengan masyarakat lokal	
8.5.	Program Penyediaan Bibit Buah-buahan			
8.5.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	1. Jumlah tanaman buah yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman buah yang berhasil hidup	
			3. Kendala dan gangguan tumbuh	
8.6.	Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul			
8.6.1.	PML Irigasi & Penanaman [kg]	Peningkatan produksi sawah	1. Keberhasilan menyemai bibit	
			2. Ketahanan terhadap hama penyakit	
			3. Keberhasilan tumbuh	

Sumber: Analisis Data, 2022

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Perlu dipantau kondisi tanaman pada saat penilaian pemeliharaan P-1 dan hasil penilaian pada pemeliharaan P-2. Jika kondisi tanaman merata lebih dari 30%, maka kegiatan pemeliharaan dinilai tidak berhasil.	
	Perlu dipantau aksesibilitas dan ketersediaan air untuk menjamin tumbuh bagi setiap tanaman. Jika sumber air dirasa sulit dan atau terlalu jauh, pembangunan alat pemanen air hujan dan atau embun mungkin perlu dilakukan.	
	Kendala merupakan kondisi dimana tanaman mengalami gagal tumbuh karena faktor lingkungan internal, seperti kurangnya perawatan, tanah yang kurang gembur, gulma yang terlalu rapat dan kurangnya intensitas cahaya matahari. Sedangkan gangguan tumbuh diperoleh dari faktor eksternal seperti adanya serangan hama dan penyakit, tanaman dimakan ternak dan atau diinjak satwalair.	
	Keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan rehabilitasi hutan, yang dalam hal ini adalah masyarakat Nagari Bonjol, Sopan Jaya, Panyubarangan, Sigapokna, Simalegi, Durian Tinggi, Galugur, Sialang, Manggilang, Sungai Sirah, Dusun Tengah dan Lubuk Ulang Aling Tengah.	
	Laporan pemantauan kegiatan pengolahan tanah dan penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2030
	Laporan pemantauan kegiatan PML Irigasi & Penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2029

A.9. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pengelolaan tata air gambut di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dipantau pada aksi mitigasi ini.

Tabel 191 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN		
	KEGIATAN		Aspek yang Dipantau	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
9	Pengelolaan Tata Air Gambut				

Sumber: Analisis Data, 2022

A.10. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pelaksanaan restorasi gambut di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dipantau pada aksi mitigasi ini.

Tabel 192 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN		
	KEGIATAN		Aspek yang Dipantau	Metode Pemantauan	Waktu Pemantauan
10	Pelaksanaan Restorasi Gambut				

Sumber: Analisis Data, 2022

A.11. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO11]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi [RO11] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan, Patroli dan Operasi Pengamanan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan Polhut**, dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jadwal patroli
2. Jalur patroli
3. Temuan saat patroli
4. Jumlah personil yang melakukan patroli

Pada kegiatan **Operasi Pengamanan Hutan**, aspek yang dipantau adalah Jenis-jenis temuan gangguan, ancaman dan tekanan terhadap kawasan hutan. Pada kegiatan **Pemantauan Titik Api**, aspek yang dipantau adalah titik api secara digital maupun secara kasar dilapangan. Pada kegiatan **Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**, aspek yang dipantau adalah Jumlah personil yang siap siaga.

Pada kegiatan **FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla
2. Rencana teknis FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla
3. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Pembangunan Sarpras Wisata**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Pembangunan Sarpras Wisata
1. Spesifikasi sarana dan prasarana wisata yang diajukan untuk dibangun
1. Tenaga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata

Pada kegiatan **Pemanfaatan HHBK**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Ketersediaan bahan baku HHBK secara lokal
2. Ketersediaan SDM lokal yang berkompeten memanfaatkan HHBK
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengembangan HHBK
4. *Unique Selling Point* (USP)
5. Pasar HHBK yang dimanfaatkan
6. Keterlibatan masyarakat dan UMKM
7. Kreatifitas masyarakat
8. Kesesuaian perusahaan HHBK dengan peraturan lokal/adat

Dampak perusahaan HHBK terhadap lingkungan

Pada kegiatan **Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan**, aspek yang dipantau adalah Kesesuaian dengan permasalahan yang ada dan transfer pengetahuan dan teknologi.

Pada kegiatan **Penyediaan Alat Ekonomi Produktif**, aspek yang dipantau adalah ketersediaan sarana pendukung untuk Alat Ekonomi Produktif.

Pada kegiatan **Pengembangan Stup Lebah Madu**, aspek yang dipantau adalah kapasitas penerima bantuan.

Pada kegiatan **Penyemaian Bibit dan Penamaan**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah bibit yang berhasil disemai
2. Jumlah bibit yang berhasil ditanam
3. Jumlah bibit yang berhasil tumbuh
4. Kendala dan gangguan saat persemaian, penanaman dan tumbuh

Pada kegiatan **Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk Mendapatkan Pengesahan**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial
2. Daftar kegiatan rencana pengelolaan
3. Target jangka pendek pada setiap kegiatan pengelolaan
4. Lokasi prioritas untuk kegiatan pengelolaan jangka pendek
5. Alternatif pendanaan kegiatan pengelolaan dan alokasinya

Pada kegiatan **Pengembangan Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jenis fasilitas yang dikembangkan
2. Jenis hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya

Pada kegiatan **Pengembangan dan Peningkatan Tenaga pendamping Perhutanan Sosial**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Jumlah tenaga pendamping PS yang diajukan
2. Frekuensi pengajuan tenaga pendamping PS yang diajukan

Pada kegiatan **Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, aspek yang dipantau adalah substansi kemitraan.

Pada kegiatan **Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Penetapan calon areal PS
2. Luas calon areal PS
3. Penetapan skema dan calon pengurus PS

Pada kegiatan **Penetapan Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan regu penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS
2. Penyusunan rencana teknis jalur penataan batas areal PS
3. Persiapan alat, bahan dan logistik
4. Peta hasil penataan areal kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi [RO11] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 193 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.1.	Program Penyardartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi			
11.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi 2. Rencana teknis Sosialisasi 3. Materi dan bahan paparan sosialisasi 4. Data-data kegiatan	
11.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Limapuluh Kota (Unit II)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah Limapuluh Kota diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi 2. Rencana teknis Sosialisasi 3. Materi dan bahan paparan sosialisasi 4. Data-data kegiatan	

Kegiatan Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [R011]

	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Pasaman Raya	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Stakeholder di wilayah Kabupaten Agam dan Limapuluh Kota 1. Camat Palupuh, Camat Pelembayan dan Camat Kapur IX 2. Wali Nagari Nan Tujuh, Tigo Koto Silungkang, Galugur dan Sialang Stakeholder di wilayah Kabupaten Pasaman 1. Camat Bonjol, Camat Duo Koto, Camat Lubuk Sikaping, Camat Mapat Tunggul, Camat Mapat Tunggul Selatan, Camat Padang Gelugur, Camat Panti, Camat Rao, Camat Rao Selatan, Camat Rao Utara, Camat Simpang Alahan Mati dan Camat Tigo Nagari 2. Wali Nagari Ganggo Hilia, Ganggo Mudiak, Koto Kaciak, Limo Koto, Cubadak, Simpang Tonang, Aia Manggih, Durian Tinggi, Jambak, Pauah, Sundata, Tanjung Baringin, Lubuak Gadang, Muara Tais, Pintu Padang, Muaro Sungai Lolo, Silayang, Bahagia Padang Gelugua, Sontang Cubadak, Panti, Panti Selatan, Panti Timur, Padang Mantinggi, Taruang Taruang, Lansek Kadok, Lubuak Layang, Tanjung Betung, Koto Nopan, Koto Rajo, Languang, Alahan Mati, Simpang, dan Malampah Stakeholder di wilayah Kabupaten Pasaman Barat 1. Camat Gunungtuleh, Camat Kinali, Camat Koto Balingka, Camat Lembah Melintang, Camat Luhak Nan Duo, Camat Pasaman, Camat Ranah Batahan, Camat Sungaiaur, Camat Sungaiberemas dan Camat Talamau 2. Wali Nagari Muaro Kiawai, Rabi Jonggor, Katiagan, Kinali, Parit, Ujung Gading, Koto Baru, Aua Kuniang, Lingsuang Aua, Batahan, Sungai Aua, Aia Bangih, Kajai, Sinuruik, dan Talu	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Limapuluh Kota	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Bukik Barisan; Wali Nagari Baruah Gunuang dan Maek Camat Gunuang Omeh; Wali Nagari Koto Tinggi Camat Harau; Wali Nagari Harau Camat Kapur IX; Wali Nagari Durian Tinggi, Galugur, Koto Bangun, Koto Lamo, Lubuak Alai, Muaro Paiti dan Sialang Camat Mungka; Wali Nagari Simpang Kapuak dan Talang Maur Camat Pangkalan Koto Baru; Wali Nagari Gunuang Malintang, Koto Alam, Manggilan, Pangkalan, Tanjung Balik dan Tanjung Pauh	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Agam Raya	
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut:</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Agam Camat Ampek Nagari; Wali Nagari Batu Kambing, Sitalang dan Sitanang Camat Baso; Wali Nagari Padang Tarok, Salo, Simarasok dan Tabek Panjang Camat IV Koto; Wali Nagari Balinka dan Sungai Landia Camat Kamang Magek; Wali Nagari Kamang Hilia dan Kamang Mudiak Camat Lubuk Basung; Wali Nagari Lubuk Basung Camat Malalak; Wali Nagari Malalak Selatan, Malalak Timur dan Malalak Utara Camat Matur; Wali Nagari Lawang, Matua Mudiak dan Panta Pauh Camat Palupuh; Wali Nagari Koto Rantang, Nan Tujuh, Pagadih dan Pasia Laweh Camat Pelembayan; Wali Nagari Ampek Koto Palembang, Baringin, Salareh Aia, Sungai Puar dan Tigo Koto Silungkang Camat Tanjung Raya; Wali Nagari Bayua, Duo Koto, Koto Gadang, Koto Kaciak, Koto Malintang, Maninjau, Paninjauan dan Sungai Batang Camat Tilatang Kamang; Wali Nagari Koto Tengah</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota Camat Akabiluru; Wali Nagari Batuhampar, Durian Gadang, Koto Tengah Batu Ampa, Pauh Sangik, Sariak Laweh, Suayan, Sungai Balantiak, Camat Bukik Barisan; Wali Nagari Maek Camat Gunuang Omeh; Wali Nagari Koto Tinggi dan Pandam Gadang Camat Harau; Wali Nagari Gurun, Harau, Sarilamak, Solok Bio Bio, Taram dan Tarantang Camat Lareh Sago Halaban; Wali Nagari Balai Panjang dan Batu Payuang Camat Mungka; Wali Nagari Simpang Kapuak dan Talang Maur Camat Pangkalan Koto Baru; Wali Nagari Koto Alam Camat Payakumbuh; Wali Nagari Piobang, Sungai Beringin dan Taeh Bukik Camat Suliki; Wali Nagari Kurai dan Suliki</p> <p>Stakeholder di wilayah Kota Payakumbuh Camat Payakumbuh Barat, Camat Payakumbuh Selatan, Lurah Kubu Gadang, Payolansek dan Balai Panjang</p>	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	

	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Bukit Barisan	
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut:</p> <p>Stakeholder di wilayah Kota Padang Camat Bungus Teluk Kabung; Lurah Bungus Barat, Bungus Selatan, Bungus Timur, Teluk Kabung Selatan, Teluk Kabung Tengah dan Teluk Kabung Utara Camat Koto Tengah; Lurah Balai Gadang dan Lubuk Minturun Camat Kuranji; Lurah Gunung Sarik dan Kuranji Camat Lubuk Begalung; Lurah Gates Nan XX, Kampung Jua Nan XX, Pagambiran Ampalu Nan XX dan Pampangan Nan XX Camat Lubuk Kilangan; Lurah Baringin, Batu Gadang, Indarung dan Tarantang Camat Pauh; Lurah Lambung Bukik, Limau Manis dan Limau Manis Selatan</p> <p>Stakeholder di wilayah Kota Padang Panjang Camat Padang Panjang Barat; Lurah Kampung Manggis, Silaing Bawah dan Tanah Hitam Camat Padang Panjang Timur; Lurah Koto Panjang</p> <p>Stakeholder di wilayah Kota Sawahlunto Camat Barangin; Lurah Lumindai Camat Lembah Segar; Lurah Lunto Barat dan Lunto Timur Camat Silungkan; Lurah Taratak Boncah</p> <p>Stakeholder di wilayah Kota Solok Camat Lubuk Sikarah; Lurah Tanah Garam Camat Tanjung Harapan; Lurah Laing</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Camat Lareh Sago Halaban; Wali Nagari Ampalu, Halaban dan Sitanang</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Padang Pariaman Camat 2 X 11 Kayu Tanam; Wali Nagari Anduriang dan Guguak Camat Batang Anai; Wali Nagari Kasang, Sungai Buluah, Sungai Buluah Selatan dan Sungai Buluah Timur Camat Lubuk Alung; Wali Nagari Lubuk Alung dan Pasie Laweh Lubuk Alung Camat Patamuan; Wali Nagari Tandikek Utara Camat V Koto Timur; Wali Nagari Gunung Padang Alai</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Camat Bayang; Wali Nagari Kapujan Koto Berapak dan Kubang Koto Berapak Camat Koto XI Tarusan; Wali Nagari Barung-Barung Balantai, Barung-Barung Balantai Selatan, Barung-Barung Balantai Tengah, Barung-Barung Balantai Timur, Duku, Duku Utara, Kampung Baru Korong Nan Ampek, Mandeh, Setara Nanggalo, Siguntur, Siguntur Tua, Sungai Nyalo Mudiak Aia, Sungai Pinang dan Taratak Sungai Lundang</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Sijunjung Camat Kupitan; Wali Nagari Batu Manjular dan Desa Kampung Baru Camat Sumpur Kudus; Wali Nagari Sumpur Kudus dan Unggan</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Solok Camat IX Koto Sungai Lasi; Wali Nagari Guguak Sarai, Indudur, Koto Laweh, Pianggu dan Siaro-Aro Camat Junjung Sirih; Wali Nagari Paninggahan Camat Kubung; Wali Nagari Gantuang Ciri, Koto Hilalang dan Selayo Camat X Koto Diatas; Wali Nagari Kunciir Camat X Koto Singkarak; Wali Nagari Koto Sani</p>	2023

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
11.1.5.	Sosialisasi target lokasi	Area lokasi target	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
11.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

	Metode Pemantauan	Waktu
	<p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Tanah Datar Camat Batipuah Selatan; Wali Nagari Guguak Malalo dan Padang Laweh Malalo Camat Batipuh; Wali Nagari Batipuah Baruah Camat Lintau Buo; Wali Nagari Pangian dan Tigo Jangko Camat Lintau Buo Utara; Wali Nagari Batu Bulek, Lubuak Jantan, Tanjuang Bonai dan Tapi Selo Camat Sungayang; Wali Nagari Andaleh Baru Bukik, Minang Kabau dan Sungayang Camat Tanjung Emas; Wali Nagari Koto Tengah, Pagaruyung, Saruaso dan Tanjung Barulak Camat X Koto; Wali Nagari Jaho, Singgalang dan Tambangan</p>	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Sijunjung	2023
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat IV Nagari; Wali Nagari Koto Baru dan Mundam Sakti Camat Kamang Baru; Wali Nagari Aie Amo, Kamang, Kunangan Parik Rantang, Lubuk Tarantang, Maloro, Muaro Takuang, Padang Tarok, Siaur, Sungai Batuang, Sungai Lansek, dan Tanjung Kaling. Camat Koto VII; Wali Nagari Padang Laweh Camat Kupitan; Wali Nagari Batu Manjului Camat Lubuak Tarok; Wali Nagari Buluah Kasok, Lalan, Lubuak Tarok dan Silongo Camat Sijunjung; Wali Nagari Aie Angek, Durian Gadang, Muaro, Paru, Sijunjung, Silokek dan Solok Ambah Camat Sumpur Kudus; Wali Nagari Manganti, Silantai, Sisawah, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Tamparungo, Tanjung Bonai Aur, Tanjung Bonai Aur Selatan, Tanjung Labuah dan Unggan. Camat Tanjung Gadang; Wali Nagari Langki, Pulasan, Sibakur, Tanjung Gadang, Tanjung Lolo, Taratak Baru dan Timbulun</p>	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Solok	
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Gunung Talang; Wali Nagari Aie Batumbuak, Batang Barus, Koto Gadang Guguak dan Sungai Janiah Camat Hiliran Gumanti; Wali Nagari Sariak Alahan Tigo, Sungai Abu dan Talang Babungo Camat IX Koto Sungai Lasi; Wali Nagari Siaro-Aro Camat Lembah Gumanti; Wali Nagari Aie Dingin, Salimpat dan Sungai Nanam Camat Lembang Jaya; Wali Nagari Batu Bajanjang Camat Pantai Cermin; Wali Nagari Lolo dan Surian Camat Payung Sekaki; Wali Nagari Aie Luo, Sirukam dan Supayang Camat Tigo Lurah; Wali Nagari Batu Bajanjang, Garabak Data, Rangkiang Luluih, Simanau dan Tanjung Balik Sumiso</p>	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.1.7.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
11.1.8.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	

	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Hulu Batanghari	
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut:</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Dharmasraya Camat Asam Jujuhan; Wali Nagari Lubuk Besar Camat Sembilan Koto; Wali Nagari Banai, Koto Nan Empat Dibawah, Lubuak Karak dan Silago Camat Timpeh; Wali Nagari Panyubarangan dan Timpeh</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Sijunjung Camat Kamang Baru; Wali Nagari Lubuk Tarantang dan Muaro Takuang Stakeholder di wilayah Kabupaten Solok Camat Hiliran Gumanti; Wali Nagari Sungai Abu Camat Pantai Cermin; Wali Nagari Surian Camat Tigo Lurah; Wali Nagari Garabak Data</p> <p>Stakeholder di wilayah Kabupaten Solok Selatan Camat Koto Parik Gadang Diateh; Wali Nagari Pakan Rabaa, Pakan Rabaa Tengah, Pakan Rabaa Timur, Pakan Rabaa Utara Camat Pauh Duo; Wali Nagari Alam Pauh Duo Camat Sangir; Wali Nagari Lubuk Gadang, Lubuk Gadang Selatan, Lubuk Gadang Timur dan Lubuk Gadang Utara Camat Sangir Balai Janggo; Wali Nagari Talao Sungai Kunyit Camat Sangir Batang Hari; Wali Nagari Abai, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah, Ranah Pantai Cermin dan Sitapus Camat Sangir Jujuan; Wali Nagari Lubuk Malako, Padang Air Dingin, Padang Gantiang dan Padang Limau Sundai Camat Sungai Pagu; Wali Nagari Koto Baru, Pasir Talang, Pasir Talang Barat, Pasir Talang Selatan, Pasir Talang Timur dan Pulakek Koto Baru</p>	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Dharmasraya	
	<p>Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut:</p> <p>Camat Pulau Panjang, Wali Nagari Tebing Tinggi Camat Sangir Batang Hari, Wali Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah</p>	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.1.9.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
11.1.10.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan XI)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
11.1.11.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
11.2.	Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan			

	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Pesisir Selatan	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Airpura; Wali Nagari Inderapura Utara dan Lubuk Betung Inderapura Camat Basa Ampek Balai Tapan; Wali Nagari Ampang Tulak Tapan, Bukit Buai Tapan dan Riak Danau Tapan Camat Lengayang; Wali Nagari Lakitan Tengah Camat Linggo Sari Baganti; Wali Nagari Lagan Mudik Punggasan, Padang Xi Punggasan, Punggasan Timur, Rantau Simalenang Air Haji, dan Sungai Sirah Air Haji Camat Lunang; Wali Nagari Lunang, Lunang Tengah, Lunang Utara, Pondok Parian Lunang dan Sindang Lunang Camat Pancung Soal; Wali Nagari Inderapura Selatan dan Tluk Amplu Inderapura Camat Ranah Ampek Hulu Tapan; Wali Nagari Binjai Tapan, Sungai Gambir Sako Tapan dan Tebing Tinggi Tapan Camat Ranah Pesisir; Wali Nagari Pelangai Gadang, Pelangai Kaciak dan Sungai Liku Pelangai Camat Silaut; Wali Nagari Silaut dan Sungai Sirah	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari KaKPHP Mentawai Unit X dan Unit XI	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Siberut Barat Daya; Wali Nagari Katurei dan Pasakiat Taileleu Camat Siberut Selatan; Wali Nagari Muara Siberut Camat Siberut Tengah; Wali Nagari Saibi Samukop Camat Siberut Utara; Wali Nagari Muara Sikabalu Camat Pagai Selatan; Wali Nagari Bulasat, Makalo, Malakopa dan Sinaka Camat Pagai Utara; Wali Nagari Saumanganya dan Silabu Camat Sikakap; Wali Nagari Sikakap dan Taikako Camat Sipora Selatan; Wali Nagari Beriulou, Mara, Nemnemeleu, Saureinu, Sioban Camat Sipora Utara; Wali Nagari Betumonga dan Tuapejat	2023
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala BKSDA Sumatera Barat	2023
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat IV Nagari Bayang Utara; Wali Nagari Muaro Aie dan Pancuang Taba	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.2.1.	Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan [kegiatan]	Jumlah patroli pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan [kegiatan]	1. Jadwal patroli	
			2. Jalur patroli	
			3. Temuan saat patroli	
			4. Jumlah personil yang melakukan patroli	
11.2.2.	Patroli dan Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Jumlah kegiatan patroli dan operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan [kegiatan]	1. Jadwal patroli	
			2. Jalur patroli	
			3. Temuan saat patroli	
			4. Jumlah personil yang melakukan patroli	
11.2.3.	Patroli Pengamanan Hutan Polhut [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	1. Jadwal patroli	
			2. Jalur patroli	
			3. Temuan saat patroli	
			4. Jumlah personil yang melakukan patroli	
11.2.4.	Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	1. Keterlibatan masyarakat nagari	
			2. Jalur patroli	
			3. Temuan saat patroli	
			4. Jumlah personil yang melakukan patroli	
11.2.5.	Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	Jenis-jenis temuan gangguan, ancaman dan tekanan terhadap kawasan hutan	
11.2.6.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	1. Jadwal patroli	
			2. Jalur patroli	
			3. Temuan saat patroli	
			4. Jumlah personil yang melakukan patroli	

	Metode Pemantauan	Waktu
	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kesiapan personil dan kearifan lokal yang masih berkontribusi pada terjadinya deforestasi dan degeradasi kawasan hutan di wilayah KPHL Agam Raya seperti membakar hutan untuk persiapan lahan	2023 ; 2024; 2025;
	Perlu dipantau jalur-jalur patroli dimana hasil temuan diperoleh	2026; 2027;
	Termasuk mengidentifikasi hasil temuan, seperti jenis gangguan, luas areal yang terkena gangguan secara estimasi, titik koordinat lokasi temuan	2028; 2029;
	Tim Brigade yang dapat melibatkan MPA dan Aparat, termasuk stakeholder dari Wali Nagari	2030
	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kesiapan personil dan kearifan lokal yang masih berkontribusi pada terjadinya deforestasi dan degeradasi kawasan hutan di wilayah KPHL Agam Raya seperti membakar hutan untuk persiapan lahan	2023 ; 2024; 2025;
	Perlu dipantau jalur-jalur patroli dimana hasil temuan diperoleh	2026; 2027;
	Termasuk mengidentifikasi hasil temuan, seperti jenis gangguan, luas areal yang terkena gangguan secara estimasi, titik koordinat lokasi temuan	2028; 2029;
	Tim Brigade yang dapat melibatkan MPA dan Aparat, termasuk stakeholder dari Wali Nagari	2030
	Disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat membuka ladang, misalnya bulan Agustus	2023 ;
	Perlu dipantau jalur-jalur patroli dimana hasil temuan diperoleh	2024; 2025;
	Termasuk mengidentifikasi hasil temuan, seperti jenis gangguan, luas areal yang terkena gangguan secara estimasi, titik koordinat lokasi temuan	2026; 2027;
	Tim Brigade yang dapat melibatkan MPA dan Aparat, termasuk stakeholder dari Wali Nagari	2028; 2029; 2030
	Masyarakat yang dilibatkan merupakan tokoh masyarakat dengan sepengetahuan wali nagari	2023 ;
	Perlu dipantau jalur-jalur patroli dimana hasil temuan diperoleh	2024; 2025;
	Termasuk mengidentifikasi hasil temuan, seperti jenis gangguan, luas areal yang terkena gangguan secara estimasi, titik koordinat lokasi temuan	2026; 2027;
	Tim Brigade yang dapat melibatkan MPA dan Aparat, termasuk stakeholder dari Wali Nagari	2028; 2029; 2030
	Hasil temuan dipetakan untuk menindaklanjuti hasil temuan di lapangan dengan aktivitas patroli yang lainnya.	2023 ; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030
	Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, kesiapan personil dan kearifan lokal yang masih berkontribusi pada terjadinya deforestasi dan degeradasi kawasan hutan di wilayah KPHL Pesisir Selatan seperti membakar hutan untuk persiapan lahan	2023 ; 2024; 2025;
	Perlu dipantau jalur-jalur patroli dimana hasil temuan diperoleh	2026; 2027;
	Termasuk mengidentifikasi hasil temuan, seperti jenis gangguan, luas areal yang terkena gangguan secara estimasi, titik koordinat lokasi temuan	2028; 2029;
	Tim Brigade yang dapat melibatkan MPA dan Aparat, termasuk stakeholder dari Wali Nagari	2030

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.2.7.	Pemantauan Titik Api	Berkurangnya titik api	Titik api secara digital maupun secara kasar dilapangan	
11.2.8.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Berkurangnya titik api	Jumlah personil yang siap siaga	
11.2.9.	FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait	Meningkatnya pemahaman para pihak untuk ikut menjaga kawasan hutan pada areal gambut dan ikut membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan	1. Pembentukan Tim Fasilitator FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla	
			2. Rencana teknis FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla	
			3. Data-data kegiatan	
11.3.	Program Pengembangan	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu,	Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	
11.3.1.	Pembangunan Sarpras Wisata	Jumlah sarana dan prasarana wisata yang terbangun [unit]	1. Pembentukan Tim Pembangunan Sarpras Wisata	
			2. Spesifikasi sarana dan prasarana wisata yang diajukan untuk dibangun	
			3. Tenaga lokal yang dilibatkan dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata	

	Metode Pemantauan	Waktu
	Pemantauan selain melalui online citra, juga dilakukan secara kasat mata, misalnya dengan menerbangkan drone dengan jangkauan yang luas	2023 ; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030
	Personil yang melakukan pemadaman api di hutan dipastikan sudah pernah mengikuti smart patrol.	2023 ; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Pesisir Selatan	2023 ; 2024;
	Rencana teknis kegiatan FGD mulai dari waktu, tempat, jumlah peserta, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan	2025; 2026; 2027;
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla	2028; 2029; 2030
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHL Agam Raya	
	Disesuaikan dengan spesifikasi sarana dan prasarana wisata yang tertuang dalam perencanaan	
	Tenaga lokal yang dilibatkan tidak terlepas dari wilayah berikut: Kec. Palupuh [Nagari Koto Rantang, Nan Tujuh, dan Pasia Laweh] Kec. Palembang [Nagari Ampek Koto Palembang, Baringin, Salareh Aia, Sungai Puar, dan Tigo Koto Silungkang] Kec. Tanjung Raya [Nagari Bayua, Duo Koto, Koto Gadang, Koto Kaciak, Koto	
	Malintang, Maninjau, Paninjauan dan Sungai Batang]	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.3.2.	Pemanfaatan HHBK	Jumlah kegiatan dalam pemanfaatan HHBK [kegiatan]	1. Ketersediaan bahan baku HHBK secara lokal	
			2. Ketersediaan SDM lokal yang berkompeten memanfaatkan HHBK	
			3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengembangan HHBK	
			4. <i>Unique Selling Point</i> (USP)	
			5. Pasar HHBK yang dimanfaatkan	
			6. Keterlibatan masyarakat dan UMKM	
			7. Kreatifitas masyarakat	
			8. Kesesuaian perusahaan HHBK dengan peraturan lokal/adat	
			9. Dampak perusahaan HHBK terhadap lingkungan	
11.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat			
11.4.1.	Pengembangan unit percontohan penyuluhan kehutanan	Jumlah unit percontohan penyuluhan kehutanan yang dibangun [unit]	1. Kesesuaian dengan permasalahan yang ada	
			2. Transfer pengetahuan dan teknologi	
11.4.2.	Penyediaan Alat Ekonomi Produktif	Jumlah alat ekonomi produktif yang tersedia [unit]	Ketersediaan sarana pendukung untuk AEP	
11.4.3.	Pengembangan stup	Jumlah lebah madu	Kapasitas penerima	
	lebah madu	yang dikembangkan [stup koloni]	bantuan	
11.4.4.	Pengadaan Bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP)	Adanya peningkatan kapasitas usaha kelompok PS di wilayah KPHP Pesisir Selatan	Ketersediaan sarana pendukung untuk AEP	
11.5.	Program Fasilitasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial			
11.5.1.	Forum/workshop pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah workshop pengembangan perhutanan sosial yang dilaksanakan [kegiatan]	Proses persiapan sebelum dan saat kegiatan dilaksanakan.	
11.5.2.	Fasilitasi usulan perhutanan sosial	Jumlah perhutanan sosial yang difasilitasi [kelompok]	Proses persiapan sebelum dan saat kegiatan dilaksanakan.	

	Metode Pemantauan	Waktu
	Perlu dipantau apakah bahan baku HHBK yang dimanfaatkan tersedia sepanjang tahun ataukah hanya secara musiman saja, atau mungkin dapat diproduksi untuk menjamin keberlanjutan	
	Perlu dipantau siapa saja yang memanfaatkan HHBK di tingkat nagari dan berapa persen SDM lokal yang berkompeten dalam mengolah jenis HHBK yang dimanfaatkan	
	Perlu dipantau apakah aksesibilitas dari dan ke lokasi HHBK yang dimanfaatkan cukup baik ataukah buruk	
	Perlu diidentifikasi apakah HHBK yang dimanfaatkan memiliki keunikan tersendiri dibandingkan jenis HHBK yang lain.	
	Apakah sudah ada permintaan dari HHBK yang dimanfaatkan atau baru sebatas konsumsi rumah tangga saja.	
	Apakah sudah ada UMKM yang mengembangkan HHBK yang dimanfaatkan atau baru sebatas masyarakat kecil saja yang menggunakannya	
	Apakah sudah ada yang mengolah HHBK yang dimanfaatkan ke dalam bentuk produk yang lain, seperti produk turunan	
	Perlu dipantau apakah HHBK yang dimanfaatkan tersebut sifatnya legal untuk dimanfaatkan atau bagaimana kemungkinannya jika diusahakan dalam skala besar.	
	Perlu dipantau apakah perusahaan HHBK pada tingkat yang lebih tinggi dapat merusak lingkungan ataukah tidak	
	Perlu dipantau apakah unit percontohan penyuluhan yang dibangun dapat menjawab permasalahan yang ada di tingkat tapak, misalnya <i>demonstration plot</i> agroforestry dengan 3 lapisan tajuk yang terdiri dari tumbuhan bawah, panaman perdu dan pohon buah.	
	Perlu dipantau apakah unit yang dibangun telah memberikan transfer pengetahuan bagi masyarakat di tingkat tapak dan apakah ada pengembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat lokal	
	Misalnya, perlu dilakukan pengecekan kapasitas listrik yang ada di masyarakat jika akan memberikan bantuan berupa alat atau mesin yang menggunakan daya listrik yang besar. Apakah hal ini akan menjadi hambatan atau tidak bagi si penerima alat.	
	Perlu dipastikan penerima bantuan pengembangan lebah madu telah memiliki stup	
	lebah madu sebelumnya. Sehingga penerima manfaat bertindak sebagai pengembang, bukan pemulai usaha.	
	Misalnya, perlu dilakukan pengecekan kapasitas listrik yang ada di masyarakat jika akan memberikan bantuan berupa alat atau mesin yang menggunakan daya listrik yang besar. Apakah hal ini akan menjadi hambatan atau tidak bagi si penerima alat.	
	-	
	-	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.5.3.	Pendataan penggarap oleh masyarakat	Terkumpulnya data penggarap lahan di wilayah KPHL Pesisir Selatan	Proses persiapan sebelum dan saat kegiatan dilaksanakan.	
11.5.4.	Pengurusan izin perhutanan sosial	Terbitnya izin PS di lokasi R0 11 KPHP Pesisir Selatan	Proses persiapan sebelum dan saat kegiatan dilaksanakan.	
11.5.5.	Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial	Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok PS	Proses persiapan sebelum dan saat kegiatan dilaksanakan.	
11.6.	Program Nursery dan Penanaman Penyulaman			
11.6.1.	Penyemaian bibit dan penamaan [batang]	Terjaganya hutan mangrove	1. Jumlah bibit yang berhasil disemai	
			2. Jumlah bibit yang berhasil ditanam	
			3. Jumlah bibit yang berhasil tumbuh	
			4. Kendala dan gangguan saat persemaian, penanaman dan tumbuh	
11.7.	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
11.7.1.	Penyusunan Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan [RKPS]	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	1. Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial	
			2. Daftar kegiatan rencana pengelolaan	
			3. Target jangka pendek pada setiap kegiatan pengelolaan	
			4. Lokasi prioritas untuk kegiatan pengelolaan jangka pendek	
			5. Alternatif pendanaan kegiatan pengelolaan dan alokasinya	
11.7.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	1. Jenis fasilitas yang dikembangkan	
			2. Jenis hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya	
11.8.	Program Kemitraan Lingkungan			
11.8.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial [orang]	1. Jumlah tenaga pendamping PS yang diajukan	
			2. Frekuensi pengajuan tenaga pendamping PS yang diajukan	
11.8.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	Substansi kemitraan	
11.9.	Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			

	Metode Pemantauan	Waktu
	-	
	-	
	-	
	Laporan pemantauan kegiatan Penyemaian Bibit dan Penamaan Mangrove di Nagari Sinaka seluas 14,24 oleh PT. Minas Pagai Lumber	2023 dan 2024
	Jika di wilayah KPH, maka perlu dilengkapi dengan Surat Tugas KaKPH terkait	
	Jika di wilayah KPH, sebaiknya secara garis besar mengacu pada dokumen RPHJP KPH yang sudah ada atau sudah di sahkan agar perencanaan dapat terintegrasi	
	Target jangka pendek (1 tahun) sebaiknya ditentukan untuk mengetahui kapasitas kinerja lembaga dan capaian pengelolaan	
	Sebaiknya ditentukan lokasi yang dapat memberikan manfaat secara lingkungan, ekonomi dan sosial sekaligus	
	Jika di wilayah KPH, sebaiknya secara garis besar mengacu pada dokumen RPHJP KPH yang sudah ada atau sudah di sahkan agar perencanaan dapat terintegrasi dan memperoleh dukungan pendanaan	
	Fasilitas yang dikembangkan perlu dihitung seberapa besar tingkat manfaat terhadap ekonomi wilayah	
	Pengembangan hasil hutan atau jasa lingkungan dilakukan atas dasar prinsip kelestarian kawasan hutan, peningkatan ekonomi wilayah dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan kawasan hutan	
	Jumlah tenaga PS yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan pendampingan PS di lapangan	
	Frekuensi pengajuan tenaga pendamping PS dalam satu tahun dibandingkan dengan tenaga pendamping PS yang berhasil didatangkan dan melakukan pendampingan di lapangan	
	Durasi perjanjian kerjasama, pemenuhan kewajiban dalam kerjasama, kontrak harga, aspek kelestarian hasil hutan yang dikerjasamakan dan aspek lainnya	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PEMANTAUAN	
			Aspek yang Dipantau	
11.9.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [hektar]	1. Penetapan calon areal PS	
			2. Luas calon areal PS	
			3. Penetapan skema dan calon pengurus PS	
11.9.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [hektar]	1. Pembentukan regu penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS	
			2. Penyusunan rencana teknis jalur penataan batas areal PS	
			3. Persiapan alat, bahan dan logistik	
			4. Peta hasil penataan areal kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS	

Sumber: Analisis Data, 2022

A.12. Rencana Monitoring pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO12]

Aspek yang dipantau pada aksi mitigasi pengelolaan mangrove [RO12] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi target lokasi RO 12 Pengelolaan Mangrove**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Data-data kegiatan

Pada kegiatan **Penyuluhan Kehutanan Terkait Pengelolaan Mangrove**, aspek yang dipantau terdiri dari:

1. Pembentukan Tim Fasilitator Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove
2. Rencana teknis Sosialisasi
3. Materi dan bahan paparan sosialisasi
4. Kuisisioner uji kepeahaman peserta
5. Data-data kegiatan

	Metode Pemantauan	Waktu
	Perlu dipastikan calon areal PS yang diusulkan bebas dari konflik	
	Luas calon areal PS yang diusulkan sebaiknya mampu dikelola oleh calon pengurus	
	Skema PS yang ditetapkan perlu ditinjau dari segi tingkat kemanfaatannya dan pengurus yang diajukan dipastikan merupakan yang berdomisili di area dimana calon area PS ditetapkan	
	area PS ditetapkan	
	Pembentukan regu perlu melibatkan stakeholder lokal dan calon pengurus PS	
	Peta rencana teknis jalur penataan batas perlu dirancang dan dibuat secara partisipatif dengan memperhatikan batas-batas kawasan yang sudah tersedia di lapangan, baik berupa batas alam maupun batas buatan yang sengaja dibuat seperti patok batas.	
	Daftar kebutuhan logistik personil selama proses penataan batas, termasuk blanko Berita Acara Hasil Penataan Batas	
	Peta hasil penataan areal perlu di sosialisasikan untuk menghindari potensi konflik dan memperoleh legitimasi areal PS	

Rencana pemantauan kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi pengelolaan mangrove [RO12] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 194 | Rencana Pemantauan Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi M

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Aspek yang Dipantau	
12.1.1.	Sosialisasi target lokasi R0 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) [kegiatan]	Area lokasi target lokasi R0 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) diketahui masyarakat nagari	1. Pembentukan Tim Fasilitator Sosialisasi	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Data-data kegiatan	
12.1.2.	Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove [kegiatan]	Adanya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove Adanya manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat dari keberadaan hutan mangrove	Pembentukan Tim Fasilitator Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove	
			2. Rencana teknis Sosialisasi	
			3. Materi dan bahan paparan sosialisasi	
			4. Kuisisioner uji kephahaman peserta	
			5. Data-data kegiatan	

Sumber: Analisis Data, 2022

B. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana kegiatan dalam perencanaan dicapai baik dari segi target maupun tujuannya. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang menjadi aspek kunci dalam kegiatan evaluasi.

Pada evaluasi secara reguler pelaporan terhadap pelaksanaan aksi mitigasi perlu dilengkapi dengan dokumentasi lapangan (foto, video, ataupun informasi dari drone) per tahapan kegiatan yang memuat data waktu dan lokasi referensi geografis. Pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi atau pelaporan kerja teknis untuk Indonesia's FOLU Net Sink 2030 ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Rapat persiapan yang dilakukan untuk membahas, menetapkan dan menyepakati kriteria dan indikator yang akan digunakan;
- b) Pelaksanaan yang mencakup pencatatan dan pendataan yang dilakukan oleh

Mitigasi Pengelolaan Mangrove [R012]

PEMANTAUAN		
	Metode Pemantauan	Waktu
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Siberut Tengah; Wali Nagari Saibi Samukop	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	
	Dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala KPHP Mentawai	
	Rencana teknis kegiatan sosialisasi mulai dari waktu, tempat, jumlah personil, termasuk stakeholder tapak yang akan dilibatkan sebagai tamu undangan, tidak terlepas dari stakeholder berikut: Camat Siberut Tengah; Wali Nagari Saibi Samukop	
	Bahasa paparan disesuaikan dengan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat di tingkat tapak	
	Dipersiapkan untuk mengukur tingkat kephahaman masyarakat terkait manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial dari keberadaan ekosistem mangrove di wilayahnya.	
	Termasuk rundown acara, foto-foto kegiatan, catatan diskusi dan Berita Acara kesepakatan jika ada hal-hal yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat	

unit kerja yang bertanggungjawab secara teknis bersama dengan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Kerja terkait;

- c) Rekapitulasi laporan pelaksanaan aksi mitigasi dilakukan oleh unit evaluasi dan pelaporan pada satker yang terkait. Hal ini untuk menjamin bahwa semua pelaksanaan aksi mitigasi dilakukan sesuai rencana dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- d) Evaluasi (*valuing*), dilaksanakan secara periodik dengan memberikan penilaian terhadap keberhasilan capaian atas target kegiatan (*output*) maupun dampak (*outcome*);
- e) Hasil evaluasi disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim cq. Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi apabila dalam pelaporan IGRK tahunan diperlukan telaahan untuk menentukan perlu tidaknya peningkatan atau prioritas pelaksanaan aksi mitigasi yang dilakukan pada tahun berikutnya dengan mempertimbangkan target capaian pengurangan emisi GRK menuju Indonesia's FOLU Net Sink 2030;

- f) Pemantauan aksi mitigasi di sektor FOLU akan diperkuat dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Indikator (NSPK) untuk pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan aksi mitigasi penurunan emisi dari sektor kehutanan dan lahan (FOLU).
- g) Pelaporan dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada Menteri LHK.

B.1. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral [RO1]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral [RO1] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk Mendapatkan Pengesahan**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Rencana kerja yang berhasil di sahkan
2. Kesesuaian dan integrasi rencana kerja dengan rencana kerja pemangku di atasnya
3. Tingkat kesesuaian dokumen RKPS dengan dokumen RPHJP KPH terkait
4. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
5. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
6. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pengembangan Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Jumlah orang yang menerima manfaat fasilitas yang dikembangkan
2. Kuantitas dan kualitas hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya

Pada kegiatan **Pengembangan dan Peningkatan Tenaga Pendamping Perhutanan Sosial**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Progress tindak lanjut usulan pengajuan tenaga pendamping PS
2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
4. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pengembangan Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, aspek yang dievaluasi adalah keterlibatan kelompok dalam pemenuhan kontrak perjanjian kerjasama.

Pada kegiatan **Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
2. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
3. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penetapan Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR Kepada Kelompok Masyarakat**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Luas areal yang telah ditetapkan sebagai PS
2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
4. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pembuatan Batas, Penanaman dan Patroli Rutin**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tren deforestasi tahunan
2. Tingkat kesadaran masyarakat
3. Pola pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar area saaraan FOLU Net Sink 2030
4. Laporan evaluasi kegiatan FOLU Net Sink

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan mineral [RO1] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 195 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
1.1.	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
1.1.1.	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan	Rencana Kerja/ Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan [RKPS]	1. Rencana kerja yang berhasil di sahkan 2. Kesesuaian dan integrasi rencana kerja dengan rencana kerja pemangku di atasnya 3. Tingkat kesesuaian dokumen RKPS dengan dokumen RPHJP KPH terkait 4. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan 5. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan 6. Hambatan dan kendala di lapangan	
1.1.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan [KUPS]	1. Jumlah orang yang menerima manfaat fasilitas yang dikembangkan 2. Kuantitas dan kualitas hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya	
1.2.	Program Kemitraan Lingkungan			
1.2.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial [orang]	1. Progress tindak lanjut usulan pengajuan tenaga pendamping PS 2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan 3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan 4. Hambatan dan kendala di lapangan	
1.2.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	Keterlibatan kelompok dalam pemenuhan kontrak perjanjian kerjasama	
1.3.	Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			

Peningkatan Laju Deforestasi Lahan Mineral [R01]

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Matrik SMART dalam rencana kerja kelompok PS	
	Kegiatan kelompok yang terintegrasi dengan RPHJP KPH dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja KPH juga.	
	Jika 70% kegiatan yang tersusun dalam RKPS sinkron dengan kegiatan KPH atau pemangku wilayah, maka RKPS dinilai sangat baik.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Semakin banyak orang yang terlibat dalam memperoleh manfaat fasilitas yang dikembangkan maka semakin besar tingkat manfaat terhadap ekonomi wilayah	
	Jika kuantitas peningkatan hasil hutan memenuhi prinsip kelestarian, maka peningkatan produktivitas berhasil Jika kuantitas dan kuantitas hasil hutan memenuhi aspek peningkatan ekonomi wilayah, maka peningkatan nilai tambah berhasil	
	<p>Dapat diukur berdasarkan hasil keputusan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, atau dikategorikan dengan skala berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> disetujui tanpa syarat disetujui dengan syarat ditolak on progress pengajuan pengajuan terkendala belum diajukan 	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Perlu dievaluasi seberapa besar perjanjian kerjasama yang dibuat dalam memberikan dukungan dalam peningkatan ekonomi kelompok. Semakin banyak anggota kelompok yang dilibatkan, maka kemitraan tersebut dapat dinilai berhasil dalam memberdayakan masyarakat sekitar.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
	KEGIATAN		Aspek yang Dievaluasi	
1.3.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [hektar]	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK	1. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			2. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			3. Hambatan dan kendala di lapangan	
1.3.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [hektar]	Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	1. Luas areal yang telah ditetapkan sebagai PS	
			2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	
1.4.	Program Pelatihan, Penyuluhan dan Perlindungan			
1.4.1.	Pembuatan batas, penanaman dan patroli rutin [ha]	Laju deforestasi berkurang, masyarakat semakin sadar dan pertanian menetap	1. Tren deforestasi tahunan	
			2. Tingkat kesadaran masyarakat	
			3. Pola pembukaan lahan untuk pertanian di sekitar area saaraan FOLU Net Sink 2030	
			4. Laporan evaluasi kegiatan FOLU Net Sink	

Sumber: Analisis Data, 2022

B.2. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [R02]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pengurangan laju deforestasi lahan gambut di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dievaluasi pada aksi mitigasi ini.

Tabel 196 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut [R02]

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI		
	KEGIATAN		Aspek yang Dievaluasi	Metode Evaluasi	Waktu
2	Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut				
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis Data, 2022

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Disesuaikan dengan analisis spasial Luas spasial setelah dikurangi kondisi pengukuran sangat mungkin memberikan hasil yang berbeda	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Jika hasil analisis Citra dan atau Drone menunjukkan adanya deforestasi, berarti kegiatan tidak efektif	2023-2030 secara triwulan
	Jika sebagian besar persepsi masyarakat terhadap hutan masih tidak ada rasa memiliki, berarti kegiatan belum berhasil.	
	Jika pada saat pembukaan ladang tahunan, terjadi tekanan terhadap area lokasi sasaran FOLU Net Sink yang saat ini dijaga dan dipertahankan keberadaan hutannya, berarti kegiatan belum efektif	
	Laporan evaluasi perlu disusun oleh PBBH a.n. PT. Multikarya Lisun Prima selaku pemegang izin konsesi dan penanggung jawab kegiatan FOLU Net Sink di wilayahnya.	

B.3. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [RO3]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi [RO3] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 3**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi m

Tabel 197 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
3.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi			
3.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 3 di Wilayah KPHL Sijunjung	Area lokasi target lokasi RO3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
3.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 3 di Wilayah KPHP Mentawai	Area lokasi target lokasi RO3 Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

Sumber: Analisis Data, 2022

mitigasi pencegahan degradasi pada area konsesi [R03] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Pencegahan Degradasi pada Area Konsesi [R03]

EVALUASI		Waktu
	Metode Evaluasi	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

B.4. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pembangunan hutan tanaman di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dievaluasi pada aksi mitigasi ini.

Tabel 198 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pembangunan Hutan Tanaman [RO4]

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI		
	KEGIATAN		Aspek yang Dievaluasi	Metode Evaluasi	Waktu
4	Pembangunan Hutan Tanaman				
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis Data, 2022

B.5. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [RO5]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) [RO5] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penyuluhan dan Penanaman**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Keberhasilan kegiatan
2. Ketercapaian target luasan

Pada kegiatan **Penanaman Permudaan Alam**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Keberhasilan kegiatan
2. Ketercapaian target luasan

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi penerapan pengayaan hutan alam (ENR) [RO5] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 199 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Aspek yang Dievaluasi	
5.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR)			
5.1.1.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat keahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
5.1.2.	Sosialisasi target lokasi R0 5 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat keahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan	
			anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

Penerapan Pengayaan Hutan Alam (ENR) [R05]

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>- Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran</p>	
	<p>yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. - Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Aspek yang Dievaluasi	
5.1.3.	Sosialisasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
5.1.4.	Sosialisasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Area lokasi target lokasi R05 Penerapan Pengayaan Hutan Alam di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan	

Sumber: Analisis Data, 2022

B.6. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Penerapan RIL-C [RO6]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi penerapan RIL-C [RO6] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 6 Penerapan RIL-C**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang	

Pada kegiatan **Penanaman dan Pembuatan Guludan**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam
2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh
3. Tingkat erosi tanah di area penanaman

Pada kegiatan **Penerapan RIL-C di Areal Izin PBPH**, aspek yang dievaluasi adalah penilaian kinerja PHPL.

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi penerapan RIL-C [RO6] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 200 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
6.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 6 Penerapan RIL-C			
6.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung	Area lokasi target lokasi RO6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat keahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
6.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat keahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

Penerapan RIL-C [R06]

EVALUASI		Waktu
Metode Evaluasi		
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. - Dinyatakan dalam satuan persen (%). 	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
6.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
6.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Area lokasi target lokasi RO 6 Penerapan RIL-C di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
6.2.	Program Penanaman Tanaman Konservasi			
6.2.1.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2022 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
			3. Tingkat erosi tanah di area penanaman	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Salinan Laporan Evaluasi Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2022 PT. Minas Pagai Lumber</p> <p>Jika tingkat erosi tanah di area penanaman < 1 ton/ha, maka kegiatan dinilai berhasil</p>	2022

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
6.2.2.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2023 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
			3. Tingkat erosi tanah di area penanaman	
6.2.3.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2024 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
			3. Tingkat erosi tanah di area penanaman	
6.2.4.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2025 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
			3. Tingkat erosi tanah di area penanaman	
6.2.5.	Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2026 [batang]	Erosi tanah rendah < 1 ton/ha	1. Jumlah tanaman yang berhasil di tanam	
			2. Jumlah tanaman yang berhasil tumbuh	
			3. Tingkat erosi tanah di area penanaman	
6.3.1.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Minas Pagai Lumber [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	Penilaian kinerja PHPL	
6.3.2.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Multikarya Lisun Prima [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	Penilaian kinerja PHPL	
6.3.3.	Penerapan RIL-C di Areal Izin PT. Salaki Summa Sejahtera [ha]	Implementasi RIL-C pada lokasi sasaran FOLU Net Sink 2030	Penilaian kinerja PHPL	

Sumber: Analisis Data, 2022

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Salinan Laporan Evaluasi Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2023 PT. Minas Pagai Lumber Jika tingkat erosi tanah di area penanaman < 1 ton/ha, maka kegiatan dinilai berhasil	2023
	Salinan Laporan Evaluasi Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2024 PT. Minas Pagai Lumber Jika tingkat erosi tanah di area penanaman < 1 ton/ha, maka kegiatan dinilai berhasil	2024
	Salinan Laporan Evaluasi Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2025 PT. Minas Pagai Lumber Jika tingkat erosi tanah di area penanaman < 1 ton/ha, maka kegiatan dinilai berhasil	2025
	Salinan Laporan Evaluasi Kegiatan Penanaman dan Pembuatan Guludan Tahun RKT 2026 PT. Minas Pagai Lumber Jika tingkat erosi tanah di area penanaman < 1 ton/ha, maka kegiatan dinilai berhasil	2026
	Laporan kegiatan penilaian kinerja PHPL a.n. PT. Minas Pagai Lumber sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu dan Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	2022-2030
	Laporan kegiatan penilaian kinerja PHPL a.n. PT. Multikarya Lisun Prima sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu dan Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	2022-2030
	Laporan kegiatan penilaian kinerja PHPL a.n. PT. Salaki Summa Sejahtera sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu dan Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	2022-2030

B.7. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [RO7]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penanaman Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di Areal Berizin (P-0), Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Areal Berizin, Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin (P-0), Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin (P-0)** dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase tanaman yang tumbuh
2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman
3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman
4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman
5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman
6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
8. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-1 (P-1)** dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase tanaman yang tumbuh
2. Persentase bibit sulaman yang digunakan

3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun
4. Keterlibatan masyarakat lokal
5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
7. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2), Pemeliharaan Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di Luar Areal Berizin Tahun ke-2 (P-2)** dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase tanaman yang tumbuh
2. Persentase bibit sulaman yang digunakan
3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun
4. Keterlibatan masyarakat lokal
5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
7. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL Pola Intensif, Penyusunan Rancangan Kegiatan RHL Pola Semi-Intensif, dan Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL
2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pengolahan Tanah dan Penanaman dan PML Irigasi & Penanaman**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Keberhasilan kegiatan
2. Pemenuhan target

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mit
| Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pening

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.1.	Program Penysadartahuan IFNet 2030 RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi			
7.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kephahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

kegiatan peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7] selengkapnya disajikan pada tabel berikut. **Tabel 201**
Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi [R07]

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
	KEGIATAN		Aspek yang Dievaluasi	
7.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui	1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
		masyarakat nagari [kegiatan]	2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
	KEGIATAN		Aspek yang Dievaluasi	
7.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X & Unit XI)	Area lokasi target lokasi RO 7 Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 7 Peningkatan	Area lokasi target lokasi RO 7	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi	
7.2.	Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Peningkatan Cadangan Karbon Dengan Rotasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang belum dibebani izin konsesi diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.2.	Program Rehabilitasi pada Areal Berizin			

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.2.1.	Penanaman Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin (P-0)	Tertanamnya areal lahan terbuka di dalam areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha [ha]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan	
			rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
7.2.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi intensif di tahun ke-1 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha [hektar]	8. Hambatan dan kendala di lapangan	
			1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
7. Hambatan dan kendala di lapangan				

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema intensif dengan kerapatan 1.100 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 1.100 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 1.100 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 1.100 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	- Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman	
	Jika luas lokasi penanaman < 34,16 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 34,16 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 34,16 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 1.100 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 1.100 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 1.100 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.2.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Intensif 1.100 batang/ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi intensif di tahun ke-2 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 34,16 ha [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.2.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ha di areal berizin	Tertanamnya areal semak belukar di dalam areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: Aie Amo 24,69 ha Padang Tarok 63,34 ha Tanjung Kaliang 69,74 ha [hektar]	Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema semi intensif dengan kerapatan 625 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 157,67 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 157,67 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 157,67 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.2.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi-intensif di tahun ke-1 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: Aie Amo 24,69 ha Padang Tarok 63,34 ha Tanjung Kaling 69,74 ha [hektar]	Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.2.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi-intensif di tahun ke-2 pada areal izin PT. Multikarya Lisun Prima seluas 157,67 ha di lokasi berikut: Aie Amo 24,69 ha Padang Tarok 63,34 ha Tanjung Kaling 69,74 ha [hektar]	Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.	Program Rehabilitasi pada Wilayah di Luar Areal Berizin			

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.1.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin (P-0)	Terehabilitasinya Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.2.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi intensif di Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha pada tahun ke-1 [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema semi intensif dengan kerapatan 625 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka	
	dinilai cukup sesuai - Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 130,44 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 130,44 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 130,44 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.3.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi semi intensif di Blok HP Pemanfaatan HHK-HT dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 130,44 ha pada tahun ke-2 [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.4.	Penanaman Rehabilitasi Semi-Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin (P-0)	Terehabilitasinya areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema semi intensif dengan kerapatan 625 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.5.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-1 (P-1)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha pada tahun ke-1 [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 2.145,34 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 2.145,34 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 2.145,34 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.6.	Pemeliharaan Rehabilitasi Semi- Intensif 625 batang/ ha di luar areal berizin Tahun ke-2 (P-2)	Terpeliharanya tanaman rehabilitasi areal sasaran R07 FOLU Net Sink 2030 dengan tutupan lahan pertanian lahan kering campur seluas 2.145,34 ha pada tahun ke-2 [hektar]	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.7.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif [ha]	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif di areal seluas 27,98 ha	1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL	
			2. Kesesuaian skema penanaman yang	
			digunakan	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat keefektifannya di lokasi penanaman, apakah implementatif atau tidak. Indikatornya adalah dari banyaknya bibit yang berhasil di tanam sesuai dengan yang ada pada rancangan. Jika kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang implementatif. Setiap rancangan teknis dibuat untuk satu atau beberapa petak yang kondisinya sama dan memungkinkan untuk diterapkan rancangan teknis yang sama pada petak yang berbeda karena adanya kesamaan kondisi biofisik dan sosial budaya di sekitar petak lokasi rehabilitasi	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat kesesuaiannya di lokasi penanaman, apakah sesuai atau tidak. Indikatornya adalah dari sebaran bibit yang	
	berhasil di tanam yang sesuai dengan yang ada pada rancangan teknis. Jika kesesuaian sebaran tanam bibit kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang sesuai.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.8.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha pada areal seluas 27,98 ha	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.9.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 1	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema intensif dengan kerapatan 1.100 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 1.100 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 1.100 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 1.100 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 27,98 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 27,98 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 27,98 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 1.100 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 1.100 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 1.100 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.10.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 2	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan	
			dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.11.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL	
			2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.12.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif	Terlaksananya penanaman tanaman	1. Persentase tanaman yang tumbuh	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan	
	berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat keefektifannya di lokasi penanaman, apakah implementatif atau tidak. Indikatornya adalah dari banyaknya bibit yang berhasil di tanam sesuai dengan yang ada pada rancangan. Jika kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang implementatif. Setiap rancangan teknis dibuat untuk satu atau beberapa petak yang kondisinya sama dan memungkinkan untuk diterapkan rancangan teknis yang sama pada petak yang berbeda karena adanya kesamaan kondisi biofisik dan sosial budaya di sekitar petak lokasi rehabilitasi	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat kesesuaiannya di lokasi penanaman, apakah sesuai atau tidak. Indikatornya adalah dari sebaran bibit yang berhasil di tanam yang sesuai dengan yang ada pada rancangan teknis. Jika kesesuaian sebaran tanam bibit kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang sesuai.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	- Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
	(P0)	RHL pola semi-intensif 625 batang/ha pada areal seluas 664,95 ha	2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.13.			Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke-
		1	2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	- Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema semi intensif dengan kerapatan 625 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 664,95 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 664,95 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 664,95 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya	
	20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.14.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 2	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.15.	Penyusunan Rancangan	Tersusunnya	1. Jumlah rancangan	
	kegiatan RHL Pola Agroforestry	Rancangan kegiatan RHL Pola Agroforestry	teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL	
			2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	- Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat keefektifannya di	
	lokasi penanaman, apakah implementatif atau tidak. Indikatornya adalah dari banyaknya bibit yang berhasil di tanam sesuai dengan yang ada pada rancangan. Jika kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang implementatif. - Setiap rancangan teknis dibuat untuk satu atau beberapa petak yang kondisinya sama dan memungkinkan untuk diterapkan rancangan teknis yang sama pada petak yang berbeda karena adanya kesamaan kondisi biofisik dan sosial budaya di sekitar petak lokasi rehabilitasi	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat kesesuaiannya di lokasi penanaman, apakah sesuai atau tidak. Indikatornya adalah dari sebaran bibit yang berhasil di tanam yang sesuai dengan yang ada pada rancangan teknis. Jika kesesuaian sebaran tanam bibit kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang sesuai.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.16.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (P0)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha pada areal seluas 6.133,59 ha	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.3.17.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke-1	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema agroforestry dengan kerapatan 400 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 400 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 400 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 400 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 6.133,59 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 6.133,59 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 6.133,59 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 400 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 400 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 400 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
7.3.18.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 2	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
7.4.	Program Penyediaan Bibit Buah-buahan			
7.4.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	1. Keberhasilan kegiatan	
			2. Pemenuhan target	
7.5.	Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul			
7.5.1.	PML Irigasi & Penanaman [kg]	Peningkatan produksi sawah	1. Keberhasilan kegiatan	
			2. Pemenuhan target	

Sumber: Analisis Data, 2022

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Laporan evaluasi kegiatan pengolahan tanah dan penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2023; 2026; 2027 dan 2028
	Laporan evaluasi kegiatan PML Irigasi & Penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2028

B.8. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [RO8]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon dengan rotasi [RO7] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL
2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (P0)** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase tanaman yang tumbuh
2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman
3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman
4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman
5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman
6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
8. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase tanaman yang tumbuh
2. Persentase bibit sulaman yang digunakan
3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun
4. Keterlibatan masyarakat lokal
5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
7. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)** dan kegiatan lain yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase tanaman yang tumbuh
2. Persentase bibit sulaman yang digunakan
3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun
4. Keterlibatan masyarakat lokal
5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
7. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pengolahan Tanah dan Penanaman** dan **PML Irigasi & Penanaman**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Keberhasilan kegiatan
2. Pemenuhan target

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi peningkatan cadangan karbon tanpa rotasi [RO8] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 202. Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.1.	Program Penyadartahuan IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon tanpa Rotasi			
8.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi [R08]

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
		masyarakat nagari [kegiatan]	2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI	
Metode Evaluasi	Waktu
<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	
<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen(%).</p>	
<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan Unit XI)	Area lokasi target lokasi RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 8 Peningkatan	Area lokasi target lokasi RO 8	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
8.2.	Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi di Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang belum dibebani izin konsesi diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
			Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.	
	Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.2.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Intensif	1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL	
			2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.2.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Intensif (PO)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha pada areal seluas 33,30 ha	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat keefektifannya di lokasi penanaman, apakah implementatif atau tidak. Indikatornya adalah dari banyaknya bibit yang berhasil di tanam sesuai dengan yang ada pada rancangan. Jika kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang implementatif. Setiap rancangan teknis dibuat untuk satu atau beberapa petak yang kondisinya sama dan memungkinkan untuk diterapkan rancangan teknis yang sama pada petak yang berbeda karena adanya kesamaan kondisi biofisik dan sosial budaya di sekitar petak lokasi rehabilitasi	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat kesesuaiannya di lokasi penanaman, apakah sesuai atau tidak. Indikatornya adalah dari sebaran bibit yang berhasil di tanam yang sesuai dengan yang ada pada rancangan teknis. Jika kesesuaian sebaran tanam bibit kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang sesuai.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari skema intensif dengan kerapatan 1.100 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 1.100 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 1.100 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 1.100 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 33,30 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 33,30 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 33,30 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 1.100 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 1.100 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 1.100 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	- Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan - Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.2.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 1	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.2.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola intensif 1.100 batang/ha di tahun ke- 2	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.3.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan			

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. - Dinyatakan dalam satuan persen (%). 	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
Pola Semi-Intensif		

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.3.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	Tersusunnya Rancangan kegiatan RHL Pola Semi-Intensif	1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL	
			2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.3.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Semi-Intensif (PO)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha pada areal seluas 803,27 ha	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat keefektifannya di lokasi penanaman, apakah implementatif atau tidak. Indikatornya adalah dari banyaknya bibit yang berhasil di tanam sesuai dengan yang ada pada rancangan. Jika kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang implementatif. Setiap rancangan teknis dibuat untuk satu atau beberapa petak yang kondisinya sama dan memungkinkan untuk diterapkan rancangan teknis yang sama pada petak yang berbeda karena adanya kesamaan kondisi biofisik dan sosial budaya di sekitar petak lokasi rehabilitasi	
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat kesesuaiannya di lokasi penanaman, apakah sesuai atau tidak. Indikatornya adalah dari sebaran bibit yang berhasil di tanam yang sesuai dengan yang ada pada rancangan teknis. Jika kesesuaian sebaran tanam bibit kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang sesuai.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	- Dihitung dari skema semi intensif dengan kerapatan 625 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 803,27 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 803,27 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 803,27 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 625 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 625 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 625 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.3.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 1	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.3.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Semi-Intensif Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola semi-intensif 625 batang/ha di tahun ke- 2	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.4.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam Rangka IFNet 2030 RO 8 Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi dengan			
8.4.1.	Penyusunan Rancangan kegiatan RHL Pola	Tersusunnya Rancangan kegiatan	1. Jumlah rancangan teknis penanaman yang berhasil disusun dan disahkan sesuai standar BPDASHL	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
Pola Agroforestry		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat keefektifannya di lokasi penanaman, apakah implementatif atau tidak. Indikatornya adalah dari banyaknya bibit yang berhasil di tanam sesuai dengan yang ada pada rancangan. Jika kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang implementatif. - Setiap rancangan teknis dibuat untuk satu atau beberapa petak yang kondisinya sama dan memungkinkan untuk diterapkan rancangan teknis yang sama pada petak yang berbeda karena adanya kesamaan kondisi biofisik dan sosial budaya di sekitar petak lokasi rehabilitasi 	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
			2. Kesesuaian skema penanaman yang digunakan	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.4.2.	Penanaman Tanaman RHL Pola Agroforestry (PO)	Terlaksananya penanaman tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha pada areal seluas 1.253,03 ha	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Kesesuaian kerapatan tanaman menurut skema penanaman	
			3. Kesesuaian lokasi penanaman dengan rencana penanaman	
			4. Kesesuaian luasan penanaman dengan rencana penanaman	
			5. Kesesuaian skema penanaman dengan rencana penanaman	
			6. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			7. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			8. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Rancangan teknis yang berhasil disusun dan disahkan dilihat kesesuaiannya di lokasi penanaman, apakah sesuai atau tidak. Indikatornya adalah dari sebaran bibit yang berhasil di tanam yang sesuai dengan yang ada pada rancangan teknis. Jika kesesuaian sebaran tanam bibit kurang dari 70%, maka rancangan teknis tersebut dinilai kurang baik dan kurang sesuai.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari skema agroforestry dengan kerapatan 400 batang/ha dengan membagi jumlah tanaman yang berhasil hidup dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika kerapatan < dari 400 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika kerapatan = 400 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika kerapatan > dari 400 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dinilai dari petak lokasi penanaman dengan lokasi petak dalam dalam rancangan penanaman Jika lokasi penanaman > 1 km dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai belum sesuai Jika lokasi penanaman < 500 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai cukup sesuai Jika lokasi penanaman < 100 m dari lokasi dalam rancangan penanaman, maka dinilai sangat sesuai	
	- Dinilai dari luas lokasi penanaman dengan luas lokasi petak dalam rancangan penanaman Jika luas lokasi penanaman < 1.253,03 ha, maka dinilai belum sesuai Jika luas lokasi penanaman = 1.253,03 ha, maka dinilai cukup sesuai Jika luas lokasi penanaman > 1.253,03 ha, maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang ditanam dibagi jumlah luasan dalam rancangan penanaman Jika jumlahnya < 400 batang/ha maka dinilai belum sesuai Jika jumlahnya = 400 batang/ha maka dinilai cukup sesuai Jika jumlahnya > 400 batang/ha maka dinilai sangat sesuai	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
8.4.3.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-1 (P1)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 1	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.4.4.	Pemeliharaan Tanaman RHL Pola Agroforestry Tahun ke-2 (P2)	Terlaksananya pemeliharaan tanaman RHL pola Agroforestry 400 batang/ha di tahun ke- 2	1. Persentase tanaman yang tumbuh	
			2. Persentase bibit sulaman yang digunakan	
			3. Frekuensi pemeliharaan dalam setahun	
			4. Keterlibatan masyarakat lokal	
			5. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			6. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			7. Hambatan dan kendala di lapangan	
8.5.	Program Penyediaan Bibit Buah-buahan			
8.5.1.	Pengolahan tanah dan penanaman [batang]	Tidak ada lahan kosong	1. Keberhasilan kegiatan	
			2. Pemenuhan target	
8.6.	Program Penyuluhan dan Pemberian Bibit Unggul			
8.6.1.	PML Irigasi & Penanaman [kg]	Peningkatan produksi sawah	1. Keberhasilan kegiatan	
			2. Pemenuhan target	

Sumber: Analisis Data, 2022

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-1 hanya 20%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-1 (P-1)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dari jumlah tanaman yang hidup dibagi dengan jumlah tanaman yang tertuang dalam rancangan penanaman. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika bibit sulaman habis terpakai, maka kemungkinan besar persentase keberhasilannya kurang dari 70% mengingat alokasi bibit sulaman untuk P-2 hanya 10%.	
	Perlu dicek dokumentasi kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2) untuk membuktikan berapa kali kegiatan pemeliharaan dilakukan dalam setahun dan membuktikan aktivitas pemeliharaan benar-benar dilakukan.	
	Perlu dievaluasi jumlah masyarakat lokal yang diberdayakan dari kegiatan pemeliharaan tahun ke-2 (P-2)	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Laporan evaluasi kegiatan pengolahan tanah dan penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2030
	Laporan evaluasi kegiatan PML Irigasi & Penanaman PT. Minas Pagai Lumber	2029

B.9. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pengelolaan tata air gambut di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dievaluasi pada aksi mitigasi ini.

Tabel 203 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Tata Air Gambut [RO9]

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI		
			Aspek yang Dievaluasi	Metode Evaluasi	Waktu Evaluasi
9	Pengelolaan Tata Air Gambut				
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis Data, 2022

B.10. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]

Berdasarkan analisis tim penyusun, tidak ada arahan untuk implementasi aksi mitigasi pelaksanaan restorasi gambut di Sub Nasional Sumatera Barat. Dengan demikian, tidak ada aspek yang harus dievaluasi pada aksi mitigasi ini.

Tabel 204 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Pelaksanaan Restorasi Gambut [RO10]

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI		
			Aspek yang Dievaluasi	Metode Evaluasi	Waktu Evaluasi
10	Pelaksanaan Restorasi Gambut				
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Analisis Data, 2022

B.11. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [RO11]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi [RO11] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi Target Lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan

4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan, Patroli dan Operasi Pengamanan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan Polhut**, dan kegiatan lainnya yang sejenis, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Efektivitas kegiatan patroli terhadap jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan
2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
4. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Efektivitas kegiatan patroli hutan bersama masyarakat terhadap aktivitas perambahan hutan oleh masyarakat
2. Efektivitas keterlibatan masyarakat dalam patroli
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Operasi Pengamanan Hutan**, aspek yang dievaluasi adalah temuan gangguan hutan. Pada kegiatan **Pemantauan Titik Api**, aspek yang dievaluasi adalah output kegiatan. Pada kegiatan **Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan**, aspek yang dievaluasi adalah durasi kebakaran.

Pada kegiatan **FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Adanya rencana kerja Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait
2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
4. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pembangunan Sarpras Wisata**, aspek yang dievaluasi adalah tingkat kesesuaian sarana dan prasarana wisata yang diajukan dengan yang berhasil dibangun

Pada kegiatan **Pemanfaatan HHBK**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Ketersediaan bahan baku HHBK secara lokal
2. Ketersediaan SDM lokal yang berkompeten memanfaatkan HHBK
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengembangan HHBK
4. *Unique Selling Point* (USP)
5. Pasar HHBK yang dimanfaatkan
6. Keterlibatan masyarakat dan UMKM
7. Kreativitas masyarakat
8. Kesesuaian perusahaan HHBK dengan peraturan lokal/adat
9. Dampak perusahaan HHBK terhadap lingkungan

Pada kegiatan **Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan**, aspek yang dievaluasi adalah keberadaan manfaat baik secara lingkungan, ekonomi dan sosial.

Pada kegiatan **Penyediaan Alat Ekonomi Produktif**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Kapasitas usaha kelompok PS
2. Volume produksi

Pada kegiatan **Pengembangan Stup Lebah Madu**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Kapasitas usaha penerima bantuan stup lebah madu
2. Volume produksi

Pada kegiatan **Penyemaian Bibit dan Penamaan**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Metode persemaian
2. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk Mendapatkan Pengesahan**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Rencana kerja yang berhasil di sahkan
2. Kesesuaian dan integrasi rencana kerja dengan rencana kerja pemangku di atasnya
3. Tingkat kesesuaian dokumen RKPS dengan dokumen RPHJP KPH terkait
4. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
5. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
6. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pengembangan Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Jumlah orang yang menerima manfaat fasilitas yang dikembangkan
2. Kuantitas dan kualitas hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya

Pada kegiatan **Pengembangan dan Peningkatan Tenaga pendamping Perhutanan Sosial**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Progress tindak lanjut usulan pengajuan tenaga pendamping PS
2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
4. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, aspek yang dievaluasi adalah keterlibatan kelompok dalam pemenuhan kontrak perjanjian kerjasama.

Pada kegiatan **Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
2. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
3. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penetapan Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS Skema HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Luas areal yang telah ditetapkan sebagai PS
2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
4. Hambatan dan kendala di lapangan

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi perlindungan areal konservasi tinggi [RO11] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 205 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi Perlindungan Areal Konservasi Tinggi [R011]

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.1.	Program Penyardartahuan IFNet 2030 RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi			
11.1.1.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya (Unit I)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Pasaman Raya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.1.2.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Limapuluh Kota (Unit II)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah Limapuluh Kota diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	2023
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<p>Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada.</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	2023
	<p>Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.</p> <p>Skala Sangat Tinggi: apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi: apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang: apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya]</p> <p>Skala Rendah: apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi</p> <p>Skala Sangat Rendah: apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi</p>	
	<p>Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. - Dinyatakan dalam satuan persen (%). 	
	<p>Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan</p> <p>Dinyatakan dalam satuan persen (%).</p>	
	<p>Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.</p>	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.1.3.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya (Unit III)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Agam Raya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.1.4.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan (Unit IV)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Bukit Barisan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	2023
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	2023
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.1.5.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung (Unit V)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Sijunjung diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.1.6.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok (Unit VI)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Solok	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	2023
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	2023
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.1.7.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari (Unit VII)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHL Hulu Batanghari diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.1.8.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya (Unit VIII)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Dharmasraya diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	2023
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	2023
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.1.9.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan (Unit IX)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Pesisir Selatan diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.1.10.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X dan XI)	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah KPHP Mentawai diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.1.11.	Sosialisasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat	Area lokasi target lokasi RO 11 Perlindungan Areal Konservasi Tinggi di Wilayah BKSDA Sumatera Barat diketahui masyarakat nagari [kegiatan]	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	2023
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	- Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan - Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2023
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	2023
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	2023
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.2.	Program Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan			
11.2.1.	Patroli Pengendalian Kebakaran Hutan [kegiatan]	Jumlah patroli pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan	1. Efektivitas kegiatan patroli terhadap jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan	
			2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.2.2.	Patroli dan Operasi Pengamanan Hutan [kegiatan]	Jumlah kegiatan patroli dan operasi pengamanan hutan yang dilaksanakan	1. Efektivitas kegiatan patroli terhadap jumlah kasus gangguan hutan	
			2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.2.3.	Patroli Pengamanan	Berkurangnya laju	1. Efektivitas kegiatan patroli polhut terhadap jumlah temuan kasus perambahan hutan untuk kebun sawit	
			2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dengan membagi antara jumlah kasus temuan kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah kegiatan patroli yang dilakukan dikali 100% Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dihitung dengan membagi antara jumlah kasus temuan gangguan hutan dengan jumlah kegiatan patroli yang dilakukan dikali 100% Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	- Dihitung dengan membagi antara jumlah kasus perambahan hutan untuk kebun sawit dengan jumlah kegiatan patroli polhut yang dilakukan dikali 100% - Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2023,
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.2.4.	Patroli Pengamanan Hutan Bersama Masyarakat [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	1. Efektivitas kegiatan patroli hutan bersama masyarakat terhadap aktivitas perambahan hutan oleh masyarakat	
			2. Efektivitas keterlibatan masyarakat dalam patroli	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.2.5.	Operasi Pengaman Hutan [kegiatan]	Berkurangnya laju perambahan hutan baru untuk kebun sawit	Temuan gangguan hutan	
11.2.6.	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	1. Efektivitas kegiatan patroli terhadap jumlah kasus kebakaran hutan dan lahan	
			2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.2.7.	Pemantauan Titik Api [kegiatan]	Berkurangnya titik api	Output kegiatan	
11.2.8.	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan [kegiatan]	Berkurangnya titik api	Durasi kebakaran	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dengan membagi antara jumlah kasus perambahan kawasan hutan dengan jumlah kegiatan patroli hutan bersama masyarakat yang dilakukan dikali 100% Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Jika dengan melibatkan masyarakat perambahan kebun sawit menjadi menurun, maka kegiatan dinilai efektif.	2023, 2024, 2025,
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2026, 2027, 2028,
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2029, 2030
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Jika temuan kasus gangguan hutan tren-nya menurun berarti kegiatan berjalan efektif.	2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
	Dihitung dengan membagi antara jumlah kasus temuan kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah kegiatan patroli yang dilakukan dikali 100% Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2023, 2024,
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2025, 2026, 2027,
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2028, 2029, 2030
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dibandingkan dengan jumlah titik api pada saat sebelum dilakukan pemantauan dan setelah dilakukan pemantauan. Jika tren-nya menurun, berarti pemantauan dianggap efektif.	2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030
	Jika waktu pemadaman api di lokasi kebakaran dapat lebih cepat dipadamkan dibandingkan dengan mengandalkan curah hujan dan pemadaman alami, maka kegiatan pemadaman dinilai efektif.	2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.2.9.	FGD Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait [kegiatan]	Meningkatnya pemahaman para pihak untuk ikut menjaga kawasan hutan pada areal gambut dan ikut membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan	1. Adanya rencana kerja Pengamanan Hutan dan Karhutla bersama Stakeholder Terkait	
			2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.3.	Program Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			
11.3.1.	Pembangunan Sarpras Wisata [unit]	Jumlah sarana dan prasarana wisata yang terbangun	Tingkat kesesuaian sarana dan prasarana wisata yang diajukan dengan yang berhasil dibangun	
11.3.2.	Pemanfaatan HHBK [kegiatan]	Jumlah kegiatan dalam pemanfaatan HHBK	1. Ketersediaan bahan baku HHBK secara lokal	
			2. Ketersediaan SDM lokal yang berkompeten memanfaatkan HHBK	
			3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengembangan HHBK	
			4. <i>Unique Selling Point</i> (USP)	
			5. Pasar HHBK yang dimanfaatkan	
			6. Keterlibatan masyarakat dan UMKM	
			7. Kreatifitas masyarakat	
			8. Kesesuaian perusahaan HHBK dengan peraturan lokal/adat	
			9. Dampak perusahaan HHBK terhadap lingkungan	
11.4.	Program Pemberdayaan Masyarakat			
11.4.1.	Pengembangan unit percontohan penyuluhan kehutanan	Jumlah unit percontohan penyuluhan kehutanan yang dibangun [unit]	Keberadaan manfaat baik secara lingkungan, ekonomi dan sosial	
11.4.2.	Penyediaan Alat Ekonomi Produktif	Jumlah alat ekonomi produktif yang tersedia [unit]	Kapasitas usaha kelompok PS	
			Volume produksi	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Salinan rencana kerja dimasukkan ke dalam data base KPHL Pesisir Selatan untuk diintegrasikan ke dalam perencanaan pendampingan di tahun-tahun berikutnya.	2023, 2024,
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2025, 2026, 2027, 2028,
	- Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan - Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2029, 2030
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Dapat diukur berdasarkan review dan penilaian KaKPH dengan skala kategori seperti: sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai	
	HHBK layak untuk dijadikan skala bisnis jika ketersediaan bahan baku lokal lebih dari 50% dan tidak	
	Jika terdapat 50% masyarakat berkompeten dalam memanfaatkan HHBK, maka patut diperhitungkan untuk skala bisnis	
	HHBK menjadi layak untuk dikembangkan jika aksesibilitas dari dan ke lokasi kawasan tempat lokasi pengembangan HHBK sangat baik dan ditunjang dengan prasarana lainnya seperti energi, listrik dan air.	
	HHBK akan sangat bernilai jika memiliki keunikan dan perbedaan dibandingkan dengan HHBK sejenis dari wilayah lain	
	Jika HHBK memiliki prospek untuk jangkauan pasar nasional, maka layak untuk dikembangkan	
	Jika dengan pemanfaatan skala bisnis dapat melibatkan kontribusi masyarakat yang lebih banyak, maka sudah layak untuk dikembangkan	
	Jika jumlah produk turunan dari HHBK yang dimanfaatkan lebih dari 3 jenis, maka layak untuk dikembangkan dalam skala bisnis	
	Jika belum ada regulasi terkait dengan HHBK yang dimanfaatkan, maka hal ini merupakan peluang besar untuk pengembangan lebih lanjut	
	Jika dampak terhadap lingkungan dinilai negatif, maka perlu dilakukan tinjauan secara menyeluruh untuk kelayakan lokasi. Namun, jika dampaknya masih dapat diatasi, maka HHBK tersebut sudah layak untuk dapat dikembangkan di tingkat nagari.	
	Perlu dievaluasi terkait aspek manfaat baik secara lingkungan, ekonomi maupun sosial dari keberadaan unit percontohan penyuluhan kehutanan yang dibangun.	
	Kapasitas usaha dibandingkan saat sebelum diberikan bantuan dan setelah diberikan bantuan alat, misalnya dari pendapatan dan atau penjualan produk	
	Volume produksi dibandingkan saat sebelum diberikan bantuan dan setelah diberikan bantuan alat	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.4.3.	Pengembangan stup lebah madu	Jumlah lebah madu yang dikembangkan [stup koloni]	Kapasitas usaha penerima bantuan stup lebah madu	
			Volume produksi	
11.4.4.	Pengadaan Bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP)	Adanya peningkatan kapasitas usaha kelompok PS di wilayah KPHP Pesisir Selatan	Kapasitas usaha kelompok PS	
			Volume produksi	
11.5.	Program Fasilitasi dan Pendampingan Perhutanan Sosial			
11.5.1.	Forum/workshop pengembangan usaha perhutanan sosial	Jumlah workshop pengembangan perhutanan sosial yang dilaksanakan [kegiatan]	Kesesuaian target pada indikator kegiatan dengan capaian kegiatan	
11.5.2.	Fasilitasi usulan perhutanan sosial	Jumlah perhutanan sosial yang difasilitasi [kelompok]	Kesesuaian target pada indikator kegiatan dengan capaian kegiatan	
11.5.3.	Pendataan penggarap oleh masyarakat	Terkumpulnya data penggarap lahan di wilayah KPHL Pesisir Selatan	Kesesuaian target pada indikator kegiatan dengan capaian kegiatan	
11.5.4.	Pengusulan izin perhutanan sosial	Terbitnya izin PS di lokasi RO 11 KPHP Pesisir Selatan	Kesesuaian target pada indikator kegiatan dengan capaian kegiatan	
11.5.5.	Penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial	Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok PS	Kesesuaian target pada indikator kegiatan dengan capaian kegiatan	
11.6.	Program Nursery dan Penanaman Penyulaman			
11.6.1.	Penyemaian bibit dan penamaan [batang]	Terjaganya hutan mangrove	1. Metode persemaian	
			2. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.7.	Program Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat			
11.7.1.	Penyusunan Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial untuk mendapatkan pengesahan [RKPS]	Rencana Kerja/Pengelolaan Kelompok Perhutanan Sosial yang Disahkan	1. Rencana kerja yang berhasil di sahkan	
			2. Kesesuaian dan integrasi rencana kerja dengan rencana kerja pemangku di atasnya	
			3. Tingkat kesesuaian dokumen RKPS dengan dokumen RPHJP KPH terkait	
			4. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			5. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			6. Hambatan dan kendala di lapangan	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Kapasitas usaha dibandingkan saat sebelum diberikan bantuan dan setelah diberikan bantuan stup madu, misalnya dari pendapatan usaha lebah madu dan atau penjualan produk madunya	
	Volume produksi madu dibandingkan saat sebelum diberikan bantuan dan setelah diberikan pengembangan stup lebah madu	
	Kapasitas usaha dibandingkan saat sebelum diberikan bantuan dan setelah diberikan bantuan alat, misalnya dari pendapatan dan atau penjualan produk	
	Volume produksi dibandingkan saat sebelum diberikan bantuan dan setelah diberikan bantuan alat	
	-	2023-2030
	-	2024-2030
	-	2024
	-	2024 dan 2025
	-	2023-2030
	Laporan evaluasi kegiatan Penyemaian Bibit dan Penamaan Mangrove di Nagari Sinaka seluas 14,24 oleh PT. Minas Pagai Lumber	2023 dan 2024
	Matrik SMART dalam rencana kerja kelompok PS	2023-2030
	Kegiatan kelompok yang terintegrasi dengan RPHJP KPH dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja KPH juga.	
	Jika 70% kegiatan yang tersusun dalam RKPS sinkron dengan kegiatan KPH atau pemangku wilayah, maka RKPS dinilai sangat baik.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
11.7.2.	Pengembangan fasilitas peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil hutan dan jasa lingkungan [KUPS]	Fasilitas Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	1. Jumlah orang yang menerima manfaat fasilitas yang dikembangkan 2. Kuantitas dan kualitas hasil hutan dan atau jasa lingkungan yang ditingkatkan nilai tambahnya	
11.8.	Program Kemitraan Lingkungan			
11.8.1.	Pengembangan dan peningkatan tenaga pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah tenaga pendamping perhutanan sosial [orang]	1. Progress tindak lanjut usulan pengajuan tenaga pendamping PS 2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan 3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan 4. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.8.2.	Pengembangan kemitraan kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Kemitraan Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan [PKS]	Keterlibatan kelompok dalam pemenuhan kontrak perjanjian kerjasama	
11.9.	Program Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
11.9.1.	Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK	Luas Prakondisi Persetujuan PS dalam Skema HD, HKm, HTR, KK [hektar]	1. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan 2. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan 3. Hambatan dan kendala di lapangan	
11.9.2.	Penetapan kawasan hutan yang memperoleh persetujuan PS Skema	Luas Kawasan Hutan yang Memperoleh Persetujuan PS	1. Luas areal yang telah ditetapkan sebagai PS	

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Semakin banyak orang yang terlibat dalam memperoleh manfaat fasilitas yang dikembangkan maka semakin besar tingkat manfaat terhadap ekonomi wilayah	
	Jika kuantitas peningkatan hasil hutan memenuhi prinsip kelestarian, maka peningkatan produktivitas berhasil Jika kuantitas dan kuantitas hasil hutan memenuhi aspek peningkatan ekonomi wilayah, maka peningkatan nilai tambah berhasil	2023-2030
	Dapat diukur berdasarkan hasil keputusan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, atau dikategorikan dengan skala berikut: disetujui tanpa syarat disetujui dengan syarat ditolak on progress pengajuan pengajuan terkendala belum diajukan	2023-2030
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Perlu dievaluasi seberapa besar perjanjian kerjasama yang dibuat dalam memberikan dukungan dalam peningkatan ekonomi kelompok. Semakin banyak anggota kelompok yang dilibatkan, maka kemitraan tersebut dapat dinilai berhasil dalam memberdayakan masyarakat sekitar.	2023-2030
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	2024
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	
	Disesuaikan dengan analisis spasial Luas spasial setelah dikurangi kondisi pengukuran sangat mungkin memberikan hasil yang berbeda	2024

NO	STRATEGI/PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
			Aspek yang Dievaluasi	
	HD, HKm, Kemitraan Kehutanan, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat	Skema HD, HKm, KK, dan HTR kepada Kelompok Masyarakat [hektar]	2. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			3. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			4. Hambatan dan kendala di lapangan	

Sumber: Analisis Data, 2022

B.12. Rencana Evaluasi pada Aksi Mitigasi Pengelolaan Mangrove [RO12]

Aspek yang dievaluasi pada aksi mitigasi pengelolaan mangrove [RO12] adalah sebagai berikut:

Pada kegiatan **Sosialisasi target lokasi RO 12 Pengelolaan Mangrove**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi
2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi
3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
5. Hambatan dan kendala di lapangan

Pada kegiatan **Penyuluhan Kehutanan Terkait Pengelolaan Mangrove**, aspek yang dievaluasi terdiri dari:

1. Tingkat pemahaman masyarakat di lokasi penyuluhan terhadap pengelolaan mangrove
2. Tekanan dan ancaman terhadap hutan mangrove di sekitar nagari setelah dilakukannya penyuluhan
3. Analisis persepsi dan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial hutan mangrove
4. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan
5. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan
6. Hambatan dan kendala di lapangan

Rencana evaluasi kegiatan implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada aksi mitigasi pengelolaan mangrove [RO12] selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen (%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	

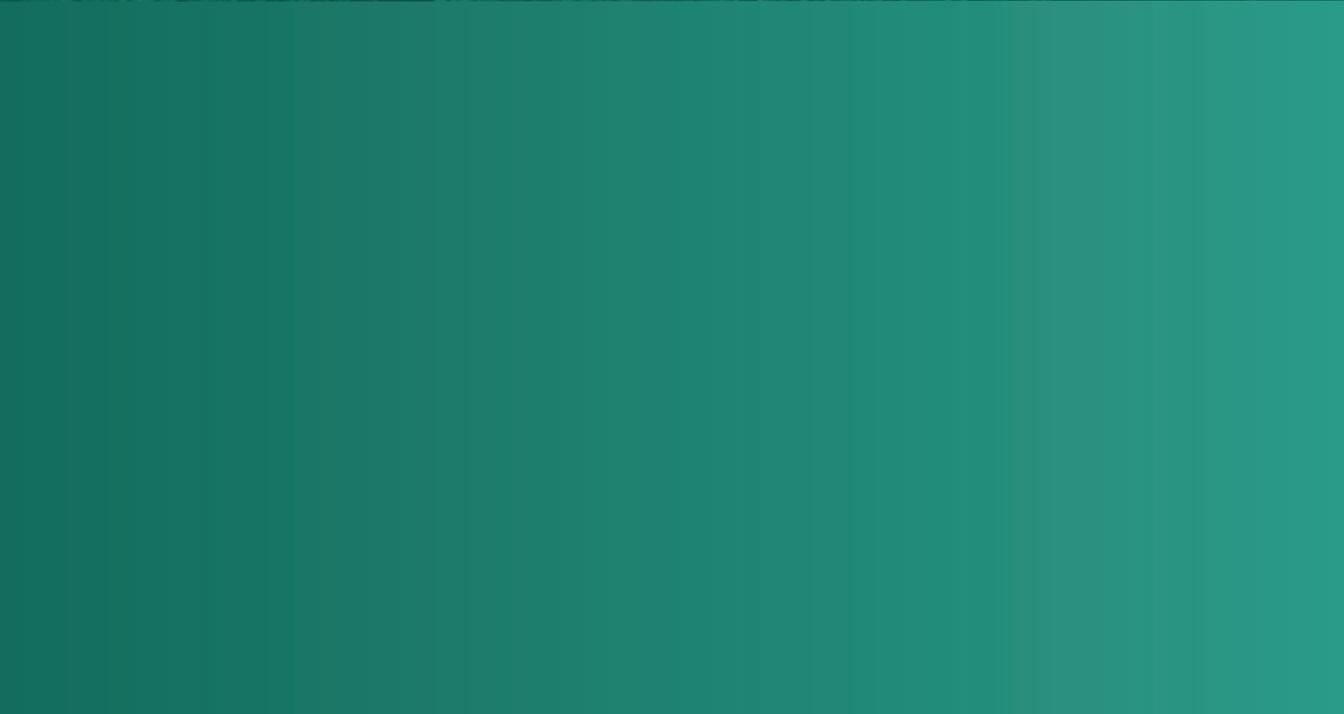
Tabel 206 | Rencana Evaluasi Kegiatan Implementasi FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat pada Aksi Mitigasi

NO	STRATEGI/PROGRAM/	INDIKATOR KINERJA	EVALUASI	
	KEGIATAN		Aspek yang Dievaluasi	
12.1.1.	Sosialisasi target lokasi R0 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) [kegiatan]	Area lokasi target lokasi R0 12 Pengelolaan Mangrove di Wilayah KPHP Mentawai (Unit X) diketahui masyarakat nagari	1. Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap aksi mitigasi	
			2. Tingkat dukungan stakeholder dan masyarakat di lokasi sosialisasi terhadap agenda aksi mitigasi	
			3. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			4. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			5. Hambatan dan kendala di lapangan	
12.1.1.	Penyuluhan kehutanan terkait pengelolaan mangrove [kegiatan]	Adanya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove Adanya manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat dari keberadaan hutan mangrove	Tingkat kepehaman masyarakat di lokasi penyuluhan terhadap pengelolaan mangrove	
			2. Tekanan dan ancaman terhadap hutan mangrove di sekitar nagari setelah dilakukannya penyuluhan	
			3. Analisis persepsi dan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial hutan mangrove	
			4. Persentase serapan anggaran yang digunakan untuk kegiatan	
			5. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan perencanaan	
			6. Hambatan dan kendala di lapangan	

Sumber: Analisis Data, 2022

asi Pengelolaan Mangrove [R012]

EVALUASI		
	Metode Evaluasi	Waktu Evaluasi
	Dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	2023
	Evaluasi dapat diukur dari jumlah undangan yang hadir dengan jumlah peserta yang diundang dan dikalikan 100%. Tingkat dukungan dikategorikan dengan skala berikut: 0-25% [tidak mendukung]; 26-50% [kurang mendukung]; 51-75% [cukup mendukung] dan 76-100% [sangat mendukung].	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	2024
	Peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dapat diukur berdasarkan analisis dengan skala Lickert seperti: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Skala Sangat Tinggi : apabila waktu diskusi melebihi waktu yang ditargetkan Skala Tinggi : apabila peserta yang interaktif lebih dari 3 sesi [ada sesi tambahan] Skala Sedang : apabila peserta yang interaktif sebanyak 3 sesi [9 penanya] Skala Rendah : apabila jumlah peserta yang interaktif kurang dari 3 sesi Skala Sangat Rendah : apabila tidak ada peserta yang bertanya dan tidak ada diskusi	
	Jika 0 kasus ancaman terjadi, maka penyuluhan berhasil Jika masih terjadi kasus, maka kegiatan penyuluhan belum berhasil dan perlu dilakukan di tahun berikutnya.	
	Jika sebagian besar masyarakat merasa mendapatkan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial dari keberadaan hutan mangrove, maka penyuluhan berhasil. Jika sebagian besar masyarakat tidak merasa mendapatkan manfaat apa pun dari hutan mangrove, maka kegiatan penyuluhan belum berhasil.	
	Dihitung dari jumlah alokasi anggaran yang tertulis dalam perencanaan, anggaran yang digunakan dalam kegiatan, dan sisa anggaran jika ada. Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Dihitung dari rencana detail perencanaan dibandingkan dengan penggunaan real kegiatan Dinyatakan dalam satuan persen(%).	
	Disebutkan jenis-jenis hambatan dan kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, termasuk kendala jika kegiatan tidak dapat dilakukan atau direalisasikan.	



BAB 06



PENUTUP

BAB VI | PENUTUP

Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat Tahun 2022-2030 ini merupakan pedoman dan arahan pelaksanaan agenda Indonesia's FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Sumatera Barat dalam jangka panjang hingga tahun 2030 (8 tahun). Pelaksanaan dan penjabaran lebih lanjut dari rencana implementasi ini perlu dipantau pencapaiannya agar tetap konsisten sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

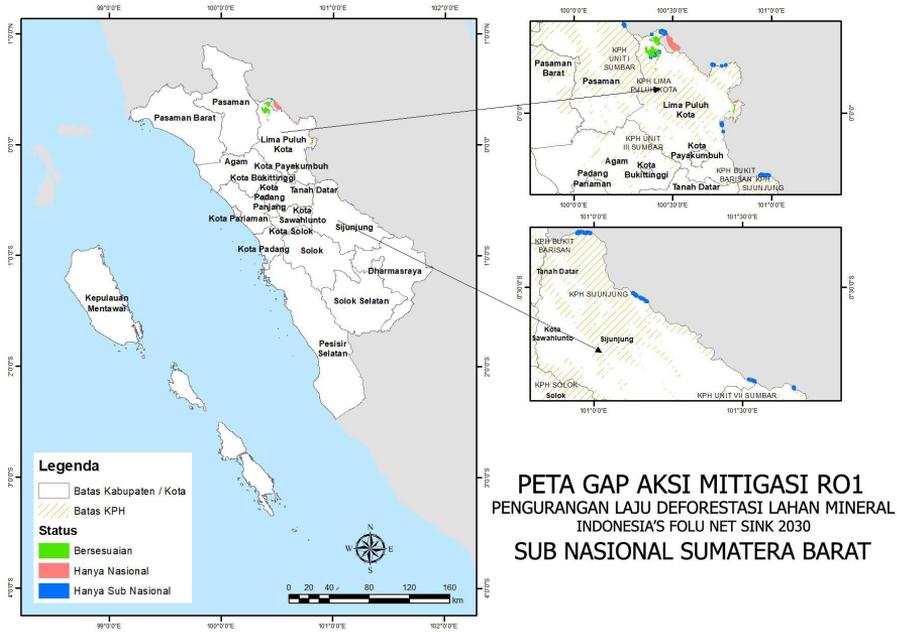
Disadari pula bahwa dalam melakukan perencanaan ini masih sulit memprediksi dinamika yang mungkin terjadi baik dari sisi teknis, kebijakan, maupun politis. Oleh karena itu, dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat Tahun 2022-2030 ini amat terbuka untuk direviu agar dapat sinkron dan tetap bersinergi dengan kebijakan-kebijakan lain, khususnya dengan kepentingan banyak pihak. Selama dapat memberikan pengaruh dan dampak yang lebih baik untuk pembangunan kehutanan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, kontribusi dari sektor *Other Land Use* sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Sebagai pelengkap, pendukung, dan implementasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan, dokumen Rencana Kerja Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Sumatera Barat Tahun 2022-2030 ini dilengkapi dengan data dan informasi spasial berupa peta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

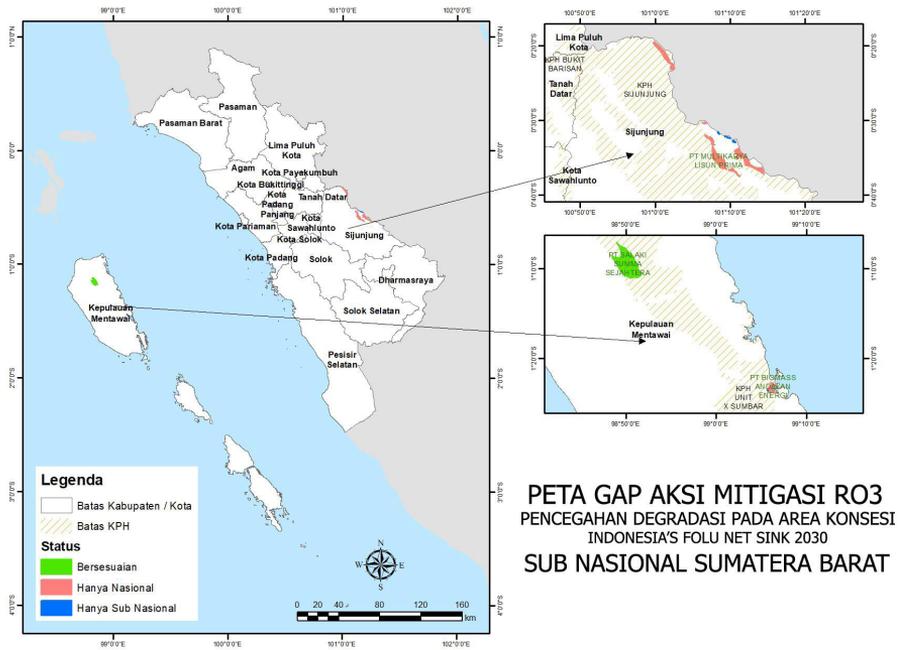
DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. *Kebakaran hutan dan lahan di berbagai negara tahun 2020 diprediksi jadi yang terburuk selama 18 tahun terakhir, bagaimana di Indonesia?* September 18, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196002>.
- Butarbutar, Tigor. "Sistem Silvikultur Tebang Pilih untuk Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Kerangka REDD+." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 2014: Vol. 11, No. 2: 163-173.
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. FORCLIME. Agustus 31, 2018. <https://www.forclime.org/index.php/id/aktivitas-dan-pencapaian/952-mendukung-mekanisme-pendanaan-hijau> (diakses tanggal 12 Oktober 2022).
- El-Fattah, Hirata. *Illegal Logging di Negara Hutan Tropis (Indonesia)*. Juni 25, 2015. <https://www.kompasiana.com/el-fattah/5509ce5f813311775db1e3b7/illegal-logging-di-negara-hutan-tropis-indonesia>.
- FWI. *Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2001.
- Ilham, Qori Pebrial. "Model Pengelolaan Hutan Multipihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Studi Kasus KPHL Solok, Sumatera Barat)." *Tesis*, 2016: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. *Rencana Operasional Indonesia FOLU Net Sink 2030*. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). *Peta Jalan Implementasi Nationally Determined Contribution Mitigasi*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rochmayanto, Yanto, Ari Wibowo, Mega Lugina, Tigor Butarbutar, RM Mulyadin, and Dony Wicaksono. *Cadangan Karbon pada Berbagai Tipe Hutan dan Jenis Tanaman di Indonesia (Seri 2)*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2014.
- Septyan, Ananda Rizky. *Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum*. Mei 7, 2019. <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>.
- Sitepu, Bina Swasta. "Regenerasi Alami pada Areal Restorasi Lahan Gambut di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah." *Prosiding Seminar Nasional II 2016: Biologi, Pembelajaran, dan Lingkungan Hidup Perspektif Interdisipliner*. Malang: Pusat Studi Lingkungan dan Kependidikan, UMM Press, 2016. 588-594.

LAMPIRAN PETA-PETA



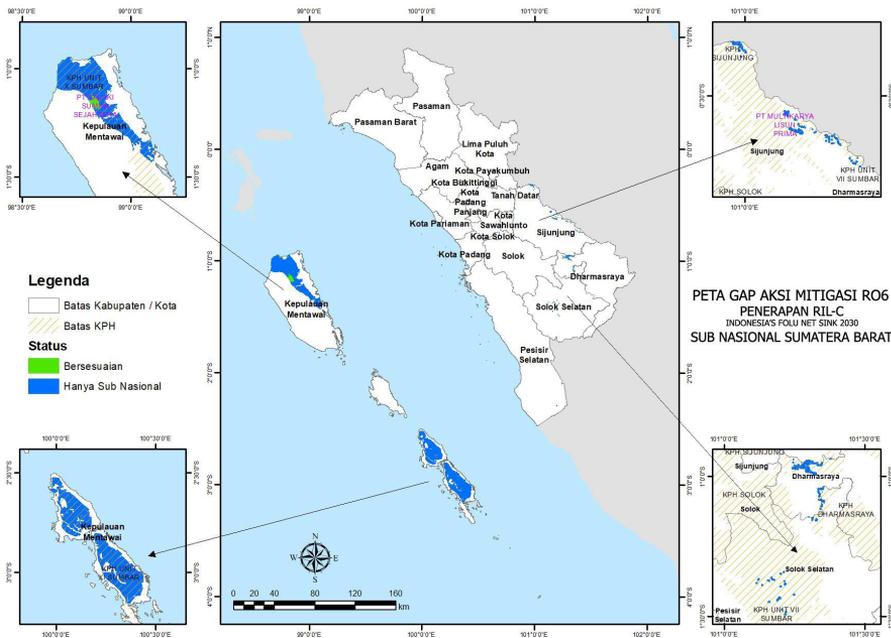
Lampiran 1 | Peta Gap R01 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional



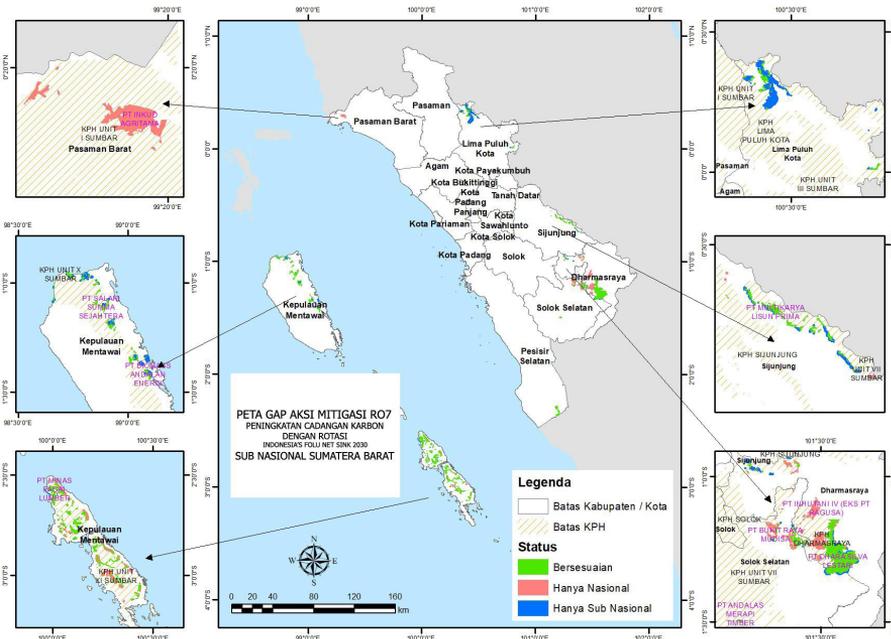
Lampiran 2 | Peta Gap R03 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional



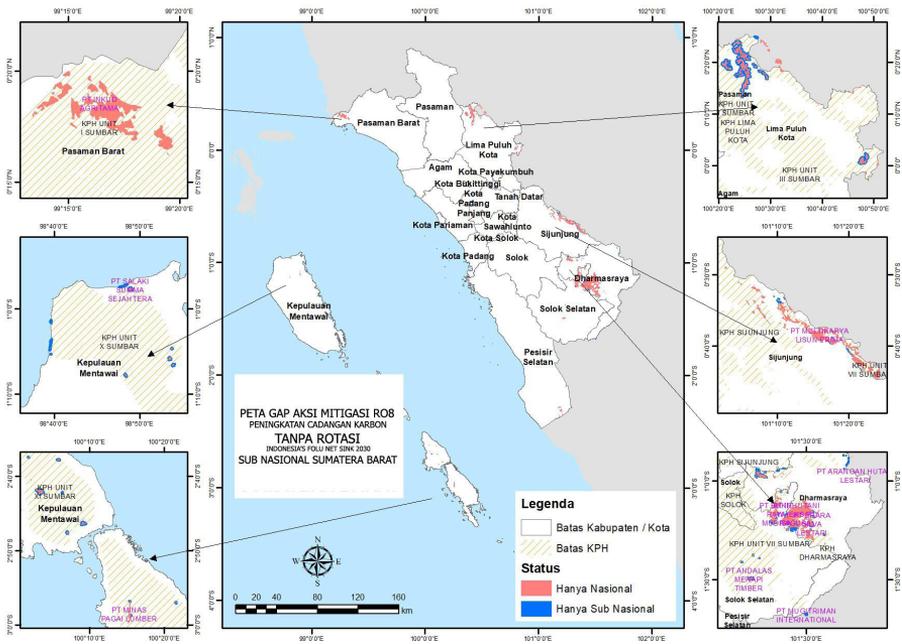
Lampiran 3 | Peta Gap R05 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional



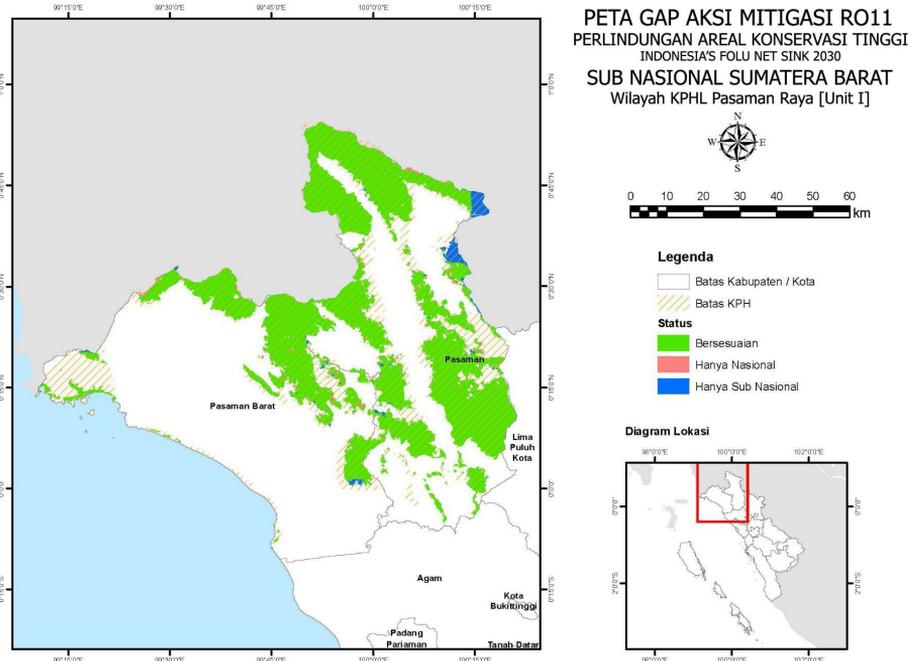
Lampiran 4 | Peta Gap R06 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional



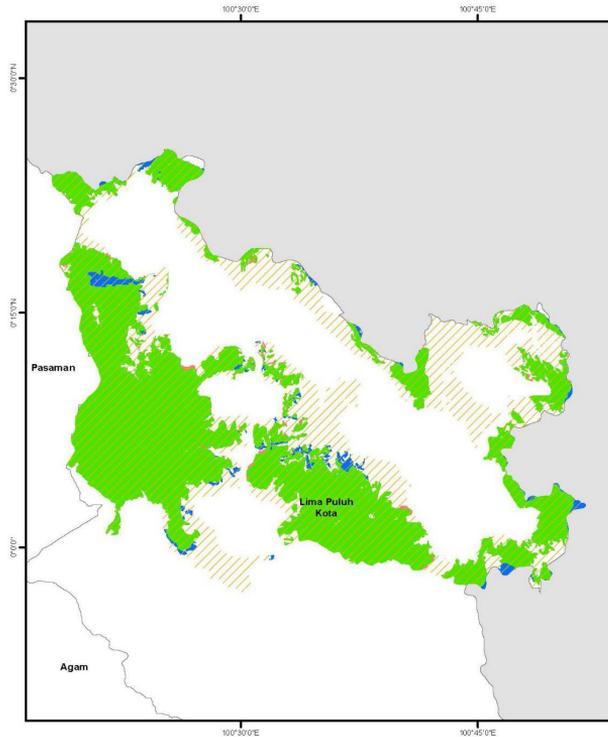
Lampiran 5 | Peta Gap R07 Arahan Nasional dengan Arahan Sub-Nasional



Lampiran 6 | Peta Gap R08 Arah Nasional dengan Arah Sub-Nasional



Lampiran 7 | Peta Gap R011 Arah Nasional dengan Arah Sub-Nasional



PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHL Limapuluh Kota [Unit II]



Legenda

□ Batas Kabupaten / Kota

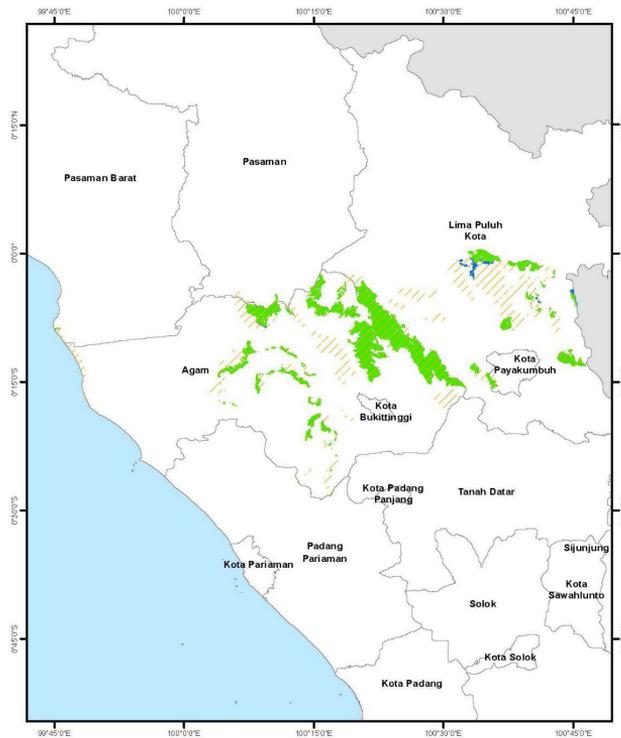
▨ Batas KPH

■ Bersesuaian

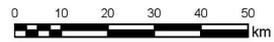
■ Hanya Nasional

■ Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi



PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHL Agam Raya [Unit III]



Legenda

□ Batas Kabupaten / Kota

▨ Batas KPH

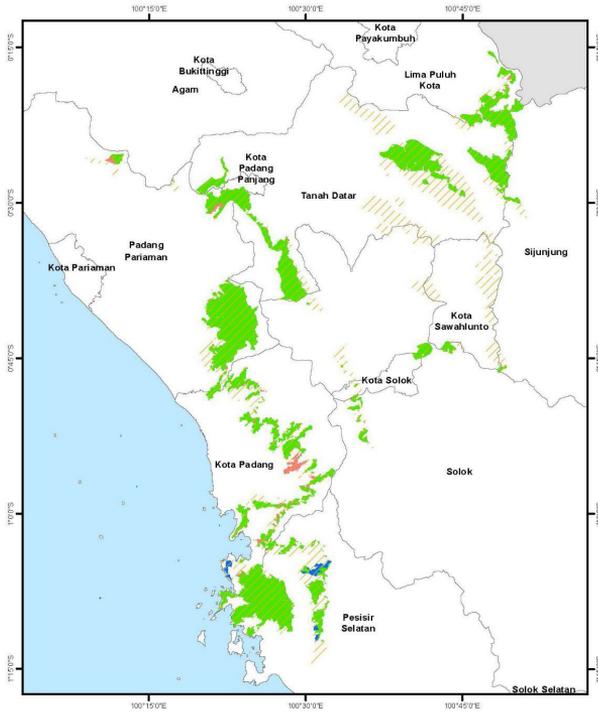
■ Bersesuaian

■ Hanya Nasional

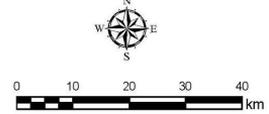
■ Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi





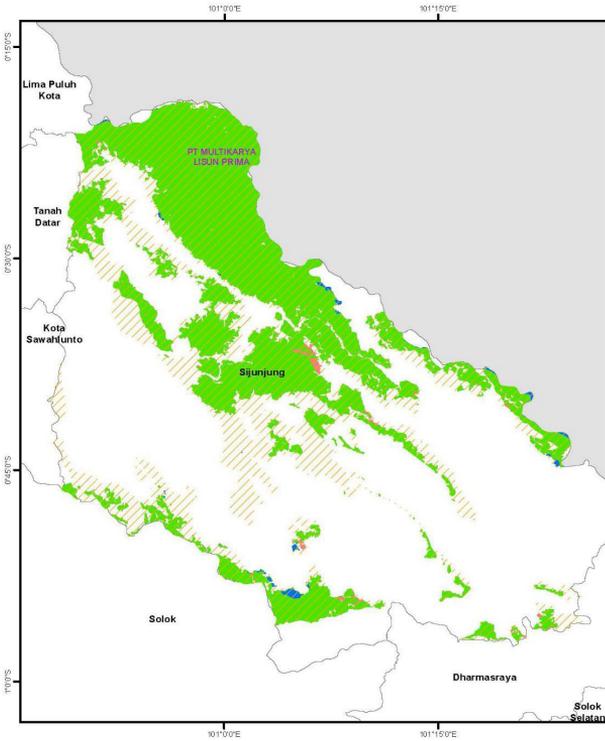
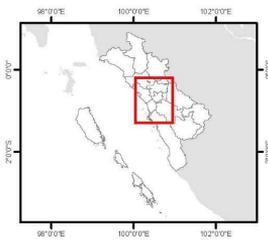
PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FoLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHL Bukit Barisan [Unit IV]



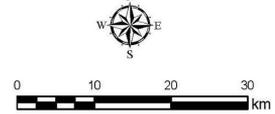
Legenda

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi



PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FoLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHL Sijunjung [Unit V]

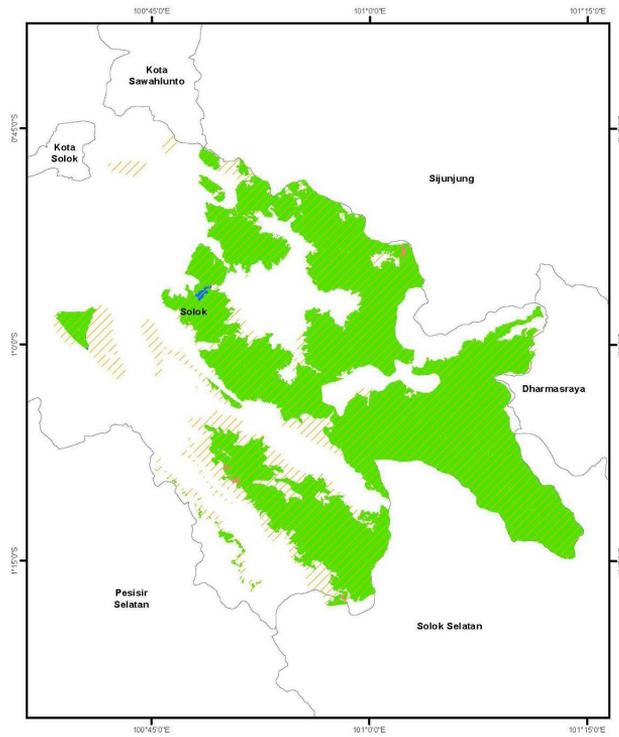


Legenda

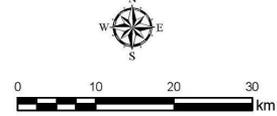
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi





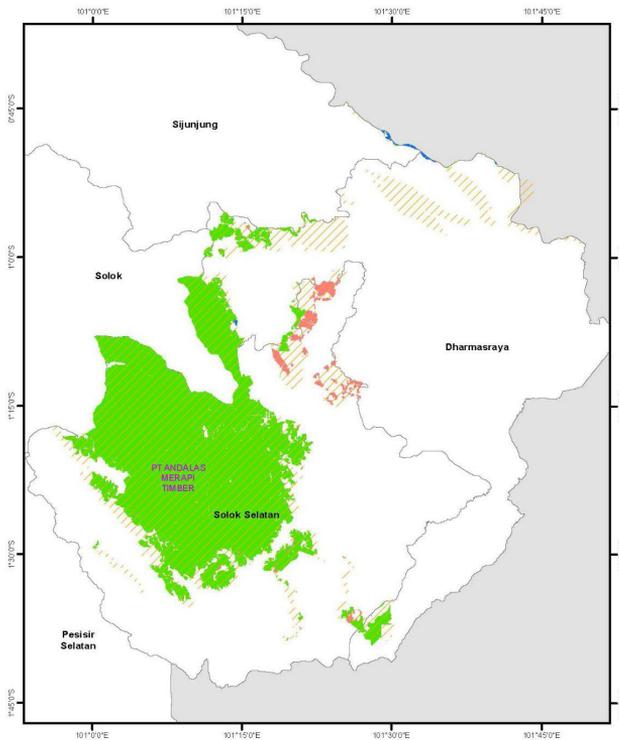
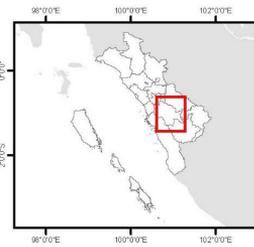
PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FoLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHL Solok [Unit VI]



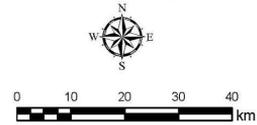
Legenda

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi



PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FoLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHL Hulu Batanghari [Unit VII]

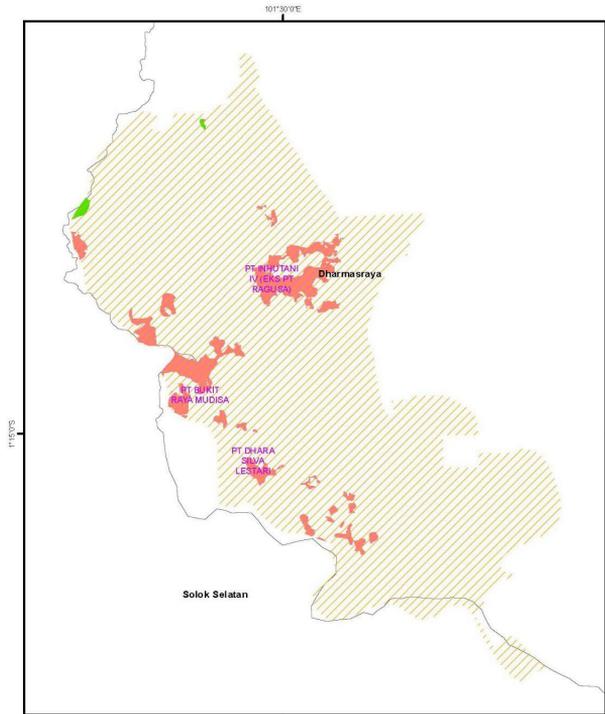


Legenda

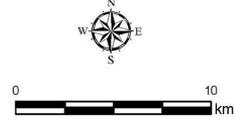
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi





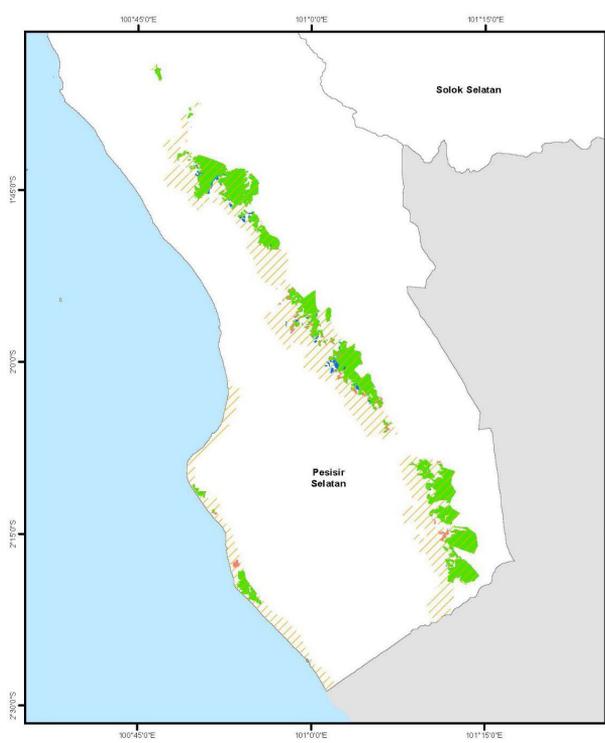
PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHP Dharmastraya [Unit VIII]



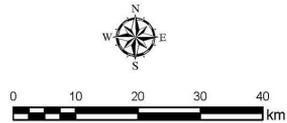
Legenda

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi



PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATRA BARAT
Wilayah KPHP Pesisir Selatan [Unit IX]

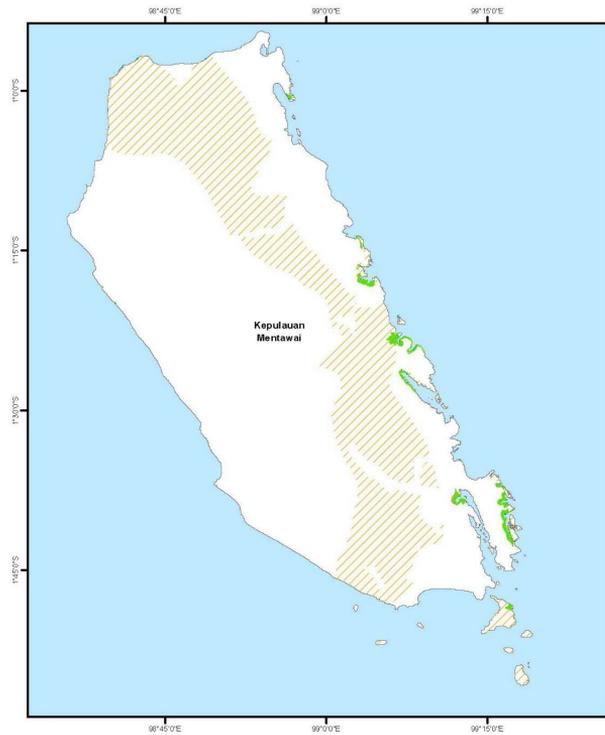


Legenda

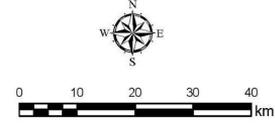
- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi





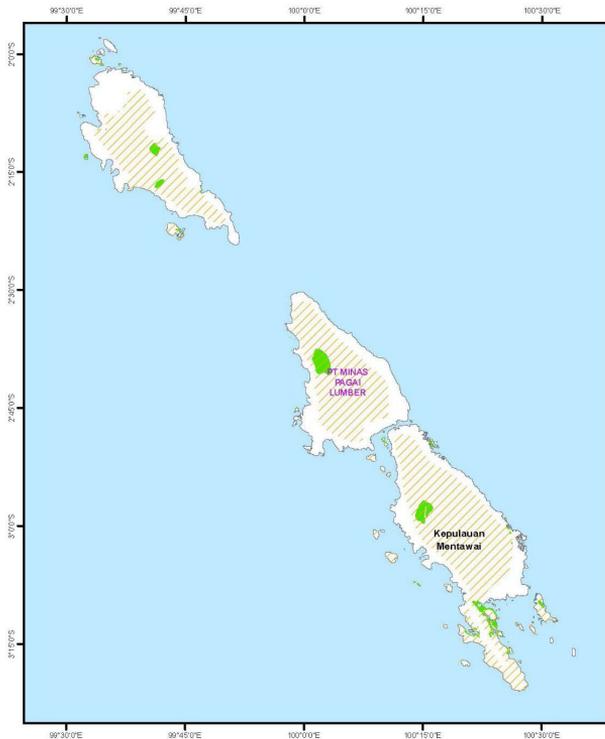
PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FoLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATERA BARAT
Wilayah KPHP Mentawai [Unit X]



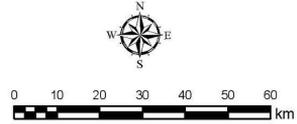
Legenda

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi



PETA GAP AKSI MITIGASI RO11
PERLINDUNGAN AREAL KONSERVASI TINGGI
INDONESIA'S FoLU NET SINK 2030
SUB NASIONAL SUMATERA BARAT
Wilayah KPHP Mentawai [Unit XI]

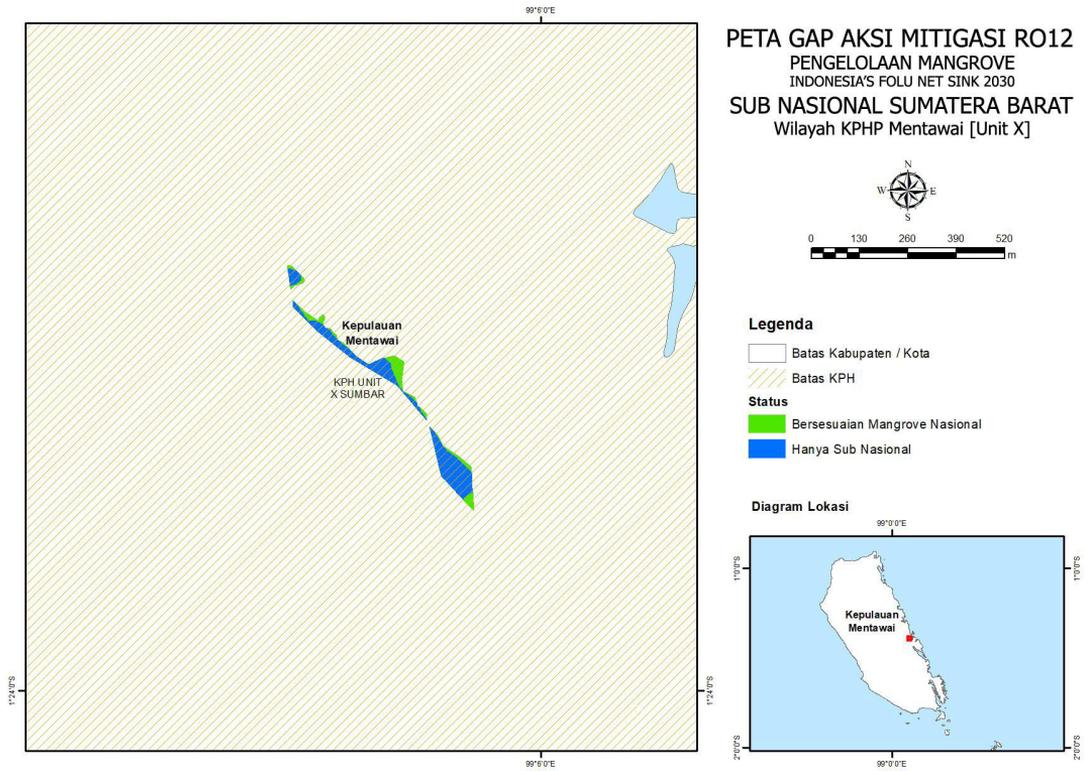


Legenda

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas KPH
- Status**
- Bersesuaian
- Hanya Nasional
- Hanya Sub Nasional

Diagram Lokasi





Lampiran 8 | Peta Gap R012 Arahan Peta Mangrove Nasional dengan Arahan Sub-Nasional